JEJAK KEBANGSAAN

Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel

Penulis:
Soewarsono
Herman Hidayat
Ana Windarsih
Thung Ju Lan
Rosmaida Sinaga
Langgeng Sulistyo Budi
Riwanto Tirtosudarmo

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2013

Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel/
Soewarsono & Thung Ju Lan (penyunting); ed. 1-Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2013

x + 241 hlm.; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-979-461-848-6

Judul:
Jejak Kebangsaan
Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel

Penulis:
Soewarsono, Herman Hidayat, Ana Windarsih, Thung Ju Lan, Rosmaida
Sinaga, Langgeng Sulistyo Budi, Riwanto Tirtosudarmo

copyright ©2013 pada Soewarsono, dkk

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Edisi pertama: September 2013
YOI: 741.31.11.2013
Desain sampul: Iksaka Banu

Alamat Penerbit:
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Telp. 021-31926978; 3920114
Faks. 021-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
www.obor.or.id

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih vii
Glosarium x

Bab 1 1
Tanah Merah, Boven Digoel, dan Manokwari dalam Jejak Sejarah Kebangsaan Indonesia
Soewarsono

Bab 2 31
"Jejak Kebangsaan" di Manokwari dan Tanah Merah, Boven Digoel: Sebuah Pengantar
Soewarsono

Bagian I
Manokwari

Bab 3 43
Perjuangan dan Pemikiran H.M. Misbach
Herman Hidayat

Bab 4 83
Menelusuri Jejak 'Pengaruh' Haji Misbach di Manokwari
Ana Windarsih

Bab 5 97
Manokwari, "Kota Kebangsaan" yang Dilupakan
Thung Ju Lan

Bagian II
Tanah Merah, Boven Digoel

Bab 6 117
Tanah Merah, Boven Digoel:
Kota Pemerintahan dan Kamp Internir pada Masa Kolonial
Rosmaida Sinaga

Bab 7 161
Boven Digoel dan Pergerakan Politik Indonesia 1927-1943
Langgeng Sulistyo Budi

Bab 8 199
Boven Digoel dan Migrasi Politik Kaum Nasionalis, 1920-1950
Riwanto Tirtosudarmo

Bab 9 221
Epilog: *Papua and problem of structural injustice*
Riwanto Tirtosudarmo

Indeks 225
Tentang Penulis 237

SEKAPUR SIRIH

Papua adalah salah satu "Masalah Nasional" yang belum terpecahkan. Perbedaan budaya dan sejarah integrasinya ke Indonesia menjadi alasan bagi sebagian kalangan untuk memperlakukan Papua secara berbeda. Akan tetapi, JEJAK KEBANGSAAN menunjukkan bahwa di masa lalu perbedaan itu dapat dikatakan hampir tidak ada. Kaum pergerakan nasional yang dibuang ke Manokwari dan Boven Digoel hidup di Papua dengan bantuan penduduk lokal. Meskipun dicoba untuk diawasi dan diisolasi oleh negara kolonial Hindia Belanda, suatu hubungan antara kaum pergerakan nasional dengan penduduk lokal sampai batas tertentu berlangsung. Perbedaan pada waktu itu cuma antara pemerintah kolonial Belanda dan penduduk 'daerah jajahan' yang disebut *'Dutch Subject'*, antara kolonialisme dan nasionalisme, atau antara penjajahan dan kemerdekaan.

Perjuangan melawan kolonialisme yang sejalan dengan lahir dan terbentuknya nasionalisme Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal batas geografis maupun perbedaan suku, agama, maupun ideologi. Haji Misbach dari Solo yang terkenal sebagai "Haji Merah" karena ke-Islam-an sekaligus ke-Komunis-annya, "para pemberontak 26/27" yang kebanyakan dari Banten dan Pantai Barat Sumatera, maupun beberapa figur pergerakan nasional seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir—semuanya disatukan oleh semangat yang sama, yaitu semangat menentang kolonialisme Belanda. Hubungan mereka dengan penduduk lokal Papua memang bukan merupakan sebuah jejak sejarah yang gamblang, karena sebagai 'tahanan politik', gerak langkah mereka, tentu saja, sangat dibatasi. Akan tetapi, hubungan itu tetap terlihat, khususnya dari beberapa tulisan Haji Misbach yang diterbitkan di *Medan Moeslimin*. Cerita Chalid Salim tentang suku-suku asli di sekitar Tanah Merah

juga memperlihatkan adanya interaksi para tahanan politik di Boven Digoel dengan penduduk lokal.

"Pergaulan itu dimulai ketika penduduk asli yang berkunjung kamp, khususnya kaum pria, dan beberapa waktu kemudian kaum perempuannya ikut berkunjung. Untuk mengunjungi kamp, penduduk asli sekitar Boven Digul harus menempuh perjalanan sekitar 30–40 kilometer. Gubug mereka bangun di dekat kamp Tanah Merah. Pada tahap awal mereka hanya memperhatikan kehidupan di dalam kamp. Lama-kelamaan mereka mau bekerja di beberapa keluarga tahanan. Rata-rata mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau tukang kebun. Untuk pekerjaan itu mereka mendapatkan upah pakaian, tembakau, dan bahan pangan. Pada tahap tersebut, penduduk asli Papua belum paham dengan mata uang" (lihat tulisan Langgeng Sulistyo Budi di buku ini).

Melalui para tahanan politik tersebut, penduduk asli mulai belajar kebiasaan baru, mulai dari kebiasaan makan, berpakaian sampai kemampuan berbahasa Melayu. Sulit untuk mengukur kesadaran politik seperti apa yang diperoleh oleh penduduk lokal Papua, akan tetapi suatu hal yang jelas adalah bahwa posisi penduduk lokal Papua tidak jauh berbeda dengan para tahanan politik tersebut, mereka hanya merupakan 'rakyat negeri jajahan'. Kesamaan nasib inilah sepertinya yang mempersatukan mereka dengan Indonesia, sehingga Soekarno berani memproklamasikan wilayah Indonesia 'Dari Sabang Sampai Merauke', dan bahkan berhasil mendorong sebuah perjuangan untuk membebaskan Irian Barat pada tahun 1962.

Dalam konteks politik hari ini, pertautan sejarah antara Papua dan Indonesia tersebut sepertinya sudah dilupakan, karena masalah Papua kini terfokus pada masalah integrasi via Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang memang problematik—dan karena itu dianggap tidak sah. Tetapi, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa hubungan Papua dengan wilayah Indonesia yang lain sudah berlangsung selama ratusan tahun, paling tidak sejak kerajaan Ternate dan Tidore berkuasa di Kepulauan Maluku Utara di abad ke 18. Sungguh naif jika kita menafikan hal tersebut karena kehidupan masyarakat Muslim di wilayah kepala burung (khususnya Fak-Fak) dan di Kepulauan Raja Ampat, sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim

di Kepulauan Maluku, seperti juga pembangunan masyarakat Papua hari ini sulit dipisahkan dari pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia seluruhnya.

Upaya menelusuri JEJAK KEBANGSAAN di dua tempat di Papua tidak akan berhasil tanpa keterlibatan beberapa pihak. Pertama, pendanaan yang berasal dari Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) tahun anggaran 2012. Kedua, bantuan para narasumber yang dengan murah hati telah memberikan data yang diperlukan kepada para penulis. Untuk itu, rasa terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan di sini.

Namun demikian, perlu kami nyatakan bahwa segala tanggung jawab atas isi tulisan di dalam buku ini sepenuhnya ada pada masing-masing penulis.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami hubungan Papua dengan sejarah kebangsaan Indonesia.

Jakarta, Juni 2013.

Tim penulis

Glosarium

Afdeeling: Suatu wilayah yang diatur oleh *Assistant Resident*

Aspirant-Controleur: pegawai, calon *controleur*

Assistentsbestuur: pejabat sipil yang memimpin suatu pos pemerintahan di distrik

Assistant Resident: pejabat sipil, biasanya bertanggungjawab atas suatu wilayah *afdeeling*.

Commiezen: petugas pajak

Controleur: kontrolir, jabatan dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda; pejabat muda yang dalam dinas sipil mengurus inspeksi dan pengawasan.

Departemen: Pelaksana roda pemerintahan. Departemen-departemen dalam pemerintahan Hindia Belanda adalah: Keuangan, Dalam Negeri (yang mengawasi korps pamong dan kepolisian), Pekerjaan Umum, Pendidikan, Agama dan Kerajinan, Kehakiman, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut.

Dewan Hindia: suatu badan penasihat tingkat tinggi, yang terkenal dengan nama "*Raad van Indie*"

Distrik: Setingkat kecamatan

Gezaghebber: penguasa

Gubernur Jenderal: kepala pemerintahan Hindia Belanda yang diangkat oleh Ratu/ Raja Belanda atas usul dari Menteri Jajahan

Oppasser: pengawas

BAB 1

TANAH MERAH, BOVEN DIGOEL[1], DAN MANOKWARI DALAM JEJAK SEJARAH KEBANGSAAN INDONESIA

Soewarsono

1. *Pengantar*

Sebuah *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua* diterbitkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Mendahului diskusi mengenai "bisnis militer," sebuah ringkasan "Sejarah Papua" dikemukakan. Dalam ringkasan, sejumlah peristiwa dicatat: (1) peristiwa antara 1600-(16 Mei 1895); (2) peristiwa tanggal 7 Maret 1910; (3) peristiwa 7 Desember 1941; (4) 17 Agustus 1956; (4) peristiwa 1 Desember 1961; (5) peristiwa 19 Desember 1961; (5) peristiwa 11 Januari 1962; (6) peristiwa 15 Agustus 1962; (7) peristiwa 1 Oktober 1962; (8) peristiwa 5 April 1967; (9) peristiwa Juli-Agustus 1969; dan (10) peristiwa 1 Juli 1971.[2]

Di antara peristiwa-peristiwa di atas, ada dua keterangan bersifat sejarah yang menarik untuk dicatat di sini. Kedua keterangan sejarah tersebut adalah, *pertama*:

"7 Maret 1910: Keluar Deklarasi Batavia yang menyatakan *Nederlandsch Nieuw Guinea* (Papua Barat) tidak termasuk Hindia Belanda. Batas-batas

1 Dalam tulisan ini dipilih penulisan kata Digoel sejauh itu bukan kutipan atau judul buku.

2 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, Tim Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel, Papua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Februari – Maret 2004.

wilayah Hindia Belanda mulai Aceh sampai Maluku, sedangkan Papua berada langsung di bawah Pemerintah Belanda di Belanda."[3]

Kedua:

"Boven Digoel merupakan daerah yang cukup terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena digunakan sebagai daerah pembuangan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia. Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir pernah dibuang ke sini. Area ini dibangun pada 27 Januari 1927 oleh Kapten LTh Becking. Kawasan itu dulunya merupakan hutan rimba dan rawa-rawa tempat hidup ular dan buaya. Banyak juga korban pengasingan yang meninggal karena serangan nyamuk malaria. Tanah Merah di masa kini adalah ibu kota Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel."[4]

Dua pertanyaan dapat diajukan terhadap kedua keterangan tersebut. (1) Benarkah istilah "*Nederlandsch Nieuw Guinea*" telah dipakai sejak 1910? (2) Dengan mengingat bahwa "Mohammad Hatta," "Sutan Sjahrir," dan "Kapten LTh Becking" merupakan sosok-sosok di dalam "Hindia Belanda," bagaimana ketiganya dapat berada di dalam wilayah yang bukan wilayah "Hindia Belanda," melainkan di dalam wilayah yang berada langsung di bawah "Pemerintah Belanda di Belanda?"

Seorang penulis, Herbert Feith, menyatakan di sebuah kesempatan:

> "Meanwhile Dutch-Indonesian antagonisms were fanned high by a series of developments. In early November [1951] the Dutch government had submitted to its parliaments a proposal to write 'Netherlands New Guinea' into the clause of its constitution which defined the territory of the kingdom."[5]

---

3 Lengkapnya lihat Tim Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel, Papua, *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Februari – Maret 2004, hlm. 7.

4 *Ibid.*, hlm. 11.

5 *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1978, hlm. 197.

Dengan kata lain, *Nieuw Guinea* menjadi "*Netherlands New Guinea*," atau mendapat tambahan "*Netherlands*" (bahasa Belanda: *Nederlandsch*), baru sejak awal November 1951, ketika "Dutch-Indonesian antagonisms were fanned high by a series of developments." Sementara terkait dengan Hindia Belanda, sebuah kajian menjelaskan:

> "The new era was, as Furnivall aptly named it, the age of 'expansion[,] efficiency, and welfare.'[] *The archipelago 'from Sabang to Merauke' was now under Dutch control, and within this territory the colonial rust en orde was realized.* Dutch business activities expanded rapidly; exports doubled in the first decade of this century and more than octupled by 1920."[6]

Dari kedua keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa "*Nieuw Guinea*" yang masih belum ditulis sebagai "*Nederlandsch Nieuw Guinea*" termasuk ke dalam Hindia Belanda—sebuah sebuah negara kolonial yang awal kelahirannya dapat ditelusuri kembali dari dua nama, Daendels dan Raffles,[7] dan bentangan wilayah "*'from Sabang to Merauke'*" –nya dibuat atas dasar perjanjian pemerintah Belanda dan Inggris tentang *Nieuw Guinea*.[8]

Adalah suatu kenyataan bahwa "keterkenalan" Boven Digoel"—bukan pertama-tama karena keterkaitannya dengan "sejarah kemerdekaan Indonesia," melainkan, terutama, dengan sejarah Hindia Belanda. Juga, Hatta dan Sjahrir bukan "figur utama" untuk "tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia" di "daerah pembuangan" Boven Digoel yang beribukota di Tanah Merah. "Kefiguran mereka yang utama" adalah karena mereka memutuskan

---

6 Takashi Shiraishi, 'Islam and Communism: An Illumination of the People's Movement in Java, 1912-1926,' Ph. D Dissertation, Cornell University, 1986, hlm. 54, tekanan (yang bukan garis bawah) ditambahkan.

7 John R.W. Smail *et.al.* mengatakan:
"... the VOC system continued unchanged for almost a decade more. But new forces had risen in Europe, their roots in the Enlightenment, in the wars of the French Revolution, and in the industrial revolution in England. After 1808, those forces were brought to bear in a rapid succession of assaults on what was by now the ancient regime of the VOC Java. First, in 1808, came the new Governor-General, Herman Daendels, Dutch by birth, a Napoleonic marshal by career and inclination; then, between 1811 and 1816, English conquest and rule under Lieutenant Governor-General Stamford Raffles, an Adam Smith Liberal of great charm and energy...."
In Search of South-East Asia: A Modern History, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1971, hlm. 150.

8 Untuk "terbentuknya 'Hindia Belanda,'" lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Jilid 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris, dan Ecole francaise de'Extreme-Orient, 2008, hlm. 74-85.

untuk melancarkan pemberontakan terhadap Hindia Belanda di akhir tahun 1926 di Batavia, Banten dan tempat-tempat lain di Jawa, dan awal tahun 1927 di wilayah Pantai Barat Sumatera.[9] Hatta dan Sjahrir berada di "daerah pembuangan" Boven Digoel hanya selama kurang lebih setahun, antara 1935 hingga 1936. Boven Digoel kemudian dilihat oleh para penguasa negara kolonial Hindia Belanda itu sebagai tempat yang "kurang cocok untuk kedua bumiputera yang berpendidikan akademi" tersebut—kedatangan Hatta ke Boven Digoel disertai dengan tujuh belas peti buku dan dimaksud Hatta untuk "menemaninya" selama tinggal di Boven Digoel.[10] Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira, sementara sejumlah "tokoh" lain terus berada di "daerah pembuangan" Boven Digoel hingga mereka dievakuasi oleh negara kolonial Hindia Belanda tahun 1943.

Sebagaimana akan dipaparkan di bagian berikut, penting juga untuk diingat bahwa keterkaitan *Nieuw Guinea* dengan "sejarah kemerdekaan Indonesia" dimulai dengan keputusan negara kolonial Hindia Belanda di awal tahun 1920-an untuk "menempatkan" seorang figur pergerakan nasional bernama Haji M. Misbach ke Kota Manokwari.

2. *Republik Indonesia minus Nieuw Guinea*

Suatu hubungan yang erat antara "sejarah kemerdekaan Indonesia" dengan negara kolonial Hindia Belanda memang dapat ditelusuri—hubungan keduanya bahkan sangat erat. Secara ringkas hubungan erat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, mereka yang melakukan pemberontakan merupakan *"by-product"* sistem pendidikan bergaya Barat yang diperkenalkan negara kolonial Hindia Belanda. *"By-product,"* karena tujuan awal pengenalan sistem pendidikan bergaya Barat adalah memproduksi *"armies of clerks."* Dikenal sebagai "kaum intelligentsia" atau "kaum pergerakan," mereka bukan hanya memperlihatkan

9 Lihat I.F.M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1977; *Citra dan Perjuangan Perintis kemerdekaan: Seri Perjuangan ex-Digul*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial, 1977; Takashi Shiraishi, "The Phantom Word of Digoel," *Indonesia 61* (April 1996), hlm. 93-118.

10 Rudolf Mrazek, *Sjahrir[:] Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996, hlm. 267.

sikap anti kolonialisme dan anti kapitalisme tetapi juga menggagas sebuah entitas politik yang cakupan ruangnya sama dan sebangun dengan Hindia Belanda dan menamakan entitas tersebut "Indonesia." *Kedua*, terkait dengan aktivitas politik "kaum intelligentsia" atau "kaum pergerakan" yang didasarkan terutama pada *"colonial nationalism"* tersebut,[11] selain penjara yang tersebar di berbagai wilayah di Hindia Belanda, pemerintah negara kolonial Hindia Belanda menyediakan dua kota di *Nieuw Guinea*: kota Manokwari dan (hutan yang kemudian menjadi kota) Tanah Merah di sebuah wilayah yang secara administratif disebut Boven Digoel sebagai "tempat pengasingan" mereka. Mengenai kedua kota tersebut, berikut kata-kata Harsja W. Bachtiar. *Pertama*:

> "Kedudukan daerah Dig[oe]l dalam pergerakan kebangsaan Indonesia bertambah istimewa sebagai simbol perlawanan rakjat terhadap kekuasaan pendjadjah Belanda ketika tempat pengasingan para pemimpin komunis dihulu sungai Dig[oe]l itu didjadikan pula tempat pengasingan para pemimpin gerakan kebangsaan jang tidak tergolong kaum komunis."[12]

Berupa perkampungan—bukan penjara, "tempat pengasingan" bagi "para pemimpin komunis" dikenal dengan nama "Tanah Tinggi," sementara untuk mereka "jang tidak tergolong kaum komunis," termasuk Hatta dan Sjahrir, berada di dekat Tanah Merah. Sebuah penjara juga dapat diketemukan di Tanah Merah tetapi dipakai untuk tujuan lain, yaitu lebih merupakan sebuah penanda bahwa Tanah Merah merupakan sebuah "kota kolonial." *Kedua*:

> "Sebenarnja, ada pula pemimpin2 pergerakan kebangsaan Indonesia jang diasingkan di tempat lain. Hadji Mohammad Misbach dari Solo, misalnja, pemimpin komunis-keagamaan jang mempropagandakan ideologi komunis dengan kutiban2 dari Qur'an, dibuang ke Manokwari dimana ia meninggal dua tahun kemudian."[13]

---

11 Baca: Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1987, hlm. 111 dan seterusnya.

12 "Sedjarah Irian Barat," dalam *Penduduk Irian Barat*, ("dibawah redaksi" Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar), tanpa tempat: P.T. Penerbitan Universitas, 1963, hlm. 67.

13 *Ibid.*

Terkait dengan penjelasan Harsja W. Bachtiar tersebut, keterangan berikut menarik untuk diperhatikan apa yang dikemukakan Takashi Shirashi:

> "Misbach was not the first pergerakan leader to whom Article 47 of the Regerings Reglement was applied in the age of pergerakan (Soewardi, Tjipto, Tan Malaka and Semaoen preceded him), but he was the first who actually went to the land of his exile *within the Indies*."[14]

Mengutip kembali Harsja W. Bachtiar:

> "Penggunaan [Nieuw Guinea] sebagai daerah pengasingan pemimpin[2] pergerakan kebangsaan Indonesia sungguh[2] mengakibatkan terdjadinja ikatan yang lebih erat antara daerah [Nieuw Guinea] dan pulau2 Indonesia lain."[15]

Menulis mengenai 20 hari perjalanannya dari Surabaya menuju Manokwari dengan menggunakan kapal laut antara 18 Juli hingga 7 Agustus 1924, Hadji Mohammad Misbach menyebut 17 pelabuhan yang harus disinggahi. Selain Surabaya, pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah: "Buleleng, Ampenan, Hadji, Makasser, Leksola, Ambon, Namlea, Sanomo, Batjan, Ternate, Galela, Tobelo, Patoni, Weda, Sorong dan Manokwari."[16] Sementara itu, berikut keterangan sebuah perjalanan lain menuju Digoel di tahun 1932:

> "Perjalanan ke Dig[oe]l dimulai dari Batavia dengan menumpang Kereta Api Cepat menuju Surabaya. Lalu naik kapal K.P.M. yang berlayar ke Makassar. [Setelah itu] pindah... ke kapal lain menuju Ambon. [Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan] 'kapal putih' [yang] menyinggahi banyak pelabuhan-pelabuhan di Maluku[, misalnya pelabuhan-pelabuhan] Banda... pulau Kisar... Tual... Dobo... muara sungai Dig[oel]... [dan, sebelum berlabuh di sungai Digoel,] sungai Kawarga...."[17]

14 Takashi Shiraishi, 'Islam and Communism: An Illumination of the People's Movement in Java, 1912-1926,' hlm. 540, tekanan ditambahkan.

15 "Sedjarah Irian Barat," hlm. 67-68.

16 Takashi Shiraishi, 'Islam and Communism: An Illumination of the People's Movement in Java, 1912-1926,' hlm. 535-540.

17 I.F.M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 118 dan seterusnya.

Ketiga, diinvasi bala tentara Kekaisaran Jepang pada bulan Maret 1942 dalam konteks Perang Pasifik, Hindia Belanda bukan hanya ditinggal lari aparat negara kolonialnya tetapi juga Hindia Belanda, sebagai sebuah entitas politik tunggal, dibubarkan untuk kemudian dipecah menjadi tiga entitas politik berbeda oleh bala tentara Kekaisaran Jepang.[18] Lewat sebuah "kolaborasi politik" dan *"follow[ing] Hatta's footsteps,"* kaum pergerakan[19] bukan hanya mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencoba merealisasikan gagasan politiknya tetapi juga mencoba menyatukan kembali ketiga entitas politik buatan bala tentara Kekaisaran Jepang di bawah nama Indonesia. *Keempat*, beberapa saat setelah Kekaisaran Jepang menyerah kepada negara-negara Sekutu—dan mengakibatkan Kekaisaran Jepang menjadi daerah pendudukan Amerika Serikat, yaitu pada 17 Agustus 1945, kaum pergerakan tersebut menyatakan diri dan statusnya sebagai "bangsa Indonesia" yang "merdeka."[20] Dan tepat sehari setelahnya, atau sejak 18 Agustus, sebagai "bangsa Indonesia" yang "merdeka," mereka mulai merealisasikan sebuah proyek politik: membentuk sebuah negara nasional (*nation-state*) di atas ketiga entitas politik buatan bala tentara Kekaisaran Jepang yang disebutnya Republik Indonesia. Prosesnya dimulai dengan dipilihnya secara aklamasi Soekarno dan Hatta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden, atas usul Oto Iskandardinata.[21]

Kelima, laporan Kontras menjelaskan bahwa:

> "7 Desember 1941: Pemerintah Belanda meninggalkan Papua ketika meletus Perang Pasifik. Kekuasaan di Papua digantikan oleh Jepang yang masuk ke Papua setelah menyerang Pearl Harbour. Kemudian, 22 April 1944, Jepang mengakhiri pendudukannya di Papua setelah armada Angkatan Laut AS yang dipimpin Jenderal Mac Arthur merapat di Jayapura."[22]

18 George Sanford Kanahele, 'The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence,' Ph. D Dissertation, Cornell University, 1967, hlm. 37-38.

19 *Ibid.*, hlm. 42.

20 Untuk peristiwa "Proklamasi 17 Agustus 1945," baca: *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [dan] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 407-409. Juga George McT. Kahin, "Sukarno's Proclamation of Indonesian Independence," *Indonesia 69* (April 2000), hlm. 1-3.

21 *Ibid.*, hlm. 445 dan seterusnya.

22 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, hlm. 8.

Serangkaian upaya dilakukan oleh pemerintah pelarian Hindia Belanda yang berkedudukan di Australia untuk menggagalkan proyek politik tersebut. "Pemerintah pelarian Belanda di bawah pimpinan menteri djadjahan merangkap letnan gubernur djenderal Hindia Belanda H.J. van Mook" membentuk apa yang disebut kesatuan-kesatuan bernama *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA) dan menjadikannya bagian *dari South West Pacific Area* (SWAP)-nya "djenderal Douglas MacArthur", dan *South East Asia Command*-nya "laksamana Lord Louis Mountbatten.[23] *Nieuw Guinea* tempat dari mana "pendudukan Djepang" berakhir setahun lebih dahulu, merupakan pijakan awal upaya untuk menegakkan kembali kekuasaan negara kolonial Hindia Belanda. "Sesudah Djepang menjerah, kolonel R. Abdoelkadir Widjojoatmodjo diganti sebagai Chief Conica [*Commanding Officer NICA*] di [*Nieuw Guinea*] oleh J.P.K. van Eechoud jang kemudian bertindak sebagai residen [*Nieuw Guinea*] sampai daerah ini didjadikan daerah jang dikepalai oleh seorang gubernur."[24] Sehari sebelum apa yang disebut Konferensi di Malino, Makassar, 15 Juli 1946, "wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan [*Nieuw Guinea*]" diserahkan *South East Asia Command* Inggris kepada "letnan gubernur djenderal van Mook." Lewat NICA-NICA inilah terbentuk enitas-entitas politik yang kemudian disebut *"the... BFO states."*[25]

Keenam, didahului dengan serangkaian "konfrontasi bersenjata" yang tidak saja mengakibatkan ibukota Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta tetapi juga wilayahnya menjadi menciut secara drastis, sebuah kesepakatan dicapai antara Republik Indonesia dengan "*the Netherlands*," yang di dalam prosesnya menyertakan BFO. Lewat apa yang dikenal sebagai "*the Round Table Conference at The Hague*" yang berlangsung antara 23 Agustus-2 November 1949, dua hal disepakati: membentuk sebuah Uni Indonesia-Belanda dan mendirikan "*the Republic of the United States of Indonesia*," yang beribukota di Distrik Federal Batavia. Terkait dengan *Nieuw Guinea*, dinyatakan bahwa:

> "'the status quo of the Residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of sovereignty... the question

23 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat," hlm. 77-78.
24 *Ibid.*, hlm. 79.
25 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, hlm. 13.

> of the political status of New Guinea be determined through negotiations' between [the Republic of the United States of Indonesia] and the Netherlands."[26]

Ketujuh, Republik Indonesia merupakan satu di antara 15 negara bagian "*[the] Republic of the United States of Indonesia.*" "*The Republic of United States of Indonesia*" tidak berumur panjang; sosoknya menghilang pertengahan tahun 1950 seiring dengan bergabungnya 14 entitas lain dari "*the Republic of the United States of Indonesia*" ke dalam Republik Indonesia.

"*[T]he quick liquidation of the federal structure of Indonesia*" inilah yang menjadi konteks mengapa Republik Indonesia kemudian menuntut agar segera dilakukan sebuah pembicaraan mengenai status "*the Residency of New Guinea.*"

3. *Menuju Republik Indonesia plus Irian Barat*

Terkait dengan soal *Nieuw Guinea* dalam hubungannya dengan Republik Indonesia, tiga periode agaknya dapat dibedakan. *Pertama*, periode hingga Republik Indonesia didasarkan kembali pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada bulan Juli 1959; *kedua*, periode Juli 1959 hingga pecahnya "Gerakan 30 September 1965" (G30S); dan, *ketiga*, periode September 1965 hingga Mei 1998.

Laporan Kontras mengatakan: "17 Agustus 1956: Pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Provinsi Irian Barat Perjuangan dengan ibu kota Soasiu di Maluku Utara dan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai gubernurnya."[27] Didahului dengan abrogasi secara unilateral baik Uni Indonesia-Belanda maupun "*the Round Table Conference at The Hague,*" masing-masing pada 13 Februari dan 3 Mei 1956, pembentukan Provinsi Irian Barat Perjuangan tersebut tampak sebagai jawaban Republik Indonesia terhadap perkembangan yang berlangsung di *Nieuw Guinea* sejak masa Residen van Eechoud—sosok "jang memimpin usaha untuk memisahkan daerah [*Nieuw Guinea*] dari daerah² Indonesia lainnja."[28] Setelah "*the Residency of New Guinea*" dihapus, muncul kemudian sebuah "*Nederlandsch*

26 *Ibid.*, hlm. 15.
27 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, hlm. 8.
28 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat," hlm. 79.

Nieuw Guinea"—"the territory of the kingdom [of the Netherlands]." di bawah seorang Gubernur. Hingga tahun 1962, tiga *Gubernur "Nederlandsch Nieuw Guinea"* dapat dicatat: (1) S.L.J. van Waardenburg (1950-1953), (2) J. Van Baal (1953-1958), dan (3) P.J. Plateel (1958-1962).

Selanjutnya kita juga membaca bahwa, "S[oe]karno never saw the West Irian for which he fought so hard till he was over 60. Here, as in the classroom maps, we see fiction seeping into reality...."[29] Kata-kata tersebut merupakan sebuah ilustrasi untuk uraian berikut:

> "To put it another way, their common experience, and the amiably competitive comradeship of the classroom, gave the maps of the colony which they studied (always colored differently from British Malaya or the American Philippines) a territorially-specific imagined reality which was every day confirmed by the accents and physiognomies of their classmates."[30]

Sementara kedua keterangan dimaksud untuk memperlihatkan Soekarno adalah *"by-product"* sistem pendidikan bergaya Barat yang diperkenalkan negara kolonial Hindia Belanda, Soekarno sendiri mulai memperlihatkan sikap perlawanannya dalam soal *"the West Irian"* (Irian Barat) segera setelah menjadi Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945.

Dalam pidato *tujuhbelasan* tahun 1960, Presiden Soekarno mengatakan:

> "It is imperative... that the working cabinet carries out a policy for the liberation of West Irian in a revolutionary manner—revolutionary in terms of language of the Indonesian National Revolution."[31]

Jika dengan *"language of the Indonesian National Revolution"* dimaksud "diplomasi dan perjuangan," maka soal tersebut makin ditegaskan dalam pidato *tujuhbelasan* setahun kemudian, tahun 1961, ketika Presiden Soekarno mengatakan:

---

29 Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, hlm. 111.

30 *Ibid.*

31 Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, NSW 2059, Australia: Allen & Unwin Pty. Ltd., 1985, hlm. 23.

> "... kita tidak akan membuang-buang kata lagi dengan Belanda sekarang! Irian Barat harus secepatnya dikembalikan ke dalam kekuasaan Republik. Pada waktu ini kebijaksanaan kita terhadap Belanda adalah kebijaksanaan konfrontasi di segala bidang—bidang politik, ekonomi, ya, bahkan dalam bidang militer!"[32]

Sementara pernyataan tersebut agaknya dilatar belakangi dengan kenyataan bahwa "Belanda memperkuat pertahanannya di pulau besar itu, yang dipimpin oleh Vice-Admiral (Laksamana Madya) L.E.H. Reeser, dengan Hollandia sebagai Markas Besarnya,"[33] untuk menanggapi kemungkinan terjadinya "konfrontasi militer," sebuah "belanja militer" dilakukan Jenderal Nasution ke "USSR," "Poland" dan "Czechoslavia" guna *mendapatkan "a variety of modern weapons, including submarines, destroyers, fighter planes and medium bomber."*[34]

Konfrontasi itu sendiri berlangsung segera setelah Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato di bekas ibukota Republik Indonesia masa "perjuangan," Yogyakarta, pada 19 Desember 1961. Dikenal sebagai "Tri Komando Rakyat" (Trikora), pidato berisi tiga hal:

> "1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial;
> 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah-air Indonesia;
> 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah-air dan bangsa...."[35]

Pidato Trikora disampaikan setelah, mengutip laporan Kontras, pada "1 Desember 1961: Belanda memerintahkan bendera Bintang Kejora Papua Barat dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda."[36] Peristiwa itu sendiri dapat dilihat sebagai jawaban atas langkah Gubernur "*Nederlands Nieuw Guinea*" Plateel ketika pada Oktober 1961 membentuk apa yang disebut *Komite Nasional Papua*. Sebuah "manifesto" kemudian dikeluarkan *Komite* tersebut yang di dalamnya berisi:

---

32 Dikutip dalam Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 276.

33 I.F.M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 82.

34 Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, hlm. 23.

35 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat," hlm. 89-90.

36 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, hlm. 8.

"1. Menentukan bendera Papua
2. Lagu Kebangsaan Papua
3. Penggantian nama West Nieuw Guinea menjadi Papua Barat
4. Nama bangsa mendjadi Papua
5. Usul agar bendera Papua dikibarkan tanggal 1 Nopember 1961."[37]

Untuk merealisasikan pidato Trikora, dua komando dibentuk Presiden Soekarno: *pertama*, *Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat*, dengan Presiden Soekarno sebagai Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Nasution sebagai Wakil Panglima, serta Deputi II KSAD Brigadir Jenderal A. Yani sebagai Kepala Staf, dan, *kedua*, *Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*, dengan Mayor Jenderal Suharto, Panglima Tjadangan Umum Angkatan Darat (Tjaduad) sebagai Panglima Komando. Dibentuk 11 Januari 1962, Komando Mandala Pembebasan Irian Barat secara khusus mendapat tugas "merencanakan dan melaksanakan operasi militer terhadap Belanda."[38] Sejumlah operasi militer digelar Mayor Jenderal Suharto, yang kemudian memunculkan seorang "*hero*," yaitu seorang perwira Batalyon 454/ Para (Srondol) Divisi Diponegoro bernama Untung.[39]

---

37 *Penduduk Irian Barat*, hlm. 88-89.
Dalam kaitan ini sebuah keterangan mengatakan: "'Pengibaran Bendera' pada 1 November 1961 tidak terlaksana, [karena] persetujuan pemerintah Belanda belum tiba pada waktu yang diharapkan. Akhirnya [p]emerintah Belanda menyetujui bahwa deklarasi dan [pengibaran] Bendera Papua [Barat] akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 1961..." Lihat Agus A. Alua, *Papua Barat[:] Dari Pangkuan ke Pangkuan (Suatu Ikhtisar Kronologis)*, Seri Pendidikan Politik Papua No. 1, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Desember 2002, hlm. 49.

38 Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, hlm. 277.

39 "Untung had become a national hero when, under Suharto's command, he was the first paratrooper to be dropped into the West Irian jungle in 1962..." Sementara Suharto sendiri hanya bercerita:
"Operasi infiltrasi lintas udara dengan menggunakan pasukan pilihan terdiri atas RKAD, PGT, dan RAIDER PARA, atas sasaran Sorong, Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, dan Merauke, bertujuan untuk mengikat musuh di tempatnya, menarik cadangan untuk memperkuat posisi mereka. Dan mengelabui Belanda seolah-olah kita akan melakukan pendaratan Ampibi di Kaimana sebagai pancangan kaki (beach head) untuk gerakan selanjutnya. Ternyata taktik ini berhasil. Belanda mengerahkan cadangannya ke depan dan memperkuat Kaimana. Dengan demikian, Biak menjadi lemah dan inilah yang menjadi satu-satunya sasaran utama kita. Keberhasilan itu karena para prajurit telah menunjukkan bakti mereka dengan tidak kepalang tanggung. Bayangkan, mereka telah menyediakan diri dengan dilemparkan di tengah malam buta, di tengah hutan yang tidak mereka kenal, dan entah apakah mereka akan jatuh di rawa, atau tersangkut di pohon. Mereka begitu taat kepada komando, yang sebenarnya, mereka taat kepada kepatriotikan mereka, membela kejayaan negara, membela kebulatan negara. Mereka cinta kepada negara dan bangsa."
Brian May, *The Indonesian Tragedy*, Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd., 1978, hlm. 98; *S[u]harto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm. 107.

Konfrontasi militer tidak berlangsung. Sebuah kesepakatan kemudian dicapai untuk menyelesaikan persoalan Irian Barat atau *Nederlandsch Nieuw Guinea* (Papua Barat) melalui meja perundingan. Dilakukan di New York sejak Juli 1962, perundingan menghasilkan apa yang disebut dengan Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Dinyatakan di dalam perjanjian bahwa penyerahan sepenuhnya *Nederlandsch Nieuw Guinea* (Papua Barat) dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia untuk menjadi Irian Barat akan dilakukan lewat sebuah masa transisi yang terbagi ke dalam dua bagian.

Kedua bagian dari proses transisi tersebut dapat dilihat lewat poin-poin perjanjian berikut:

> "a. The transfer, via a temporary United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), of the administration of Papua from the Kingdom of the Netherlands to the Republic of Indonesia. It also authorized UNTEA to employ Indonesian personnel to implement the terms of the Agreement to the Papuan population and to promulgate new laws;
>
> b. The act of self-determination or the Act of Free Choice or the ascertainment of the wishes of the people of Papua, six years after the administration had been formally and fully transferred to the sovereign Government of the Republic of Indonesia."[40]

Atau dalam ungkapan yang lain:

> "PBB [lewat UN Temporary Executive Authority, UNTEA] pada tanggal 1 Oktober 1962 [akan] mengambil alih Irian Barat dalam jangka waktu tujuh bulan, setelah mana [yaitu pada 1 Mei 1963] Indonesia akan mengambilalih administrasi atas wilayah itu. Suatu 'Penentuan Pendapat Rakyat' [Pepera] yang akan diadakan dalam [tahun] 1969 di kalangan penduduk Irian Barat pada akhirnya akan menentukan apakah wilayah itu akan tetap dalam lingkungan Republik Indonesia, ataukah akan memilih merdeka."[41]

---

40 Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, *Questioning the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into the Republic of Indonesia*, New York, 2003, hlm. 32. Sementara bunyi perjanjian dapat diketemukan dalam Daniel Gruss, "UNTEA and West New Guinea," A. von Bogdandy and R. Wolfrum, (eds.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 9, 2005, hlm. 97-126.

41 Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, hlm. 277.

"Pada 1 Mei 1963 kedaulatan atas Irian-Barat oleh Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia. Dan ia menjadi provinsi ke 22 R.I. Ibukota Hollandia dinamakan Soekarnopura..."[42]

Tak seorangpun, bagaimanapun juga, dapat mengetahui sikap Presiden Soekarno terhadap bagian kedua dari proses transisi tersebut mengingat Presiden Soekarno tidak berada dalam kekuasaan hingga tahun 1969. Meskipun begitu, "setelah penyerahan kedaulatan Irian pada bulan Mei 1963 [, Presiden Soekarno] terbang di atas angkasa Dig[oe]l," dan, "[m]enurut kata orang, pada saat itu dari ketinggian pesawat terbang ia memberi penghormatan kepada pos nan jauh di bawah itu."[43]

"He also directed an investigation into the history of the Tanah Merah prison which found the graves of most of the 79 Indonesians who had died there. A Heroes' Monument was built...."[44]

Pada tanggal 30 September 1965 malam terjadi sebuah gerakan militer yang oleh pelakunya disebut *Gerakan 30 September* (G30S). Menarik untuk diperhatikan bahwa G30S melibatkan mereka yang berperan penting dalam "Pembebasan Irian Barat." "Dikomandani" oleh Letnan Kolonel Untung—yang seperti telah disebutkan merupakan *"hero"* dalam "Pembebasan Irian Barat"—dalam kapasitasnya sebagai Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa,[45] G30S tidak saja menewaskan bekas Deputi II KSAD dan Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang kemudian menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Kepala Staf Komando Tertinggi (Men/Pangad/Kas KOTI) Letnan Jenderal A. Yani, dan sejumlah jenderal pada Staff Umum (SUAD)-nya. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Maret 1967, Presiden Soekarno dipaksa—"secara konstitusional" lewat tuduhan "terlibat" dalam peristiwa yang kemudian di-frase-kan sebagai

42 I.F.M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 84-85.

43 *Ibid.*, hlm. 14.

44 Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, hlm. 34.

45 Baca: *G-30-S Dihadapan Mahmillub: 2 Di Djakarta (Perkara Untung)*, Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman A.D. (AHM-PTHM), 1966.

"G30S/PKI" tersebut—melepaskan jabatan Presiden Republik[46] Jenderal Suharto, bekas Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan sejak Mei 1963 menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)—yang merupakan kelanjutan dari Tjaduad, kemudian muncul perlahan ke "kepermukaan" untuk akhirnya mengambil-alih bukan hanya jabatan-jabatan (1) Men/Pangad/Kas KOTI dan (2) Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan (Menko Hankam) tetapi juga jabatan Presiden dari Soekarno, pertama Maret 1967, sebagai pejabat (*Acting President*), dan, setahun kemudian, Maret 1968, sebagai Presiden.

Untuk membuat perbedaan, Jenderal Suharto menyatakan bahwa rezim yang berada di bawah Soekarno merupakan sebuah "Orde Lama," sementara rezim yang kemudian dibangunnya merupakan sebuah "Orde Baru"—sebuah Orde yang tampak di hadapan seorang penulis sebagai sebuah piramid kekuasaan: *"the army's rule over all and [Suharto's] rule over the army."*[47]

Mengambil alih Indonesia dari Soekarno dan Orde Lama-nya, Suharto dan Orde Baru-nya meninggalkan banyak jejak di Irian Barat. Seolah ingin menunjukkan dirinya sebuah "diskontinuitas" dari Soekarno, maka Soekarnopura—nama pengganti Hollandia-nya *"Nederlandsch Nieuw Guinea"*—diganti oleh Suharto dan Orde Baru-nya menjadi "Jayapura;" setelah itu, Irian Barat menjadi "Irian Jaya." Sementara jejak Soekarno dan Orde Lama-nya menghilang, dua jejak penting ditinggalkan Suharto dan Orde Baru-nya. *Pertama*, ketika pada "5 April 1967[,] Freeport-McMoRan Copper & Gold, sebuah perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat, [diberi izin untuk] memulai usaha pertambangan secara resmi dengan menandatangani kontrak karya selama 30 tahun. Sejak itu, perusahaan yang di Irian dinamakan PT Freeport Indonesia ini mulai mengeksploitasi Ertsberg (gunung bijih)."[48] *Kedua*, ketika, dengan maksud "*to honor the New York Agreement of August 1962,*"[49] Suharto dan Orde Baru-nya memutuskan untuk

46 Baca: "Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengeni Pertanggungjawaban dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS," dalam *Kumpulan Pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 September: Benarkah Gerakan 30 September Didalangi Bung Karno?*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006, hlm. 80-116.

47 Brian May, *The Indonesian Tragedy*, hlm. 156.

48 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, hlm. 8.

49 Brian May, *The Indonesian Tragedy*, hlm. 163.
Sementara *Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations* menjelaskan:

menyelenggarakan *"the Act of Free Choice"* atau Pepera. Dengan keputusan tersebut suatu perbedaan dengan Soekarno juga diperlihatkan karena, seperti dikatakan seorang penulis, *"[i]f Sukarno had remained in power the Act of Free Choice would probably never been held at all; he had declared in November 1962 that he did not want a plebiscite."*[50]

Dua jenderal berperan penting dalam pelaksanaan *"the Act of Free Choice"* atau *"[the] plebiscite"* atau Pepera: Brigadir Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dan Brigadir Jenderal Ali Murtopo. *"[I]nstrumental"* dalam penghancuran PKI dan organisasi massa *onderbouw*-nya secara fisik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali ketika berpangkat Kolonel dan menjadi Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Jenderal Sarwo Edhie Wibowo diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Militer XVII Tjendrawasih pada Juni 1968.[51] Seperti pendahulunya, Brigadir Jenderal R. Bintoro, Brigadir Jenderal Sarwo Edhie Wibowo menggelar sebuah operasi militer. Dengan nama "Operasi Wibawa," tiga tujuan ditetapkan Brigadir Jenderal Sarwo Edhie Wibowo dengan satu di antaranya adalah " mengamankan usaha memenangkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)."[52] "[M]engamankan usaha" memang dilakukan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo—dan agaknya karena hal itu ada anggapan bahwa *"his initial approach to the Irian uprisings tended to be more accomodating than his predecessor;"*[53] tetapi yang

---

"One of the central aspects of the Agreement was the Act of Free Choice; a provision designed to ascertain the wishes of the Papuan people, concerning their political decision about remaining within the state of Indonesia. This was to be implemented by Indonesia six years after the administration of the territory had been formally and fully transferred to it. In January 1965, however, Indonesia withdrew its active participation in the United Nations, putting the implementation of the second part of the New York Agreement into question. Only in the middle of 1966 did Indonesia decided, following a government policy change, to resume its membership of the Organization. In that year it returned its delegation to the General Assembly, and participated in the 21st session. In New York Foreign Minister Adam Malik confirmed that Indonesia was prepared to honor its commitments under the New York Agreement and to implement the Act of Free Choice as the final part of the New York Agreement."

Lihat juga: *Questioning the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into the Republic of Indonesia*, hlm. 34.

50 *Ibid.*, *The Indonesian Tragedy*, hlm. 195.

51 "[I]nstrumental" diambil dari "instrumental" dalam kalimat berikut: "[I]nstrumental in crushing the November revolt in Banten, Captain L. Th. Becking was sent to Digoel with his largely Ambonese soldiers and convict workers to build a camp in time for the arrival of the first batch of internees scheduled to arrive in March 1927." Takashi Shiraishi, "The Phantom Word of Digoel," hlm. 96-97.

52 JRG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: Grasindo, 1993, hlm. 157.

53 Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, hlm. 37.

berperan penting dalam "usaha memenangkan pelaksanaan" adalah Brigadir Jenderal Ali Murtopo—"orang" Suharto sejak di Divisi Teritorial Diponegoro Jawa Tengah.

> "As was the case with all the other meetings, the assembly members had spent several weeks before the day under guard by the authorities and isolated from the rest of the community. Some assembly members claim that they were threatened and bribed by Brigadier-General Ali Murtopo, Commander of the Army's OPSUS (Special Operations Section), during those weeks when they were under guard. Murtopo had been selected by President Suharto to go to West Irian with a team of military personnel, students, and teachers in order to mount a 'hearts and minds' campaign and 'make a success' of the Act. According to the Reverend Hokujoku who was a member for Jayapura, Murtopo warned them that Indonesia was a great military power and would not tolerate dissent. If they wanted their own country, he mockingly suggested that they could ask the Americans for a piece of the moon. Hokujoku also described how those Papuans chosen to speak at the meeting were given exact instructions about what to say and were forced by the Indonesians to rehearse their speeches.[]"[54]

"[A] great military power," yang asal-usulnya dari "belanja militer" ke "USSR," "Poland" dan "Czechoslavia" dan awalnya ditujukan terhadap Belanda, kini diarahkan kepada mereka yang *"wanted their own country."*

> "On November 19, 1969, the General Assembly adopted the draft as resolution 2504 (XXIV), by a vote of 84 to none, with 30 abstentions. The General Assembly took note of the report of the Secretary-General and acknowledged, with appreciation, the fulfillment of the tasks entrusted to the UN Secretariat General."[55]

54 John Saltford, "United Nations Involvement with the Act of Self-Determination in West Irian (Indonesian West New Guinea) 1968-1969, *Indonesia69* (April 2000), hlm. 87.

55 *Questioning the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into the Republic of Indonesia*, hlm. 38.

Secara kronolologis proses Republik Indonesia plus Irian Barat dapat digambarkan demikian:

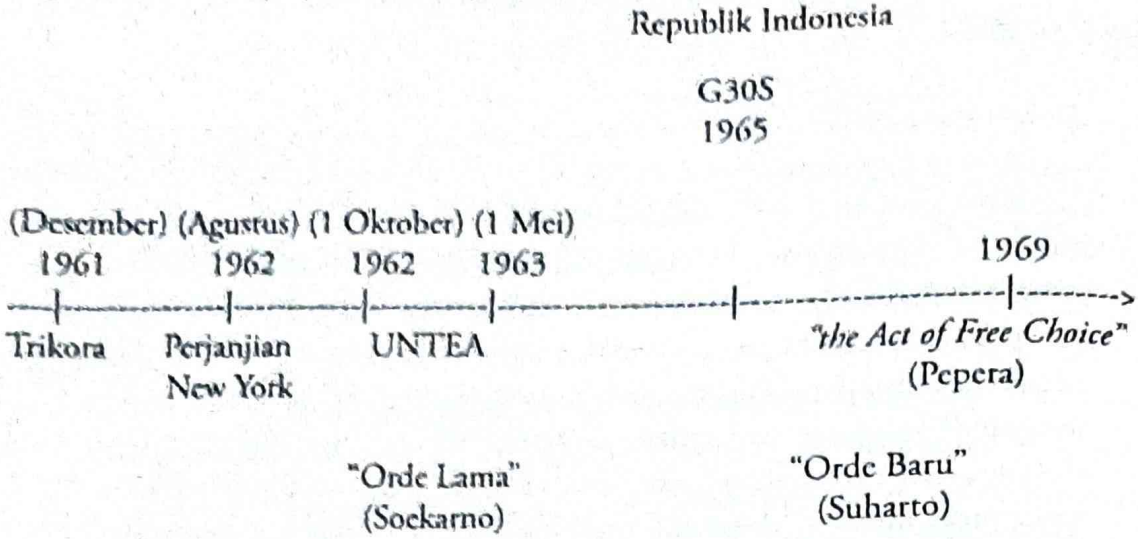

Sebuah Indonesia "baru"—yang cakupan ruangnya tidak sama dan sebangun dengan Hindia Belanda—bahkan dicoba didirikan Suharto dan Orde Baru-nya ketika sebuah proses "pengintegrasian" dilakukan terhadap Timor Portugis sejak akhir 1975 seiring dengan keputusan "pemiliknya," pemerintah Portugal di Lisabon, untuk mendekolonisasikan wilayah seberang lautannya tersebut. Suharto memang berbeda dengan Soekarno. Berlatar belakang bukan "kaum intelligentsia" atau "kaum pergerakan," Suharto justru menjadi bagian dari negara kolonial Hindia Belanda—sebagai seorang sersan (KNIL), dan menjadi bagian dari aparatus bala tentara Kekaisaran Jepang yang menduduki Jawa dan Madura—pertama, sebagai polisi, dan, kemudian, sebagai komandan kompi Pembela Tanah Air (Peta). Dengan kata lain: *"There is no evidence of any nationalist activity on his [Suharto's] part until after the proclamation of Indonesia's independence."*[56]

Persoalannya kemudian: apakah ketika di bawah Suharto dan Orde Baru-nya Republik Indonesia masih dapat dilihat sebagai sebuah *nation-state*?[57]

---

56 Baca: Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1990, khususnya"Chapter 3[:]" "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective," hlm. 109-111, tekanan asli.

57 Mark N. Hagopian menulis:
"Let us summarize our findings about nationalism thus far. First, a nation is a group manifesting national sentiment. It is not *a state, which is a political formation sometimes coinciding with a nation (the 'nation-state') and sometimes not.*"

4. *Plus Irian Barat*:

Sebuah Problematik untuk Republik Indonesia?

Berikut adalah kata-kata I.F.M. Chalid Salim, seorang Digoelis, yang karyanya telah beberapa kali dicatat:

> "Benar, Belanda telah membiarkan saja pulau itu tak berkembang selama [dua setengah] abad, tapi pada masa 60 tahun terakhir ini telah banyak juga yang telah mereka kerjakan!"[58]

> "Maka dalam jangka waktu 60 tahun kontak yang erat dengan Belanda dan kemudian Indonesia, terbentuk suatu lapisan kaum intelek Irian yang mempunyai pengetahuan umum yang luas sekali, yang sanggup menilai plebisit yang diselenggarakan itu,—terlepas daripada sikap pro atau kontra mereka dengan plebisit itu. Akan tetapi saya berpendapat, bahwa halnya lain dengan penduduk asli yang belum berkembang sama sekali, yang mendiami daerah pedalaman Irian."[59]

Bertemu langsung dengan Suharto pada 1975, dan pada kesempatan tersebut menyerahkan versi bahasa Belanda tulisannya, "Vijftien Jaar Boven Digoel" yang diterbitkan tahun 1973, I.F.M. Chalid Salim mengatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa tulisan tersebut menunjukkan: "Kekuasaan Belanda di masa lampau hanya dapat bertahan di Irian, berkat kekuatan senjatanya!"[60]

Kenyataannya, jauh sebelum "plebisit," bahkan ketika "*Dutch-Indonesian antagonisms*" tengah berlangsung, "suatu lapisan kaum intelek Irian" dapat diketemukan.

> "A West Papuan delegate to the conference ["the Round Table Conference at The Hague"], Johan Ariks, expressed the strongest opposition to any talk of surrendering his country to Indonesia. Ariks came from fighting stock—the Arfak

---

Lihat *Ideals and Ideologies of Modern Politics*, New York: Longman, 1985, hlm. 69, tekanan ditambahkan.

58 *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 84.

59 *Ibid.*, hlm. 86-87.

60 I.F.M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, hlm. 5, 88.

> tribes of the Manokwari area. During World War 2, his son had been executed by the Japanese after being caught with a band of Papuan and Dutch guerillas. Ariks himself had been active in the resistance. He was a well-educated man, having been schooled in a Dutch-run seminary on Java. He spoke Dutch and Malay, and his passion regarding the future of New Guinea, like that of Franz Kaisiepo before him, shocked the Indonesian delegation. Almost twenty years later, by then an old man, he would direct the Arfaks' massive revolt and eventually die in an Indonesian jail.
>
> While Ariks' view was common amongst West Papuan leaders, some held different convictions. In October 1949, three Biaks, Lucas Rumkorem, Corinus Krey and Julianus Tarumaselly formed the Independent Indonesian Party at Bosnik, the aim being for Dutch New Guinea to join Indonesia. They planted a pine tree to symbolise the party's growth. The men were discovered by Dutch intelligence and the party declared illegal. When Rumkorem went underground, forming the Bird of Paradise Reserve Army (*Tentara Tjadangan Tjendrawasih*), some village people joined him. In 1958, Rumkorem and his followers were arrested and despatched to the old prison camp at Tanah Merah. In 1963 he was rewarded for his suffering when Indonesia made him an officer in its navy."[61]

Kata-kata *"like that of Franz Kaisiepo before him [Johan Ariks],"* dalam kutipan di atas mengacu pada kehadiran Franz Kaisiepo dalam konferensi di Malino, Makassar, 16 Juli 1946, yang digelar oleh "letnan gubernur djenderal Hindia Belanda H.J. van Mook." Terkait dengan kehadiran Franz Kaisiepo yang dikirim oleh residen van Eechoud, berikut kata-kata seorang penulis:

> "During the talks Kaisiepo made it clear to both the Dutch and Indonesians present that Papuans wanted nothing to do with an Indonesian republic. [....] He requested that Holland rule West New Guinea separately from Indonesia and suggested a new a name for the territory—Iryan. The word derived from the language of Biak and meant 'steamy.' It was applied to the appearance of mainland New Guinea when viewed from offshore: a hot, shimmering land, rising from the sea. The word would latter be adapted by Indonesia into the acronym IRIAN, short for the slogan 'Follow Indonesian republic (in the struggle) against the Netherlands.' The co-opting of the term by Indonesian propagandists would

61 Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, hlm. 17-18.

greatly anger West papuans, who would come to resent called Irianese (*orang Irian*)."[62]

Sementara sebuah keterangan lain menjelaskan:

"Pada konferensi di Malino djuga untuk pertama kali, menurut van Eechoud, diusulkan agar nama 'Papua,' jang dianggap oleh beberapa orang sebagai suatu nama jang memuat unsur merendahkan penduduk pribumi [Nieuw Guinea], diganti dengan nama 'Irian.' Nama 'Irian' diusulkan oleh Frans Kaisiepo, jang dianggap mewakili daerah [Nieuw Guinea] dalam konferensi Malino, dan diambil alih dalam pemberitaan oleh pegawai dinas penerangan Belanda sehingga dikenal oleh orang[2] diluar ruang konferensi Malino.... memanglah sebelum konferensi Malino diadakan, daerah [Nieuw Guinea] senantiasa dinamakan daerah Papua. Nama 'Irian' kemudian digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia dan oleh karena itu dilarang pemakaiannja oleh pemerintah djadjahan Belanda."[63]

Hingga Mei 1998, jumlah "lapisan kaum intelek Irian" pastinya makin membesar. Mereka yang disebut di dalam keterangan laporan Kontras di bawah ini jelas termasuk di dalamnya:

"1 Juli 1971: Brigjen Seth J Rumkorem, mantan anggota intelijen dari Kodam Diponegoro, memproklamasikan Negara Republik Papua Barat di Jayapura. Jejak itu diikuti oleh sembilan mahasiswa Universitas Cenderawasih dengan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Abepura dan memproklamasikan berdirinya Negara Papua Barat pada bulan Juli 1982. Tanggal 14 Desember 1988, Thomas Wanggai, doktor di bidang administrasi pemerintahan lulusan Jepang dan AS, juga memproklamasikan Negara Melanesia Barat di Lapangan Mandala Jayapura."[64]

Melihat Seth J Rumkorem dari cerita tentang ayahnya, Lucas Rumkorem, ia juga dapat dianggap sebagai sebuah kelanjutan dari Orde Lama:

"In 1958, Rumkorem and his followers were arrested and despatched to the old prison camp at Tanah Merah. In 1963 he was rewarded for his suffering when Indonesia made him an officer in its navy[,]".

62 *Ibid.*, hlm. 14-15.
63 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat," hlm. 80-81.
64 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, hlm. 9.

Keputusan Seth J Rumkorem untuk membentuk Negara Republik Papua Barat, sebagaimana halnya Orde Baru, merupakan sebuah diskontinuitas terhadap Orde Lama, *Tentara Pembebasan Nasional* (National Liberation Army)-nya[65] pastinya menyumbang penting pada sosok OPM, yang muncul pertama kali pada 26 Juli 1965 di Manokwari.[66]

---

65 Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, hlm. 52.

66 JRG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, hlm. 1.
Sementara dalam *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya* (hlm. 35) Robin Osborne menulis:
"The standard-bearer for this struggle was called the [OPM]; it derived from the FPN [the Papuan National Front], the political front that had been urged by [Nicolaas] Jouwe and [Markus] Kaisiepo from Holland and established later in West Papua. In practice, the OPM's founders were from the Arfak people, mainly all of whom had been trained in the Dutch-created Papuan Volunteer Corps. In 1960 a large barracks was built in Manokwari. Before Arfak leaders would endorse the project, they had insisted that the Dutch allows a sizeable proportion of Arfak recruits. Back ini their villages they held supplies of weapons air-dropped by the US forces during World War 2. Other arms were obtained from the Allied dumps that had been revealed by the Dutch.
The first act of rebellion was performed not with foreign arms but with bow-and-arrow and traditional clubs. Equally in line with custom was the fact that violence occured only after attempts at negotiation had failed. The attack took place on 28 July 1965, two months before the fall of Sukarno and the takeover by Gen.[eral] Suharto."
Seperti dapat dibaca dari sebuah *footnote* dalam tulisan seorang penulis bernama Peter King, King menggunakan kata-kata Robin Osborne tersebut untuk menolak pendapat Benedict Anderson dengan mengatakan:
"Benedict Anderson's history can be faulted on its details too. 'The OPM,' he says categorically, 'arose not before the *Orde Baru* . . . but afterward.' But, as I have suggested above, the OPM was arguably born during or before the Manokwari uprising against the occupying forces of *Orde Lama* in July 1965, two months before *Gestapu* (September 30,1965), when Suharto seized power, and seven months before *Supersemar* (March 11,1966), when Sukarno finally yielded to him."
Meski lahir pada masa "Orde Lama," OPM lebih merupakan gerakan terhadap "Orde Baru." Kenyataannya, sejumlah pemberontakan telah dihadapi oleh "Orde Lama" sebagaimana tampak dari "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Orang-Orang yang Tersangkut dengan Pemberontakan." "Ditetapkan" dan "diundangkan" Presiden Soekarno di Jakarta 17 Agustus 1961, "Keputusan" berisi:
"[Pemberian] amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan [1] pemberontakan [DI/TII] Daud Bereueh di Aceh[;] [2] pemberontakan 'Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia' dan 'Perjuangan Semesta'[PRRI/Permesta] di Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi[,] Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah[;] [3] Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan; [4] Pemberontakan [DI/TII] Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Jawa Tengah[;] [5] Pemberontakan [DI/TII] Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan; [dan 6] pemberontakan 'Republik Maluku Selatan' [RMS] di Maluku, yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai dengan sumpah menurut agama masing-masing serta penandatanganan atas sumpah itu dengan lafal yang berikut:
'Saya bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, Manifestasi Politik yang telah menjadi Garis-garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, Revolusi dan Pemimpin Besar [R]evolusi,' di hadapan penguasa setempat, yaitu Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya."

Sebuah "penilaian" mengenai "plebisit" atau *"the Act of Free Choice"* atau Pepera memang dikemukakan "lapisan kaum intelek Irian" ini. Awalnya, penilaian terdengar sayup-sayup.

> "... dalam bulan Maret 1981, sebuah petisi yang ditandatangani oleh 50 orang diserahkan kepada Gubernur Irian Jaya. Petisi berisi 3 (tiga) butir pernyataan yaitu[,] [p]ertama[,] [p]rotes terhadap penyelenggaraan Act of Free Choice tahun 1969 dimana seharusnya dilakukan pemungutan suara bagi seluruh penduduk/ rakyat (satu orang satu suara) sebagai suatu hal yang prinsip sebagaimana dilakukan kemudian dalam pemilihan umum tahun 1971 dan tahun 1977 di Irian Jaya (bukan dengan musyawarah dewan)."[67]

Penilaian baru terdengar "sangat nyaring" setelah (1) Suharto, "Bapak Pembangunan" dan "Jenderal Besar," memutuskan untuk melakukan, dalam istilahnya sendiri, "*tinggal glanggang colong playu*,"[68] dan (2) penggantinya yang juga wakilnya, B.J. Habibie, dalam upaya mendapatkan legitimasi kekuasaan Republik Indonesia dari mereka yang berada Timor Timur, memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah referendum pada bulan Agustus 1999—sebuah penanda bahwa Republik Indonesia bukan sebuah *nation-state*.

Menarik untuk dicatat bahwa, sementara di satu sisi menolak tuntutan "lapisan kaum intelek Irian" untuk melaksanakan sebuah referendum di Papua seperti telah dilakukan di Timor Timur, Republik Indonesia yang bukan *nation-state* ketika akan menyelenggarakan referendum di Timor Timur mengambil Pepera sebagai model.

> "Given that Gen.[eneral] Tanjung was the senior military figure within Habibie's cabinet, it is likely that he played a crucial role in the cabinet's decision to approve

---

Lihat Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, hlm. 35; Peter King, "Morning Star Rising? Indonesia Raya and the New Papuan Nationalism," *Indonesia 73* (April 2002), hlm. 94, khususnya footnote No. 18; Benedict [R. O'G.] Anderson, "Indonesian Nationalism Today and in the Future," *Indonesia 67* (April 1999), hlm. 5.

67 JRG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, hlm. 124.

68 Perhatikan kata-kata berikut:
"Namun di sisi yang lain, ada keinginan Presiden untuk tetap melanjutkan pemerintahannya walau tidak sampai 2003 dan akan turun secara terhormat setelah dapat mengatasi krisis yang melanda bangsa ini. Sebagaimana sering saya dengar dari Presiden untuk tidak: 'Tinggal glanggang colong playu'...."
Lihat: *Bersaksi Di Tengah Badai: Dari Catatan Wiranto Jenderal Purnawirawan*, Jakarta: IDe, 2004, hlm. 85.

President Habibie's proposal to put Indonesian sovereignty to a vote in East Timor. It should be noted that he had prior experience in engineering the results of similar kind of referendum in West Papua and deceiving the United Nations. He served as the army's point man for the covert operations behind the 1969 'Act of Free Choice' in West Papua. As described in his authorized biography, Tanjung led 150 soldiers of RPKAD (the special forces that were later named Kopassandha, and then Kopassus) in a secret operation to win the referendum on independence in West Papua. He assigned his soldiers to 'work on' *(menggarap)* the members of the 1,026-member council of West Papuan representatives. Each soldier attached himself to six representatives and plied them with food, cigarettes, and drinks. Tanjung recalled: 'All the members of the council were continually contacted and managed up to the day before the vote. So, we were always on them.' He admits he tried to keep the operation hidden from the United Nations observers so that they would not suspect the referendum was anything less than fair.[] Gen. Tanjung's success in determining the outcome of the West Papuan vote in 1969 may have led him to believe that the army could repeat such a success thirty years later in East Timor. Although the East Timor voting process was completely different—it was tightly controlled by the United Nations and enfranchised all adults, not just a select group of representatives—Tanjung may have assumed that the army's power over the society was sufficient to guarantee an Indonesian victory. Even if the polling booths were controlled by the United Nations, the East Timorese society was still under the control of the army."[69]

Ketika "to 'work on' *(menggarap)* the members of the 1,026-member council of West Papuan representatives" tersebut, Jenderal Tanjung agaknya menjadi bagian dari *"a team of military personnel, students, and teachers in order to mount a 'hearts and minds' campaign and 'make a success' of the Act"* yang dipimpin Ali Murtopo.

Selain yang disebutkan di atas, terdapat juga "lapisan kaum intelek Irian" yang disebut seorang penulis sebagai "[t]he *reformasi*-era nationalists of 1998–2000." Menurut penulis tersebut,

"[H]aving] achieved some eminence within the Indonesian system" dan "[having] received some of their education overseas" serta "[owing] much more to the first generation nationalists of the 1960s than to the OPM," "the reformasi-era

69 Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Secret Documents," *Indonesia* 72 (October 2001), hlm. 34.

nationalists" men-"disassociate themselves from the OPM"..... "not only because they disagreed with the OPM's violent methods but also because they realized that disassociation from the OPM was necessary if the movement was to attract international support and the sympathy of *reformasi*-oriented Indonesians."[70]

Kelompok "the *reformasi*-era nationalists" ini merumuskan nasionalismenya di bawah "slogan, *'Correcting the Course of Papuan History'* (Perlurusan Sejarah)," dengan kata-kata berikut:

"The people of Papua have been sovereign as a nation and a state since December 1, 1961. The people of Papua, through the Second Congress [held in Jayapura from May 29 to June 4, 2000], reject the 1962 New York Agreement on moral and legal grounds as the agreement was made without any Papuan representation. The people of Papua, through the Second Congress, reject the results of *Pepera* (the "Act of Free Choice") because it was conducted under coercion, intimidation, sadistic killings, military violence and immoral conduct contravening humanitarian principles. Accordingly, the people of Papua demand that the United Nations revoke resolution 2504, of 19 December [sic] 1969.[]"[71]

Akhirnya, kondisi Papua dapat disimpulkan sebagaimana ditulis oleh Laporan Kontras:

"Sejak proklamasi tahun 1971 itulah, pemerintah Indonesia mengirimkan Angkatan [B]ersenjata[-]nya ke Papua untuk menumpas OPM. Namun demikian, anggota OPM yang dinyatakan hanya berjumlah puluhan saja, terus menjadi alasan untuk dilakukannya operasi militer di Irian Jaya selama 20 tahun tanpa pernah berhasil menumpas Gerakan tersebut dan pada kenyataannya hanya menimbulkan ketakutan dan korban di kalangan rakyat sipil. Operasi Militer ini pada akhirnya membentuk sebuah kebencian yang mengakar terhadap pemerintah Indonesia.

.....

..... Pengalaman bergabung dengan Indonesia menjadi memoria passionis (ingatan kolektif) tentang penindasan hak asasi manusia dari segala segi: baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan

70 Richard Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption*, Washington: East-West Center , 2005, hlm. 19-20, 27.

71 Richard Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption*, hlm. 8-9.

pemerintahan Indonesia dibawah rejim S[u]harto yang militeristik telah menimbulkan trauma dan antipati yang mendalam terhadap Indonesia.[]"[72]

72 *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, hlm. 9.

Referensi

Alua, Agus A. 2002, Papua *Barat[:] Dari Pangkuan ke Pangkuan (Suatu Ikhtisar Kronologis)*, Seri Pendidikan Politik Papua No. 1, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Desember.

Anderson, Benedict [R. O'G.] 1999, "Indonesian Nationalism Today and in the Future," *Indonesia 67* (April).

Anderson, Benedict R. O'G. 1990, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Anderson, Benedict. 1987, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.

Bachtiar, Harsja W. 1963, "Sedjarah Irian Barat," dalam *Penduduk Irian Barat*, ("dibawah redaksi" Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar), tanpa tempat: P.T. Penerbitan Universitas.

Bersaksi Di Tengah Badai: Dari Catatan Wiranto Jenderal Purnawirawan. 2004, Jakarta: IDe.

Chauvel, Richard. 2005, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption*, Washington: East-West Center.

Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan: Seri Perjuangan ex-Digul. 1977, Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial.

Djopari, HRG. 1993, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: Grasindo.

Feith, Herbert. 1978, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.

G-30-S Dihadapan Mahmillub: 2 Di Djakarta (Perkara Untung). 1966, Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman A.D. (AHM-PTHM).

Gruss, Daniel. 2005, "UNTEA and West New Guinea," A. von Bogdandy and R. Wolfrum, (eds.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Volume 9.

Hagopian, Mark N. 1985, *Ideals and Ideologies of Modern Politics*, New York: Longman.

Kahin, George McT. 2000, "Sukarno's Proclamation of Indonesian Independence," *Indonesia 69* (April).

King, Peter. 2002, "Morning Star Rising? Indonesia Raya and the New Papuan Nationalism," *Indonesia 73* (April).

Lombard, Denys. 2008, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Jilid 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris, dan Ecole francaise de'Extreme-Orient.

May, Brian. 1978, *The Indonesian Tragedy*, Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd.

"Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengeni Pertanggungjawaban dan Kepemimpinan Presiden Sockarno dan Persidangan Istimewa MPRS," dalam *Kumpulan Pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 September: Benarkah Gerakan 30 September Didalangi Bung Karno?* 2006, Yogyakarta: Media Pressindo.

Moore, Samuel. 2001, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Secret Documents," *Indonesia 72* (October).

Mrazek, Rudolf. 1996, *Sjahrir[:] Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Osborne, Robin. 1985, *Indonesia's Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya*, NSW 2059, Australia: Allen & Unwin Pty. Ltd.

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations. 2003, *Questioning the Unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into the Republic of Indonesia*, New York.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [dan] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945. 1995, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Salim, I.F.M. Chalid. 1977, *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Sanford Kanahele, George . 1967, 'The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence,' Ph. D Dissertation, Cornell University.

Saltford, John. 2000, "United Nations Involvement with the Act of Self-Determination in West Irian (Indonesian West New Guinea) 1968-1969, *Indonesia69* (April).

Shiraishi, Takashi. 1966, "The Phantom Word of Digoel," *Indonesia 61* (April).

----------. 1986, 'Islam and Communism: An Illumination of the People's Movement in Java, 1912-1926,' Ph. D Dissertation, Cornell University.

S[u]harto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. 1989, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.

Smail, John R.W., *et.al.* 1971, *In Search of South-East Asia: A Modern History*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Sundhaussen, Ulf. 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES.

Tim Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel, Papua, *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel Papua*, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Februari – Maret 2004.

BAB 2

"JEJAK KEBANGSAAN" DI MANOKWARI DAN TANAH MERAH, BOVEN DIGOEL: SEBUAH PENGANTAR

Soewarsono

1. *Pengantar*

Dua keterangan berikut mungkin dapat diperbandingkan. Keterangan pertama berasal dari sebuah entri dalam sebuah ensiklopedia:

"History

The first Europeans to sight the island of New Guinea were the Portuguese in 1511, and what is now the Indonesian portion of the island was subsequently visited by Spanish, Dutch, German, and English explorers. The English attempted to found a colony near Manokwari (now in West Papua) in 1793. The Dutch claimed the western half of New Guinea in 1828, but their first permanent administrative posts, at Fakfak (now in West Papua) and Manokwari, were not set up until 1898. Haji Misbach, a Muslim communist, was exiled by the Dutch to western New Guinea in 1924, and three years later about 1,300 communists were imprisoned there after an uprising in Java. The Japanese occupied the northern part of Dutch New Guinea during World War II until Allied forces recaptured Hollandia (now Jayapura) in 1944. The Netherlands regained sovereignty of western New

Guinea at the end of the war and retained it after officially recognizing Indonesia's independence in 1949. In 1962, after protracted negotiations, the region was placed under United Nations administration, and in 1963 it was transferred to Indonesia, with provision that a plebiscite would be held by 1969 to decide its future status.

Opposition to Indonesian rule, led by the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka or OPM), erupted almost immediately. The plebiscite took place in 1969, and, though the results were suspect, the area became the Indonesian province of Irian Jaya. The OPM continued to resist Indonesian rule, and violence broke out periodically. In 1999 then president of Indonesia B.J. Habibie divided the area into three provinces: Irian Jaya, Central Irian Jaya, and West Irian Jaya. Largely perceived as a "divide-and-rule" maneuver, the partition met with strong local opposition and consequently was annulled the following year by Habibie's successor, Abdurrahman Wahid. Wahid not only returned the region to the status of a single province but also granted it a significant degree of autonomy.

In January 2002, just a few months after Megawati S[oe]karnoputri assumed the presidency, Irian Jaya officially changed its name to Papua. Meanwhile, Megawati resurrected the idea of dividing the province, and in 2003, without consulting the residents of Papua or the local government, the province was split into West Irian Jaya (Irian Jaya Barat) and Papua. An interim governor was appointed for West Irian Jaya, and a legislature was installed the following year. Although the constitutionality of the division of the province was disputed for some years, Papua and West Irian Jaya were officially recognized as separate entities by Megawati's successor, Susilo Bambang Yudhoyono. Both provinces held direct general elections in 2006, and in 2007 West Irian Jaya became known as West Papua.

Virginia Gorlinski[.]"[1]

1 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/293960/Papua/303094/History, tekanan-tekanan asli.

Sementara keterangan kedua berikut berasal dari halaman-halaman pertama sebuah buku:

> "*Pendahuluan*
> Istilah papua yang digunakan di dalam buku ini mengacu pada pengertian Tanah Papua yang secara administratif terdiri atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Papua bagian utara, barat, dan selatan berada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Tidore pada periode 1453-1890 (Alua 2006: 8). Kesultanan Ternate mengakui kekuasaan Kesultanan Tidore atas Papua pada abad ke-16 (Kamma 1981: 61). Walaupun secara resmi Belanda menguasai Tanah Papua sejak Traktat London tahun 1824 dan [mendirikan] Fort Du Bus di teluk Triton pada 24 Agustus 1828, namun pemerintah kolonial Belanda mulai efektif sejak pendirian pos pemerintahan pertama di Manokwari pada 9 November 1898. Penyerahan kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949 memunculkan persoalan tentang status politik Papua yang masih diduduki Belanda. Konflik Indonesia-Belanda berkaitan dengan persoalan ini berakhir dengan Persetujuan New York 1962 di mana Belanda menyerahkan Papua ke UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) dan selanjutnya UNTEA menyerahkan Papua kepada Indonesia. Sebagai bagian dari persetujuan New York, Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 dan hasil resminya 1.024 wakil-wakil orang Papua memilih bergabung dengan Indonesia.
>
> Tanah Papua pada masa kolonial Belanda biasa disebut dengan West Nieuw Guinea atau Nederlandse Nieuw Guinea. Setelah bergabung dengan Indonesia nama daerah ini diganti menjadi Provinsi Irian Barat. Kemudian pada masa Orde Baru, S[u]harto mengganti Irian Barat dengan nama Irian Jaya. Sesudah berakhirnya rezim Orde Baru tepatnya pada tanggal 31 Desember 1999, nama Irian Jaya berubah menjadi Papua. Undang-Undang No. 45/1999 dan Inpres No. 1/2003 telah memekarkan Provinsi Papua menjadi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya. Namun dalam praktiknya, provinsi ini berubah menjadi dua provinsi yakni Papua dan Irian Jaya Barat yang berganti nama menjadi Papua Barat. Sejak 18 April 2007, Irian Jaya Barat berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007. Sekarang ini, Provinsi Papua terbatas atas 1 kota dan 19 kabupaten. Sementara Provinsi Papua Barat terdiri atas 1 kota dan 8 kabupaten."[2]

2 Muridan S. Widjojo, ed., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 3-4.

Ada beberapa hal yang dapat dikatakan ketika membaca pendahuluan buku di atas lewat entri ensiklopedi yang dikutip pertama. Satu di antaranya: pendahuluan buku itu tidak menyebut dua hal yang dicatat entri ensiklopedi. *Pertama*: "Haji Misbach, a Muslim communist, was exiled by the Dutch to western New Guinea in 1924," dan, *kedua*: "three years later about 1,300 communists were imprisoned there after an uprising in Java."

2. *"[T]he Penindi cemetary"*

Tentang Haji Misbach, tercatat bahwa ketika berada di Manokwari, ia *"kept 'moving'"* dengan mendirikan *"the Manokwari SR [Sarekat Rakjat]."* Namun itu tidak terlalu lama. Setelah *"[suffering] Malaria,"* Haji Misbach *"died on May 24, 1926."* Juga dikatakan bahwa *"Misbach was buried by a small group of Manokwari SR members in the Penindi cemetary, Manokwari, alongside his wife."*[3]

Terkait dengan *"the Penindi cemetary"* atau "pemakaman Penindi"—tepatnya Fanindi—beberapa hal dapat dikemukakan. Fanindi awalnya merupakan sebuah "tempat berkumpul," *fanduri waum*, pendatang dari Biak Nun[m]for. Dalam perjalanan waktu, Fanindi berkembang menjadi sebuah permukiman orang-orang Biak Nun[m]for, atau kemudian disebut orang-orang Doreri. Dan adalah pemukiman ini, dikenal sebagai "kampung tua," *manukwar*, yang kemudian berkembang menjadi sebuah "daerah kotaan" (*urban area*) Manokwari. Dua hal dapat dicatat dalam kaitan perkembangan "kampung" menjadi "daerah perkotaan." *Pertama*, kedatangan dua orang misionaris berkebangsaan Jerman, yakni Carel Willem Ottow dan Johann Gotlob Geislerr di Pulau Mansinam. Keduanya tiba pada tanggal 5 Februari 1855 dan sejak itu memulai "memberitakan" Injil, pertama-tama kepada orang-orang Biak Nun[m]for yang berada di pantai dan orang-orang Arfak yang berdiam di Pegunungan Arfak. *Kedua*, didirikannya pos pemerintahan oleh Pemerintahan Hindia Belanda beberapa saat setelah L. A. Van Oosterzee sebagai Controleur Afdeling Noord New Guinea. L. A. Van Oosterzee dilantik oleh Residen Ternate Dr. D. W. Horst atas nama Gubernur Jenderal

3 Takashi Shiraishi, 'Islam and Communism: An Illumination of the People's Movement in Java, 1912-1926,' Ph. D Dissertation, Cornell University, 1986, hlm. 557-560.

Hindia Belanda pada hari Selasa tanggal 8 November 1898. Pada tahun 1995, melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995, tanggal pelantikan L. A. Van Oosterzee sebagai Controleer Afdeling Noord New Guinea dijadikan sebagai hari jadi "daerah perkotaan" Manokwari.

Menghilangnya "pemakaman Penindi" menjadi satu di antara penanda kemunculan "daerah perkotaan." Pemakaman tersebut—yang dalam suatu saat, di tahun 1980-an, lebih dikenal sebagai "kuburan Cina"—mulai menghilang seiring dengan makin meluasnya "daerah perkotaan" Manokwari, khususnya sejak ditetapkannya keputusan bahwa ibukota Provinsi Papua Barat berada di "daerah perkotaan" tersebut.[4] Banyak makam dipindahkan ke tempat pemakaman baru di Pasir Putih dan muncul di atas bekasnya beberapa bangunan: Gedung Radio Republik Indonesia (RRI), Lapangan Tenis milik PT Telekomunikasi dan Gedung PT Telekomunikasi serta sebuah gereja.

Meskipun begitu, sejumlah makam masih dapat diketemukan. Dua di antaranya Haji Misbach dan istrinya walau tanah dimana kedua makam—dan beberapa lainnya—berada kini dimiliki sebuah gereja (Lihat sketsa hasil observasi lapangan).

Pada batu nisan makam Haji Misbach terbaca: "Perintis Kemerdekaan RI." Hampir dapat dipastikan bahwa penulisan tersebut sepertinya dilakukan setelah tahun 1960.

> "Adapun orang-orang yang diakui sebagai Perintis Kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang No. 5/Prps/64 ialah mereka yang berjuang dalam partai politik atau dalam kesatuan bersenjata yang teratur menentang kolonialisme dan karena kegiatan politiknya itu dihukum atau dibuang ke DIGUL atau ke tempat lain oleh Pemerintah Kolonial. Pemberontakan anak buah 'De Zeven Provincien' pada zaman Hindia Belanda dan Pemberontakan Tentara PETA (Pembela Tanah Air) Blitar di bawah pimpinan SUPRIYADI pada zaman pendudukan tentara Jepang, diakui sebagai pejuang Perintis Kemerdekaan."[5]

Haji Misbach jelas termasuk di antara "mereka yang berjuang dalam partai politik atau dalam kesatuan bersenjata yang teratur menentang kolonialisme

4 Tidak ada "Kota Manokwari" dalam daftar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

5 *Citra dan Perjuangan Perintis kemerdekaan: Seri Perjuangan ex-Digul*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial, 1977, hlm. vi-vii.

dan karena kegiatan politiknya itu dihukum atau dibuang... ke tempat lain oleh Pemerintah Kolonial."

Lokasi Makam Haji Misbach

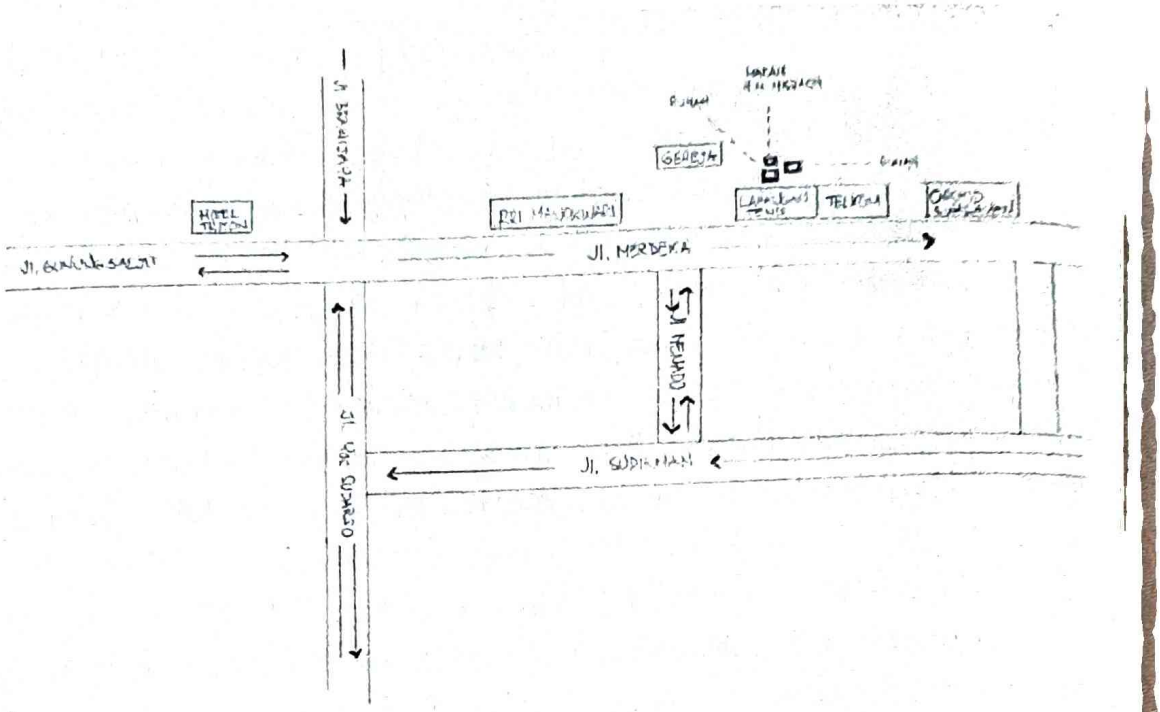

3. *Boven Digoel*

Tempat *"1,300 communists"* dipenjara di wilayah negara kolonial Hindia Belanda bernama *"western New Guinea"* awalnya adalah wilayah "the sub-division (*onderafdeeling*) of Southern New Guinea" yang berpusat di Merauke, sebagaimana tergambar dari kutipan di bawah ini:

> "On December 10,1926, the area up the Digoel river was separated from the sub-division *(onderafdeeling)* of Southern New Guinea by government decree and was made a new administrative sub-division of Boven Digoel with Tanah Merah as its center."[6]

6 Takashi Shiraishi, "The Phantom Word of Digoel," *Indonesia* 61 (April 1996), hlm. 96.

"1,300 communists," di antaranya "Haroenrasjid and Ahmad Dasoeki, both Hadji Misbach's proteges and former leaders of the Islamic Communist *mualimin* movement in Solo,"[7] tidak berada di Tanah Merah sebagai "pusat" dari "the sub-division (*onderafdeeling*) of Boven Digoel". "Pusat" tersebut merupakan tempat bagi para penguasa yang terdiri dari orang-orang sipil, polisi, dan militer. Seiring dengan "pembangunan" berbagai fasilitas "modern" untuk menunjang kehidupan mereka, "pusat" -atau Tanah Merah- muncul menjadi sebuah "daerah perkotaan" yang pada gilirannya tampak seperti *"a little Buitenzorg."*[8]

Walaupun di "pusat" terdapat sebuah penjara, *"1,300 communists"* tidak berada di penjara tersebut. Mereka ditempatkan di kampung-kampung yang dibangun baik di dekat Tanah Merah maupun sebuah kampung yang agak jauh dari Tanah Merah di tengah-tengah hutan, dikenal sebagai Tanah Tinggi, dengan "'head-hunters' and 'cannibals' in the jungle and crocodiles in the river"[9] sebagai tetangganya. Dalam perjalanan waktu, kampung-kampung di dekat Tanah Merah juga diperuntukkan bagi siapa saja yang menentang pemerintah negara kolonial Hindia Belanda. Begitulah:

> "In the years from 1930 to 1934 they still included "PKI and SR leaders and propagandists' interned after having served their prison sentences because of their involvement in the revolts in 1926 and 1927. But they were of increasingly less importance. More prominent were leading members of the "red" trade union central, the Sarekat Kaum Boeroeh Indonesia (SKBI, Indonesian Trade Union), interned in 1930, and above all PARI "leaders and agents" such as Soenarjo, Mardjono, Sarosan, Djamaloeddin Tamin, Daja bin Joesoef, Kandor, and many others, interned from 1931 to 1934. Indeed, after the government discovery of the PARI underground, its membership meant an almost sure one-way ticket to Digoel in the 1930s. Then, in the wake of the government clamp down on the "non-cooperationist" nationalists in 1933-1934, non-communists such as Permi (Perhimpoenan Moeslimin Indonesia, Indonesian Muslims' Association) and PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia, Indonesian Islamic Association Party) leaders from West Sumatra (Moechtar Loetfi, Ilyas Jacob, Jalaloeddin Thaib and several others), Hatta, Sjahrir, and their five other Pendidikan Nasional Indonesia

7 *Ibid.*, hlm. 108
8 *Ibid.*, hlm. 110.
9 *Ibid.*, hlm. 103.

(PNI-Baru, Indonesian National Education) friends, Partindo (Partai Indonesia, Party of Indonesia) leaders from North Sumatra (Mochidin Nasoetion, Abdul Hamid Loebis and several others) went to Digoel. And finally a new generation of PARI, PNI-Baru, and Moesso's PKI-Muda leaders (Jahja Nasoetion and Dawood of the PARI, "Moscow agent" Amir Hamzah Siregar, Ahmad Soemadi and Djokosoedjono of the PKI-Muda, Moerad and Bermawi Latif of the PNI-Baru, among many others) again swelled the rank of Digoel internees in 1936."[10]

Bagaimanapun juga, terdapat sebuah pengecualian. Ditetapkan kemudian bahwa kampung-kampung di dekat Tanah Merah bukanlah tempat yang cocok bagi *"university trained 'intellectuals.'"*[11] Karena itulah Mohammad Hatta and Sjahrir ditransfer *"from Digoel to Banda Neira in early 1936."*

Sejak 1934, seiring dengan diungsikannya para tahanan politik Boven Digoel ke Australia dan karena itu mereka meninggalkan kampung-kampung (kamp-kamp)-nya, jika Boven Digoel segera menghilang, tidak demikian dengan Tanah Merah. Penjara Tanah Merah menjadi bagian penting dalam periode dari apa yang disebut sebagai *"Dutch-Indonesian antagonisms."*[12]

"Perjuangan-perjuangan dalam mendukung semangat nasionalisme Indonesia juga diwujudnyatakan di dalam berbagai organisasi-organisasi yang dibentuk. Organisasi Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang didirikan tahun 1946, Partai Irian dalam Republik Indonesia Serikat (PIDRIS) tahun 1949, Persatuan Organisasi Gerakan Irian (POGI) tahun 1950, Perkumpulan Sosial Serui Waropen (PSSW), Partai Indonesia Merdeka tahun 1946, Tentara Cendrawasih Cadangan (TCC) tahun 1957 dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) pada tahun 1946. Kesemua organisasi ini pada dasarnya bertujuan memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Akibat dari pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, maka banyak elit-elit politik Papua telah menjadi sasaran penangkapan untuk kemudian dibuang ke penjara-penjara, termasuk penjara [di Tanah Merah] Boven Digoel."[13]

10 *Ibid.*, hlm. 101.
11 *Ibid.*, hlm. 101.
12 Lihat kembali bab 1
13 Adrianus Moromon, 'Penjara yang Memerdekakan: Arti dan Peranan Kamp Interniran Boven Digoel bagi Bangsa Indonesia,' Skripsi Sarjana Universitas Cendrawasih, Jayapura, 2006, hlm. 64.

Belakangan, Tanah Merah dalam konteks kekinian juga dapat dilihat. *Pertama*, munculnya Kabupaten Digoel—yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Merauke di tahun 2003—dengan ibukotanya Tanah Merah:

> "Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003... maka daerah yang dahulu disebut sebagai Deportatie Kamp Boven Digoel ditetapkan sebagai... satu kabupaten dengan nama Kabupaten Boven Digoel.
>
> Tentang pemberian nama kabupaten, telah menjadi bahan perdebatan antara dua nama yaitu Kabupaten Sokanggo dan Kabupaten Boven Digoel. Nama Kabupaten Sokanggo tidak mendapat banyak perhatian, karena sesuai dengan arti katanya yaitu tanah yang berwarna merah, yang berindikasi bahwa Kabupaten Sokanggo nantinya hanya diperuntukkan bagi penduduk Tanah Merah. Sementara nama Kabupaten Boven Digoel mendapat perhatian dan tanggapan serius oleh sebagian besar penduduk Boven Digoel."[14]

Kedua, didirikannya "monumen Hatta menunjuk tanah" empat tahun kemudian, di tahun 2007.

> "**Sebuah** monumen bertengger di pertigaan jalan depan kantor Polres Boven Digoel. Monumen dengan tangan menunjuk ke tanah itu adalah monumen Mohammad Hatta, proklamator kelahiran Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 itu. Monumen yang tak jauh dari Bandara Tanah Merah itu, menjadi saksi bisu kalau *founding father[]*tersebut pernah dibuang ke pulau ujung timur Indonesia. 'Monumen dengan telunjuk ke tanah ini, menggambarkan bahwa Mohammad Hatta menunjuk kalau dirinya pernah dibuang di tempat ini,' tutur seorang anggota polisi berpangkat Aiptu, sebagai pemandu dalam kunjungan Dirut PLN Dahlan Iskan beserta rombongan, pekan lalu."[15]

Bab-bab selanjutnya merupakan upaya para penulis melihat beberapa aspek dalam kaitannya dengan, bukan hanya bagaimana kehidupan *"1,300 communists"* yang berada baik di kampung-kampung sekitar di "daerah perkotaaan" Tanah Merah maupun di "Kampung" Tanah Tinggi—*"an*

14 *Ibid.*, hlm. 30.

15 "Patung Menunjuk Tanah, Tanda Hatta di Tanah Merah Berkunjung ke Boven Digoel, Papua, Tempat Proklamator RI Dibuang," http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/p...?mib=berita.detail&id=109551.

inhospitable barren environment not without danger,' 'isolated,' 'thinly populated,' with 'limited access routes,'"[16] tetapi juga "keberadaan" Haji Misbach di "daerah perkotaan" Manokwari.

16 Takashi Shiraishi, "The Phantom Word of Digoel," hlm. 96.

Referensi

Citra dan Perjuangan Perintis kemerdekaan: Seri Perjuangan ex-Digul, 1977, Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial.

Moromon, Adrianus. 2006. 'Penjara yang Memerdekakan: Arti dan Peranan Kamp Interniran Boven Digoel bagi Bangsa Indonesia,' Skripsi Sarjana Universitas Cendrawasih, Jayapura.

Shiraishi, Takashi. 1966. "The Phantom Word of Digoel," *Indonesia 61* (April).

Shiraishi, Takashi. 1986. 'Islam and Communism: An Illumination of the People's Movement in Java, 1912-1926,' Disertasi Ph. D, Cornell University.

Widjojo, Muridan S. ed. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia.

BAGIAN I

MANOKWARI

BAB 3

PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN H.M. MISBACH

Herman Hidayat

1. *Pengantar*

Indonesia memasuki awal abad ke XX ditandai dengan lahirnya gerakan kebangkitan "bumiputera". Gerakan ini dalam pemaknaan oleh ilmuwan Jepang, Takashi Shiraishi ialah suatu kesadaran mencari bentuk untuk menampilkan kesadaran politik dengan kritis, antara lain kritik atas penghapusan sifat diskriminatif dan eksploitasi tenaga bumiputera oleh kolonial Belanda yang kapitalis. Kita lihat gerakan kesadaran politik tersebut ditampilkan dalam bentuk pendidikan, ekonomi, dan politik seperti Boedi Oetomo (tahun 1908), SDI (Sarekat Dagang Islam) (1911) yang akhirnya dikenal sebagai Sarekat Islam (SI), dan puncaknya Sumpah Pemuda (1928). Dalam hal Sarekat Islam (SI), yang patut dicatat, menurut Amien Rais (Rambe, 2008:ii) adalah daya tahannya yang mengagumkan dalam melewati rintangan zaman, sehingga SI tetap eksis sampai sekarang setelah melewati usia seabad pengabdiannya pada bangsa dan negara.

Salah satu pimpinan SI Surakarta ialah Haji Misbach yang radikal yang dibina oleh tutornya Haji Oemar Said Tjokroaminoto, pimpinan SI yang kharismatik dan orator. Haji Misbach melalui pikiran dan tindakannya sangat menentang penindasan, sikap diskriminatif, dan eksploitasi kapitalis Belanda. Kritiknya terhadap penguasa kolonial dan para residen orang Indonesia yang pro Belanda, bahkan raja sekalipun, sangat vokal. Kritiknya terhadap

residen Surakarta dan Pakubuwono X dalam suatu kartun sangat pedas; "jangan takut dihukum, dibuang dan digantung", akan tetapi kritik tersebut akhirnya memicu inspirasi kaum buruh di perkebunan Belanda untuk mogok bekerja. Mereka merasa diupah sangat kecil dan tidak manusiawi. Meskipun, Haji Misbach dan tokoh-tokoh lain dalam barisan SI merah ditindas oleh kekuasaan kolonial, bahkan Haji Misbach dipenjara di Pekalongan, Surakarta, dan terakhir diasingkan di Manokwari pada tahun 1924, ia tetap vokal dalam melontarkan kritik-kritiknya yang diterbitkan melalui majalah *Medan Moeslimin*. Haji Misbach sangat mengagumi nilai-nilai Islam, dan ajaran Karl Marx yang menekankan perbaikan kondisi sosial dan anti penindasan serta eksploitasi rakyat demi keuntungan kapitalis di berbagai sektor ekonomi. Akibat dari penindasan kolonial tersebut, masyarakat Indonesia menjadi miskin, tak berdaya, terhina, dan terjajah secara fisik dan mental.

Tulisan ini mencoba mengangkat biografi politik Haji Misbach, pemikiran revolusioner dan kritik Haji Misbach terhadap penguasa kolonial, serta menganalisa implikasi pemikiran Haji terhadap berbagai tokoh-tokoh atas Organisasi Masyarakat (Ormas) di Manokwari -tempat pengasingan Haji Misbach di masa lalu (1925-1926)- seperti Ormas Islam (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama/NU, dan Majelis Ulama Indonesia/MUI), Kristen, Budha, Hindu, dan Gerakan Merah Putih. Para pimpinan Ormas yang diwawancarai pada umumnya menyatakan bahwa mereka tidak bersinggungan secara langsung dengan pemikiran Haji Misbach, karena rentang waktunya yang jauh, tetapi pada dasarnya mereka menghargai pikiran-pikiran Haji Misbach yang anti penindasan, eksploitasi, diskriminasi, serta semangatnya yang menghargai kemajemukan masyarakat, di samping mempunyai toleransi dalam menegakkan kehidupan beragama.

2. *Biografi Politik*

Mengkaji sosok dan pemikiran Haji Misbach sangat menarik. Tokoh ini diberikan usia oleh Tuhan cukup pendek, hanya 50 tahun. Tetapi pemikirannya tentang aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dan Marxisme dalam menentang penindasan kolonial Belanda sangat mengagumkan. Haji Misbach lahir di Kauman, Surakarta pada tahun 1876 dan wafat bersama

istrinya dalam pengasingan di kota Manokwari pada tahun 1926 (Gambar 1).[1] Ayahnya memberikan nama Ahmad ketika Haji Misbach masih kecil. Setelah dia menikah, namanya diganti menjadi Darmodiprono. Setelah dia usai menunaikan *ibadah haji* (Rukun Islam kelima) di Mekkah, orang awam mengenalnya sebagai Haji Mohamad Misbach.

Gambar 1: Makam Haji Misbach dan Istrinya yang wafat tahun 1926 di Penindi, kota Manokwari (Arsip foto pribadi ini diambil pada tanggal 31 Agustus 2012.)

Pendidikan Misbach diawali dengan belajar ilmu-ilmu agama di pesantren. Kemudian dia belajar di sekolah bumiputera "Ongko Loro" selama delapan bulan. Perpaduan belajar di sekolah agama dan umum, memberikan Misbach wawasan berpikir yang luas. Misbach mengikuti jejak langkah ayahnya menjadi pedagang batik di daerah Kauman. Bisnis batiknya menanjak sehingga ia berhasil membuka rumah pembatikan.

Pada tahun 1912 di Surakarta berdiri Sarekat Islam (SI). Keanggotaannya pada bulan Juni 1912 tercatat telah mencapai 2.000 orang. Ketika Haji Oemar Said Tjokroaminoto menjadi Ketua Cabang SI di Surabaya, SI berkembang pesat dan anggotanya bertambah banyak, karena dia mempunyai kemampuan dalam berorganisasi dan kharisma dalam berorasi di depan publik.[2] Di bawah

1 Penulis bersama kolega peneliti, Soewarsono, berziarah pada tanggal 31 Agustus 2012 dan berdoa di makam H.M. Misbach dan istrinya yang wafat pada tahun 1926 di Penindi, kota Manokwari. Suami-istri orang Biak, Alfred dan Maria, berjasa membersihkan rumput yang tumbuh dan menutupi nisan Haji M. Misbach dan istrinya. Kondisi makam keduanya cukup menyedihkan, karena tidak terawat. Memang sebagian besar makam yang lain sudah dipindahkan oleh keluarganya ke pemakaman umum Pasir Putih. Hanya tinggal beberapa makam yang masih ada, termasuk makam Haji Misbach dan istrinya.

2 Tjokroaminoto dijuluki "Raja Jawa tanpa Mahkota", karena dia dapat memimpin dua juta orang pengikut SI, di zaman puncak kejayaannya, dan dia merupakan sentrum dari gerakan SI. Lihat Safrizal

kepemimpinannya, SI dapat diorganisir menjadi satu kekuatan rakyat yang paling ditakuti pemerintahan kolonial. Anggota SI bertambah, sebagai gambaran di Surakarta saja mencapai 35.000 pada bulan Agustus 1912. Sebagai perbandingan jumlah penduduk Surakarta saat itu hanya 60.000 orang, dan jumlah itu sudah mencakup orang Indo Eropa dan Cina.[3] Dalam konteks sejarah Indonesia, menurut Amien Rais, pengaruh SI sejak masa penjajahan sangat besar dalam membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia, karena sejak awal pembentukannya telah ditujukan untuk memperjuangkan semangat emansipasi yang mulai tumbuh. Oleh sebab itu, Amien Rais[4] menekankan bahwa pertumbuhan gerakan politik umat Islam Indonesia amat erat kaitannya dengan keberadaan SI sebagai kekuatan politik umat.

Keterlibatan Misbach di SI Surakarta dimulai tahun 1914, ketika SI membentuk *Indlandsche Journalisten Bond* (IJB) yang menerbitkan majalah *Medan Moeslimin*, yang edisi pertamanya terbit pada tanggal 15 Januari 1915. Keberadaan majalah tersebut sangat penting sebagai media gerakan yang sangat popular di Surakarta dan sekitarnya[5].

Pada awal perjuangannya, Misbach dekat dengan pemikiran Tjokroaminoto (pendiri SI) yang sama-sama memperjuangkan Sosialisme Islam. Misbach juga mengatakan jasa Tjokroaminoto sangat besar, karena dia telah mengangkat namanya ke depan sejajar dengan tokoh Muslim lainnya di Surakarta. Tetapi dalam perjalanan waktu kemudian, pemikiran Misbach lebih radikal dalam mengusung nilai Islam sebagai agama keadilan dan kemanusiaan. Lembaga perkumpulan dakwah yang kesohor dan reformis bernama *SATV* (*Sidiq (benar), Amanah (terpercaya), Tablig (menyampaikan), dan Fatonah (cerdas)*) merupakan wahana perjuangan Misbach untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Dari sini, terlihat bahwa Misbach sudah mempunyai indikasi "berseberangan" dengan pemikiran gurunya, Tjokroaminoto, sejalan dengan pecahnya SI menjadi dua kelompok besar, yakni SI putih dan SI merah.

Rambe.2008. *Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Penerbit Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia, hlm. 59.

3 *Ibid.*

4 Baca Amien Rais dalam "Kata Pengantar" buku *Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*, hlm. XV.

5 "Haji Misbach: Muslim Komunis," dalam *Tabloid Pembebasan*. Edisi V/Thn II/Februari 2003, http://indomarxist.tripod.com/hmisbach.htm, diakses 29 Maret 2012.

SI putih didukung oleh Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Abdoel Moeis. Sedangkan SI merah didukung oleh Semaoen, Darsono, dan Tan Malaka.

Semaoen masuk ke SI tahun 1915 dan pada saat yang sama menjadi anggota ISDV (*Indische Sociaal-Democratische Vereneging*), dimana kesadaran Marxisme tengah berkembang. Di Semarang, ia menjadi oposisi atas kepemimpinan Muhammad Joesoef, pemimpin SI Cabang Semarang. Ilmuwan Jepang kesohor, Takashi Shiraishi, menyebut Semaoen mewakili generasi yang lebih muda dan ingin cepat-cepat dalam menyelesaikan setiap persoalan, sebaliknya M. Joesoef mewakili generasi tua yang cenderung berhati-hati dalam mengambil tindakan. Bulan Maret 1917, oposisi Semaoen terhadap M. Joesoef tambah keras ketika menanggapi respons SI Semarang terhadap kasus Marco yang terkena *pers delicten* untuk kedua kalinya. Dalam debat dengan M. Joesoef, Semaoen memperoleh dukungan suara lebih banyak dari anggota SI, dan akhirnya terpilih mewakili SI Semarang dalam komite tersebut.[6] Pada 6 Mei 1917, Semaoen berhasil menyingkirkan M. Joesoef, dan diangkat sebagai ketua SI Semarang. Semaoen yang karena perkenalannya dengan tokoh Sosialis Belanda, Henk Sneevliet, akhirnya menjadi Marxis, mulai menyuarakan hal yang berbeda dengan Tjokroaminoto, Abdoel Muis dan Agus Salim. Pada Kongres Nasional Pertama SI di Bandung tahun 1916, Semaoen mengemukakan pendapatnya yang menentang Islam sebagai dasar pergerakan[7] dan agar Islam tidak usah dikembangkan sebagai ideologi, karena ia menganggap kebangsaan dan kerakyatan yang lebih tepat.[8]

Pada tanggal 23 Mei 1920 PKI (Persarekatan Komunis di India) didirikan sebagai penganti ISDV, dibawah pimpinan Semaoen. Pada Kongres SI bulan Oktober 1921 di Surabaya, diputuskan bahwa SI merah yang berafiliasi kepada PKI dikeluarkan dari SI. Kelompok Semaoen (SI Semarang) adalah bagian dari mereka yang terkena kebijakan tersebut. Akhirnya Semaoen dan kawan-kawan keluar dari CSI, dan menyusun cabang-cabang SI merah dalam suatu Central SI merah untuk menentang SI putih pimpinan Tjokroaminoto. Haji Mohamad Misbach masuk sebagai propagandis SI merah.

---

6 Baca Takashi Shiraishi.1977. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926.* Diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Jakarta: Grafiti, hlm. 136-139.

7 Amelz. 1952. *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya.* Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, hlm.116.

8 Safrizal Rambe, *Op Cit*, hlm. 111.

Sosok Misbach menjadi populis, karena pemikirannya yang revolusioner dipublikasikan di media, dan karena aksi-aksi demonstrasinya bersama rakyat dalam menentang kolonialisme Belanda yang melakukan praktik penindasan dan diskriminatif di tengah masyarakat.

Nampaknya apa yang diperjuangkan Misbach sejalan dengan langkah Tan Malaka umtuk membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan kolonial. Realitas sosial yang menimpa masyarakat Indonesia, adalah akibat dari struktur sosial yang timpang waktu itu, yakni struktur masyarakat jajahan dimana masyarakat terjajah dijadikan sapi peras (tereksploitasi) baik secara politik, ekonomi, dan sosial oleh penguasa kapitalis Belanda. Berbagai bentuk penindasan yang keras dan keji, meminjam istilah Tan Malaka, dapat diperumpamakan sebagai "tanah emas, surga buat kaum kapitalis, tetapi tanah keringat, air mata dan maut, dan neraka buat kaum proletar". Kritik pertamanya dimulai terhadap rencana ekonomi kapitalis; "kapitalisme merampok" adalah makian Tan Malaka terhadap cara kerja kapitalis dalam upaya melipatgandakan kapitalnya.[9] Gambaran yang memilukan pada suasana kolonial juga dikomentari oleh Lothrop Stoddard dalam bukunya *"The Rising Tide of Color"* (Pasang Naik Kulit Berwarna):

> "... dunia kulit berwarna yang telah lama bergolak dibawah dominasi politik putih (Orang Eropa, termasuk Belanda), terdorong oleh naluri yang paling asasi, yaitu naluri untuk melangsungkan hidupnya, bersatu kedalam suatu perasaan setia-kawan bersama melawan dominasi kulit putih..... Dalam menghadapi kenyataan dominasi politik dunia kulit putih ini, perasaan-perasaan antipasi yang terdapat dikalangan dunia kulit berwarna sendiri, mau tidak mau harus menyelinap kebelakang."

Pernyataan orang kulit putih tentang tesis mengenai orang kulit berwarna ini dengan tepat mencerminkan apa yang dikatakan orang kulit berwarna sendiri. Misalnya, Profesor Ryutaro Nagai, seorang ilmuwan Jepang, menulis:

> "Dunia tidak diperuntukan melulu untuk ras kulit putih, akan tetapi juga untuk ras-ras yang lain. Di Australia, Afrika Selatan, Canada, dan Amerika Serikat terdapat

9 Baca Safrizal Rambe.2003. *Pemikiran Politik Tan Malaka: Kajian Terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 227-229.

> daerah-daerah luas yang tidak didiami orang, yang menunggu untuk ditempati. Meskipun penduduk dari pemerintah yang berkuasa menolak untuk menempati daerah tersebut, tidak seorang bangsa kulit kuning diperbolehkan masuk. Dengan demikian orang kulit putih tampaknya rela memberikan kepada burung-burung dan binatang liar daripada kepada ras kuning. Kecongkakan dan ketamakan di kalangan kaum ningrat di beberapa negara dalam hal tindakannya membagi-bagi tanah yang paling luas dan baik, terang belum apa-apa jika dibandingkan dengan sikap ras putih terhadap mereka yang berbeda-beda kulitnya.[10]

Di mata Misbach, lembaga-lembaga Islam tidak tegas dalam membela kaum *dhuafa* (*kaum lemah*). Berjuang melawan kapitalisme tak membuat Misbach tidak menegakkan Islam. Baginya, perlawanan terhadap kapitalis dan pengikutnya sama dengan berjuang melawan setan.[11] Salah satu aksi H.M. Misbach adalah membuat kartun di majalah *Islam Bergerak* edisi 20 April 1919. Isinya berupa kritik keras terhadap kapitalis Belanda yang menghisap petani, mempekerjakan paksa masyarakat, memberi upah kecil, dan membebani pajak. Residen Surakarta digugatnya, Paku Buwono X digugatnya, karena keduanya dianggap ikut-ikutan menindas rakyat. Retorika khas Misbach muncul dalam kartun itu sebagai "suara dari luar dunia petani." Bunyinya, "jangan takut, jangan khawatir". Di sisi lain, Misbach juga menegaskan kepada rakyat agar "jangan takut dihukum, dibuang dan digantung", sambil memaparkan kesulitan Nabi Muhammad saat menyiarkan Islam. Kata-kata tersebut memicu kesadaran dan keberanian petani untuk mogok. Suara Haji Misbach sangat lantang dalam menegakkan keadilan di bumi Indonesia, meskipun akhirnya ia ditindas oleh kekuasaan kolonial Belanda yang didukung oleh kekuatan kapitalis Indonesia.

Siapa saja yang dinilainya buruk, maka dia tidak segan untuk mengkritiknya. Haji Misbach adalah figur pemimpin yang berani dan mempunyai keteguhan dalam bersikap. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, sosok Haji Misbach, seperti halnya seorang Tan Malaka. Jika banyak pihak, terutama kelompok Islam kemudian menyesalkan perjuangan 'revolusioner" yang dilakukan Haji Misbach dengan jalan "kekerasan", mungkin ini adalah kelemahan dari

10 Untuk informasi yang lebih lengkap, baca L. Stoddard. 1965. *Pasang Naik Kulit Berwarna* (Terjemahan oleh kantor Menko Kesra). Jakarta: tanpa penerbit, hlm. 34-35.

11 Baca "Haji Misbach: Muslim Komunis," dalam *Tabloid Pembebasan* Edisi V/Thn II/Februari 2003, http://indomarxist.tripod.com/hmisbach.htm,diakses 29 Maret 2012.

pemikirannya. Tapi di sisi lain, perjuangan Haji Misbach tidak mengurangi kekuatan pemikirannya yang progresif yang telah memberikan inspirasi besar bagi para penerus gerakan revolusioner di Indonesia.[12]

Sebagai implikasi dari rapat dan pemogokan petani yang diorganisirnya, misalnya pemogokan buruh di perkebunan Nglungge pada 23 Februari 1919, di perkebunan Tegalgondo 10 April 1919 dimana lebih dari 20.000 orang mogok dan menuntut kenaikan *glidig*, penguasa kolonial menangkap Haji Misbach. Yang pertama diciduk adalah Wongsosoediro dan H. Bakri. Setelah itu terjadi penangkapan besar-besaran. Lebih dari 80 orang, termasuk hampir semua pemimpin kring Karangduren dan Klaseman.[13] Misbach dan para pemimpin pergerakan lainnya ditangkap di Surakarta. Misbach ditangkap pada tanggal 16 Mei 1920, dipenjarakan di Pekalongan selama 2 tahun 3 bulan. Pada tanggal 22 Agustus 1922 ia dibebaskan dan kembali kerumahnya di Kauman, Surakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, Misbach muncul sebagai propagandis PKI/SI merah dan menyatakan: "keselarasan antara paham Komunis dan Islam". Bulan Juli 1924, Misbach kembali ditangkap dan dibuang beserta istri dan tiga anaknya ke Penindi, Manokwari. Tuduhan atas Misbach adalah karena dia terlibat dan mendalangi pemogokan-pemogokan, teror-teror, dan sabotase di Surakarta dan sekitarnya. Meskipun, akhirnya tuduhan atas Misbach itu ditemukan palsu, karena saksi-saksi akhirnya mengaku telah memberi kesaksian palsu dengan bujukan bayaran dari Hardjosumarto, orang yang "ditangkap" bersama Misbach. Hardjosumarto sendiri mengaku telah menyebarkan pamflet bergambar palu arit dan tengkorak, membakar bangsal sekatenan, dan mengebom Mangkunegaran.

Di pengasingan di Manokwari, H.M. Misbach aktif berinteraksi dengan penduduk setempat dan dengan berbagai suku "pendatang" yang ada di kampung Borobudur-Manokwari, seperti suku Bugis, Makassar, dan Buton. Bahkan akhirnya komunitas ini mendirikan mesjid/musholla untuk beribadah. Di pengasingan, Misbach tetap menulis dan mengirim laporan perjalanannya

12 Susanto, Happy. "Komunisme Islam H. Misbach," dimuat dalam *Jurnal Perubahan Sedane*, November 2005, blog Happy Susanto "Menuju Islam Humanis", http://happy-susanto-files.blogspot.com/2007/10/komunisme-islam-h-misbach.html, diakses 29 Maret 2012.

13 Takashi Shiraishi. 1997. *Op.Cit*, hlm.213-217.

dalam suatu artikel berseri "Islamisme dan Komunisme". Majalah *Medan Moeslimin* di Solo kemudian memuat artikel Misbach tersebut.

3. Pemikiran Revolusioner H. Misbach

Di bagian sebelumnya, penulis telah mengemukakan bahwa Tuhan menganugerahkan umur yang pendek bagi Haji Misbach, yaitu hanya 50 tahun (1876-1926). Memang usianya sangat pendek jika dibandingkan dengan Rasul Muhammad SAW (63 tahun), namun sosok Misbach sangat produktif dalam berkarya. Seperti telah dikemukakan di bagian sebelumnya, di pengasingan, meskipun dalam kondisi yang sulit, Haji Misbach terus menulis artikel berseri dengan topik:"Islamisme dan Komunisme". Hal ini adalah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pembaca majalah *Medan Moeslimin* yang didirikannya bersama para koleganya. Artikel berseri itu dimaksudkan untuk memberikan kesadaran yang sangat penting bagi orang yang mengaku Islam dan komunis sejati. Misalnya, dalam artikel yang berjudul "Pamitan Saya"[14] Misbach mengawalinya dengan kritik sebagai berikut:

> "....bukannya mereka menggerakkan agama Islam yang sejati. Tetapi sebetulnya cuma di atas bibir saja. Betul mereka senantiasa menunjukkan ke Islamannya, akan tetapi dipilih aturan yang disukai oleh hawa nafsunya saja. Perintah yang tidak disukai mudah dibawakan saja, tegasnya mereka melawan atau menentang perintah Tuhan Allah. Takut dan cinta kepada kehendak syaiton yang dipertaruhkan dalam "kapitalisme" pada waktu sekarang ini, adalah tanda kejahatan.
>
> .....Sebaliknya bagi kawan kita yang mengaku dirinya sebagai seorang komunis, akan tetapi mereka masih suka mengeluarkan fikiran yang bermaksud akan melenyapkan agama Islam, saya berani mengatakan, bahwa mereka bukan komunis yang sejati. Di sisi lain, orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi tidak setuju adanya komunisme, saya berani mengatakan bahwa bukan Islam sejati, atau belum mengerti betul-betul tentang duduknya agama Islam".

14 Susanto, Happy. "Komunisme Islam H. Misbach," dimuat dalam *Jurnal Perubahan Sedane*, November 2005, blog Happy Susanto "Menuju Islam Humanis", http://happy-susanto-files.blogspot.com/2007/10/komunisme-islam-h-misbach.html, diakses 29 Maret 2012.

Dari pernyataan di atas, ada dua hal yang harus disimpulkan. Pertama, bagaimana Misbach memandang kejahatan kapitalisme. Kedua, bagaimana hubungan antara Islam dan komunisme dimana dua doktrin dasar tersebut menekankan pembebasan manusia dari belenggu pemerasan tenaga manusia oleh para kapitalis yang tidak manusiawi. Dan juga dua doktrin tersebut untuk menekankan semangat 'pembebasan' dari semua bentuk kolonial dari penjajahan asing.

Pendapat Misbach tentang Islam dan Komunisme sangat menarik untuk dikaji. Dia berpendapat bahwa baik ajaran Islam dan komunisme tidak bertentangan, karena dia berangkat dari keyakinan. Kedua ajaran tersebut menekankan perbaikan kondisi sosial dimana dan kapan pun selama eksploitasi dan penindasan masih banyak.

Misbach memang sangat mengagumi kepribadian Rasul Muhammad dan Karl Marx. Keduanya di mata Misbach adalah sumber inspirasi pergerakannya dalam meneguhkan fondasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan di bumi Indonesia. Pada Kongres PKI/SI Merah di Bandung dan Sukabumi pada awal Maret 1923, Misbach mengatakan:

> "Dengan mendasarkan pada Qur'an, pembicara berpendapat bahwa ada beberapa hal yang bersesuaian antara ajaran Qur'an dan Komunisme. Misalnya Qur'an menetapkan bahwa kewajiban setiap Muslim untuk mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia dan ajaran komunisme juga menekankan pentingnya pengakuan hak-hak asasi manusia". [15]

Hal ini menurut Misbach sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa kita harus berjuang melawan penindasan dan penghisapan. Ini juga salah satu sasaran komunisme. Alhasil, bagi Misbach, Karl Marx adalah pahlawan yang bisa membebaskan kaum buruh melalui penerapan materialis historis. Misbach melihat bahwa komunisme lahir dari tubuh penindasan kapitalisme itu sendiri, dan ia lahir untuk merobohkan kapitalisme yang disebutnya sebagai "hantu". Berikut adalah beberapa alasan yang diajukan Misbach tentang mengapa kita harus melawan kapitalisme, yakni karena kapitalisme penyebab kekacauan di dunia:

15 Shiraishi, Takashi. 1977. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926.* Grafiti Press.

1. Dunia kemiskinan disebabkan [oleh] adanya kapitalisme yang hanya berorientasi untuk memperoleh "keberuntungan" tanpa landasan moral. Kemiskinan sebab adanya pengisapan dan tindasan yang keluar dari kapitalisme. Manusia yang miskin menjadi rusak badannya, dan mudah dihinggapi rupa-rupa penyakit yang tumbuh dari badannya. Manusia yang telah menjadi miskin tersia-sia hidupnya, sebab tidak mempunyai rumah, pakaian dan makanan yang mencukupi. Dan manusia yang miskin banyak yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Implikasi dari hidup miskin, banyak yang terjerumus dalam kejahatan seperti menipu, mencuri, membegal, merampok dan sebagainya. Orang-orang perempuan lalu banyak menjual kehormatannya, ialah dengan menjadi pelacur dan lain-lain. Kejahatan itu sukar ditolong, kecuali kalau kapitalisme dilenyapkan dari dunia. Akan tetapi ikhtiar/usaha itu tidak berhasil.
2. Manusia dalam zaman kapitalisme menjadi rusak moralnya (budinya), meskipun mereka mendapat pengajaran yang tinggi. Sebab moralnya mudah dipermainkan oleh kapitalisme. Misalnya dalam prilaku berpakaian, minum dan makan yang sangat berlebihan. Bukti yang jelas, di Eropa berjuta-juta manusia mati, sebab buat kepentingan permainan oleh kapitalisme. Karena kaum modal (kapitalis) itu yang menjadi cita-citanya hanya menambahkan keuntungan dengan tidak mengingat beribu-ribu orang lain menjadi sengsara dan bahkan mati kelaparan. Dari itu segenap waktu, segenap tenaganya, bagi kaum buruh terpaksa dihabiskan untuk mencari keuntungan [bagi] kaum modal, sebab terikat oleh peraturannya kaum modal. Kaum modal memeras kaum buruhnya tidak memandang bangsa dan agama dan tidak ambil pusing. Kaum buruh dimana saja selain mereka mengorbankan tenaganya, fikiran dan agamanya dirusak juga oleh kapitalisme.

Pada akhirnya H.M. Misbach dikenal dengan julukan "Muslim Komunis" atau "Islam Komunis" karena pemikirannya dalam mengkaji Islam dinilai sangat moderat, radikal, dan berhaluan komunis. Ia adalah pejuang komunis yang ada dalam barisan Islam.[16] Tentang hal ini, H.M. Misbach sendiri mengatakan:

> "Kami sebagai orang Islam wajib dari jauh membuka topi buat tanda memberi terimakasih kepada Karl Marx yang menjadi penunjuk jalan, karenanya kami bisa mengetahui rintangan agama yang terbesar."

16 Susanto, Happy. "Komunisme Islam H. Misbach," dimuat dalam *Jurnal Perubahan Sedunia*, November 2005, blog Happy Susanto "Menuju Islam Humanis", http://happy-susanto-files.blogspot.com/2007/10/komunisme-islam-h-misbach.html, diakses 29 Maret 2012.

Kekaguman Misbach atas semangat ajaran Islam dan Komunisme untuk menentang penindasan dan perilaku diskriminatif penjajah Belanda, mempunyai kesamaan dengan pikiran Soekarno yang menggabungkan tiga ajaran yakni Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Soekarno mengutip konsep nasionalisme (kebangsaan) dari pendapat Ernest Renan yang pada tahun 1882 telah mengemukakan pendapatnya tentang paham "bangsa" itu. "Bangsa", menurut Renan adalah suatu nyawa, suatu azas akal, yang terjadi dari dua hal. Pertama, rakyat harus bersama-sama menjadikan satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan jenis (ras), bukan bahasa, bukan agama, bukan persamaan kebutuhan, dan bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan "bangsa" itu. Pada awalnya, Soekarno mempertanyakan, dapatkah dalam tanah jajahan pergerakan Nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakikatnya tiada bangsa, dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perjuangan internasional? Kemudian Soekarno dengan tekun mempelajari dan mencari hubungan antara ketiga sifat itu untuk membuktikan bahwa tiga sumber itu dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain. Juga untuk membuktikan bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama, bahkan menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak-taufan yang tidak dapat ditahan terjangannya. Seperti ditegaskan oleh Soekarno, azas-azas nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi "rochnya" pergerakan-pergerakan di Asia. Rochnya pula dari pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini. Dalam pandangan Soekarno, "Kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita: Indonesia-Merdeka!"[17]

Haji Misbach berupaya keras mendekatkan pesan Islam setara dengan pesan yang diajarkan dalam komunisme. Dalam ruang sosial yang lebih luas, posisi H.M. Misbach sangat unik. Ia berbeda dengan kebanyakan pengikut kelompok Islam garis "kanan" (fundamentalis) yang menuduh bahwa komunisme itu ateis (tidak percaya Tuhan dan anti-agama), dan melakukan sikap radikal dengan jalan pertumpahan darah. Dalam konteks pemikiran garis "kiri" (Marxis). H. Misbach berbeda dengan kaum komunis lainnya,

17 Baca Soekarno. 1965. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta. hlm. 2-3.

seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan lain-lainnya. Perpecahan dalam tubuh SI dikarenakan ada beberapa kelompok yang menolak posisi agama lebih dipentingkan dalam perjuangan keadilan dan kemanusiaan pada masa pra-kemerdekaan. H. Misbach tetap berpegang pada keyakinan Islam, dan oleh karena itu tidak mau menjadi seorang ateis. Agak sulit bersikap seperti Haji Misbach ini karena biasanya kaum komunis itu melepaskan diri dari ikatan agama. Sementara H. Misbach tetap melakukan sholat, dan sudah melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks politik SI saat itu, bahwa Misbach berada dalam posisi "moderat atau di tengah".

Dalam berbagai media dan forum, Haji Misbach berusaha meyakinkan banyak orang Muslim, bahwa ada banyak kecocokan antara ajaran Islam dan Komunisme. Haji Misbach banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah keadilan dan kemanusiaan, dan dapat dikaitkan dengan dengan pemikiran Karl Marx. Ia tidak suka dengan simbol-simbol agama yang dimaknai secara normatif. Misalnya dalam perilaku berkopiah. Haji Misbach lebih suka menggunakan penutup kepala model Jawa. Dia mengatakan bahwa tak ada gunanya menggunakan simbol-simbol agama dalam berpakaian kalau ternyata masih menyimpan kebusukan pemikiran dan sikap keagamaan yang sempit. Bagi Misbach yang penting adalah "substansi" dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan praktis. Karena, baginya, identitas Islam tidak memberikan jaminan, bahwa seorang Muslim telah melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Indikasi yang dipergunakannya adalah sejauh mana tujuan-tujuan agama telah dilaksanakan, dan itu tidak tergantung pada simbolis dan pemikiran sempit. Misbach juga mencoba mensintesiskan pemikiran/paradigma Islam dengan paradigma Marxis, karena ia mempunyai keinginan kuat untuk menyiapkan revolusi Indonesia. Dengan kata lain, keberhasilan Haji Misbach tidak dilakukan secara simbolis, sempit dan normatif. Jadi, sangat disayangkan bahwa nama Haji Misbach sering dilupakan dalam catatan sejarah perjuangan rakyat Indonesia, seperti halnya sosok Tan Malaka. Jika ada sekelompok manusia yang menyatakan siap berjuang secara revolusioner, maka sosok Haji Misbach jauh lebih siap

melakukan praksis dari pemikirannya yang revolusioner itu dengan damai. Hal ini dapat menjadi suatu "inspirasi" bagi generasi muda di masa depan.

Sebelum meninggal tahun 1926, Haji Misbach mengeluarkan artikel terakhirnya yang berjudul:"Nasehat" dan diterbitkan di Majalah *Medan Moeslimin* pada tanggal 1 April 1926. Tulisan ini adalah pandangan singkatnya tentang Islamisme dan Komunisme. Dia mengatakan dalam awal tulisannya,

> "Hai sudara-saudara ketahuilah! Saya seorang yang mengaku setia pada agama dan juga masuk di dalam lapangan pergerakan komunis, dan saya mengaku tambah terbukanya fikiran saya di lapangan kebenaran atas perintah agama Islam itu, tidak lain ialah dari sesudah saya mempelajari ilmu komunisme, hingga sekarang saya berani mengatakan juga, bahwa kacaunya keselamatan dunia ini, tidak lain hanya dari kejahatan kapitalisme dan imprialisme yang berbudi busuk. Sesudah saya mendapatkan pengetahuan yang demikian itu, dalam hati saya selalu berfikir-fikir tentang berhubungan dengan fasal agama dan juga ilmu komunisme yang saya pelajari, bahwa kedua ajaran tersebut pada prinsipnya menentang keras penindasan dan penghisapan manusia yang dilakukan oleh kapitalisme. Oleh sebab itu kita wajib membasmi kapitalisme, karena agama berdasar sama rata, sama rasa, takluk sama Tuhan yang maha kuasa, hak persamaan untuk segenap manusia dalam dunia. Karena tinggi dan hinanya manusia hanya tergantung atas budi kemanusiaan. Dan budi itu ada tiga bagian ialah:
>
> 1. Budi kemanusiaan: mempunyai perasaan atas keselamatan umum.
> 2. Budi binatang: hanya mengejar keselamatan dan kesenangan diri sendiri.
> 3. Budi syaitan: selalu mendorong membikin rusak manusia dan keselamatan umum".[18]

Nasihat Misbach dalam konteks di atas sesungguhnya ditujukan kepada kawan-kawan seperjuangannya, bahwa jika masuk dalam lapangan pergerakan itu, haruslah dengan *berasas agama* yang hak, agar supaya jangan sampai mendapat rugi dalam zaman perlawanan ini, melainkan untung dalam kemenangan atau untung dalam akhirat. Jika perlu, korbankan harta benda, dan jiwa untuk mengejar kebenaran dan keadilan tentang pergaulan hidup dalam dunia ini.

18 Ibid, hlm. 3-4, 10.

Dari uraian mengenai pokok-pokok pemikiran Haji Misbach di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa, titik pijak pemikiran Haji Misbach berangkat dari soal "*tauhid*". Bagi Misbach konsep *tauhid* sangat penting, sebagai fondasi keberislaman seseorang-dalam bentuk gerakan *emanative* di wilayah praksis. Dari *tauhid normative* dikembangkan menjadi *tauhid pembebasan*. Dia berjuang dalam konfrontasi dengan penjajah Belanda dilandasi dengan pemikiran progresifnya ini. Inti dari *tauhid pembebasan* ini, menurut Haji Misbach, adalah bahwa umat manusia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dalam bingkai satu keadilan dan kemanusiaan, tanpa perbedaan (diskriminatif) baik dalam ras, warna kulit dan status sosial. Dalam kata lain, eksploitasi ras kulit putih (Belanda) atas ras berwarna baik coklat, kuning, hitam, dan sebagainya adalah tidak legal (tidak sah), karena bertentangan dengan fitrah manusia yang diberikan Tuhan ialah memperoleh persamaan untuk sama-sama menikmati kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi dengan prinsip tauhid, manusia diajarkan bagaimana memahami kenyataan dalam kesatuan bersama Tuhan yang dapat berimplikasi pada usaha untuk mempersatukan umat manusia dalam bingkai satu kesatuan *keadilan dan kemanusiaan*. Dengan kata lain, "keesaan Tuhan" mempunyai implikasi pada keesaan umat manusia.

Pendapat Haji Misbach di atas didukung oleh pendapat Asghar Ali Engineer (dari India), seorang penggagas *teologi pembebasan Islam*. Menurut Asghar, *tauhid* adalah inti dari teologi Islam yang biasanya diartikan dengan keesaan Tuhan. Teologi pembebasan, berbeda dengan teologi tradisional (normatif), menafsirkan tauhid bukan hanya sebagai keesaan Tuhan, namun juga sebagai kesatuan umat manusia (*unity of mankind*) yang tidak akan benar-benar terwujud tanpa terciptanya masyarakat tanpa kelas (*classless society*).[19]

Pendapat Asghar hampir sama dengan pikiran Haji Misbach. Mereka sama-sama menghendaki masyarakat tanpa kelas dengan prinsip *tauhid*. Jika dirangkai dalam format sosio-religius, pemikiran H. Misbach itu disebut dengan istilah masyarakat *tauhid-komunis*, yakni tatanan masyarakat yang tidak menghendaki adanya berbagai diskriminasi dalam bentuk warna kulit, asta, dan kelas. Masyarakat tanpa kelas adalah cerminan dari model tatanan

[19] Lihat Asghar Ali Engineer. 2000. *Islam dan Teologi Pembebasan* (Terj.). Penterjemah Agung Prihantoro. Pustaka Pelajar, Cetakan kedua, hlm. 11.

ini. Umat manusia benar-benar satu, tidak dibedakan karena kedudukan sosial, karena jenis kelamin, karena warna kulit, dan sebagainya. Jadi intinya, masyarakat *tauhid-komunis* tidak mengenal bentuk eksploitasi dan penindasan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menekankan sikap *tauhid* bagi orang-orang tertindas dalam surat *Al-Qashos* ayat 5 yang berbunyi:

> "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami tegakkan kedudukan mereka di muka bumi." Dari perspektif ini, Islam adalah agama pembebasan, dan menjadikan kaum tertindas sebagai tujuan perjuangan akhir dalam Islam. Kaum tertindas tidak bisa dilecehkan, karena ketika mereka bangkit melakukan perjuangan, maka Tuhan tentu bersama-sama dengan mereka".

4. Implikasi Pandangan Haji Misbach terhadap Organisasi Masyarakat di Manokwari Hari Ini

Haji Misbach yang wafat di Manokwari pada tahun 1926, telah dianugerahi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, karena dia telah berjuang melalui pikiran (tulisan-tulisan) dan fisik dalam menentang praktik penindasan dan perilaku diskriminatif kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Implementasi semangat kebangsaan (*nasionalisme*) dan perjuangan menentang kolonial Belanda dilancarkannya mulai dari Jawa (Solo, Semarang, Pekalongan, Bandung, Sukabumi, Surabaya) sehingga akhirnya diasingkan dengan keluarganya dan wafat di kota Manokwari-Papua. Meskipun dia sendiri dan keluarganya -istrinya dan anak-anaknya- akhirnya menjadi korban praktik penindasan Belanda baik secara politik, ekonomi maupun sosial, semangat dan kegigihan Haji Misbach patut menjadi contoh bagi generasi muda kita.

Kota Manokwari[20] yang luasnya 18.746 hektar, sekarang berpenduduk 150.000 orang (sensus tahun 2010). Komposisi pemeluk agama Katolik (62 persen); Islam (33 persen); Protestan (4,5 persen); Hindu (0,1 persen), dan Budha (0,09 persen) (*Manokwari dalam Angka, 2010*). Kota Manokwari

20 Kota Manokwari menjadi kota pemerintahan pada tanggal 8 November 1898. Residen pertama yang dilantik ialah L.A.Van Oosterzee.

mempunyai sejarah yang penting bagi masyarakat Kristen di Papua, karena pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang penginjil (*zending*) dari Jerman, C.W. Ottow dan Johan Gottlob Geisslerr tiba di Pulau Mansinam, yang luasnya sekitar 410 hektar. Sebelum ke Manokwari, dua penginjil tersebut datang dan minta izin kepada Sultan Tidore untuk menyebarkan agama Kristen di Papua. Saat itu, pertengahan abad ke-18, Papua Barat termasuk Sorong dan Manokwari merupakan koloni/wilayah kekuasaan Sultan Tidore. Atas jasa baik dari Sultan Tidore, dua penginjil tersebut disertai pasukan Kerajaan Tidore berlayar dari Maluku Utara ke Manokwari dan tiba di Pulau Mansinam. Setelah pengabdiannya yang panjang sebagai *zending* yang membina umat Kristiani di Pulau Mansinam dan Manokwari, Ottow meninggal pada tanggal 9 November tahun 1962, dan temannya Geisslerr pulang ke Jerman. Makam Ottow terletak di belakang GKI Jemaat Elem Kwawi (Gambar 2).

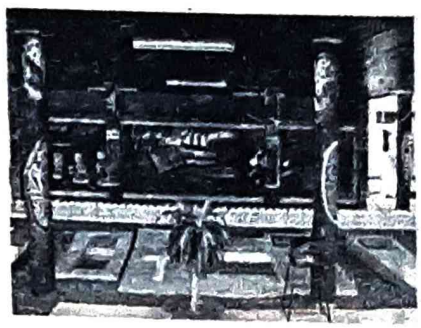

Gambar 2: Lokasi makam Carl Wilhelm Ottow yang wafat pada 9 November 1962 di Manokwari. (Foto diambil pada 31 Agustus 2012, arsip).

Ditinjau dari pemikirannya yang revolusioner, makna kehadiran Haji Mohamad Misbach tahun 1924 di tanah Papua Barat, kota Manokwari sesungguhnya sangat penting. Penulis mewawancarai beberapa tokoh Ormas (Organisasi Masyarakat) seperti Majelis Ulama Papua, Muhammadiyah, dan tokoh Ormas kedaerahan seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Buton, Jawa, serta Ormas Kristen, Budha, dan Hindu untuk mengetahui pendapat mereka tentang pemikiran Haji Misbach yang revolusioner tersebut. Sayangnya, seperti telah disinggung sebelumnya, hasil wawancara memperlihatkan bahwa tidak ada yang merasa telah bersentuhan

langsung dengan Haji Misbach. Bahkan banyak yang tidak mengenal sosok H.M. Misbach. Secara ringkas, bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Lokasi makam Haji Misbach yang terletak di Penindi (dekat kantor RRI), kota Manokwari, oleh masyarakat awam hanya dikenal sebagai makam umum. Sampai tahun 1980-an, daerah pemakaman tersebut dikenal sebagai "kuburan Cina". Kenyataan ini diperkuat oleh beberapa informan.[21]
2. Walaupun pokok-pokok pikiran Haji Misbach yang brilian dalam perjuangan menghilangkan sikap eksploitasi dan penindasan oleh pihak kolonial, menghargai pluralisme (kebhinnekaan), keadilan, dan menghapuskan sikap diskriminatif antar manusia baik kulit putih dan berwarna, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan pembebasan untuk menuju kemerdekaan dari penjajah dan serta mengisi kemerdekaan dengan perhatian pada sektor pendidikan, pelayananan kesehatan serta pembangunan infrastruktur, telah dimuat dalam berbagai koran dan majalah, pada praktiknya buah pikiran Haji Misbach kurang dikenal di antara ormas-ormas yang ada di Manokwari. Masih belum dikenalnya buah pikiran Haji Misbach oleh tokoh-tokoh Ormas tersebut, barangkali adalah karena jangka waktu sejak wafatnya Haji Misbach (tahun 1926) sampai hari ini sudah sangat lama.

Dengan kata lain, sosok Haji Misbach masih perlu diperkenalkan kembali. Begitu pula dengan sejarah perjuangan dan buah pemikirannya Dalam hal *situs* makam, pemerintah daerah Papua Barat dan tokoh-tokoh Islam (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang bergabung dalam MUI) mempunyai kewajiban moral untuk mensosialisasikan keberadaan makam Haji Misbach (tokoh perintis kemerdekaan nasional) kepada masyarakat Manokwari. Ada beberapa hal dari pemikiran Haji Misbach yang menurut penulis penting untuk diangkat dan dikontekstualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Manokwari hari ini, khususnya dalam kehidupan antar-umat beragama. Hal-hal tersebut adalah:

21 Wawancara dengan Mecky Sagrim, Dosen Peternakan dari Universitas Papua dan Haji Ismail Yanu, Ketua Gerakan Merah Putih pada tanggal 30 Agustus, 2012.

4.1 *Nilai kerukunan dalam kehidupan beragama*[22]

Kerukunan adalah esensi ajaran agama. Karena di dalam kerukunan, umat beragama dapat menghormati dan menghargai praktik ibadah pemeluk agama lain. Sikap menghormati adalah cerminan pengamalan konsep *tauhid* bagi pemeluk masing-masing agama. Penghayatan dan pengamalan nilai kerukunan antara umat beragama sebenarnya bersumber juga dari pemikiran Haji Misbach mengenai "*tauhid pembebasan*" yang mengatakan:

> ".....agama berdasar sama rata, sama rasa, takluk sama Tuhan yang maha kuasa, hak persamaan untuk segenap manusia dalam dunia. Karena tinggi dan hinanya manusia hanya tergantung atas budi kemanusiaan. Dan budi itu ada tiga bagian ialah:
>
> 1. Budi kemanusiaan: mempunyai perasaan atas keselamatan umum.
> 2. Budi binatang: hanya mengejar keselamatan dan kesenangan diri sendiri.
> 3. Budi syaitan: selalu mendorong membikin rusak manusia dan keselamatan umum".[23]

Dengan kata lain, Haji Misbach menghargai *pluralisme* (kemajemukan) dalam masyarakat, menjaga toleransi, dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama, serta tidak bersikap diskriminatif, tetapi harus melakukan sikap menghormati nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sepertinya pandangan Haji Misbach tentang pluralisme atau kemajemukan tersebut dipunyai pula oleh umat Muslim di Manokwari. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Hakim Musa, Ketua MUI Papua Barat[24], melaksanakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama harus berangkat dari

22 Kerukunan hidup umat beragama adalah salah satu dari Trilogi Pembangunan sebagaimana tertera dalam Pola Umum Pelita Ketiga (Alamsyah 1981:76). Kerukunan hidup antara umat beragama di Indonesia wajib dibina dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah, yakni dengan melibatkan pimpinan agama baik Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, karena kerukunan hidup yang semakin mantap di antara sesama umat beragama berarti ikut serta meningkatkan tercapainya stabilitas dan ketahanan nasional yang dinamis. Kerukunan yang hendak dicapai adalah: 1) kerukunan intern umat beragama; 2) kerukunan antar umat beragama; dan 3) kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

23 Lihat Soekarno. 1965. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta. hlm. 3-4, 10.

24 Tokoh Muslim seperti Haji Abdul Hakim Musa (58 tahun), kelahiran Fak-Fak, Papua dan sekarang sebagai ketua Majlis Ulama Indonesia, Papua Barat dan Haji Nafrul Hutapea (Ketua Muhammadiyah), Manokwari dan Sekretaris MUI Papua Barat.

menghargai doktrin 'pluralisme' (kemajemukan) manusia, karena ini kodrat Allah menciptakan manusia yang beraneka ragam baik dalam ras, warna kulit dan beragama di bumi ini. Dalam kaitan itu, ia berpendapat, Indonesia dibangun dari semangat "Bhinneka Tunggal Ika", jadi kita harus menjunjung *pluralisme* baik suku, bahasa, warna kulit, dan beragama. Bagi Abdul Hakim Musa, Pancasila sebagai idelogi bangsa adalah representasi ideal tentang **nasion** (kehidupan berbangsa dan bernegara) dan kehidupan demokrasi. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah demokrasi yang didasarkan pada hak-hak sipil, antara lain hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berserikat, dan berkumpul serta mengemukakan pendapat, hak beragama, hak untuk mendapat pendidikan baik, hak untuk memberikan ekspresi dalam berkebudayaan dan jaminan sosial bagi kelompok-kelompok, baik mayoritas dan minoritas.[25]

Sayangnya, menurut Ketua MUI tersebut, hak-hak tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Misalnya dalam hal hak beragama. Pada tahun 1999 umat Islam ingin mendirikan bangunan Mesjid Raya dan Islamic Center di kota Manokwari, namun ditolak oleh masyarakat Kristen, khususnya oleh *BKAG* (*Badan Kerjasama Antar Gereja*) sehingga harus ditunda sampai sekarang. Hal ini, menurut ketua MUI, adalah melanggar hak-hak sipil umat Islam, karena, menurut Abdul Hakim Musa, di Papua Barat ada peraturan dan kearifan lokal di mana setiap pemeluk umat beragama mempunyai kebebasan untuk mendirikan tempat ibadahnya. Bagi Hakim Musa, toleransi dan kerukunan umat beragama di Papua Barat harus dijaga, karena di provinsi ini komposisi umat beragama adalah 51 persen umat Islam dan 49 persen umat Kristiani dan kelompok minoritas lain seperti Budha dan Hindu

Di sisi lain, Hakim Musa melihat bahwa pimpinan adat, baik dari suku Madachan, suku Doreri, maupun suku Arfak, merasa tidak keberatan atas usulan untuk mendirikan Mesjid Raya dan Islamic Center, karena mereka mendasarkan diri pada menjaga toleransi, kerukunan, dan saling menolong di antara masyarakat adat yang sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat lokal Papua[26].

25 Baca Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (editor). 2009. *Menjaga Rumah Kebangsaan: Jejak Langkah Politik Taufik Kiemas*. Jakarta: Q Communication, hlm. 257.

26 Wawancara 29 Agustus 2012.

Pendapat bahwa karena kota Manokwari secara mayoritas dihuni oleh masyarakat Kristen dan karena sejak tahun 1855 pendeta Ottow dan Geisslerr telah datang dari Jerman ke Pulau Mansinam untuk menyebarkan Injil dan nilai-nilai Kristiani, maka kota Manokwari kemudian dapat dikatakan sebagai kota Injil ditolak oleh Hakim Musa. Pendapat Pdt. Shirley, kelahiran Ambon (51 tahun) bahwa dengan menjaga keberadaan Pulau Mansinam sebagai kiblat dan altar yang kudus bagi umat Kristiani sudah mencerminkan penghormatan pada nilai-nilai *pluralisme* dan toleransi[27] dibantah oleh Ketua MUI tersebut. Menurut pandangannya, toleransi sudah lama diberikan oleh umat Islam, yaitu walaupun ketika itu tanah Papua berada di bawah kontrol Kerajaan Islam Tidore yang berpusat di Maluku Utara, permohonan Ottow dan Geisslerr untuk mengadakan misi *zending* diberikan, dan bahkan diantar oleh pasukan kerajaan Tidore sampai ke Pulau Mansinam dengan selamat (Gambar 3). Anggota pasukan tersebut juga membantu mendirikan tempat tinggal bagi kedua misionaris tersebut di Pulau Mansinam. Dengan kata lain, kontribusi masyarakat Islam terbilang besar dan sudah sejak awal dalam menciptakan kerukunan dan toleransi umat beragama di Manokwari.

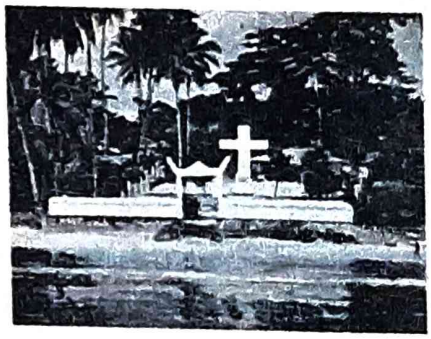

Gambar 3: Pulau Mansinam dan tanda salib yang didirikan pada tahun 1999 terlihat dari depan laut (foto pribadi, diambil pada bulan Agustus 2012).

Dalam perkembangannya, terutama di daerah Fak-Fak, jika komunitas Islam mendirikan mesjid, maka komunitas Kristen turut berpartisipasi dengan memberikan kayu dan paku. Sebaliknya, jika komunitas Kristen mendirikan gereja, komunitas Islam juga membantu dengan memberikan dukungan tenaga

27 Wawancara dengan Pdt Shirley Parinussa di kantor BKAG (Badan Kerjasama Antar Gereja) di Kantor Dinas Agama, di Kabupaten, Manokwari pada tanggal 30 Agustus 2012.

dan material, sehingga bangunan gereja itu selesai. Semangat bekerjasama dan saling mendukung antar masyarakat adalah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Hal ini pun sesuai dengan semangat toleransi, kerukunan dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi, penolakan dan penundaan pendirian Mesjid Raya dan Islamic Center oleh komunitas Kristiani yang terjadi akhir-akhir ini dinilai lebih dilandasi oleh kepentingan yang bersifat *politis*. Menurut Hakim Musa, Ketua MUI Papua Barat tersebut, ada dua faktor yang mendorong penolakan tersebut[28]. Pertama, ialah faktor internal, bahwa umat Kristiani digerakkan oleh para pendeta yang berasal dari luar Papua, seperti dari Ambon (Maluku), Kei (Maluku Tenggara), Toraja (Sulawesi Selatan) dan Batak (Sumatra Utara). Mereka berhasil memprovokasi komunitas Kristen lokal untuk menolak pembangunan mesjid raya. Kedua, pengaruh faktor eksternal. Banyak gereja besar dari luar Papua yang didirikan di kota Manokwari, seperti Gereja Pantekosta, Yehova dan Bethel, dan hal ini mempunyai implikasi terhadap pergulatan untuk memperoleh wibawa dan legitimasi dalam membina umat, terutama di antara elit pendeta dari persekutuan Gereja Papua dan persekutuan gereja besar dari luar.

Pendapat hampir serupa dikemukakan oleh Abdul Hakim Ahmad[29]. Menurut Abdul Hakim Ahmad, pandangan Pdt Sherley dan *BKAG* bukanlah pendapat mereka sebagai seorang rohaniawan. Diakui bahwa memang ada kekhawatiran dari komunitas Kristen dengan adanya Mesjid Raya dan Islamic Center, bahwa mungkin terjadi 'Islamisasi' di Manokwari. Menurutnya, kekhawatiran tersebut sangat berlebihan, karena dalam pandangan Abdul Hakim Ahmad, yang dapat menyatukan orang Papua adalah "adat" bukan agama.[30] Dalam pengamatan Abdul Hakim Ahmad, perkembangan dan pendirian tempat ibadah, khususnya bangunan gereja di Manokwari dan pulau Mansinam sangat pesat sekali. Bahkan, seperti telah disinggung di atas, kota Manokwari dalam rencana peraturan daerah (Perda) hendak dijadikan "Kota Injil". Program utamanya adalah pelaksanaan "Syariat Kristiani" untuk dilaksanakan dalam kehidupan umatnya. Selain itu adalah untuk mencegah dan mengurangi beredarnya minuman keras (*MIRAS*) yang biasa dikonsumsi

28 Wawancara 29 Agustus 2012.
29 Abdul Hakim Ahmad adalah anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Dia lahir di Kabupaten Kaemana.
30 Wawancara 30 Agustus 2012.

oleh banyak warga masyarakat Papua. Implikasi dari minuman tersebut memang sangat membahayakan moral dan mendorong berkembangnya kejahatan, baik tindakan kekerasan, pencurian maupun asusila. Akan tetapi, dalam konteks ini, Abdul Hakim Ahmad mempertanyakan apakah Pemda Manokwari bisa benar-benar menjaga dan menerapkan Syariat Kristiani terhadap warganya yang beragama Kristen? Di samping itu, apakah Pemda dapat secara tegas menindak dan memberikan *sanksi* hukum kepada umat Kristiani yang tidak melaksanakan ibadah ke gereja setiap minggu, atau melakukan pelanggaran, seperti mencuri, minum minuman keras dan berbuat berzina dengan perempuan yang bukan muhrimnya? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Papua Barat, yang dari pengalaman kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh pada bulan September 2011, melihat bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh masih dirasakan berat dan bersifat *diskriminatif* terhadap perempuan. Selain itu, ia juga mempertanyakan, apakah Pemda dan DPRD Papua Barat sudah dapat membuat draft Perda Syariah Kristen, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya, serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran? Menurut pendapat Abdul Hakim, penerapan Syariat Injil di Manokwari masih memerlukan waktu yang panjang dan harus dipikirkan lebih serius dan matang, karena Perda Syariat Islam di Provinsi Aceh yang sudah lebih jelas pun masih belum terealisir secara baik[31].

H. Ismail Yanu[32] sebagai Ketua Adat Serui juga tidak setuju jika "Manokwari dijadikan kota Injil" karena alasan historis tentang dua *zending* Jerman Ottow dan Geisslerr yang datang ke Pulau Mansinam pada tahun 1855[33]. H. Ismail berpendapat bahwa sebaiknya Kota Manokwari tetap menjadi kota kebangsaan yang tidak eksklusif atau hanya untuk golongan tertentu. Kota ini harus bersifat *pluralistis* dan majemuk, artinya semua golongan, baik Kristen, Islam, Hindu, maupun Budha mempunyai hak-hak yang sama untuk dilindungi dan

31 Wawancara, 30 Agustus 2012.

32 Haji Ismail Yanu (78 tahun) lahir pada 28 Oktober 1934 di pulau Serui. Dia adalah Ketua Gerakan Merah Putih. Dia merupakan pejuang lapangan pro-integrasi Irian Jaya ke pangkuan Indonesia. Haji Ismail Yanu pernah terlibat aktif dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia di perbatasan Kalimantan dengan Sarawak dan Sabah. Berkat pengalaman dan kesetiaan kepada Republik Indonesia, pemerintah telah memberikan tanda jasa dan bintang. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1984 BAKN memberikan kepangkatan pegawai IIIC dengan pensiun sebesar Rp 1.200.000 setiap bulan.

33 Wawancara 2 September 2012.

dihormati dalam mengembangkan tempat ibadah dan mengurus umatnya, di samping tentunya memajukan kota. Haji Ismail, yang mengakui bahwa dirinya adalah seorang bekas pendeta yang menjadi Muslim pada tahun 2000 dan telah melaksanakan ibadah haji ke Mekkah tahun 2006, menyatakan bahwa pendeta Kristen, baik yang berasal dari Papua sendiri maupun yang berasal dari luar Papua, harus menghormati semangat "pluralisme" yang sudah menjadi ciri kota Manokwari dan Papua Barat pada umumnya. Mereka tidak boleh mengklaim bahwa masyarakat Kristen lah yang mempunyai sejarah di kota Manokwari, karena Republik Indonesia bersama tentara nasional Indonesia (TNI) dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya membebaskan Irian Jaya, sehingga Papua dan Papua Barat yang dulu bernama Irian Jaya dapat merdeka dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam konteks Indonesia merdeka, semua kota di Papua, termasuk kota Manokwari harus terbuka luas bagi seluruh warganegara Indonesia dengan tidak membedakan suku, agama, kepercayaan, serta asal usul. Menurut Haji Ismail Yanu, semangat pengamalan Bhinneka Tunggal Ika yang dikemukakan oleh Bung Karno dalam kaitan dengan sejarah pembentukan Indonesia adalah sebagai berikut. "Indonesia pada dasarnya adalah sebuah ide, bukan batas territorial wilayah. Ide tentang nasib orang di Nusantara yang dijajah oleh Belanda yang ingin membebaskan diri dari kekuasaan kolonial Belanda. Orang-orang itu dipersatukan oleh ide tentang Indonesia."[34] Bahkan, Haji Ismail Yanu mengkaitkan fakta sejarah dibuangnya Haji Misbach ke kota Manokwari tahun 1924 pada masa kolonial Belanda sebagai indikator bahwa Provinsi Papua, yang dulu bernama Irian Jaya, adalah bagian integral dari wilayah Indonesia sekarang. Selain itu, dalam pandangannya, Papua yang dulu bernama Irian Jaya sudah dimerdekakan oleh pemerintah Indonesia dengan perjuangan fisik dari kolonial Belanda. Jadi, klaim masyarakat lokal untuk 'merdeka' dari Indonesia, menurut pendapatnya, tidak legal. Haji Ismail Yanu, Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Manokwari (Gambar 4) yang mempunyai anggota sekitar 5.000 orang, beranggapan bahwa kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan Pemerintah Belanda harus tetap dipertahankan, yaitu bahwa Papua berdaulat dan merdeka di bawah pemerintahan Indonesia. Apalagi sekarang

34 Baca Imran Hasibuan dan Muhammad Yamin (ed). 2011. *Empat Pilar untuk Satu Indonesia: Versi Kebangsaan dan Pluralisme Taufik Kiemas*. Jakarta: Gramedia, hlm. 197.

pemerintah pusat telah memberikan status OTSUS dan dana trilyunan rupiah kepada Provinsi Papua Barat dan Papua. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para pemimpin Papua, baik Gubernur, Walikota, Bupati maupun Camat, untuk tidak bisa bekerja keras dan mensejahterakan rakyat Papua dalam bingkai OTSUS. Jika masih ada rakyat yang menuntut karena merasa belum merasa sejahtera, menurutnya, yang harus disalahkan adalah pimpinan formal yang mayoritas dipegang oleh orang Papua tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana dana OTSUS trilyunan dan APBD provinsi dan kabupaten telah dipergunakan? Bagi Haji Ismail Yanu, pimpinan harus bertanggung jawab, karena mereka mendapatkan *mandat* (kepercayaan) untuk mensejahterakan rakyatnya. Mereka juga harus mempunyai komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program-program pembangunan buat mensejahterakan bagi masyarakat dan tidak boleh berbohong pada rakyatnya. Jika akhirnya rakyat menuntut referendum/merdeka dari Indonesia, ini merupakan kesalahan para pimpinan formal, adat dan agama di Papua, karena mereka lalai menjalankan mandat yang dipegangnya dan tidak amanah.

Gambar 4: Bapak Haji Ismail YANU yang berbaju merah adalah Ketua Umum Gerakan Merah Putih di Jalan Pahlawan, kota Manokwari. Foto ini diambil pada 3 September 2012.

Dalam konteks historis yang demikian, sikap eksklusivisme dari mayoritas Kristen melalui penolakan pendirian Mesjid Raya dan Islamic Center pada tahun 1999, bagi Haji Ismail Yanu, merupakan sikap intoleran dalam mengamalkan kerukunan kehidupan beragama. Akan tetapi H. Ismail Yanu melihat bahwa hal itu terjadi karena mereka *terprovokasi* oleh elit Kristen

dan pendeta Kristen yang berasal dari luar, baik dari Ambon, Batak, Toraja, maupun Kei (Maluku Tenggara). Sebaliknya, H. Ismail Yanu yakin bahwa tokoh-tokoh adat Papua, baik Madachan, Arfak, Doreri, maupun Serui, adalah orang-orang yang sangat *toleran* dan menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama sebagaimana tercermin dalam beberapa forum diskusi yang dilakukan H. Ismail Yanu bersama dengan tokoh-tokoh adat tersebut.

Doktor Mulyadi Djaya (44 tahun), Dosen di Universitas Papua[35], sangat kecewa atas penolakan umat Kristiani terhadap rencana didirikannya Mesjid Raya dan Islamic Center, karena bagi Mulyadi, kota Manokwari adalah kota kebangsaan yang harus terbuka untuk pembangunan fisik dan rohani bagi seluruh komunitas penduduk Papua Barat. Mengacu pada peraturan Kementerian Agama, ia juga menganggap dengan dijadikan kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, pembangunan Mesjid Raya di suatu provinsi adalah suatu kewajaran, jika bukan malah suatu keharusan sebagai simbol representatif kaum Muslimin. Menurut Mulyadi, yang juga pengurus organisasi Muhammadiyah, Mesjid Raya dan *Islamic Center* adalah simbol bagi keberadaan Islam sebagai agama yang pertama kali datang ke Papua ketika wilayah ini berada di bawah proteksi Sultan Tidore pada abad 16 sampai abad ke-18 Masehi. Seperti pendapat Hakim Musa, Ketua MUI dan Abdul Hakim Ahmad, anggota DPRD, Mulyadi juga mengingatkan bahwa kedatangan Ottow dan Geisslerr untuk melakukan *zending* agama Kristen ke Manokwari adalah berkat dukungan penuh Sultan Tidore yang mengutus pasukan kerajaan untuk mengantar mereka langsung ke tempat tujuan. Hal ini, menurut Mulyadi, mencerminkan jiwa besar dan sikap toleransi umat Islam terhadap penyebaran Kristen di Manokwari. Namun, dalam pengamatannya, para pimpinan gereja tidak pernah menyebutkan peran penting atau keterlibatan sejarah Sultan Tidore dan pasukannya, dan juga keberadaan *artefak* sumur dan makam bekas peninggalan kaum Muslimin di Pulau Mansinam dalam peringatan "masuknya Injil di Manokwari" setiap tanggal 5 Februari di Pulau Mansinam. Ia melihat toleransi dan kerukunan dipraktikkan dengan sangat baik antar umat beragama hanya antara periode tahun 1980-an sampai

35 Di sini Mulyadi Djaya mewakili tokoh Ormas dari Muhammadiyah. Ormas ini di kota Manokwari banyak melakukan aktifitas di sektor pendidikan dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Islam, sampai Perguruan Tinggi.

awal 1990-an. Para pemimpin dan umatnya, jika merayakan hari-hari besar keagamaan saling berkunjung ke rumah masing-masing, khususnya pada hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal. Kondisi tersebut sekarang sudah berubah. Menurut Mulyadi, praktik kerukunan mulai bergeser setelah Reformasi 1998 dan penerapan Otonomi Khusus (OTSUS) Papua tahun 2001. Implikasi dari praktik Otsus tersebut adalah terjadinya pergeseran posisi/jabatan penting yang dulunya dipegang oleh pendatang (dari Jawa, Bugis, Makassar dan Buton), akhirnya digantikan oleh pejabat dari penduduk asli. Pada periode tahun 2002-2007, hampir seluruh birokrasi dikuasai oleh suku asli Papua Barat, baik dari suku Arfak, Madachan, dan Doreri. Dengan kata lain, jabatan Gubernur, Walikota, Bupati, dan Camat dikuasai oleh orang Papua asli yang beragama Kristen. Pergulatan antar suku asli Arfak, Madachan, Doreri dan Serui dalam menduduki jabatan Gubernur, Walikota dan Bupati sangat keras. Misalnya, jika Gubernur dimenangkan oleh suku Serui yang berasal dari pulau Yapen, banyak jabatan kepala dinas di kantor gubernur dipegang oleh suku Serui. Keadaan ini menurut Muyadi, sangat diskriminatif, karena tak memperhatikan dan mempertimbangkan nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam promosi jabatan publik. Para pejabat di pemerintahan dan wakil rakyat di legislatif inilah yang merancang agar "Manokwari menjadi kota Injil" di tanah Papua. Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Manokwari sebagai kota Injil yang sempat dibuat pada tahun 2006-2008 itu mendapat penolakan dari umat Islam, karena mereka beranggapan bahwa hal ini tidak saja tidak menghargai *pluralisme*, tetapi juga akan menimbulkan *eksklusivitas* kota, karena kota Manokwari hanya akan menjadi milik golongan mayoritas (Kristen), padahal Manokwari dalam sejarahnya merupakan kota terbuka.

Di sisi lain, toleransi dan kerukunan hidup beragama dimaknai oleh komunitas Budha sebagai penghormatan dan pengakuan terhadap hak minoritas untuk bisa menjalankan ibadah dan mendirikan tempat ibadah secara merdeka dan damai. Sebagai pejabat urusan agama Budha, Satimin[36] (gambar 5) berpendapat, kunci kerukunan adalah 'menghormati' umat agama lain, khususnya bagi kelompok agama *minoritas* seperti Budha dan Hindu.

36 Satimin (47 tahun) adalah pejabat urusan agama Budha golongan III D di Dinas Kanwil Kementerian Agamai Provinsi Papua Barat. Dia lahir di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, dan telah bertugas sekitar 12 tahun di Papua Barat dari Sorong sebelum dimutasi ke Manokwari.

Untuk melaksanakan prinsip kerukunan, sejak awal pimpinan-pimpinan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha sebaiknya berkumpul bersama untuk merumuskan prinsip dasar etika pergaulan dan menghormati agama lain dengan wujud semangat solidaritas[37].

Gambar 5: Bapak Satimin yang berbaju gelap adalah pegawai Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha dari Kantor Wilayah Kementrian Agama, Provinsi Papua Barat

(Diambil pada Agustus 2012 di kota Manokwari).

Satimin mencontohkan praktik kerukunan antar umat beragama yang sederhana dengan menganjurkan setiap umat beragama memasang spanduk besar pada momen hari-hari besar agama lain dengan kalimat: "Selamat Hari Raya Waisak/Galungan dan atau Nyepi" atau "Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri/Hari Natal", dan juga saling mengunjungi rumah para pimpinan umat beragama pada hari-hari besar keagamaan tersebut sebagai cerminan dari interaksi yang sehat dan baik di samping memperlihatkan rasa solidaritas yang tinggi antar umat beragama. Oleh karena itu, dalam hal keinginan umat Islam untuk mendirikan Mesjid Raya dan Islamic Center di kota Manokwari, maupun keinginan komunitas Kristen untuk membuat *Perda* (Peraturan Daerah) tentang kota "Manokwari sebagai kota Injil", komunitas Budha tidak berkeberatan, sepanjang umat masing-masing agama (baik Islam dan Kristen) mempunyai pola pikir yang dewasa dan saling menghormati, serta dapat lebih meningkatkan ketaatan kepada Tuhan yang maha kuasa, karena dalam pandangan Satimin, Tuhan itu pada hakikatnya ada pada diri kita masing-masing. Dalam pandangan Satimin, penyebutan "Manokwari kota Injil" secara implisit berarti pengamalan nilai-nilai Kristiani yang memberikan landasan berfikir, motivasi dan dukungan

37 Wawancara 29 Agustus 2012.

untuk umat Kristen agar dapat menjaga diri dalam beriman, jangan menodai agamanya dengan meminum minum keras beralkohol sampai mabuk, jangan berzina dengan perempuan lain (bukan muhrimnya), harus bersikap adil dan menghormati dengan para pemeluk agama lain, jangan merugikan umat lain, harus terus menjaga sikap toleransi antar umat, dalam bertindak tidak boleh bersifat politis, tetapi harus berdasarkan kemaslahatan dan kesalehan sosial. Nampaknya nilai-nilai Kristiani di atas sangat ideal bagi pemeluk Kristen, tetapi yang penting adalah upaya melaksanakan nilai-nilai tersebut harus secara maksimal bagi terciptanya Manokwari sebagai kota Injil. Itulah harapan masyarakat Budhis. Sebaliknya, jika pengamalan nilai-nilai tersebut dirasakan sangat memberatkan bagi pemeluk Kristiani di tataran aplikasi, Satimin menganjurkan "hendaklah diundur dulu, sampai umatnya mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan". Dengan kata lain, jangan dipaksakan berdasarkan syahwat politik para pimpinan agama baik pendeta maupun pastor untuk melaksanakan syariat Kristiani di Manokwari.

4.2 Sikap tidak diskriminatif dalam pelayanan publik (pendidikan, sumberdaya manusia, dan kesehatan)

Pengamalan 'budi kemanusiaan' adalah sikap terpuji dalam melaksanakan kerukunan umat beragama. Pernyataan tersebut pernah ditulis oleh Haji Misbach dalam makalahnya berjudul "Nasehat", yang sebenarnya ditujukan kepada para pemimpin organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik agar mereka mempunyai etika tersebut. Sayangnya, hal ini tidak tercermin dalam pola hubungan antar organisasi keagamaan di Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari karena disinyalir adanya sikap diskriminatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sektor pendidikan dan kesehatan adalah sarana publik yang perlu mendapat perhatian khusus. Ada korelasi positif antara rendahnya fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan publik dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua Barat. Padahal, di antara beberapa faktor pendorong keberhasilan proses pembangunan di wilayah itu adalah tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, ditambah dengan pemanfaatan *science*

dan teknologi yang optimal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, pemerintah pusat dan daerah harus selalu memperhatikan pembangunan pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan. Setelah provinsi Papua memperoleh perlakuan status khusus atau OTSUS (Otonomi Khusus), pemerintah pusat memberikan dana khusus ke Provinsi Papua Barat sebanyak Rp 4 triliun/tahun (2011) di luar alokasi dana APBD, dan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6 triliun/pertahun. Sayangnya ada hambatan dalam pelaksanaannya, karena berdasarkan UU No. 32/2004, program-program yang menyangkut pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Mekanisme seperti ini sangat menghambat dalam melaksanakan semua program di tingkat pemda.

Menurut anggota DPRD Papua, Abdul Hakim Ahmad kelahiran 31 Oktober 1957 yang berasal dari Ayamaru, Kaimana[38] (Gambar 7), kebijakan pembangunan dari pola *top down* harus diubah menjadi *bottom up*. Bagi Abdul Hakim, dalam semangat pelaksanaan OTSUS, semua program pembangunan, baik sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan sebagainya harus berdasarkan usulan program dari Kabupaten dan Kecamatan, karena dilihat baik kebutuhan pokok maupun sekunder mereka yang lebih tahu. Sedangkan dana pembangunan APBD dan dana OTSUS seharusnya sudah disiapkan dan didelegasikan dari *Kementrian Keuangan* ke *Bank BPD Provinsi Papua Barat*. Dengan kata lain, tugas DPRD-Papua dan Gubernur hanya menerima usulan program dari berbagai sektor dan dari semua kabupaten, serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Strategi pembangunan daerah yang berangkat dari bawah (*bottom up)* sebaiknya bermula dari desa, *distrik* (kecamatan), dan kabupaten, sehingga diharapkan target mensejahterakan rakyat baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur (jalan, jembatan, dermaga, dan lapangan terbang) bisa direalisasikan programnya. Selain itu, percepatan program pembangunan berbagai sektor diharapkan dapat mengurangi demonstrasi-demonstrasi rakyat yang menuntut "referendum" atau kemerdekaan dari Indonesia. Meskipun, dalam mengawasi program pembangunan, pemerintah pusat telah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pelaksanaan Pembangunan di Manokwari), tetapi

38 Wawancara 30 Agustus, 2012.

pada kenyataannya program pembangunan dalam berbagai sektor masih berjalan lamban, sehingga sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih jauh dari tercapai.

Gambar 7: Abdul Hakim Ahmad yang memakai kaos merah adalah anggota DPRD Provinsi Papua Barat Periode 2009-2014. Penulis (di tengah) dan Soewarsono melakukan wawancara di rumahnya.

Abdul Hakim Ahmad menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Otsus, pemerintah Papua Barat meminta hak-hak pelaksanaannya melalui pelimpahan kewenangan dalam berbagai sektor, baik kehutanan, tambang, perikanan dan sebagainya. Sampai saat ini (tahun 2012), walaupun sudah ada UU OTSUS, akan tetapi pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan dan mengawasi pelaksanaannya. Seluruh perizinan untuk memperoleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) untuk sektor kehutanan, misalnya, serta izin membuka perkebunan kelapa sawit, izin tambang, dan izin pengelolaan sektor perikanan masih dipegang 'kewenangan' oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sepertinya hanya menjadi pengamat atau penonton saja. Lagipula, meskipun pemerintah pusat memberikan dana OTSUS dan alokasi APBD melalui pembagian pendapatan daerah dan pusat dari berbagai sektor, namun jumlahnya masih sangat terbatas jika dibandingkan rasio luas wilayah dan kebutuhan pembangunan berbagai sektor di Papua Barat.

Pendidikan dan perhatian atas kualitas sumberdaya manusia adalah sangat penting, karena suatu bangsa yang maju di dunia, baik masyarakat Jepang, Amerika Serikat dan Eropa Barat (Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda) pada awal kebangkitan mereka sebagai negara industri telah mencurahkan perhatian yang serius terhadap pengembangan sumberdaya manusia, *science*

dan teknologi. Dan kunci pengembangan sumberdaya manusia adalah sektor pendidikan yang berkualitas. Menurut Abdul Hakim Ahmad, dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua Barat, pemerintah daerah harus menghargai nilai-nilai "profesionalisme". Artinya, setiap pekerja harus dihargai karena profesionalismenya. Untuk peningkatan *skill* (kecakapan) orang Papua Barat perlu diberikan prioritas kepada generasi muda Papua untuk studi di pulau Jawa, seperti Universitas Gadjah Mada, Airlangga, ITB, Universitas Indonesia, IPB, Universitas Hasanuddin, dan sebagainya, terutama untuk studi berbasis teknik seperti, konstruksi jalan dan jembatan (teknik sipil), mesin (otomotif, komputer, elekstronik), geologi, hidrologi, cuaca atau klimatologi, kehutanan, perikanan, dan kedokteran. Disamping itu, peran ilmu-ilmu sosial seperti, ekonomi, politik, antropologi, sosiologi, demografi juga perlu mendapatkan perhatian serius, meski sebagai bidang komplementari. Diharapkan SDM yang sudah menamatkan jenjang S-2 (Master) dan S-3 (Doktor), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar segera kembali ke provinsi Papua Barat agar dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk membangun daerah.

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Manokwari, dan pidato sambutannya mengenai "*The Gate of Civilization*" (pintu peradaban) di Pulau Mansinam bulan September, 2009 sangat terkenal. Penamaan tersebut dikaitkan dengan usaha keras dua pendeta Jerman yang berhasil membawa masyarakat Papua yang awalnya masih belum punya peradaban untuk *hijrah* (pindah) ke peradaban modern dan maju yang berbasiskan *science* dan *technology*. Menurut Pdt Sherley, setelah mengenal Injil, masyarakat Papua menjadi berperilaku dan bertindak secara lebih bermoral dan mempunyai landasan etik dalam bertindak; dan yang lebih penting lagi, masyarakat Papua sekarang banyak yang ingin maju dengan menghargai sektor pendidikan. Pdt Sherley menekankan bahwa dengan pendidikan yang baik, masyarakat Papua akan dapat meningkatkan sumberdaya manusia, sehingga mempunyai peradaban berbasis *science* dan *technology* yang lebih maju. Untuk merealisasikan program memajukan peradaban itu, menurut Pdt Sherley, pemerintah pusat telah mengucurkan dana khusus tahun 2011 sebesar Rp 160 milyar untuk membangun Pulau Mansinam, baik pembangunan di sektor agama, seperti membangun Gereja

Besar (Gambar 6), pembangunan lingkungan hidup dan sanitasi (seperti membangun sentra air bersih dan MCK), serta mengembangkan aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dermaga dan jalan kampung yang diperkeras. Pembangunan dermaga dimaksudkan untuk memudahkan bersandarnya kapal dan pengiriman logistik kepada masyarakat, serta untuk memperlancar transportasi buat kepentingan penumpang antar pulau.

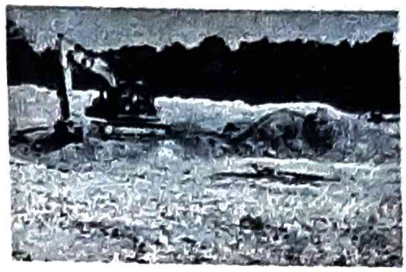

Gambar 6: Masih dalam tahap pembukaan lahan bagi rencana pembangunan Gereja Besar di Pulau Mansinam seluas 4 hektar. Gereja ini adalah proyek pembangunan pusat yang dilaksanakan setelah kunjungan Presiden SBY pada pertengahan tahun 2009. Diharapkan selesai pada akhir tahun 2012. Foto ini diambil pada Agustus 2012 (arsip pribadi).

Menurut Mulyadi Djaya, Muhammadiyah tidak berkeberatan terhadap rencana didirikannya Gereja Besar, pembangunan sarana air bersih dan MCK, maupun pembangunan dermaga untuk transportasi antar pulau di Pulau Mansinam, karena Muhammadiyah memahami arti sejarah dari masuknya Injil bagi komunitas Kristen. Kedatangan Injil tersebut, menurut Mulyadi, merupakan sebuah "keberuntungan" bagi masyarakat Papua, karena telah mentransformasi peradaban Papua dari *animisme* menjadi orang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta modern dan berkemajuan. Hanya bagi Muhammadiyah, umat Kristiani tidak bersikap simpatik, karena telah menghilangkan jejak sejarah umat Islam, padahal seperti telah dikemukakan sebelumnya, Sultan Tidore dan dan pasukannyalah yang berjasa mengantar Ottow dan Geisslerr dari Maluku Utara berlayar ke Pulau Mansinam. Menurut Mulyadi, sudah waktunya bagi pimpinan gereja dan elite Kristiani untuk memberikan pelajaran "sejarah" yang jujur kepada generasi muda Kristen tentang sikap toleransi umat Islam yang besar, sebagaimana terwakili dalam sikap Sultan Tidore dan pasukannya tersebut. Walaupun kuburan dan sumur tua di Pulau Mansinam yang menurut cerita dibuat oleh pasukan Islam, masih perlu dikaji dan diteliti keabsahannya sebagai artefak sejarah,

Muhammadiyah menginginkan Pulau Mansinam diposisikan sebagai arena pertemuan dua agama besar Kristen dan Islam, yakni menjadi *pulau rohani* yang terbuka bagi publik, sehingga umat Islam juga bisa mengunjunginya untuk ekowisata rohani dan juga pariwisata. Mulyadi Djaya menganjurkan pemerintah daerah untuk membuat pula *musholla* atau *mesjid* di Pulau Mansinam, sehingga ketika tiba waktu sholat, umat Islam dapat dengan bebas melaksanakan ibadahnya.

Di bekas lahan yang ditolak untuk pendirian Mesjid Raya dan *Islamic Center*, Muhammadiyah berkeinginan untuk mendirikan rumah sakit/ balai pengobatan/poliklinik dan rumah bersalin. Sarana kesehatan tersebut, menurut Doktor Mulyadi Djaya yang juga Dosen di Universitas Papua, akan dibuka untuk umum, khususnya masyarakat Papua Barat. Ketika hal ini disosialisasikan kepada umat Islam dan umat agama lainnya, menurut Doktor Mulyadi Djaya, mereka memberi tanggapan yang positif terhadap rencana tersebut. Hal ini terkait dengan sejarah umat Islam di Manokwari yang awalnya berhimpun dalam wadah *PUIM* (Persatuan Umat Islam Manokwari). Wadah ini sebagai pemersatu umat, di samping ingin menunjukkan bahwa Islam (baik pendatang dan asli Papua) bersatu dalam satu wadah. Dari wadah PUIM ini, pada tahun 1980-an akhirnya mereka melebarkan sayapnya dengan membentuk *YAPIS* (Yayasan Pendidikan Islam) sebagai sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Misi YAPIS adalah pendidikan untuk semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan pendidikan. Banyak anak-anak dari suku Arfak dan suku-suku lain bersekolah di sekolah-sekolah YAPIS, dari SD sampai SMA karena pendidikan YAPIS bermutu, berdisiplin, dan murah.

Meskipun, menurut salah seorang anggota DPRD Provinsi Papua Barat, alokasi dana pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat cukup besar, terlebih jika ditambah dengan alokasi dana dari pemerintah daerah, akan tetapi dana tersebut masih dirasakan sangat kecil bagi masyarakat Kristen. Menurut anggota DPRD ini, perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten) kepada komunitas lain seperti umat Islam, Budha, dan Hindu sangat tidak sebanding karena porsi anggaran untuk pembangunan gereja jauh lebih besar dibandingkan

alokasi dana bagi pembangunan tempat ibadah agama lainnya. Hal ini secara tidak langsung diperkuat oleh Satimin, sebagai representasi agama Budha di Manokwari, ketika mengemukakan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan-hambatan itu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pemeluk agama Budha di kota Manokwari masih tergolong sedikit, hanya sekitar 250 jiwa, dan kurang-lebih 2.050 jiwa untuk seluruh Provinsi Papua Barat. Yang terbanyak berasal dari keturunan Cina, dan mereka bertempat tinggal di Kotamadya Sorong.
2. Sumber daya manusia (SDM) umat Budha masih belum berkualitas, sehingga perlu ditingkatkan, antara lain, melalui sarana ceramah (*lecture*) kepada anak didik dari tingkat SD sampai SMA, dan juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pembinaan umat Budha melalui *MBI* (Majelis Budhayana Indonesia) dan *WBI* (Wanita Budhis Indonesia), dengan target meningkatkan penghayatan dan implementasi nilai-nilai agama Budha kepada masyarakat awam Budha ketika beribadah di Vihara dan Candi.

Implikasi dari tindakan diskriminatif oleh pemda dalam hal pelayanan publik di bidang keagamaan ini, dalam penilaiannya adalah bahwa wawasan kebangsaan dan demokrasi Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi untuk menjaga toleransi dan mengembangkan kerukunan kehidupan beragama masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan jajarannya di Papua Barat[39]. Dengan kata lain, implementasi pemikiran Haji Misbach tentang *tauhid pembebasan* yang mencakup nilai-nilai pluralisme, keterbukaan, toleransi dan menjaga kerukunan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam konteks Manokwari, sepertinya tidak berjalan dengan baik. Tuntutan masyarakat Kristen agar kota Manokwari ditetapkan sebagai kota Injil, eksklusivitas pulau Marsinam sebagai tempat kudus, serta alokasi budget pemerintah daerah lebih besar untuk pembangunan tempat ibadah Kristen sangat tidak sejalan dengan pokok-pokok pikiran Haji Misbach. Implikasi dari hal ini adalah bahwa pimpinan agama Islam dan cendekiawannya, tokoh agama Budha serta anggota DPRD provinsi banyak memberikan kritik kepada masyarakat Kristen, termasuk kepada elite politik dan penyelenggara negara,

39 Wawancara 30 Agustus 2012.

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang dianggap tidak mempunyai komitmen dan konsistensi dalam menjalankan kepemimpinan yang berasas budi kemanusiaan dan keadilan.

5. Penutup

Sarekat Dagang Islam yang awalnya tumbuh dan berkembang dari *Rekso Roemekso* (sebuah perkumpulan tolong-menolong) untuk menghadapi para *kecu* (maling) yang membuat daerah Lawean tidak aman, akhirnya menjadi organisasi Sarekat Islam (SI) yang disegani oleh kolonial Belanda. Ada korelasi positif antara tokoh Sarekat Islam yang mewarnai gerakan SI dalam perjuangannya, baik yang sangat radikal yang dikenal sebagai SI merah maupun SI putih yang moderat, mereka sama-sama anti penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat, anti sikap diskriminatif, akan tetapi sebaliknya menghargai masyarakat pluralis/majemuk dan sangat toleran dalam interaksi antar umat beragama. Posisi Haji Misbach yang mewakili SI merah yang radikal melalui aktualisasi dan kontektualisasi pemikiran nilai-nilai Islam dan Marxisme, bukan saja melancarkan kritik keras terhadap pemerintah kolonial, tetapi juga bisa memprovokasi kaum buruh untuk mogok. Pemogokan kaum buruh perkebunan di berbagai daerah baik di Surakarta, Semarang, Jogyakarta (Bantul) mempunyai dampak kepada mandegnya produksi perkebunan kaum kapitalis. Keadaan ini sangat merugikan para pemodal/kapitalis. Meskipun, akhirnya penguasa kolonial Belanda dapat menangkap dan memenjarakan pemimpin-pemimpin buruh, termasuk Haji Misbach di penjara Pekalongan, Surakarta dan bahkan akhirnya diasingkan di Manokwari sampai wafatnya pada tahun 1926, perjuangan yang ditunjukkan oleh Haji Misbach khususnya tetap "konsisten" dari awal sampai akhir. Sungguhpun dia dan keluarganya sangat menderita secara fisik dan rohani, tetapi dalam memoar tulisannya tercermin bahwa Haji Misbach sangat sadar bahwa risiko perjuangan memang memerlukan pengorbanan.

Meskipun para tokoh-tokoh agama di Manokwari, baik Islam, Kristen, maupun Budha, tidak mengenal langsung pemikiran Haji Misbach sebagai salah satu tokoh perintis kemerdekaan, tetapi pemikiran Haji Misbach

mengenai "*tauhid pembebasan*" yang mencakup penghargaan dan sikap menjaga pluralisme (kemajemukan) masyarakat, toleransi dan memelihara kerukunan antara umat beragama, serta tidak bersikap diskriminatif dan mengedepankan sikap kemanusiaan dan keadilan, sepertinya sejalan dengan kebutuhan kehidupan keagamaan di Manokwari. Dengan kata lain, pemikiran Haji Misbach tetap kontekstual dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam interaksi sosial antara para tokoh agama dan masyarakat Papua Barat secara luas agar terjelma sikap toleran dan kerukunan antara umat beragama, menjunjung keterbukaan kota Manokwari untuk semua golongan, serta menghargai kemajemukan masyarakat. Dengan demikian, dalam praktik toleransi dan kerukunan agama di Papua, peran pemimpin adat bersama para rohaniawan dan ulama sangat besar dalam membina umatnya untuk tetap memberikan ruang dan saling menciptakan semangat toleransi dan kerukunan umat beragama, demi kemajuan masyarakat Papua kini dan esok.

Referensi

Buku

Adam, Cindy. 1966. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Diterjemahkan oleh Abdul Bar Salim). Jakarta: Gunung Agung.

Amelz. 1952. *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya*. Jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasibuan, Imran dan Yamin, Muhammad (ed.). 2009. *Menjaga Rumah Kebangsaan: Jejak Langkah Politik Taufik Kiemas*. Jakarta: Q Qommunication.

_____(ed.). 2011. *Empat Pilar Untuk Satu Indonesia: Versi Kebangsaan dan Pluralisme Taufik Kiemas*. Jakarta: Gramedia.

Prawiranegara, Alamsyah Ratu. 1981. *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Disunting oleh H.A Hafizh Dasuki. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Rambe, Safrizal. 2008. *Sarekat Islam: pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendekia.

_____. 2003. *Pemikiran Politik Tan Malaka: Kajian terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis."* Jogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Diterjemahkan oleh Hilmar Farid). Jakarta: Grafiti Press.

Stoddard. Lothrop. 1965/1966. *Pasang Naik Kulit Berwarna* (Diterjemahkan oleh Panitia Penerbit, Jakarta).

Sukarno. 1965. *Dibawah Bendera Revolusi.* Jakarta: Dibawah Bendera revolusi Press. Jilid Pertama. Cetakan keempat.

Paper

Susanto, Happy. "Komunisme Islam H. Misbach," dimuat dalam *Jurnal Perubahan Sedane*, November 2005, blog Happy Susanto "Menuju Islam Humanis", http://happy-susanto-files.blogspot.com/2007/10/komunisme-islam-h-misbach.html, diakses 29 Maret 2012.

"Haji Misbach: Muslim Komunis," dalam *Tabloid Pembebasan.* Edisi V/Thn II/ Februari 2003, http://indomarxist.tripod.com/hmisbach.htm, diakses 29 Maret 2012.

"Penyemai 'Virus' Ideologi Komunisme: Antara Sneevliet, Mas Marco Kartodikromo, dan Haji Misbach," http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/19/penyemai-%E2%80%98virus%E2%80%99-ideologi-komunisme-antara-sneevliet-mas-marco-kartodikromo-dan-haji-misbach/, diakses 29 Maret 2012.

Gunawan. "Achmad alias Darmodiprono alias Haji Mohammad Misbach" Paper dipresentasikan dalam Lingkar Studi Pembebasan Keluarga Mahasiswa Pencinta Demokrasi IAIN Sukijo. Rabu, 21 November 2011, http://bung-gun.blogspot.com/2006/11/achmad-alias-darmodiprono-alias-haji.html, diakses 29 Maret 2012.

Qahar Mudzakkir. "Haji Muhammad Misbach (1879-1926)," http://qahar.wordpress.com/2008/02/04/h-m-misbach-1879-1926/, diakses 29 Maret 2012.

BAB 4

MENELUSURI JEJAK 'PENGARUH' HAJI MISBACH DI MANOKWARI

Ana Windarsih

Pengantar

Di tanah Papua Barat yang dulu disebut sebagai Irian Jaya pada tahun 1924 pernah dibuang seorang aktivis pergerakan yang dikenal sebagai Haji Misbach. Tempat peristirahatannya yang terakhir ditemukan berada di sudut kota yang sekarang menjadi ibukota Papua Barat yaitu Manokwari. Bahkan rumah yang dipercaya sebagai tempat penjaranya juga masih dipertahankan sebagaimana bangunan aslinya. Letaknya di Jalan Merdeka, Kota Manokwari, yang merupakan jalan utama di kota tersebut.

Masa pembuangan H. Misbach ke Manokwari memang cukup singkat hanya 2 tahun (1924-1926). Namun yang menarik adalah mengapa beliau dibuang ke Manokwari, sementara para tokoh pergerakan yang lain seperti Tjokroaminoto, Mohammad Hatta dibuang ke Digoel.

Menyusuri jejak sejarah merupakan hal yang sangat menarik. Karena dari sanalah tergambar masa lalu yang mungkin menjadi pencerah di masa kini.[1] Demikian pula dengan upaya menyusuri jejak 'pengaruh' Haji Misbach di kota Manokwari seperti yang akan dipaparkan dalam tulisan ini.

---

1 "Masyarakat sekarang ialah akibat yang lampau. Masyarakat yang akan datang ialah akibat dari yang sekarang. Seorang yang berkewajiban buat memperbaiki masyarakatnya yang sekarang tentulah mesti mengetahui keadaan masyarakat itu sekarang dan dahulu" (Malaka, 2008 : 368).

Siapakah Haji Misbach?

Haji Misbach yang lahir di Surakarta, tepatnya di Kauman sekitar tahun 1876, dapat dikatakan adalah seorang tokoh pergerakan nasional, karena ia dikenal sebagai seorang yang anti-kolonialisme Belanda. Bernama kecil Ahmad, Haji Misbach dilahirkan di dalam keluarga seorang pedagang batik yang cukup berada, yang sekaligus juga menjabat sebagai pejabat keagamaan. Tempat tinggalnya terletak di sisi barat alun-alun utara, persis di depan keraton Kasunanan dekat Masjid Agung Surakarta. Menjelang dewasa, H. Misbach terjun ke dunia usaha sebagai pedagang batik di Kauman mengikuti jejak ayahnya. Bisnisnya pun menanjak setelah ia berhasil membuka rumah pembatikan yang sukses. H. Misbach merupakan pribadi yang egaliter, ramah kepada semua orang tidak membeda-bedakan, apakah priyayi atau orang kebanyakan. Hal ini terlihat dalam penampilannya yang lebih menyukai ikat kepala Jawa dibanding memakai peci, meski sudah bergelar haji.

H. Misbach mulai aktif terlibat dalam pergerakan pada tahun 1914, ketika ia berkecimpung dalam IJB (*Indlandsche Journalisten Bond*) yang dikomandani oleh Mas Marco Kartodikromo. Pada tahun 1915, H. Misbach menerbitkan surat kabar Medan Moeslimin, yang edisi pertamanya tertanggal 15 Januari 1915. Medan Moeslimin kemudian menjadi forum tempat bergabung yang berwibawa di Surakarta (Solo) bagi pegawai keagamaan yang progresif, kiai, guru-guru Al-Quran, dan para pedagang batik. Di situlah pendapat mereka yang kerap berbeda satu sama lain tersalur. Kelompok ini menyebut diri "kaum muda Islam". H. Misbach kemudian juga menerbitkan Islam Bergerak pada tahun 1917.

Sikap H. Misbach sangat anti-kapitalis. Siapa yang diyakini menjadi antek kapitalis yang menyengsarakan rakyat akan dihadapinya melalui artikel di Medan Moeslimin atau Islam Bergerak. Tak peduli apakah orang itu juga seorang aktivis organisasi Islam. Bagi H. Misbach berdamai dengan pemerintah Hindia Belanda adalah sesuatu yang harus dilawan dengan gigih. Maka kelompok yang anti-politik dan anti-pemogokan, secara tegas dianggapnya berseberangan dengan misi keadilan. Sikap ekstrem H. Misbach membuat ia ditangkap pada tanggal 7 Mei 1919, walaupun akhirnya H. Misbach dibebaskan pada tanggal 22 Oktober.

Terkait dengan "teror-teror" yang kemudian terjadi di Jawa, H. Misbach dipercaya sebagai otaknya dan hal tersebut membuatnya ditangkap lagi oleh Belanda. Karena beberapa tuduhan yang memberatkan yang termaktub dalam *Gouvernements besluit ddo. 27-6-27*, selama penahanan di Semarang sebelum akhirnya diasingkan ke Manokwari, tak seorang pun diizinkan menjenguknya, kecuali anak dan istrinya, dan itu pun setelah melalui izin yang berlapis[2]. H. Misbach juga dilarang membaca surat kabar maupun kitab-kitab lain. Ia hanya dibolehkan membaca Al-Qur'an.

Di tengah ganasnya alam di tempat pembuangannya, H. Misbach terserang malaria dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1926.[3] Dia dikuburkan oleh kader-kader yang berhasil dia organisir dalam SR (Serikat Rakyat) Manokwari di Kuburan Penindi, berdampingan dengan istrinya yang meninggal lebih dahulu.[4] Menurut artikel di *Medan Moeslimin* Tahun ke-XII, h. 317, H. Misbach meninggal karena menderita sakit panas malaria selama tujuh hari. Ia baru mulai mendapatkan pertolongan setelah menderita demam selama lima hari. Ia dibawa ke rumah sakit oleh seorang dokter Jawa. Atas pertolongan Sakimin, orang yang tinggal serumah dan sangat loyal dengan H.M. Misbach, ketiga anak beliau dipulangkan ke Jawa dengan biaya dari pemerintah Belanda. Pada waktu itu hampir semua orang sudah takut berhubungan dengan H.M. Misbach.

Jejak Haji Misbach di Manokwari

Secara umum sosok H. Misbach tidak dikenal di Manokwari, bahkan di kalangan muslim di kota itu sekalipun. Beberapa narasumber yang ditemui memberikan saran agar mencari informasi tentang H. Misbach di Fak-Fak, karena menurut mereka, di antaranya H.W. Bachtiar, Fak-Fak merupakan daerah bercirikan kebudayaan Islam yang dipengaruhi oleh kekuasaan raja-raja di pulau-pulau sekitarnya, seperti Sultan Tidore[5] sehingga berbeda sekali

2 Lihat *Medan Moeslimin*, Tahun ke-XII: 297, 299.

3 Sumber: *Tabloid Pembebasan* Edisi V/Thn II/Februari 2003, versi Online: http://indomarxist.tripod.com/hmisbach.htm diunduh, 12 Juli 2012.

4 http://infokebumen.tripod.com/haji_misbach.htm, diakses 1 Februari 2012 dan *Medan Moeslimin* Tahun ke-XII, h. 317.

5 Diceritakan bahwa "Melalui Kesultanan Tidore yang juga menguasai Tanah Papua sejak abad ke-17 jangkauan terjauh penyebaran Islam sudah mencapai Semenanjung Onin di Kabupaten Fak-

dengan ciri kebudayaan Manokwari yang termasuk wilayah *Noord* (Utara) *Nieuw-Guinea*[6].

Latar belakang sejarah Manokwari yang didasarkan pada kedatangan dua penginjil, Carl W. Ottow dan Johann G. Geisslerr sangat melekat kuat pada ingatan masyarakat Papua Barat. Demikian pula pandangan terhadap Belanda yang dianggap sebagai saudara yang memberikan kemerdekaan dan memberikan pendidikan sehingga masyarakat Papua Barat menjadi pandai dan melek pendidikan[7]. Pada tahun 1898-1949, Papua bagian barat memang dikenal sebagai Nugini Belanda (*Nederlands Nieuw-Guinea* atau *Dutch New Guinea*) yang merupakan bagian dari Hindia Belanda[8]. Jadi tidak mengherankan jika pengaruh pemerintah Hindia Belanda di Papua termasuk di Manokwari cukup besar.

Haji Misbach diasingkan oleh Belanda ke Niew Guinea pada tahun 1924, hampir bersamaan dengan sekitar 1.300 orang yang dipenjarakan setelah melakukan pemberontakan di Jawa[9]. Mereka semua dikenal sebagai orang-orang yang berpaham komunis. H. Misbach sendiri adalah seorang Muslim komunis. Barangkali lantaran pahamnya yang beraliran komunis itulah namanya nyaris tak pernah disebut di kalangan pergerakan Islam[10]., Sesungguhnya sebutan komunis Muslim tersebut agak salah kaprah, karena pada kenyataannya H. Misbach memperjuangkan pergerakannya tetap dalam bingkai Islam. Semua yang dilakukan adalah untuk menunjukkan ke-Islam-an yang sejati, baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada sesama muslim di Hindia Belanda. Hal tersebut dilakukannya dalam satu kata dan perbuatan.

Masa-masa H. Misbach dibuang (1924-1926), Manokwari (Papua) masih di bawah pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Seperti kita tahu, Belanda

---

Fak, Papua Barat" (Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_ Indonesia, diakses tanggal 26 November 2012).

6 Perlu dicatat bahwa, karena kemudian juga menjadi tempat kontrolir atau penguasa *Afdeeling West en Zuid Nieuw-Guinea*, Fak-Fak menjadi kota yang penuh kegiatan dagang orang-orang dari luar wilayah, seperti orang Cina, orang Arab maupun orang-orang dari pulau-pulau lain (Koentjaraningrat, 1993 :53-55). Belanda mengklaim setengah dari *Niew Guinea* bagian barat pada tahun 1828 dengan pos administratif pertamanya di Fak-Fak, sementara Manokwari tidak ditata sampai tahun 1898.

7 Wawancara dengan beberapa narasumber saat penelitian lapangan 12-23 Juli 2012.

8 Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Papua_bagian_barat, diakses tanggal 26 November 2012.

9 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/293960/303094/Hisrory, diakses tanggal 1 Februari 2012.

10 "Salah satu tokoh yang saya kagumi di sadur dari indomarxis: Haji Misbach: Muslim Komunis", Sabtu 01 Mei 2010, http://khapa-haku.blogspot.com/, diakses tanggal 1 Februari 2012.

berkuasa di Papua sampai tahun 1962, sehingga sulit bagi bangsa Indonesia untuk masuk ke sana, apalagi untuk memperhatikan keberadaan makam H. Misbach di tanah Papua. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila PB Tandirerung pernah mengatakan "Sejauh ini tak satupun informasi akurat yang menyebut lokasi kuburan kyai merah ini di Manokwari. Mungkin sejarah menganggapnya tak penting."[11]

H. Misbach sempat mendirikan partai Sarekat Rakyat di Manokwari dengan jumlah pengikut yang lumayan banyak, sekitar 20 orang. Keanggotaannya tidak pernah lebih dari 20 orang karena gangguan Polisi Belanda.[12] Bagi H. Misbach, jumlah tersebut sudah cukup untuk menjadi pokok berdirinya Sarekat Rakyat. Bisa dibayangkan sulitnya H. Misbach mengembangkan Sarekat Rakyat tersebut jika mengingat berbagai rintangan yang menghadang. Misalnya, ancaman dilepas dari pekerjaan, dihukum/ setrap, pemutusan hubungan antara penjual dan pembeli, dan sebagainya. H. Misbach sendiri terkena imbas dari pendirian Sarekat Rakyat ini, terutama berkaitan dengan sewa rumah tempat tinggalnya. Tentu saja H. Misbach melawan, bahkan ia menegaskan bahwa jika hal tersebut dilakukan, berarti melanggar kontrak perjanjian. Karena ia beliau juga berjiwa pendidik, maka di dalam tulisannya yang dikirimkan ke *Medan Moeslimin*, beliau meminta Redaksi untuk menyertakan peraturan perjanjian sewa[13]. Hal ini merupakan upaya beliau untuk menunjukkan dirinya sebagai orang yang taat peraturan, meski dalam kondisi dibuang.

Tulisan tentang "Islamisme dan Komunisme" – yang dimuat di *Medan Moeslimin*, 1926- merupakan tulisan berseri H. Misbach yang paling panjang selama beliau di pengasingan di Manokwari, dan hal ini adalah gerak perjuangan beliau yang paling popular dan monumental. H. Misbach mempunyai pandangan khusus tentang "agama Islam yang sejati". Menurutnya, umat Islam yang merasa benar sendiri dan hanya menjunjung pemimpinnya semata, hal ini berarti kegelapan. H. Misbach melihat bahwa kerusakan agama berasal dari kaum kebangsaan, feodal, dan kapitalisme

11 "Mengenang "Kyai Merah" Haji Misbach" oleh Barumbun Pong Palita, http:// langitmerahpatrixbarumbuntandirerung.blogspot.com/. Diakses tanggal 1 Februari 2012.

12 http://www.berdikarionline.com/sisi-lain/historia/20110510/haji-merah-dalam-perjuangan-anti-kolonialisme.html, diakses tanggal 1 Februari 2012.

13 *Medan Moeslimin*, Tahun ke-XI 156-159.

yang menyimpang dari kebenaran agama, sehingga kitab-kitab yang untuk mendidik masyarakat dibuat berjauhan dengan kebenaran agama yang sesungguhnya. Sejak jaman feodal manusia selalu berebut ketinggian, kekuatan dan derajat, sehingga agama menjadi rusak dan terpecah-pecah. Menurut Misbach, sesungguhnya Tuhan menurunkan agama tanpa nama, sebagaimana awalnya Tuhan menciptakan manusia hanya satu saja, yaitu Adam, kemudian Hawa dan setelah keduanya berkumpul, menyebabkan adanya beberapa anak dan cucu, kemudian baru muncul sebutan laki-laki dan perempuan. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 19 disebutkan bahwa *innaddina 'indallahil islam* yang artinya, agama yang diakui oleh Allah itu hanya Islam. Menurut H. Misbach, agama berarti penunjuk dari Tuhan, sedang Islam berarti selamat, sehingga agama Islam berarti penunjuk jalan keselamatan. Oleh karena itu Islam sejati adalah ketika pemeluk agama Islam bisa mengerti dan selanjutnya mengetahui perbedaan antara manusia yang memeluk agama dan manusia yang tidak memeluk agama[14].

Sebagaimana dijelaskan oleh Shiraishi[15], H. Misbach adalah orang yang berpandangan bahwa pemerintah seharusnya netral dalam soal agama. Tetapi karena pemerintah Belanda melindungi kapitalis Belanda, sementara kapitalis Belanda membantu misionaris Kristen, dan misionaris Kristen berlaku curang pada kaum Muslim dan merusak Islam, sehingga Muslim tetap lemah, maka bagi H. Misbach, bertindak sesuai ajaran Islam berarti berperang melawan misionaris Kristen, kapitalis Belanda dan pemerintah. Bagi H. Misbach, mengaku setia namun belum dapat bertingkah laku sesuai ajaran Islam berarti berkhianat. Akan tetapi, untuk H. Misbach merupakan hal yang salah juga jika berperang melawan aktivitas misionaris Kristen tanpa melawan kapitalis dan pemerintah.

Dalam pandangan H. Misbach, azas komunisme akan memperbaiki nasib manusia di seluruh dunia yang direndahkan oleh sebagian kecil manusia saja. Perlawanan terhadap watak-watak kapitalisme (angkara benda) dan imperialisme (angkara murka) dipercaya akan memperbaiki keadaan. Bagi Misbach, watak-watak kapitalisme dan imperialisme membuat rusak moral manusia dan menjadi hilang rasa kemanusiaannya. Ia melihat banyak manusia

14 Untuk lebih jelasnya, lihat *Medan Moeslimin*, Tahun ke-XI: 34-35 & 50-53.
15 Shiraishi, 1997:184.

yang melanggar aturan agama karena rusak batinnya oleh sebab jahatnya aturan kapitalisme dan imperialisme. Dalam hal ini, kapitalisme khususnya dipandang sebagai yang merusak dunia, menghilangkan budi kemanusiaan serta menghilangkan rasa empati terhadap sesama, sehingga menimbulkan perang atau permusuhan.[16].

Sementara pandangannya tentang aspek positif dari komunisme, sebagaimana dimuat dalam *Medan Moeslimin*, Tahun ke-XI: 6-7, adalah bahwa timbulnya komunisme itu biji dari kapitalisme yang tertanam dalam sanubari rakyat. Menurut H. Misbach, kapitalisme membuahkan biji kebencian dan keberanian untuk melawannya. "Semua didasarkan pada uang, sampai-sampai badan dan jiwanya juga diserahkan ke uang. Semua permainan tersebut telah diketahui oleh komunisme, sehingga komunisme menjadi hantu bagi kapitalisme, karena selain komunis, yang lain bisa dengan mudah menjadi perkakas atau permainannya kapitalisme. Komunisme lalu disebut sebagai 'hantu' yang ditakuti, memang sudah sewajarnya karena apabila menanam kebaikan akan memungut kebaikan juga, sebaliknya kalau kita menanam kebusukan (menindas, memeras, menghina....) akan merasakan buahnya yaitu, perlawanan". Oleh sebab itu, menurut H. Misbach, umat Islam seharusnya segera menerjunkan diri di dalam kalangan pergerakan komunisme yang cocok dengan sebagian perintah Allah (Al-Qur'an).

Kapitalisme bisa saja dianggap benar, penolong, dan puji-pujian yang lainnya, dan hal ini bisa dilihat sebagai cerminan dari kaum poetihan termasuk Muhammadiyah yang kala itu lebih memfokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, bibit perbedaan menjadi muncul karena H. Misbach berpendapat bahwa tanpa gerakan politik, Muhammadiyah akan mudah menjadi perkakas kapitalisme. Situasi konflik inilah yang membuat H. Misbach menjadi tidak lagi sejalan dengan misi dan visi Muhammadiyah, karena ia lebih memilih komunisme dalam pergerakannya. Komunisme dianggap mampu menghilangkan sekat dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersadarkan dan bergerak bersama melawan kapitalisme, maupun sesama Muslim yang menjadi perkakas kapitalisme. Dalam penghayatan H. Misbach, keimanan seseorang terletak pada perilaku keseharian orang tersebut, yang dalam bahasanya disebut sebagai gerakan.

16 *Medan Moeslimin*, Tahun ke-XI : 93.

Orang yang membiarkan kondisi sekitar yang tidak adil dan penuh penindasan dikutuknya habis-habisan sebagai orang yang munafik atau Islam *lamisan*.

Oleh H. Misbach, umat Islam dilarang takut kepada manusia, melainkan hanya takut kepada Allah, yaitu dengan memelihara perintahnya. Bagi H. Misbach, harus benar-benar menghormati dan memelihara keselamatan kaum yang tertindas, sehingga pergerakan yang dilakukan mendapatkan simpati dari masyarakat luas. H. Misbach menegaskan bahwa menolong kaum miskin dan tertindas tanpa membedakan bangsa, agama, dan warna kulit sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad: *"alchalgoe koelloehoen 'ijaloellah, faahoebboemoellah, anfaoehoem li ijalihi'* yang maksudnya sekalian manusia adalah manjadi hamba Allah semuanya, maka akan lebih dikasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang banyak membuat kebaikan kepada kawannya. Islam juga mengajarkan zakat dan sedekah agar kaum yang berharta peduli kepada yang miskin. Dan perjuangan untuk menegakkannya pada masa Rosulullah juga sampai pada kekerasan, jika ada orang yang berharta namun tidak mau melakukan kewajiban berzakat. Prinsipnya dalam Islam tidak ada istilah gencet-gencetan dalam mencari penghidupan[17]. Cara agama Islam tersebut oleh H. Misbach dipandang sejalan dengan tujuan komunis yang menawarkan prinsip sama rasa sama rata.

Titik temu antara Islam dan komunis itulah yang menjadi dasar pergerakan H. Misbach. Komunis dijadikan alat untuk memperjuangkan kebebasan rakyat miskin yang serba tertindas dan mengalami ketidakadilan dari para penguasa. Kapitalis yang selalu mengejar keuntungan dengan berbagai cara bahkan sampai pada tingkat menghisap buruhnya sendiri, bagi Islam hal itu dilarang keras, bahkan bisa dikategorikan riba, sementara bagi komunis disebut nilai lebih, namun jika didapat dengan eksploitasi, merusak hak buruh akan menghilangkan empati majikan terhadap buruhnya.

Manokwari di Mata H. Misbach

Setidaknya ada sekitar 8 artikel tentang Manokwari yang dituliskan selama H. Misbach berada di pembuangan. Kesemua artikel itu dimuat di Medan

17 *Medan Moeslimin*, Tahun ke-IX: 14-15.

Moeslimin.[18] Dari beberapa tulisan yang beliau kirimkan bisa ditahui kondisi beliau selama di pembuangan, serta peristiwa-peristiwa yang dialaminya.

Sebagai orang yang mempunyai sikap kritis, H Misbach juga menuliskan keadaan dirinya selama perjalanan dari Semarang ke Manokwari. Di antaranya terkait dengan adanya perintah dari asisten residen yang melarang H. Misbach turun ke darat di manapun kapal berhenti, meski istri dan ketiga anaknya masih diperbolehkan. Akan tetapi, karena kepopulerannya sebagai orang pergerakan, maka ketika sampai di Makassar justru banyak kawan dari partai komunis, baik laki-laki maupun perempuan, naik ke kapal, sehingga Komisaris agak dibuat repot dalam penjagaannya.

Kekritisannya dalam memperjuangkan keadilan juga ditunjukkannya ketika dimintai uang untuk membayar biaya perjalanannya, karena sejak awal ia diberitahu bahwa semua pengeluaran akan ditanggung oleh pemerintah (Belanda). H. Misbach terlebih dahulu mempertanyakan alasan mengapa ia harus membayar, meski setelah diberi penjelasan bahwa akan diganti sesampainya di Manokwari, akhirnya beliau mau membayar juga. Sesampainya di Manokwari ia pun mempertanyakan kembali uang pengganti tersebut, meski pada akhirnya ia tidak mendapatkan jawaban tentang hal itu, kecuali tentang urusan sewa rumah dan gajinya yang sebesar f50 yang akan dibayarkan hanya untuk selama 6 bulan saja.

Dalam tulisan yang lain yang berjudul "Djawa-Manokwari Baik Diketahoei" tahun ke-X, tanggal 1 Nopember 1924: 331-332, H. Misbach menguraikan aksi dirinya yang meskipun merupakan pendatang baru di Manokwari, tetapi karena jiwanya yang selalu dekat dengan *wong cilik* selalu siap untuk mendengar keluh kesah penduduk tentang kehidupan mereka yang cukup sulit.

Jejak kedekatannya dengan penduduk juga terlihat dalam tulisannya di *Medan Moeslimin* tahun ke-X: 333 yang berjudul "Hal jang kedjadian di Manokwari". Dalam tulisan tersebut bisa dilihat bahwa banyak penduduk Manokwari yang datang berkunjung ke tempat tinggal H. Misbach untuk berkenalan dan menceritakan keadaan Manokwari sebelum tahun 1924 yang sangat ramai dan kehidupan yang serba mudah untuk mencari makan. Menurut mereka, setelah tahun 1924, dengan bergantinya asisten residen dan

18 Untuk lebih jelas baca Nor Hiqmah (2008:10).

controlir, maka kehidupan menjadi serba susah, terbatas bahkan ada yang merugi, sehingga banyak di antara para pendatang tersebut yang menjual perkakasnya dan memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal mereka dulu, pulau Ternate dan pulau-pulau lainnya.

Dalam majalah *Medan Moeslimin* tahun ke-XI: 271-272 yang bertajuk "Foja-Foja Sikapnja wakil pemerintah Manokwari", H. Misbach mengkritisi kebijakan pelarangan memakai dan membuat sumur bagi rakyat, karena pemerintah (Asisten Residen van Aterze) membuka air ledeng yang menggunakan sistem sama rata dengan bayaran f4 setiap bulan. Kebijakan tersebut dianggap sebagai penindasan terhadap rakyat Manokwari, karena seandainya rakyat hanya menggunakan sedikit air pun, mereka tetap dikenakan bayaran per bulan yang sama besar yaitu f4. H. Misbach menentang hal ini, meskipun sikapnya itu membuat ia dikucilkan dari masyarakat melalui isu rahasia bahwa siapa saja yang ketahuan berkumpul dengan H. Misbach akan dimasukkan ke bui.

Semua tulisan tersebut beliau tulis pada masa pembuangannya di Manokwari, namun karena kondisi ekstrem lingkungan Manokwari, H. Misbach sempat mengajukan permintaan pindah atau dikirim ke Eropa. Selain untuk tetap melanjutkan perjuangannya dalam menyemaikan pemahaman komunisme yang dirasa cocok dengan Islam sebagai agama yang masih minoritas di Manokwari, juga karena kondisi keluarga yang silih berganti jatuh sakit. Meski permintaannya tersebut dikabulkan oleh pemerintah Belanda, asalkan dengan biaya sendiri, namun hal itu tidak pernah terlaksana, selain karena ketidakcukupan dana H. Misbach juga jatuh sakit yang sampai merenggut nyawanya.

Penutup

Situasi masa Orde Baru yang sangat menumpukan pada stabilitas sangat membatasi hadirnya literatur maupun tokoh/orang yang berhaluan kiri. Media pun sangat dikontrol dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meski harus diakui kondisi tersebut menjadi sangat terbuka ketika periode reformasi dimulai.

Salah seorang narasumber, yang ayahnya merupakan anggota perwakilan Muslim satu-satunya dan berasal dari Kaymana, berpendapat bahwa H. Misbach mungkin berada pada masa yang kurang mempunyai pengaruh karena singkatnya masa pembuangan dan seorang diri pula, karena teman seperjuangan yang lain, seperti Tjokroaminoto, meskipun dibuang tetapi di tempat yang berjauhan (Boven Digoel). Dengan demikian, di Manokwari H. Misbach kurang dapat menunjukkan kemampuannya sebagai seorang tokoh yang menentang kolonialisme dan kapitalisme sebagaimana di Solo yang merupakan tempat kelahirannya. Akan tetapi narasumber ini juga mempertanyakan apakah justru karena adanya wacana Raperdasus Manokwari sebagai kota Injil, sehingga sengaja ketokohan H. Misbach disembunyikan? Jika betul demikian, maka diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut.

Faktor lainnya adalah, sementara H. Misbach sendiri merupakan seorang Muslim yang kuat pemahaman agamanya, dan juga dalam berorganisasi beliau sangat egaliter dan tidak membedakan agama, ras, dan lain-lain, namun demikian sebagai pendatang di tanah yang baru yang mempunyai agama, adat dan budaya yang berbeda bukan perkara yang mudah untuk bisa diterima. Apalagi ditambah dengan ketatnya penjagaan terhadap aktivitas dan pergerakan H. Misbach sebagai orang buangan oleh asisten residen maupun polisi, sehingga meski banyak yang merasa setuju dan tertarik dengan yang beliau serukan, mereka (masyarakat) sepertinya merasa takut dengan hukuman yang akan diterima jika mereka berani bergaul dengan H. Misbach. Kondisi inilah yang menyebabkan H. Misbach selama masa pembuangannya yang singkat itu tidak bisa mendapatkan pengikut sebanyak ketika ia di Solo.

Sebaliknya, ada pula pandangan yang beranggapan bahwa ketika Islam jadi minoritas di Manokwari, maka mereka akan berusaha mencari *icon* sebagai lambang pergerakan yang menonjol untuk menunjukkan eksistensinya, dan dalam konteks ini H. Misbach merupakan orang yang bisa dijadikan tokoh simbolik yang berlatar belakang muslim dan mampu membangkitkan [redacted]gerakan revolusi dalam ketauhidan. H. Misbach mampu menghadirkan [redacted]pemahaman dan bukti bahwa Islam tidak tercerabut dari akar kehidupan [redacted]masyarakat, tetapai agama bahkan mampu menyelesaikan persoalan nyata [redacted]yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, semua gerak perjuangan H. [redacted]Misbach dalam menyemaikan apa yang disebutnya sebagai 'Islam yang sejati',

perlu diperhatikan, termasuk, situasi politik pada masa itu, kemampuan membaca literatur dan ketersediaan literatur pembanding, serta kondisi lingkungan masyarakat yang dihadapi. Pemahamannya tentang keterjalinan Islam dan Komunis/Komunisme untuk masa sekarang perlu dikritisi sebab keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Islam bersumber dari iman kepada Ilahi yang ghaib, sementara komunis bersumber dari Marxisme yang sangat praktis dan justru meniadakan keilahian. Dalam konteks saat ini seharusnya pemahaman diarahkan pada bagaimana melihat agama berfungsi sebagai jawaban atau memberikan solusi bagi masalah-masalah kehidupan yang timbul, yang mungkin saja ada beberapa kesamaan dengan kondisi masa pergerakan. Misalnya maraknya korupsi, penyalahgunaan wewenang, birokrasi yang boros dan kurang melayani, dan sebagainya.

Sayangnya narasumber maupun data-data tertulis yang tersedia di lapangan sangat minim, sehingga lebih banyak ditumpukan pada referensi sekunder, seperti beberapa hasil penelitian yang lalu mengenai Papua/Irian Jaya, website, dan surat kabar. Meski tidak selengkap yang diharapkan mudah-mudahan tulisan ini mampu memberikan informasi dan sumbangan referensi bagi penelitian maupun penulisan di masa-masa yang akan datang untuk tema yang serupa.

Referensi

Anderson, Benedict. 2002. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang.* Jakarta: Kerjasama Insist dengan Pustaka Pelajar.

Bachtiar, H.W. 1994. "Sejarah Irian Jaya", dalam Koentjaraningrat dkk. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk.* Jakarta: Penerbit Djambatan.

BPS. 2011. *Kabupaten Manokwari Dalam Angka.*

Drooglever, P.J. 2010. *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.* Yogyakarta: Kanisius.

Elizabeth, Adriana, dkk. 2004. *Pemetaan Peran & Para Aktor Dalam Konflik di Papua.* Jakarta : LIPI Press.

_____. 2005. *Agenda & Potensi Damai di Papua.* Jakarta : LIPI Press.

_____. 2006. *Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua.* Jakarta : LIPI Press.

_____. 2007, *Papua Road Map Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future.* Jakarta: LIPI Press.

Feith, Herbert. 1978. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca and London: Cornell University Press.

Hendrowinoto, Nurinwa Ki S., dkk. 1988. *Acub Zainal I Love The Army.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hiqmah, Nor. 2008. *H.M. Misbach Kisah Haji Merah.* Depok: Komunitas Bambu.

Kasiepo, Manuel dkk. 1987. *Pembangunan Masyarakat Pedalaman Irian Jaya*. Jakarta: Sinar Harapan.

Koentjaraningrat, dkk. 1994. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kompas. 2008. *Ekspedisi Tanah Papua Laporan Jurnalistik Kompas, Terasing di Tanah Sendiri*. Jakarta: Kompas.

Malaka, Tan. 2008. *Madilog*. Jakarta: LPPM Tan Malaka.

Mulyadi. tanpa tahun. *Budaya Pertanian Papua Perubahan Sosial dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Arak*. Yogyakarta: Karta Media

Siraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1922-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.

Tanpa nama. Seri Pendidikan Politik Mubes Papua 2002, 23-26 Febuari. "Jalan Sejarah, Jalan Kebenaran". Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Badan Penelitian STFT Fajar Timur.

Surat kabar

Tifa Papua, No. 11 Minggu I/II Mei 2007.

Website

"Haji Misbach: Sosok Komunis yang Taat Beragama", http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=186292, diakses 12 Juli 2012.

"Haji Misbach: Muslim Komunis", http://indomarxist.tripod.com/hmisbach.htm, diunduh 12 Juli 2012.

BAB 5

MANOKWARI, "KOTA KEBANGSAAN" YANG DILUPAKAN

Thung Ju Lan

1. *Pengantar*

Berbicara tentang wawasan kebangsaan dan upaya untuk menguatkannya, salah hal yang cukup penting untuk dibahas adalah memori kolektif tentang sejarah perjuangan bangsa. Beberapa elemen penanda yang dipakai untuk memelihara memori kolektif adalah monumen, tokoh yang dianggap pahlawan, makam, dan catatan sejarah.

Dari catatan yang ada, Haji Misbach yang dikenal sebagai Haji Merah adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang melawan Belanda[1]. Walaupun

1 Menurut Soe Hok Gie dalam karyanya yang berjudul "Di Bawah Lentera Merah" (Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999, http://web.unair.ac.id/admin/file/f_20807_Dibawahlenteramerah-soehokgie.pdf, diakses tanggal 28 Agustus 2012), H. Misbach adalah salah satu angkatan muda SI yang berhasil dipengaruhi oleh Sneevliet bersama kaum ISDV-nya. Dari Sneevliet-lah H. Misbach dan kawan-kawannya "belajar mengunakan analisis Marxistis untuk memahami realitas sosial yang dialami". H. Misbach bergerak di Solo dan menerbitkan surat kabar *Medan Moeslimin* dan kemudian *Islam Bergerak*. Ia pernah menjadi sekretaris dalam organisasi *Indiers Journalist Bond*, sebuah organisasi wartawan yang diketuai oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Ia bersama Semaoen dari Semarang dikenal anti-pemerintah (Belanda). Meskipun ia menjadikan unsur-unsur Islam sebagai landasan perjuangannya, tetapi, menurut Soe Hok Gie, H. Misbach juga "menerapkan cita-cita Marxisme ke dalam ayat-ayat Al-Qur'an sedemikian fasihnya". Ia dikenal sebagai Haji Merah karena ia memposisikan diri pada SI Merah pada perpecahan antara SI Merah dan SI Putih. Ia me"yakini keselarasan antara Komunisme dan Islam" (dalam Pandu Jakasurya, "Jangan Takut, Jangan Khawatir, Misbach si Haji Merah", http://www.militanindonesia.org/attachments/8239_Agustus%202011%20PDF.pdf, diakses tanggal 28 Agustus 2012). Kartun buatannya yang dipublikasikan pada Islam Bergerak Edisi 20 April 1919 ditujukan untuk "menggugat kapitalisme Belanda, yang menghisap kaum tani dengan kerja

ia berjuang di kota kelahirannya, Surakarta atau Solo, ia pernah dibuang ke Manokwari (tahun 1924) sampai meninggalnya (tahun 1926). Penelitian ini ingin melihat jejak-jejak H. Misbach selama dia ditahan di Manokwari, karena dari cerita yang ada tentangnya, H. Misbach tidak pernah berhenti berjuang meski ia sudah berkali-kali ditangkap dan ditahan di berbagai tempat yang berbeda.

Data awal yang diperoleh tentang Haji Misbach di Manokwari hanyalah tentang makam yang diperkirakan makamnya. Makam tersebut ada di tanah pemakaman Penindi yang hari ini sudah tergusur oleh kantor RRI dan Lapangan Tenis Telkom. Kuburan yang semula merupakan kuburan umum, baik untuk orang Kristen, orang Cina maupun Muslim itu, sekarang hanya bersisakan beberapa kuburan Muslim, karena kuburan Cina dan lainnya sudah dipindahkan, antara lain ke tanah pemakaman Pasir Putih. Pasir Putih adalah ibu kota kecamatan atau distrik Manokwari Timur[2].

---

paksa". Di pengasingan di Manokwari, ia juga sempat menulis artikel yang berjudul "Islamisme dan Komunisme".

2 Potongan-potongan kenangan tentang kuburan-kuburan di Manokwari termasuk kuburan Penindi dapat dilihat dalam dua bagian "Kisah Kuburan" yang terdapat pada blog *Kisah Manokwari: Manokwari ujung pukul ujung*, 23 Januari dan 3 Februari 2011, http://kisahmanokwari.wordpress.com/tag/tempat/, diakses tanggal 27 Agustus 2012. Misalnya, diceritakan bahwa "[d]aerah atau kompleks Pasir putih selain terkenal dengan obyek wisata pantai, juga mempunyai jejeran 'perumahan abadi' di pinggir pantai", dan yang dimaksud penulis tersebut dengan 'perumahan abadi' di sini adalah. "jejeran 3 buah pemakaman yang dibedakan berdasarkan agama ataupun etnis". Ketiga pemakaman tersebut adalah "[p]ertama, kuburan Islam dengan ciri nisan tanpa rumah pelindung dan sebuah pohon [m] angga hutan besar dan kemboja. Lalu ada kuburan Cina dengan pagar dan rumah penjaga kuburan.... Akhirnya, kuburan Kristen; ciri khasnya tiap makam dilengkapi sebuah salib kayu bertuliskan nama pihak yang telah berpulang, lengkap dengan tanggal 'tiba – brangkat'nya dari planet ini". Tentang kuburan Penindi sendiri, diceritakan bahwa "[l]okasi kuburan keluarga di Fanindi terletak pada dua sisi lokasi yang dibatasi oleh sebuah kali.... Kuburan di Fanindi terbagi dua; pekuburan milik keluarga besar Lodewyck Madatjan dan kuburan rakyat lainnya. Pekuburan keluarga besar Lodewyck Madatjan berada di seputaran rumah tua milik almarhum Lodewyck Madatjan yang mantan kepala suku besar Arfak dan menampung anggota keluarga besar yang meninggal... Di lokasi kuburan yang lain, tepatnya yang berada pada areal kompleks RRI, terdapat kuburan milik orang Arfak pemilik tanah...."...[Dari sini] telah ada dua kuburan yang direlokasi yaitu *kuburan Cina* dan *kuburan Sahara*. Kuburan Cina yang berlokasi di antara kantor RRI dan Telkom serta terletak di daerah jalan protokol mungkin satu contoh kuburan yang cantik pada masa lalu. Kuburan yang terletak di kelurahan Padarni ini awalnya adalah kuburan umum jaman Belanda yang tak hanya berisikan kuburan etnis Cina tetapi juga orang Eropa dan penduduk Manokwari lainnya. Populasi Manokwari sebelum tahun 1963 ditengarai dihuni oleh ribuan orang dengan persentase masyarakat kota yang beragam tetapi umumnya dihuni oleh orang Belanda, Maluku, Sanger dan Papua. Areal pekuburan ini kemungkinan dipilih karena pada masa itu kompleks ini termasuk kawasan berpenduduk sedikit.... bahkan residen Belanda pertama di Manokwari dikuburkan di tempat ini.... Kuburan lain yang direlokasi adalah pekuburan di sisi kali *jembatan Sahara*; Sahara di masa lalu adalah nama sebuah toko milik keluarga Cina Fak–Fak yang

Keterangan: Lokasi makam yang diidentifikasi sebagai Makam Haji Misbach berada di belakang rumah berwarna biru, sebagaimana terlihat pada foto di atas. Rumah biru itu terletak di atas Lapangan Tenis Telkom yang sebelumnya dikenal sebagai Pemakaman Umum Penindi.

Keterangan: Gambar di atas adalah gambar dari sebagian makam yang ada di Pemakaman Pasir Putih, yang letaknya tepat di depan rumah Kepala Suku Arfak, Barnabas Madatjan.

Sebagian dari kuburan yang masih ada di bekas pemakaman Penindi diketahui nama dan tahun meninggalnya, terutama untuk mereka yang meninggal di tahun 1960-70an. Namun untuk kuburan-kuburan tua, termasuk kuburan yang dianggap makam H. Misbach umumnya tidak bernama. Entah kapan dan oleh siapa kuburan itu dikenali sebagai makam H. Misbach juga sulit ditelusuri. Informasi yang diperoleh adalah kedatangan beberapa orang dari Surabaya dengan kendaraan Avanza kurang-lebih enam bulan lalu (sekitar awal tahun 2012) yang kemudian membersihkan dan memperbaiki makam tersebut. Tidak jelas apa yang diperbaiki, namun menilik tulisan dengan tinta emas yang masih samar-samar terbaca sepertinya

tinggal di dekat jembatan dan kuburan ini. Sewaktu SD kawasan itu sering membuatku sedikit ngeri karena jejeran kuburan Kristen di bantaran kali....".

tulisan itu dibuat pada waktu kunjungan itu. Tulisan itu berbunyi "Perintis Kemerdekaan". Tulisan tersebut dituliskan di bawah huruf Arab. Nama H. Misbach sendiri --yang juga sudah samar-samar-- ditulis dengan tinta biru di bawah kata "Perintis Kemerdekaan". Tidak jelas apakah nama itu juga baru dituliskan pada waktu yang sama atau memang sudah ada sebelumnya. Informasi tambahan lainnya adalah bahwa kuburan yang ada di sampingnya adalah kuburan istri H. Misbach. Perbedaannya dengan kuburan yang disebut makam H. Misbach adalah kuburan ini sedikit lebih kecil walau tidak begitu nampak.

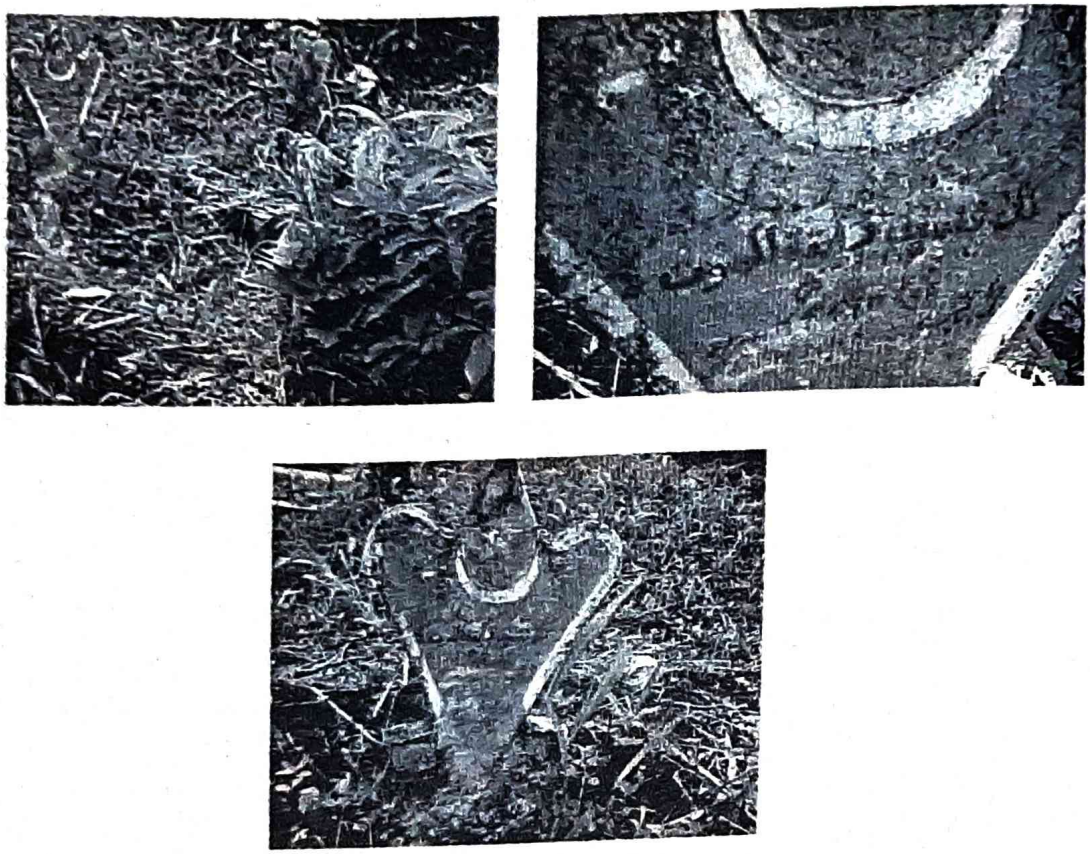

Keterangan: Makam yang diidentifikasi sebagai Makam Haji Misbach dan Istri. Di nisannya tertera tulisan "Perintis Kemerdekaan RI" dengan tinta emas, sedangkan nama Haji Misbach sendiri ditulis dengan tinta biru. Kedua tulisan tersebut sudah samar-samar sehingga sulit dibaca.

Menurut informasi yang lain, rumah tahanan H. Misbach berada pada jalur jalan yang sama, dan pada jarak yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Rumah ini terbuat dari kayu. Menurut cerita, rumah ini sering dipakai sebagai tempat minum-minum oleh pejabat-pejabat Belanda yang tinggal di rumah

bulat yang letaknya tidak jauh. Tidak jelas sejak kapan rumah itu dijadikan rumah tahanan, ataukah hanya dipakai untuk menahan H. Misbach saja. Namun, memang tempat itu tidak jauh dari lokasi pos pemerintahan Belanda dulu, yang sekarang sudah menjadi Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat.

Perlu dicatat pula bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah secara resmi mengakui keberadaan dan kepahlawanan H. Misbach. Oleh karena itu, sangat sulit mencari lokasi makam dan rumah tahanan tersebut jika tidak mendapatkan informasi dari orang yang pernah mencarinya.

Menarik untuk membahas mengapa cerita tentang H. Misbach ini tidak banyak dikenal oleh masyarakat Manokwari. Bahkan ketua suku besar Arfak yang mengklaim sebagai penguasa seluruh wilayah Manokwari, khususnya terkait adat, asal-usul, dan kepemilikan tanah, mengatakan tidak pernah mendengar tentang H. Misbach dari para pendahulunya. Memang yang bersangkutan baru berusia 50-an, tetapi sebagai yang dituakan dalam keluarga Madatjan, dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan tiga tokoh utama, Lodwijk Madatjan, Baren Madatjan, dan Cornelis Maidotga, maka bisa dikatakan bahwa Barnabas Madatjan telah menerima banyak informasi tentang suku Arfak yang dipimpinnya, terutama karena Lodwijk Madatjan baru meninggal tahun 1976.

Pertanyaan-pertanyaan tentang H. Misbach ini dimaksudkan untuk memahami kaitan sejarah yang dipunyai masyarakat Manokwari dengan Sejarah Kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kaitan tersebut berdampak pada hubungan masyarakat Manokwari dengan Republik Indonesia hari ini.

Wawasan Kebangsaan Indonesia

Secara umum, ada yang mengartikan wawasan kebangsaan sebagai "cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa."[3] Akan tetapi, pada dasarnya wawasan kebangsaan, sebagaimana dikatakan oleh Otho H. Hadi, adalah "wawasan tentang makna

3 Blog Ade Bayu, "Wawasan Kebangsaan Kita", 24 Maret 2009, http://ngeteh.wordpress.com/2009/03/24/wawasan-kebangsaan-kita/, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

hakikat bangsa dan kebangsaan"[4]. Bagi Hadi, wawasan kebangsaan merupakan "jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya", karena dalam pandangannya wawasan kebangsaan "sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (*socially and politically constructed*)". Dalam hal ini ia mengacu pada teori Bennedict Anderson tentang *Imagined Community*[5], dan ia mencontohkan Pidato Bung Karno atau perhatian Hatta mengenai wawasan kebangsaan sebagai "bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (*image*) bangsa Indonesia". Menurut Hadi, "apa pun perbedaan pandangan elit tersebut, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan". Selanjutnya ia menjelaskan makna wawasan kebangsaan ini dengan menempatkannya dalam kerangka pikir Talcott Parsons[6] mengenai teori sistem, sehingga dalam pandangan Hadi, wawasan kebangsaan dapat dipandang sebagai "suatu falsafah hidup yang berada pada tataran sub-sistem budaya" yang setara dengan *way of life* atau kerangka/peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya". Oleh karena itu, Hadi meyakini bahwa "wawasan kebangsaan tumbuh sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang", dan pengalaman itu merupakan "akumulasi dari proses tataran [pada] sistem lainnya" yang mempunyai hubungan timbal balik (*cybernetic relationship*) dengan sub-sistem budaya, yakni sub-sistem sosial, sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem politik. Dia mengambarkan pola pikir tersebut sebagai berikut:

4 "*Nation and Character Building* Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan", oleh Otho H. Hadi, website Wawasan Kebangsaan – Bappenas, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

5 Lihat Bennedict Anderson, *Imagined Community: reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991.

6 Lihat Parsons, Talcott. *Toward a General Theory of Action*. New York: Harper & Row, 1951.

POLA PIKIR PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

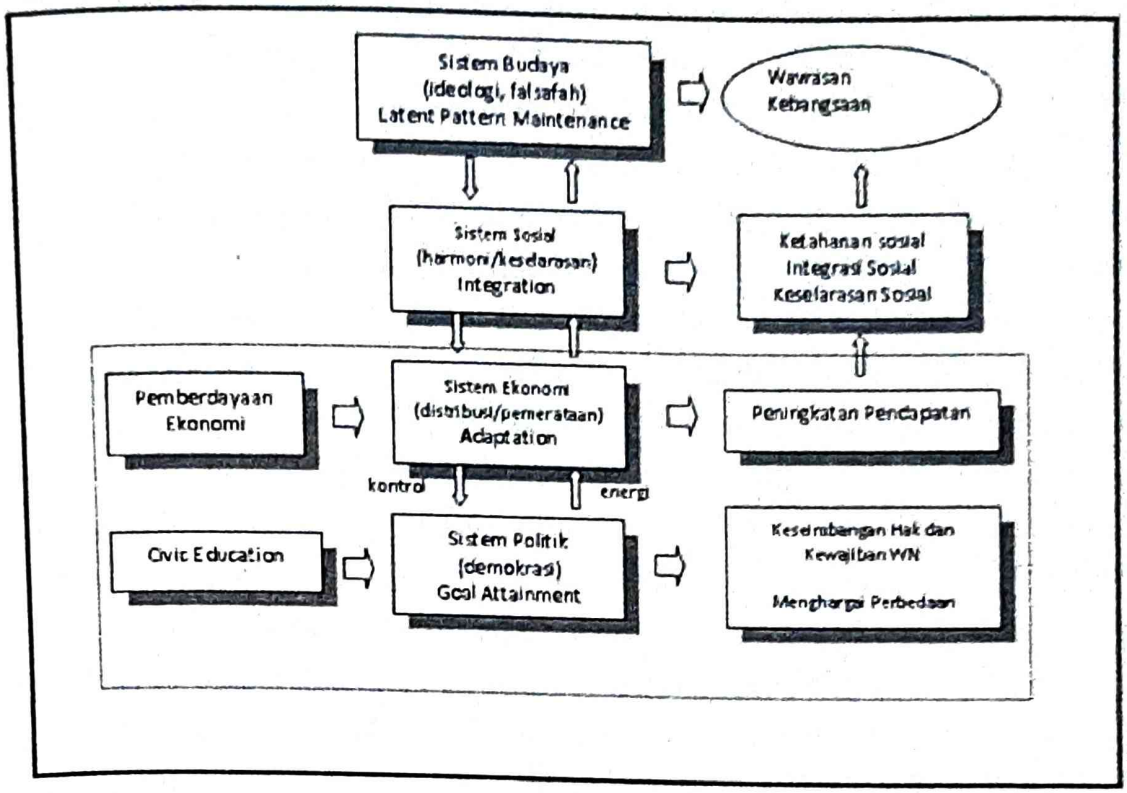

Sumber: Hadi, Otho H.,"*Nation and Character Building* Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan", Situs Wawasan Kebangsaan – Bappenas, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

Sepertinya idealisasi Hadi tentang wawasan kebangsaan tersebut belum dapat terwujud untuk konteks ke-Indonesia-an, karena seperti dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, saat membuka Sosialisasi 4 Pilar di Kabupaten Langsa, Aceh, 26 Juli 2012[7], bahwa memang ada hal-hal yang menjadi keprihatinan, sehingga akhir-akhir ini Wawasan Kebangsaan menjadi banyak dipersoalkan. Ia mencatat keprihatinan-keprihatinan tersebut mencakup masalah-masalah sebagai berikut: "Pertama, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah menjadi dangkal atau tererosi terutama di kalangan generasi muda [sehingga] seringkali disebut bahwa sifat materialistik mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan. Kedua, ada kekuatiran [terhadap] ancaman disintegrasi kebangsaan, dengan melihat

7 "Ahmad Farhan Hamid: Wawasan Kebangsaan Tuntutan Untuk Mewujudkan Jati Diri", MPR-RI, 27 Juli 2012, http://www.mpr.go.id/berita/read/2012/07/27/11063/ahmad-farhan-hamid-wawasan-kebangsaan-tuntutan-untuk-mewujudkan-jati-diri, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

gejala yang terjadi di berbagai negara, terutama yang amat mencekam adalah perpecahan di Yugoslavia, di bekas Uni Soviet, dan juga di negara-negara lainnya seperti di Afrika, dimana paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan. Ketiga, ada keprihatinan tentang adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini"[8]. Danrem 042/Gapu Jambi, Kol Kav Hasto Pr Yuwono SIP, juga berbicara tentang rasa kebangsaan yang semakin rapuh dan memudar saat tampil sebagai pembicara pada seminar sehari di Kabupaten Merangin, yang mengangkat tema "*National and Character Building* Berbasis Wawasan Kebangsaan". Menurutnya, "[d]ulu semuanya meneriakkan semangat merdeka atau mati", tetapi sekarang terdapat "penjabaran yang keliru terhadap demokrasi tanpa batas". Bahkan saat ini, dalam pandangannya masyarakat "sudah kurang menghargai simbol pemersatu bangsa, seperti bendera merah putih yang saat melakukan aksi demonstrasi malah diinjak-injak....malah ada yang ingin mengibarkan bendera selain bendera merah putih". Selain itu, "lagu kebangsaan Indonesia Raya [juga] sudah banyak yang tak hapal[9].

Dalam kaitan dengan studi tentang Manokwari ini, permasalahan disintegrasi menjadi fokus perhatian yang utama, karena seperti sudah menjadi pengetahuan umum, orang Papua, khususnya OPM atau Organisasi Papua Merdeka, memang menuntut pemisahan diri dari Negara Republik Indonesia.

Menurut Anwar Effendi dari FBS Universitas Negeri Yogyakarta[10], "[n]asionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari imperialisme dan

8 Ibid.

9 "Danrem 042/Gapu: Rasa Kebangsaan Semakin Rapuh dan Memudar", Website Pemerintah Kabupaten Merangin, 12 Juli 2012, http://www.meranginkab.go.id/show.php?mode=artikel&id=512, diakses tanggal 23 Agustus 2012. Eileen Rachman/Sylvina Savitri, EXPERD Consultant di website Indonesia Berprestasi ("Mari Mengisi Wawasan Kebangsaan", October 26, 2010, http://www.indonesiaberprestasi.web.id/?p=3095, diakses tanggal 23 Agustus 2012) juga mengatakan bahwa "[d]alam kehidupan sehari-hari, kita cukup *shock* bila menyaksikan pemahaman yang tidak mendalam mengenai apa sebenarnya hakikat kebangsaan Indonesia itu. Hiras M.S. Turnip, di sebuah situs menuliskan: "Saya tidak yakin (bukan berarti pesimis) jika kita ambil sampel di tempat-tempat umum (misalnya mall-mall), apakah pemuda-pemudi kita hafal 100 persen lagu *Indonesia Raya*? Tanyakan pula, siapa pencipta lagu *Bagimu Negeri*? Sekali lagi, meskipun kadar kebangsaan seseorang tidak semata-mata diukur dengan bisa tidaknya menyanyikan lagu kebangsaan, atau mengetahui lagu-lagu wajib perjuangan, paling tidak hal ini menjadi suatu peringatan bagi kita pencinta bangsa dan negara ini."

10 "Gagasan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Dalam Novel Indonesia Modern", http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Wawasan%20Kebangsaan.doc, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

kolonialisme Belanda, karena sebenarnya nasionalisme merupakan reaksi terhadap bentuk kolonialisme". Ia melihat hubungan keduanya dalam dua tataran, yaitu tataran universal dan tataran kontekstual. Dalam tataran universal, nasionalisme Indonesia, dalam pandangannya adalah pertama-tama "sebuah gerakan emansipasi, [atau] keinginan [untuk] mendapatkan atau membangun kembali sebuah dunia yang luas, bebas, yang di dalamnya dan dengannya manusia dapat menghidupkan dan mengembangkan serta merealisasikan dirinya sebagai subjek yang mandiri dan bebas"[11]. Pandangan ini, menurutnya, mempertentangkan nasionalisme dan imperialisme, karena dalam tataran ini "nasionalisme seiring dengan gagasan pembebasan manusia pada umumnya"[12]. Sementara itu, sebagaimana diyakini oleh Effendi, "dalam tataran kontekstual, nasionalisme Indonesia merupakan kehendak untuk membangun sebuah dunia yang di dalamnya manusia Indonesia, sebagai bagian dari budaya ke-Timur-an, dapat merealisasikan dirinya secara bebas", tepatnya "terlepas dari tekanan dan dominasi penjajahan Belanda, sebagai representasi budaya Barat"[13]. Selanjutnya, menurut Effendi, "[d]alam usaha untuk mewujudkan kehendak di atas orang-orang Indonesia tertarik ke dua arah yang berlawanan, yaitu (1) ada yang bergerak ke masa lalu, dan (2) ada yang bergerak ke masa depan. Mereka yang bergerak ke masa lalu menganggap dunia itu sudah ada sebelumnya dan dapat ditemukan kembali. Sementara yang bergerak ke masa depan menganggap dunia itu sebagai sebuah bangunan yang akan atau sedang dalam proses pembentukan"[14]. Kelompok OPM sepertinya memakai tataran universal tentang "gagasan pembebasan manusia pada umumnya", sebagaimana dilakukan oleh para inisiator "nasionalisme Indonesia" di masa lalu, dan kelompok ini cenderung bergerak ke masa depan, yaitu dengan menganggap bahwa Papua Merdeka "akan atau sedang dalam proses pembentukan".

Gagasan ini tentu saja bertentangan dengan deskripsi historis tentang cita-cita kebangsaan Indonesia. Seperti dikatakan oleh Effendi, "[d]i awal abad ini berupa cita-cita Indonesia untuk merdeka. Kemudian, di era 45-60 berupa tekad untuk menjaga keutuhan negara. Selanjutnya generasi 66

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.

ingin memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan menyejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi"[15]. Atau, apabila memakai katagori yang lain, nasionalisme dan wawasan kebangsaan Indonesia "secara garis besar dapat dipihak dalam tiga bagian, yaitu zaman sebelum merdeka, zaman setelah kemerdekaan, dan zaman modern saat ini (Indonesia baru)[16]. Sepertinya, dalam konteks wawasan kebangsaan Indonesia, cita-cita OPM bisa dikatakan cenderung kembali ke tahap awal, yaitu "untuk merdeka". Mengapa demkian?

Barangkali jawabannya perlu dicari dari perbedaan nilai-nilai yang dideskripsikan oleh Effendi untuk setiap tahapan. Deskripsi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Deskripsi
1.	Nasionalisme Gelombang Pertama: Nasionalisme Pra-Kemerdekaan	a. Nilai Patriotisme b. Rela berkorban c. Strategi perjuangan d. Kebersamaan dalam perjuangan e. Motivasi dan makna perjuangan f. Keyakinan dalam perjuangan g. Nilai kemanusian dalam perjuangan
2.	Nasionalisme Gelombang Kedua : Nasionalisme Pasca-Kemerdekaan	a. Makna hakiki kemerdekaan b. Merdeka bagi rakyat kecil c. Kebebasan d. Identitas kebangsaan e. Perilaku kepemimpinan f. Penegakan kebenaran g. Menghilangkan penindasan
3.	Nasionalisme Gelombang Ketiga: Nasionalisme Indonesia-Baru	a. Nasionalisme terbuka b. Tujuan akhir perjuangan c. Kecintaan pada kedamaian d. Sejajar dengan bangsa lain e. Sikap patriotisme baru f. Penguasaan IPTEKS g. Sikap dan semangat kemandirian
Sumber: Effendi, Anwar, "Gagasan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Dalam Novel Indonesia Modern", http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Wawasan%20Kebangsaan.doc, diakses tanggal 23 Agustus 2012.		

Studi tentang Manokwari ini pada hakikatnya adalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan di atas. Melalui penelusuran makam Haji Misbach

15 Ibid.
16 Ibid.

sebagai sebuah situs yang bisa menandai sejarah nasionalisme Indonesia dan lahirnya wawasan kebangsaan Indonesia di tanah Papua, studi ini berharap dapat menemukan kesenjangan yang terjadi dalam pengembangan nasionalisme dan wawasan kebangsaan Indonesia di wilayah ini, sehingga memunculkan OPM. Studi ini juga berharap (jika mungkin) dapat menemukan titik temu yang bisa mempertemukan aspirasi 'merdeka' yang diusung masyarakat Papua, khususnya OPM, dengan nasionalisme Indonesia saat ini yang oleh Effendi disebut sebagai "Nasionalisme-Indonesia Baru".

Sejarah Kota Manokwari

Secara etimologis, kata Manokwari berasal dari kata "*Mnukwar*" yang dalam bahasa Biak Numfor berarti "kampung tua"[17]. Sejarah awal Manokwari tidak terlepas dari sejarah Irian Jaya yang, pada awal abad VII Masehi, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya, disebut "Janggi". Diceritakan bahwa para pedagang dari Sriwijaya telah sampai ke daerah ini dan menyatakan bahwa Irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama "Janggi". Sedangkan, dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca (1365 M) dinyatakan bahwa Irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Majapahit sebagaimana tercatat dalam syair ke-14 kata-kata "*Ewanim*" yang ditafsirkan sebagai sebutan "*Onim*" dan "*Sian*" untuk *Kowiai*, suatu daerah yang kala itu terletak di Teluk Bintuni, Manokwari[18]. Hari ini Kota Manokwari adalah salah satu dari 9 kabupaten dan kota di dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/2007 tertanggal 18 April 2007), yang awalnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat (berdasarkan Undang-undang No.45/1999), terdiri atas: Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kota Sorong. Kota Manokwari sendiri sebagai ibu kota Provinsi terbagi atas 12 kecamatan dan 132 desa[19].

17 "Sejarah Kabupaten Manokwari, Situs Badan Pusat Statistik, Kabupaten Manokwari, 30 April 2012, http://manokwarikab.bps.go.id/index.php/about/kabupaten-manokwari/5-sejarah-kabupaten-manokwari, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

18 Ibid.

19 "Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil", in-christ.net (Indonesian Christian Network of Networks), 21 Mei 2008, http://www.in-christ.net/blog/teologi/perda_manokwari_kota_injil, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

Bagi banyak orang Papua, sejarah kota Manokwari dimulai sejak kedatangan Ottow dan Geisslerr, dua orang pendeta agama Kristen Protestan dari Jerman, di pulau Mansinam (di Teluk Doreri) pada tahun 1855[20], walaupun pemerintahan kota sendiri baru terjadi tahun 1898, tepatnya pada tanggal 8 November 1898, ketika pos pemerintahan pertama dibentuk oleh Pemerintahan Hindia Belanda di Manokwari. Pada hari itu, Residen Ternate, Dr. D. W. Horst, atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik Tn. L. A. Van Oosterzee sebagai *Controleer Afdeling Noord New Guinea* (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara) yang waktu itu masih termasuk wilayah keresidenan Ternate. Tanggal 8 November inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Manokwari melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2012 ini, Kota Manokwari telah berusia 114 tahun.

Kisah kedatangan dua orang misionaris Jerman yang menandakan masuknya agama Kristen pertama kali ke Tanah Papua ini merupakan salah satu faktor yang mendorong upaya ditetapkannya Kota Manokwari sebagai Kota Injil. Akan tetapi, menurut Binsar A Hutabarat, S.Th., M.C.S.[21], upaya tersebut bukan semata-mata "untuk mengingatkan masyarakat akan keberadaan Manokwari sebagai gerbang masuknya Injil ke tanah Papua", melainkan karena ada di antara tokoh-tokoh agama di Manokwari yang berpendapat bahwa "usaha melestarikan nilai-nilai Injil ... terbukti telah mengangkat kehormatan masyarakat Papua", dan sekaligus "merupakan aspirasi masyarakat Papua untuk mendapatkan harapan baru dari ketertinggalan mereka dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia."

Keterangan: Papan Selamat Datang Manokwari sebagai Kota Injil

20 "Jangan Lupakan Pulau Mansinam", Liburan.Info, http://liburan.info/content/view/902/43/lang,indonesian/, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

21 "Kontroversi Perihal Perda Manokwari Kota Injil", Op.cit.

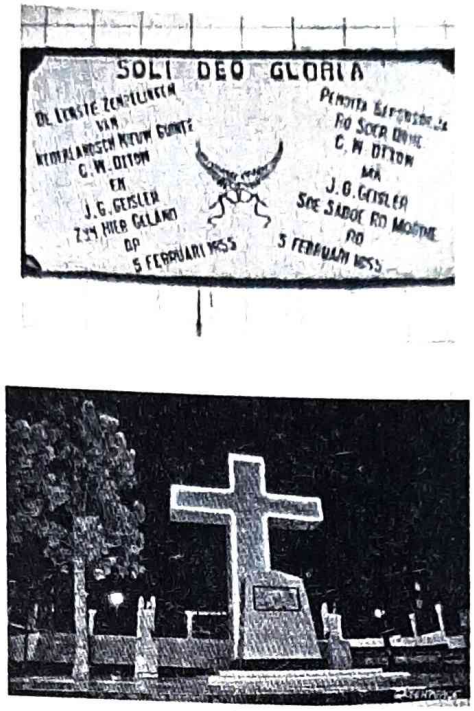

Keterangan: Informasi dalam bahasa Belanda tentang Ottow-Geissler (atau lengkapnya Carl Wilhelm Ottow & Johann Gottlob Geissler), yang berada di bagian bawah kaki prasasti berupa salib dengan ketinggian beberapa meter yang berada di bibir pantai Mansinam, menghadap ke kota Manokwari[22]. Di sisi tulisan berbahasa Belanda tersebut, ada terjemahan dalam bahasa lokal, artinya, kurang lebih, zending pertama untuk Papua Ottow-Geissler tiba di sini 5 Februari 1855. **Sumber:** "157 Tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua", Zona Damai, 5 Februari 2012, http://zonadamai.wordpress.com/2012/02/05/157-tahun-pekabaran-injil-di-tanah-papua/ diakses tanggal 23 Agustus 2012; "Jangan Lupakan Pulau Mansinam", Liburan.Info, http://liburan.info/content/view/902/43/lang,indonesian/, diakses tanggal 23 Agustus 2012

Kota Manokwari juga dikenal sebagai kota di mana OPM – Organisasi Papua Merdeka pertama kali didirikan. Organisasi tersebut didirikan pada Februari 1965, awalnya dengan nama Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM), tepatnya di Sanggeng di rumah keluarga Watofa. Pertemuan saat itu dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Manokwari seperti Kepala Suku Arfak, Lodwijk Madatjan dan Baren Madatjan, Kepala Kepolisian Papua, Mr. John Jambuani, Komandan PVK, Mr. Permenas Ferry Awom, dan beberapa anggota PVK-Polisi Papua serta Angkatan Laut Papua,

22 Wisatawan dapat menyeberang dari Manokwari ke Pulau Mansinam melalui Pantai Kwawi. Dari pantai ini, penyeberangan menuju Pulau Mansinam dapat dilakukan dengan menggunakan perahu tradisional ataupun *long boat*. Untuk penyeberangan yang memakan waktu sekitar 10-15 menit ini, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp 3.000,00-Rp 5.000,00 per orang (data Maret 2009), "Pulau Mansinam", Des Christy/wm/25/03-09, http://www.wisatamelayu.com/id/tour/866-Pulau-Mansinam/navgeo, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

seperti: Benyamin Anari, Terianus Aronggear, Mr. Marani, Fred Ajoi, Jimmy Wambrau, dan lain-lain[23].

Sesungguhnya penduduk asli Manokwari tidak homogen, melainkan terdiri dari beberapa suku, yaitu Sough, Karon, Hatam, Meyeh (Meyakh), dan Wamesa. Suku-suku ini juga memiliki budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain, akan tetapi suku Sough, Hatam dan Meyeh biasanya secara umum dikenal sebagai orang Arfak. Suku Arfak dikatakan mendiami wilayah Pegunungan Arfak dari Manokwari sampai ke Teluk Bintuni. Selain pendatang dari luar Papua, seperti orang Jawa, Buton, Bugis dan Makassar, Kota Manokwari juga menerima pendatang dari Papua sendiri, seperti orang Serui, orang Biak dan sebagainya. Bahkan salah satu kelompok dari orang Biak-Nunfor yang dikenal sebagai suku Doreri sudah lama (sejak masa pemerintahan Hindia Belanda) mendiami daerah pesisir Wondama di Manokwari, sehingga mereka mengklaim diri mereka sebagai penduduk asli Manokwari, sama seperti orang Arfak. Tentang suku Doreri ini, dikisahkan bahwa,

Pada abad ke-15 sebelum Masehi, dua orang penduduk asli Biak Pulau Nunfor yang bermarga Rumbruren dan Rumbekwan memulai pelayarannya untuk mencari Manamaker yang menurut bahasa Biak Nunfor berarti Tuhan Yesus. Mereka berlayar menggunakan perahu dengan tujuan yang tidak menentu hingga akhirnya tiba di Manokwari (Pulau Mansinam dan Lemon). Pada saat itu di *Teluk Mananswari* yang dalam bahasa Nunfor berarti *Mulut Burung* (sekarang Teluk Doreri) belum ada penghuninya, karena masyarakat asli saat itu masih hidup berpindah – pindah. Setelah beberapa hari tinggal di pulau Mansinam, suatu siang mereka melihat ada segumpalan asap di pinggir

23 Anari, John, "Sejarah OPM", West Papua Liberation Organization, http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm, diakses tanggal 23 Agustus 2012. Lihat juga "Sejarah OPM (Organisasi Papua Merdeka)", http://suciptoardi.wordpress.com/2011/08/12/sejarah-opm-organisasi-papua-merdeka/, diakses tanggal 23 Agustus 2012, dan tulisan Kamal, Mustafa, "Menggugat Organisasi Papua Merdeka (OPM)!", Kompasiana – Regional, 27 Oktober 2011, http://regional.kompasiana.com/2011/10/27/menggugat-organisasi-papua-merdeka-opm/, diakses tanggal 23 Agustus 2012, yang mencatat bahwa, pada tahun 1946 di Serui (Yapen Waropen), Silas Papare dan sejumlah pengikutnya pernah mendirikan Organisasi Politik pro-Indonesia yang bernama "Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII)". Di Manokwari pada tanggal 17 Agustus 1947 dilakukan upacara penarikan bendera merah putih yang dipimpin oleh Silas Papare. Upacara itu dihadiri antara lain oleh Johan Ariks, Albert Karubuy, Lodwijk dan Baren Mandatjan, Samuel Damianus Kawab, dan Franz Joseph Djopari serta ribuan rakyat Papua. Peringatan ini diketahui Belanda, sehingga pemuda-pemuda itu ditangkap dan dipenjara selama lebih kurang 3 bulan.

pantai Biriosi. Dua orang tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut, dengan harapan akan menemukan penduduk. Namun, setibanya di pantai Biriosi, tidak terlihat satu orang pun, hanya ada seekor anjing (*Yowiri*) yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Rumbruren dan Rumbekwan. Leher anjing tersebut kemudian dikalungi tali dengan 7 buah tulang ikan. Setelah itu mereka melepas hewan itu kembali. Lewat 7 hari baru datang pemilik anjing atau kepala suku asli yang bernama Yarini. Tetapi pertemuan 3 orang tersebut ternyata tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Karena saling tidak mengetahui bahasa, Yarini menggunakan bahasa isyarat untuk menyuruh Rumbruren dan Rumbekwan kembali ke pulau asalnya (Nunfor). Pasalnya di tempat tersebut ternyata terdapat setan (*suanggi*) yang selalu membunuhi penduduk. Namun sebelum pulang, kedua orang asal Biak itu berjanji akan kembali lagi ke Manokwari untuk membuat perhitungan dengan *suanggi*. Lewat beberapa waktu kemudian, Rumbruren dan Rumbekwan kembali ke Manokwari dengan membawa seorang *mambri* bermarga Rumfabe. Mereka lalu menyusun rencana untuk menghabisi nyawa *suanggi*. Suatu pagi *suanggi* yang dikenal dengan nama Wetori bersama istrinya merasa penasaran terhadap perahu yang dikemudikan oleh Rumbruren dan Rumbekwan yang sedang berlabuh di pesisir pantai Teluk Mananswari. Sebenarnya *mambri* Rumfabe sudah berada di dalam air di laut yang sekarang dikenal dengan nama Kwawi, sambil membawa panah dan parang. Di pantai terdapat bandar kayu panjang yang mengarah laut, dan ke atas kayu itulah Wetori dan istrinya berpijak untuk memangsa Rumbruren dan Rumbekwan yang berada di atas perahu.

Tapi alangkah kagetnya Wetori ketika anak panah yang digunakan Rumfabe langsung menembusi jantung Wetori. Saat itu juga Wetori langsung terjatuh, sementara istrinya langsung lari masuk hutan meninggalkan Wetori. Kesempatan itu digunakan oleh Rumbruren, Rumbekwan dan Rumfabe untuk memenggal kepala Wetori, dan menaruhnya di atas sebuah piring adat untuk dibawa kepada Yarini di pantai Biriosi sebagai tanda pembayaran adat. Badan Wetori sendiri dibiarkan pada tempat itu hingga membusuk dan dimakan cacing. Tempat itu lalu dinamakan Kwawi yang artinya "*cacing makan bangkai Wetori*". Upacara adat lalu dilakukan, karena setan pemangsa yang selama ini ditakuti penduduk Manokwari telah berhasil dibunuh oleh Rumbruren, Rumbekwan dan Rumfabe. Pada saat yang bersamaan juga

dilakukan penukaran makanan. "*nenami – nami kokain, kandaon nenami – namiwa kobur*" itulah bahasa Nunfor yang diucapkan oleh Rumbruren, Rumbekwan dan Rumfabe ketika hendak meninggalkan Yarini kembali ke Pulau Nunfor, yang artinya "*Kitong makan kalau sampai rasanya enak, kami akan tinggal, namun kalau tidak enak kami akan terus pulang*". Lewat beberapa waktu kemudian, 9 marga yang berbeda berlayar dari pulau Biak Nunfor menuju Manokwari. Mereka bermukim di pinggir pantai atau *fanduri waum*, yang dalam bahasa Biak Nunfor berarti *tempat bekumpul*. Tempat tersebut saat ini dikenal dengan nama Fanindi. Selain itu juga mereka bermukim pada pantai *Padarni* yang dalam bahasa Biak Nunfor artinya *tiang lampu* atau *tempat berdiri untuk memanggil orang*.[24]

Kota Manokwari, yang sejak tahun 2001 menjadi ibukota Provinsi Papua Barat[25] mengalami perubahan yang sangat pesat pada periode setelah tahun 2000, khususnya sejak tahun 2008 sampai sekarang. Perubahan tersebut tampak nyata, terutama jika dilihat dari fisik kota yang mengalami perubahan drastis dengan adanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, universitas, rumah sakit, hotel, pertokoan dan *shopping mall*, serta infrastruktur jalan.

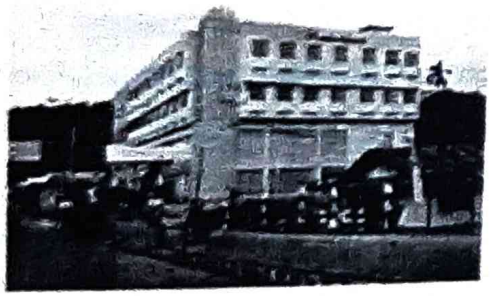

Keterangan: Swiss-Bell Hotel adalah hotel termegah di Manokwari, letaknya tidak jauh dari Pasar Sanggeng.

24 Yandeday, Steven, "Sejarah Pulau Mansinam – Manokwari", EVAN SALVES, 6 Januari 2012, http://sweetvania.blogspot.com/2012/01/sejarah-pulau-mansinam-manokwari.html, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

25 Perlu diketahui bahwa Dasar hukum otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat adalah UU 21/2001 dan Perpu 1/2008. Semula UU 21/2001 ditujukan pada Provinsi Papua yang semula meliputi seluruh wilayah yang semula bernama Irian Jaya. Perpu 1/2008 diterbitkan sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. provinsi pemekaran yang dibentuk setelah UU 21/2001 terbit (Setiawan, Hendi, "Dana Otsus Papua: Wakil Ketua DPR vs Dirjen Otonomi Daerah, Siapa yang Benar?", Kompasian, 15 November 2011, http://birokrasi.kompasiana.com/2011/11/15/dana-otsus-papua-wakil-ketua-dpr-vs-dirjen-otonomi-daerah-siapa-yang-benar/, diakses tanggal 24 Agustus 2012).

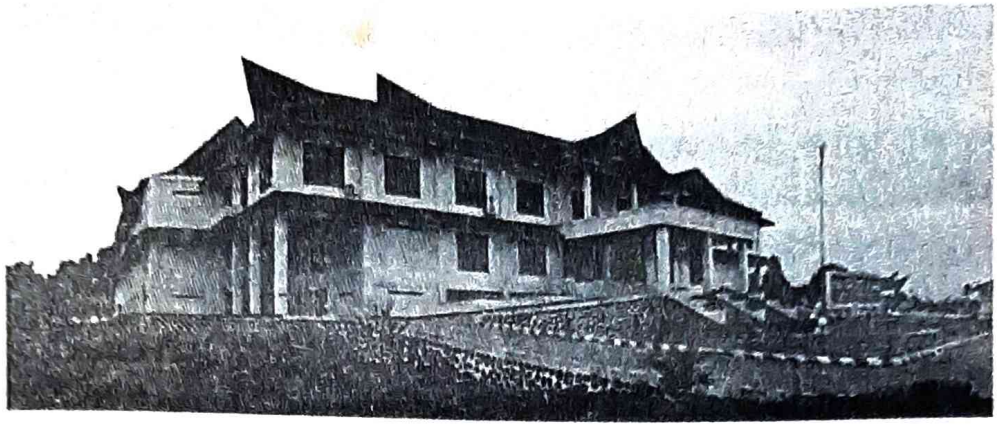

Keterangan: DPRD Kabupaten Manokwari.

Selain itu, perkembangan kota Manokwari juga terlihat dari pertambahan jumlah penduduknya. Penduduk Manokwari yang pada tahun 2010 berjumlah 212.000 jiwa, pada tahun 2011 sudah meningkat menjadi 243.000 jiwa[26]. Data BPS Provinsi Papua Barat sendiri menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk (Kabupten) Manokwari antara tahun 2000 sampai tahun 2010 adalah sebesar 3,97% per tahun, dari 127.622 jiwa menjadi 187.726 jiwa[27]. Pertumbuhan ini sedikit banyak berpengaruh pada perubahan sikap masyarakat Manokwari yang semakin bergaya 'urban', sebagaimana terefleksi dari mode transportasi, perdagangan, dan hiburan yang semakin ramai.

Kompleksitas 'Nasionalisme' di Papua

Ketika kita berbicara tentang 'nasionalisme' di Papua, kita perlu berhati-hati karena pemahaman 'nasionalisme' di wilayah ini bisa mempunyai arti yang berbeda dengan apa yang kita maksudkan, terutama jika nasionalisme yang kita bicarakan lebih mengacu pada 'Nasionalisme Indonesia'. I Ngurah Suryawan, misalnya, menangkap adanya 'nasionalisme Papua' yang disebutnya sebagai

26 "Penduduk Manokwari Terus Meningkat", Situs Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, 10 Desember 2011, http://www.manokwarikab.go.id/website-kabupaten-manokwari--wwwmanokwarikabgoid/news2068218866/78-latest-news1958260390/1125-penduduk-manokwari-terus-meningkat, diakses tanggal 24 Agustus 2012.

27 "Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010", http://irjabar.bps.go.id/?no=609&pilih=tabel1, diakses tanggal 24 Agustus 2012.

'Nasionalisme Bintang Kejora'[28]. 'Nasionalisme Papua' ini, menurut Suryawan yang mengutip Chauvel, 2005 dan Widjojo, dkk., 2009, terkonstruksi karena beberapa hal, yaitu: "[p]ertama, kekecewaan sejarah terhadap proses integrasi ke Indonesia; [k]edua, elite Papua yang merasakan persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia sejak penjajahan Belanda; [k]etiga, pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang timpang dan semakin menunjukkan perasaan berbeda (*sense of difference*); [dan k]eempat, banyaknya pendatang ke Papua yang mendominasi kehidupan ekonomi politik yang semakin memperbesar perasaan termarginalisasi orang Papua di daerah sendiri".

Kondisi semacam itu sesungguhnya tidak kondusif bagi pengembangan 'Nasionalisme Indonesia', oleh karena itu tidak mengherankan jika peran Haji Misbach dan signifikansi kota Manokwari sebagai kota kebangsaan tidak melekat pada warga kota Manokwari hari ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada upaya untuk mengangkat kisah Haji Misbach dan/atau kota Manokwari sebagai tempat pengasingan pejuang-pejuang Kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial Belanda, sebagaimana yang terjadi di Boven Digoel[29]. Bahkan, jika kita perhatikan pendapat Dr. Benny Giay yang dipaparkan Suryawan[30], tampak jelas bahwa pada diri orang Papua ada perasaan menolak sejarah dan nasionalisme Indonesia yang oleh mereka disebut sebagai "Indonesianisasi".

---

28 Suryawan, I Ngurah, "Nasionalisme Bintang Kejora: Subaltern & Gerakan Sosial Orang Papua", Etnohistori.org, Mei 2011, http://etnohistori.org/nasionalisme-bintang-kejora-subaltern-dan-gerakan-sosial-orang-papua-2.html, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

29 Dikatakan bahwa "Pemerintah Belanda mulai membuka Boven Digoel tahun 1927 sebagai tempat pembuangan tahanan politik dan kriminal. Bovel Digoel di Tanah Merah merupakan tempat pengasingan yang menakutkan. Tokoh pergerakan Indonesia Bung Hatta dan Sutan Sjahrir pernah dibuang di Bovel Digoel. Untuk mengenang Bung Hatta, berdiri tegak patung Bung Hatta di kawasan ini" (Praserya, Erwin Edhi, "Jejak Pengasingan Hatta dan Sjahrir", *Kompas.com*, 29 Juni 2012, http://vod.kompas.com/read/2012/06/29/215847/Jejak.Pengasingan.Hatta.dan.Sjahrir, diakses tanggal 28 Agustus 2012). Hal itu juga ditunjukkan pada sinopsis buku *The Journeys 2: Cerita dari Tanah Air Beta*, karya Alanda Kariza dan Fajar Nugros, yang diterbitkan oleh Penerbit Gagas Media pada tahun 2012 ini. Dikatakan bahwa, "Dekat Bandar Udara Boven Digoel, patung Bung Hatta itu berdiri tegak dengan telunjuk tangan kanannya menuding tanah. Dia seperti ingin mengatakan: 'Saya pernah di sini!' Patung itu membelakangi kompleks bangunan lama yang kini menjadi tangsi polisi, bersebelahan dengan bekas Penjara Digoel." —Farid Gaban, Berziarah ke Digul, Penjara Tak Bertepi (belbuk.com, http://www.belbuk.com/the-journeys-2-cerita-dari-tanah-air-beta-p-25352.html, diakses tanggal 28 Agustus 2012).

30 Suryawan, Op.cit.

Referensi

Anari, John. "Sejarah OPM", West Papua Liberation Organization, http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

Effendi, Anwar. "Gagasan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan Dalam Novel Indonesia Modern", http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Wawasan%20Kebangsaan.doc, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

Hadi, Otho H. "*Nation and Character Building* Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan", Situs Wawasan Kebangsaan – Bappenas, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

Kamal, Mustafa. "Menggugat Organisasi Papua Merdeka (OPM)!", Kompasiana – Regional, 27 Oktober 2011, http://regional.kompasiana.com/2011/10/27/menggugat-organisasi-papua-merdeka-opm/, diakses tanggal 23 Agustus 2012

Setiawan, Hendi. "Dana Otsus Papua: Wakil Ketua DPR vs Dirjen Otonomi Daerah, Siapa yang Benar?", Kompasian, 15 November 2011, http://birokrasi.kompasiana.com/2011/11/15/dana-otsus-papua-wakil-ketua-dpr-vs-dirjen-otonomi-daerah-siapa-yang-benar/, diakses tanggal 24 Agustus 2012

Suryawan, I Ngurah. tanpa tahun. "Nasionalisme Bintang Kejora: Subaltern & Gerakan Sosial Orang Papua", Etnohistori.org, http://etnohistori.org/nasionalisme-bintang-kejora-subaltern-dan-gerakan-sosial-orang-papua-2.html, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

Yandeday, Steven. "Sejarah Pulau Mansinam – Manokwari", EVAN SALVES, 6 Januari 2012, http://sweetvania.blogspot.com/2012/01/sejarah-pulau-mansinam-manokwari.html, diakses tanggal 23 Agustus 2012.

BAGIAN II

TANAH MERAH, BOVEN DIGOEL

BAB 6

TANAH MERAH, BOVEN DIGOEL: KOTA PEMERINTAHAN DAN KAMP INTERNIR PADA MASA KOLONIAL

Rosmaida Sinaga

1. Pengantar

Boven Digoel adalah suatu tempat yang terletak di hulu Sungai Digoel, di bagian selatan Papua. Sekarang wilayah itu merupakan wilayah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Boven Digoel merupakan suatu *onderafdeeling* yang dinamakan *Onderafdeeling Boven Digoel*. Ibukota *Onderafdeeling Boven Digoel* adalah Tanah Merah. *Onderafdeeling Boven Digoel* dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 10 Desember 1926 dan Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 529. Sementara pendirian Tanah Merah sebagai ibukota *Onderafdeeling Boven Digoel* berlangsung pada 27 Januari 1927, yang ditandai dengan kehadiran kesatuan militer Belanda di daerah Tanah Merah.[1]

Pembentukan *Onderafdeeling Boven Digoel* bertalian dengan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda tentang hukuman *internering* (pembuangan) dan pengasingan kaum pergerakan bangsa Indonesia yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Orang Belanda

1. ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 529, 1926. Lihat juga *Aanvuling der Militaire Memorie van het Bewaking Detachement aan de Boven-Dogoel 31 Juli 1934, Bundel Ministerie van Kolonie, Kantoor Bevolkingszaken* Hollandia, ARA no. 397.

menyebut Tanah Merah (ibukota *Onderafdeeling Boven Digoel*) sebagai *Deportatie Kamp Boven Digoel* atau tempat pembuangan dan pengasingan politik. Senada dengan sebutan orang Belanda terhadap Tanah Merah, I.F.M. Chalid Salim juga menyebut Boven Digoel sebagai *kamp interniran*.[2] Oleh karena itu, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan Tanah Merah sebagai ibukota *Onderafdeeling Boven Digoel*, didatangkan juga kesatuan militer didaerah itu. Kehadiran kesatuan militer di daerah itu tentunya dimaksudkan untuk mengawasi gerak-gerik kaum internir, yang dianggap mengganggu kepentingan politik pemerintah kolonial di Nusantara.

Pelabelan Tanah Merah sebagai *kamp interniran* berkaitan dengan pembukaan Tanah Merah sebagai kamp konsentrasi tokoh-tokoh pejuang pergerakan Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Tokoh-tokoh pejuang pergerakan Indonesia yang dibuang ke Tanah Merah dituduh sebagai komunis. Oleh karena itu, mereka harus dibuang dan diasingkan ke luar dari daerah asalnya, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi warga di daerahnya. Berdasarkan latar belakang pembentukan *Onderafdeeling Boven Digoel*, penulis tertarik untuk membahas Boven Digoel sebagai kota pemerintahan dan kamp internir pada masa kolonial.

Tulisan ini membahas tentang penegakan pemerintahan kolonial Belanda di *Onderafdeeling Boven Digoel* dan penempatan para tawanan politik di Boven Digoel serta dampak kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut. Oleh karena itu, penulis memberi judul tulisan ini "Boven Digoel: Kota Pemerintahan dan Kamp Internir pada Masa Kolonial."

2. Penegakan Kekuasaan dan Peningkatan Pengaruh Belanda di *Nieuw Guinea*

Pada 1898 Pemerintah Kolonial Belanda menegakkan kekuasaannya di *Nieuw Guinea* bagian barat (sekarang disebut Papua, yang dibagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Pada awal

2 Dalam kamus politik yang ditulis oleh B.N. Marbun disebutkan bahwa Kamp Interniran adalah sebagai suatu tempat yang menempatkan orang atau kelompok orang (tawanan perang, pelarian, dan sebagainya) di suatu tempat tinggal tertentu dan melarangnya meninggalkan tempat tersebut ataupun berhubungan dengan orang lain. Kamp Konsentrasi adalah sebagai tempat penahanan warga masyarakat yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah yang berkuasa dan penahanan itu umumnya dilakukan tanpa proses pengadilan.

penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di *Nieuw Guinea* bagian barat, wilayah itu dibagi menjadi dua *afdeeling*[3] yaitu *Afdeeling Noord* (Utara) *Nieuw Guinea* dan *Afdeeling West en Zuid* (Barat dan Selatan) *Nieuw Guinea*. Kedua *afdeeling* itu menjadi bagian dari Karesidenan Ternate.[4] Pembagian wilayah itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas kehadiran negara kolonial di wilayah itu. Meskipun Belanda berupaya meningkatkan efektivitas pemerintahannya di wilayah itu, keamanan dan ketertiban masih sulit ditegakkan di wilayah *Nieuw Guinea* bagian Selatan. Di wilayah *Nieuw Guinea* Selatan terutama di daerah perbatasan antara wilayah kekuasaan Belanda dan Inggris, Suku Tugeri (Marind-Anim atau orang Marind) yang bermukim di daerah Merauke acapkali melakukan pengayauan dan perompakan ke *Nieuw Guinea* bagian timur, yang merupakan daerah kekuasaan Inggris. Akibatnya, pemerintah Inggris di *Nieuw Guinea* bagian timur mengancam akan memasuki wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di bagian barat *Nieuw Guinea*. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda berupaya menertibkan Suku Tugeri. Untuk menertibkan Suku Tugeri, pemerintah kolonial Belanda berencana untuk membuka pos pemerintahannya di *Nieuw Guinea* Selatan. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada 18 Juni 1901 *Afdeeling West en Zuid* (Barat dan Selatan) *Nieuw Guinea* dimekarkan menjadi dua bagian yaitu *Afdeeling West* (Barat) *Nieuw Guinea* dan *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea*.[5] Dengan demikian, pemekaran *Afdeeling West en Zuid* (Barat dan Selatan) *Nieuw Guinea* dimaksudkan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan antara wilayah kekuasaan Belanda dan Inggris di *Nieuw Guinea*.

Setelah penegakan pemerintahan kolonial di *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea*, para aparat pemerintah yang ditempatkan di wilayah itu ditugaskan untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonial atas penduduk yang bermukim di wilayah itu. Pada masa pemerintahan Asisten Residen *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea*, L.M.P. Plate. diadakan perluasan wilayah pemerintahan di daerah *Nieuw Guinea* Selatan. Perluasan wilayah

---

Afdeeling adalah suatu wilayah yang diatur oleh asisten residen.

ANRI, *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 19, 5 Februari 1898; ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 62, 1898; *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* , No. 142, 1898.

ANRI, *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, No. 25, 18 Juni 1901, *Bundel Algemeene Secretarie*.

pemerintahan itu diwujudkan dengan penempatan seorang *gezaghebber* di daerah Okaba dan seorang asisten pemerintahan (*bestuursassistent*) di daerah Kumbe pada 1913.[6] *Gezaghebber* dan *bestuurassistent* bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah kekuasaan masing-masing.

Upaya lainnya untuk meningkatkan pengaruh pemerintah kolonial atas penduduk di daerah itu dilakukan oleh Asisten Residen *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea*, Plate, adalah mengangkat para kepala kampung. Para kepala kampung bertugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan penduduk lokal. Kepala kampung diangkat berdasarkan atas pilihan oleh penduduknya sendiri.[7] Dengan sistem pengangkatan itu diharapkan para kepala kampung itu dapat membantu pemerintah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di kampung masing-masing.

Kebijakan lainnya yang dijalankan Plate adalah meningkatkan kas daerah. Upaya peningkatan kas daerah ditempuh melalui pemungutan pajak dan membuka wilayah kekuasaannya untuk perburuan burung. Para pemburu burung cendrawasih diizinkan memasuki wilayah itu. Para pemburu burung cendrawasih diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Pada awalnya penduduk lokal membayar pajaknya dalam bentuk penyerahan hasil bumi (kelapa), namun dalam perkembangan selanjutnya beberapa orang membayar pajaknya dalam bentuk uang.[8] Pembayaran pajak dengan uang merupakan bukti bahwa penduduk lokal mulai memahami sistem keuangan pemerintah kolonial.

Plate tidak hanya menuntut kewajiban penduduk di daerah pemerintahannya, tetapi juga meningkatkan akses penduduk ke pasar Merauke melalui pembukaan beberapa ruas jalan. Adapun jalan-jalan yang dibuka oleh Plate yaitu dari Merauke ke Kampung Urum, dari kampung Bahur ke Biruk, dari kampung Kumbe ke Sungai Meliu, dan dari Kumbe

6 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea van L.M.P. Plate*, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 10. Lihat Juga ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1913, No. 415.

7 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea*, L.M.P. Plate, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 10.

8 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea*, L.M.P. Plate, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 11.

ke kampung Sarore.[9] Pembangunan beberapa ruas jalan itu dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah mengawasi tindak-tanduk penduduk dan memudahkan penduduk untuk menjual hasil buminya ke pasar Merauke, sehingga penduduk mampu membayar pajak kepada pemerintah.

Plate juga mengusulkan beberapa program perbaikan kondisi umum penduduk lokal yaitu: memberantas pemenggalan kepala dan perampokan manusia, memberantas pembalasan dendam dan semua tindak kejahatan lainnya, mensosialisasikan pemakaian busana, menghapus sistem pertukaran barang, mensosialisasikan penggunaan mata uang pemerintah, memperbaiki rumah penduduk lokal, mengajukan pengobatan penyakit kelamin yang diderita penduduk lokal.[10] Program kerja Plate tersebut membuktikan bahwa pemerintah kolonial juga berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah kekuasaannya.

Salah satu program kerja Plate adalah mengajukan pengobatan penduduk yang menderita penyakit kelamin kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengajuan pengobatan tersebut bertalian dengan banyaknya penduduk lokal yang menderita penyakit kelamin. Adapun penyebab penduduk lokal banyak yang mengidap penyakit kelamin adalah pelaksanaan adat yang memungkinkan terjadinya seks bebas di wilayah itu. Misalnya, pada saat pesta pernikahan mempelai wanita harus melakukan hubungan seksual dengan para lelaki dari klen wanita. Plate khawatir penyakit kelamin dapat menyebabkan kepunahan penduduk lokal bila pengobatan tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencegah kepunahan penduduk lokal, Plate mendukung upaya para misionaris untuk mendirikan kampung-kampung percontohan di Merauke dan Okaba. Penduduk lokal yang bermukim di kampung-kampung percontohan itu menempati satu rumah untuk satu keluarga. Dukungan Plate itu didasarkan pada keyakinannya bahwa selama pria dan wanita tinggal terpisah di rumah yang berbeda, selama itu pula tidak ada perbaikan kondisi kehidupan penduduk lokal di wilayah itu. Plate juga membongkar rumah pria dan pemuda karena rumah-rumah tersebut merupakan tempat para anak

9 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea, L.M.P. Plate*, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 3.

10 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea, L.M.P. Plate*, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 12-3.

laki-laki yang memasuki masa akil balik melakukan hubungan homoseksual dengan sesamanya atau ayah pelindungnya.[11]

Untuk memberantas penyakit kelamin di kalangan penduduk lokal, pengganti Plate, Asisten Residen L. Berkhout (menjabat asisten residen *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea* dari 15 Oktober 1915 hingga 26 Januari 1918) mengusulkan beberapa tindakan sebagai berikut: melakukan pemeriksaan kesehatan semua penduduk dan semua orang yang pergi ke pedalaman di rumah sakit, menghukum pasien yang menolak untuk dirawat, mengharuskan penduduk lokal tinggal di rumah bersama keluarganya, memerintahkan penduduk yang sehat agar tinggal di kampung terpisah, memajukan perkawinan para pemuda, menjatuhkan hukuman kerja paksa selama 3 bulan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atas wanita muda di hari pernikahannya, dan melarang pendirian dan pengelolaan rumah bordil.[12] Selain itu, pemerintah mewajibkan pemburu burung untuk memeriksakan kesehatan kelaminnya sebelum mendapat izin untuk melakukan perburuan burung. Apabila terbukti para pemburu burung itu menjadi sumber penyakit menular di kalangan penduduk lokal di pedalaman, pemerintah menghentikan pemberian izin kepada pemburu burung tersebut. Pemerintah juga memberlakukan masa waktu yang singkat atas izin perburuan. Jika masa waktu surat ijin telah usai, pemegang surat izin tersebut harus kembali memeriksakan kesehatan kelaminnya untuk memperoleh surat izin baru. Selain tindakan tersebut, pemerintah juga menugaskan seorang dokter ahli penyakit kelamin, Dr. N. Cnopius di *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea*.[13] Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut membuktikan keseriusan pemerintah kolonial untuk memberantas penyakit kelamin di kalangan penduduk lokal *Nieuw Guinea* Selatan dan mengayomi penduduk lokal dari kepunahan.

Kehadiran pemburu burung di *Nieuw Guinea* Selatan mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk membuka pos pemerintahan di

11 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bertuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea* , L.M.P. Plate, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 12, 15 Oktober 1915, hlm. 5-6.

12 ANRI, Laporan Asisten Residen L. Berkhout yang disampaikan kepada pemerintah lewat surat dari Direktur Pemerintahan tanggal, 3370/Btg, 4 April 1918, *Bundel algemeene Secretarie*.

13 ANRI, Surat Inspektur Dinas Kesehatan Umum kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 4031, 31 Maret 1920, *Bundel Algemeene Secretarie*.

pedalaman wilayah itu. Hal itu dimaksudkan untuk mengawasi terjadinya praktik-praktik perburuan liar dan untuk memudahkan pengutipan pajak perburuan burung cendrawasih.

3. Pembukaan Pos Pemerintahan di Boven Digoel

Sebelum pos pemerintahan didirikan di Boven Digoel, pemerintah kolonial melakukan eksplorasi militer pertama di daerah hulu Sungai Digoel pada 1905, yakni pada waktu kapal Pemerintah Kolonial Belanda, Volk, berlayar di Sungai Digoel. Daerah hulu Sungai Boven Digoel itu disebut Belanda dengan nama daerah Boven Digoel (artinya Digoel Hulu). Eksplorasi militer berikutnya dilakukan oleh Belanda dengan menggunakan kapal laut Zwalau pada 1909. Kapal itu berlayar di Sungai Digoel dan anak-anak sungainya. Eksplorasi itu berhasil memetakan sungai-sungai yang mengalir di daerah itu.[14] Selanjutnya pada 1913 penelitian geologi dilakukan di Boven Digoel. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa wilayah yang meliputi 10 ribu hektar itu dinyatakan cocok untuk pertanian, karena iklimnya sehat dan cukup banyak persediaan air serta curah hujannya normal.[15] Pemetaan wilayah yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dimaksudkan untuk mengetahui potensi wilayah kekuasaannya.

Periode 1914-1922 di daerah pesisir Sungai Digoel telah terjadi praktik-praktik perburuan liar terhadap burung cendrawasih yang dilakukan oleh *tukang-tukang pasang*.[16] Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda membuka pos keamanan Asiki. Pos Asiki dibangun untuk menjaga dan mengawasi suku-suku pengayau dan kanibal serta pengawasan terhadap praktik-praktik perburuan liar oleh tukang-tukang pasang. Akan tetapi, pos tersebut tidak bertahan lama karena kondisi alam yang sangat ganas.[17]

---

14 Tarmidzy Thamrin, *Boven Digul: Lambang. Perlawanan Terhadap Kolonialisme* (Surabaya: Ciscom, 2001), hlm. 112.

15 *Prisma*, No. 7 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 15.

16 Tukang-tukang pasang adalah istilah yang dipakai pemerintah kolonial Belanda untuk orang-orang Cina yang berprofesi sebagai pemburu burung cendrawasih di daerah Merauke dan sekitarnya. Lihat *Prisma*, No. 7 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 48.

17 Tarmidzi Thamrin, *Boven Digul: Lambang Perlawanan terhadap Kolonialisme* (Surabaya: Ciscom, 2001), hlm. 112-113).

Pengganti Asisten Residen L. Berkhout yaitu Asisten Residen H.M. Lublink Weddik melanjutkan karya penyelamatan penduduk lokal wilayah *Nieuw Guinea* Selatan dari kepunahan akibat penyakit kelamin. H.M. Lublink Weddik menjabat asisten residen di *Afdeeling Zuid* (Selatan) *Nieuw Guinea* dari 26 Januari 1918 hingga 20 Mei 1922. Dalam rangka pelaksanaan karya penyelamatan itu, H.M. Lublink Weddik memperluas pengaruh pemerintah kolonial di wilayah ini dengan membuka dua pos pemerintahan baru yaitu di Merauke Hulu dan Boven Digoel, hulu Sungai Digoel pada 1918. Pembukaan kedua pos itu menyebabkan hubungan pemerintah dengan penduduk lokal di sepanjang Sungai Digoel, Mappi, Bian, Kumbe dan Merauke semakin terbuka. Selain itu, pembukaan pos pemerintahan di hulu Sungai Digoel menjadi pendorong bagi para pedagang dan pemburu burung memasuki wilayah itu.[18] Kehadiran pemerintah kolonial di hulu Sungai Digoel (Boven Digoel) meningkatkan keberanian para pedagang dan pemburu burung memasuki wilayah itu.

Pada Mei 1918, 20 kapal motor yang dimiliki sejumlah pedagang di Merauke bersama 405 orang pemburu burung berangkat ke Sungai Digoel untuk berburu. Ketika mereka melakukan pemburuan burung di daerah pedalaman Sungai Digoel, penduduk lokal menyerang mereka pada Juni 1918. Para penyerang itu berhasil merampas 3 senapan dan 200 peluru. Serangan penduduk lokal itu menyebabkan seorang pemburu terbunuh di tempat kejadian, empat orang terluka berat, dan seorang mengalami luka ringan. Dalam perjalanan pulang 3 orang dari 4 orang yang terluka berat itu meninggal di atas kapal. Kurangnya sarana penghubung menyebabkan pemerintah tidak dapat bertindak cepat terhadap para terdakwa. Dua bulan setelah penyerangan itu, Brigade Polisi Bersenjata dikirim untuk menyelidiki peristiwa itu.[19] Keterlambatan penyelidikan itu mengakibatkan hasil penyelidikannya tidak maksimal.

Pemerintah secara berkelanjutan berupaya memperluas daerah pengaruhnya di *Nieuw Guinea* Selatan. Oleh karena itu, para pejabat pemerintah bersama polisi bersenjata yang bertugas di daerah itu melakukan perjalanan dinasnya (*turne*) ke kampung-kampung secara rutin. Perjalanan

18 Perpustakaan Nasional, *Koloniaal Verslag*, 1999, hlm. 75.
19 Perpustakaan Nasional, *Koloniaal Verslag*, 1919, hlm. 75. Lihat juga *Koloniaal Verslag*, 1920, hlm. 125.

dinas tersebut dimaksudkan untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi di wilayah itu. Dari hasil penyelidikan itu diketahui bahwa banyak penduduk lokal yang menderita penyakit kelamin. Hasil penyelidikan itu dilaporkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Pemerintah di Batavia menanggapi laporan itu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jenderal pada 17 April 1920 Nomor 2. Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa usaha penyelamatan penduduk *Nieuw Guiena* Selatan diserahkan kepada para misionaris Katolik yang bertugas di daerah itu dan dalam menjalankan tugasnya itu para missionaris mendapat bantuan dari pemerintah.[20] Pemerintah kolonial menyadari keterbatasannya dalam menanggulangi penyakit kelamin yang diderita penduduk lokal di *Nieuw Guinea* Selatan, sehingga pemerintah bekerja sama dengan para misionaris.

4. Pembangunan Onderafdeeling Boven Digoel

Pada 1926 pemerintah Hindia Belanda kembali melakukan pembaharuan pemerintahan di *Nieuw Guinea*. Pembaharuan pemerintahan dilakukan dengan menetapkan daerah aliran hulu Sungai Digoel di *Onderafdeeling Nieuw Guinea* Selatan (Karesidenan Amboina) menjadi *onderafdeeling* tersendiri yang dinamakan *Onderafdeeling Boven Digoel*. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal 10 Desember 1926 Nomor 2x *Onderafdeeling Boven Digoel* didirikan dan dimasukkan menjadi bagian dari Karesidenan Ambon. *Onderafdeeling Boven Digoel* ditempatkan di bawah kekuasaan seorang perwira angkatan darat dengan jabatan *gezaghebber* yang bertugas sebagai kontrolir. Kepala *onderafdeeling* ini berkedudukan di Tanah Merah.[21] Pejabat pemerintah ini diberi gaji sebesar f 100 per bulan di luar tunjangan militernya.[22] Pengangkatan seorang perwira angkatan darat untuk menjabat kepala pemerintahan *Onderafdeeling Boven Digoel* berkaitan dengan

ANRI, Besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 2, 17 April 1920, *Bundel Algemeene Secretarie*.

ANRI, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 529, 1926. Lihat juga *Aanvuling der Militaire Memorie van het Bewaking Detachement aan de Boven Digoel* 31 Juli 1934, *Bundel Ministerie van Kolonie, Kantoor Bevolkingzaken Hollandia*, ARA No. 397, hlm. 1.

ANRI, Uitreksel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 2x, 10 Desember 1926, *Bundel Binnenlandsch Bestuur*, No. 241.

kondisi daerah itu yang membutuhkan seorang pemimpin yang kuat untuk menegakkan keamanan dan ketertiban.

Peningkatan status pos pemerintahan di Boven Digoel menjadi sebuah *onderafdeeling* yang dinamakan *Onderafdeeling Boven Digoel* berkaitan dengan penahanan tawanan politik dalam jumlah yang banyak oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ibukota *onderafdeeling* ini adalah Tanah Merah yang terletak di tepi aliran Sungai Digoel.[23] Adapun yang menjadi dasar pemikiran pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan Kamp Konsentrasi Boven Digoel sebagai berikut: pertama, secara politik, yaitu Pemerintah Kolonial Belanda berkeinginan untuk mematahkan semangat juang tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia; kedua, secara geografis, yaitu bahwa pemerintah kolonial Belanda berkeinginan untuk menutup dan memutuskan hubungan keluarga serta hubungan antara sesama pejuang; ketiga, yaitu bahwa pemerintah kolonial Belanda berkeinginan untuk mencari daerah baru sebagai lahan penunjang perekonomian.[24]

Pendirian Kamp Konsentrasi massal diputuskan pada suatu pertemuan luar biasa *Raad van Nederlandsch-Indie* (Dewan Hindia Belanda) yang diadakan pada 18 November 1926, beberapa hari setelah pemberontakan komunis yang berawal di Jawa Barat pada 12 November 1926. Sebetulnya Gubernur Jenderal de Graeff sudah memutuskan sebelum mengundang para pejabat dalam pertemuan tersebut, bahwa tidak bisa ditawar lagi untuk menempatkan para pemimpin komunis yang berbahaya di tahanan secepat mungkin demi keamanan publik. Pada 17 November 1926 Gubernur Jenderal de Graeff menginstruksikan kepada Jaksa Umum untuk memerintahkan para kepala administrasi wilayah di Jawa dan Sumatera untuk melaksanakan keputusan itu. Dalam pandangan de Graeff, penahanan hanya memberikan tindakan sementara, karena seusai penyelidikan, sebagian besar dari mereka yang ditahan harus dibebaskan karena tiadanya bukti legal untuk mendukung pemberian hukuman, dan selanjutnya mereka akan memperbaharui aktivitasnya lagi. Sebab itu, salah satu cara untuk mencegah terjadinya hal tersebut, misalnya dengan mengasingkan para pemimpin utama komunis dalam jumlah besar.

23 Penduduk lokal menyebut Sungai Digoel dengan Sungai Kiut. Sungai Digoel merupakan sungai terbesar kedua di *Nieuw Guinea* setelah Sungai Mamberamo.

24 I. F. M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun di Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea-Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 189-191.

Gubernur Jenderal yakin bahwa tindakan seperti itu harus dikenakan kepada pemimpin utama dan berjanji semua interniran dibawa ke tempat yang sama sejauh mungkin. Usulan de Graeff itu didukung oleh Dewan Hindia Belanda dan diputuskan bahwa pengasingan harus dimulai pada mereka yang ditangkap di Jawa Barat. Sementara itu, pengasingan bagi mereka yang ditahan di berbagai tempat akan mengikuti secepatnya setelah kantor Jaksa Umum menerima informasi yang diperlukan bagi tindakan tersebut. Alasan-alasan yang diberikan dalam rancangan keputusan pengasingan harus jelas dan dibatasi bahwa orang yang bakal diasingkan adalah anggota PKI, partai yang bermaksud menggulingkan dan membentuk pemerintah baru dengan jalan radikal. Sebagai tindak lanjutnya, pada 19 November 1926 Jaksa umum Duyfjes mengirim telegram kepada para kepala administrasi regional dan menginformasikan bahwa berkaitan dengan kerusuhan di berbagai pemerintah wilayah dan kekacauan di Jawa Barat, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan pengasingan dalam skala besar terhadap para pemimpin komunis di seluruh Hindia Belanda, yang tindakannya memberikan ancaman serius terhadap ketenangan publik dan tatanan. Para kepala administrasi regional ditugaskan untuk menginterogasi orang yang akan diasingkan. Oleh sebab itu, seseorang yang diidentifikasi sebagai pemimpin komunis atau propagandis yang bisa diasingkan tergantung pada interpretasi para pemimpin lokal.[25]

Tawanan politik yang ditahan oleh pemerintah kolonial, merupakan orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan komunis di Jawa (Jatinegara, Tangerang, Banten, Priangan, Surakarta, Banyumas, Pekalongan, dan Kedu) dan Sumatera Barat (Silungkang, Bukit Tinggi, Padang, dan Agam). Meluasnya pemberontakan komunis tersebut, memacu pemerintah kolonial untuk membentuk dua panitia penyelidik yaitu satu untuk Karesidenan Banten dan satu lagi di Sumatera Barat. Panitia Penyelidik itu bertugas untuk meneliti penyebab suburnya gerakan komunis. Berdasarkan hasil penyelidikan dari Panitia Penyelidik diketahui bahwa pemberontakan PKI itu disebabkan kondisi sosial ekonomi yang dilatari sikap kaku pemerintah kolonial dalam mengadakan perubahan yang tak sepenuhnya dapat dimengerti oleh rakyat Banten. Sedangkan di Sumatera Barat dilatari oleh perubahan dalam berbagai

25 Takashi Shiraisi, *Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 3-6.

yang dikenakan pemerintah kepada rakyat, seperti perubahan dalam soal pemukiman dan kesatuan hukum bumi putera (nagari), penggunaan dan eksploitasi hutan, peraturan agraria, pasar, kredit, serta formasi anggota kepolisian. Perubahan-perubahan tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, di Sumatera Barat terjadi perbenturan dua kewibawaan, antara kewibawaan tradisional berdasarkan adat Minang dan kewibawaan pemerintah kolonial. Pada saat bersamaan, masyarakat Sumatera Barat sudah mengenal gerakan nasionalis yang dikenalkan oleh Abdoel Moeis, penulis roman salah asuhan. Moeis menyebarkan anti kolonialisme di daerah itu. Propaganda Moeis itu berhasil membangkitkan keresahan masyarakat, yang menjadi landasan untuk dukungan yang luas terhadap pemberontakan yang dicetuskan kaum komunis. Ketimpangan ekonomi dan perubahan sosial yang belum dipahami masyarakat dimanfaatkan oleh propangandis-propagandis komunis di Sumatera Barat.[26] Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) meletus di Banten, Batavia, dan Priangan pada malam hari, 12 November 1926. Pemberontakan PKI di Batavia dapat ditumpas pada hari berikutnya, sedangkan di Banten dan Priangan pada bulan Desember 1926. Setelah Belanda berhasil menumpas pemberontakan PKI di Jawa, pemberontakan PKI kembali meletus di Sumatera pada 1 Januari 1927. Namun, pemberontakan itu berhasil dipadamkan Belanda pada 4 Januari 1927. Pemerintah kolonial menangkap 13.000 orang dan menembak beberapa orang. Sebanyak 4.500 orang dijebloskan ke dalam penjara dan 1.308 orang dikirim ke penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digoel, yang dibangun pada 1927 untuk mengisolasi mereka. [27]

Tanah Merah dan lingkungan sekitarnya dipilih oleh pemerintah kolonial sebagai lokasi penahanan tawanan politik. Pembukaan Tanah Merah sebagai ibukota *Onderafdeeling Boven Digoel* berlangsung pada 27 Januari 1927, yang ditandai dengan kehadiran empat brigade infanteri dan satu brigade zeni di Tanah Merah. Tanah Merah terletak pada jarak 465 Km dari muara Sungai Digoel dan 230 Km dari pantai. Sebelum dijadikan lokasi penahanan tawanan

26 *Prisma*, No. 7, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 15.

27 M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 371-2).

politik, Tanah Merah merupakan hutan rimba yang diselingi dengan hutan sagu, sehingga menciptakan kesan yang menyeramkan.[28]

Pendirian *Onderafdeeling Boven Digoel* diikuti dengan pembukaan sekolah Katolik di daerah ini. Sekolah katolik yang dibuka di *onderafdeeling* ini berada di kampung Gatote, Mandung, Digoel dan Dinah.[29] Hal ini membuktikan bahwa pembukaan pos pemerintahan di *Nieuw Guinea* Selatan selalu diikuti dengan pembukaan sekolah-sekolah rakyat. Pelayanan pemerintah di bidang pendidikan merupakan wujud kehadiran negara kolonial di tengah masyarakat NNG.

Penduduk lokal yang bermukim di aliran kanan Sungai Digoel adalah orang-orang Mappi. Penduduk yang bermukim di aliran kiri Sungai Digoel terdiri atas orang-orang Papua Mandobo, Auyu, dan Muyu. Penduduk Mappi bersifat nomaden. Mereka selalu berupaya untuk menemukan daerah yang ditumbuhi pohon sagu. Orang Muyu menanam pohon sagu di sekitar tempat tinggalnya. Sagu merupakan makanan pokok orang Muyu sehingga sagu menjadi tanaman utamanya. Tanaman lainnya adalah pisang, ubi, tebu, cabai dan papaya. Cabai dan papaya banyak ditemukan di daerah orang Muyu.[30] Dari jenis-jenis tanaman orang Muyu tersebut diketahui bahwa makanan mereka telah bervariasi.

Penduduk lokal yang bermukim di aliran Sungai Digoel menerapkan pembagian kerja antara wanita dan pria. Para wanita bertugas untuk mengolah sagu, menyiapkan makanan, mengasuh anak, mencari kayu bakar, mengumpulkan hasil hutan, dan memelihara ternak (babi dan anjing). Sedangkan para pria mengerjakan tugas yang lebih berat seperti menebang pohon, membangun dan memperbaiki rumah, membuat perahu, melakukan perburuan, dan menangkap ikan, serta melakukan perjalanan pengayauan.[31]

Penduduk lokal membangun rumah panggung yang tingginya 1.0 meter dari atas permukaan tanah. Rumah dibangun di atas tonggak-tonggak kayu

28 *NA, Aanvuling der Millitaire Memorie van het Bewaking Detachment aan de Boven Digoel, Bundel. Ministerie van Kolonie, Kantoor Bevolkingzaken Hollandia*, ARA No. 397, hlm. 1-2.

29 ANRI, *Memorie van de Gezaghebber D.H. Fikkert, Oktober 1928 – Januari 1933, Zuid Nieuw Guinea*, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 18.

30 NA, Aanvuling der Militaire Memorie van het Bewaking Detachement aan de Boven Digoel 31 Juli 1934, *Bundel Ministerie van Kolonie, Kantoor Bevolkingzaken Hollandia*, ARA N0. 397, hlm. 14-5.

31 NA, *Aanvuling van der Militaire Memorie van het Bewaking Detachement aan de* Boven Digoel 31 Juli 1934, *Bundel Ministerie van Kolonie, Kantoor Bevolkingzaken Hollandia*, ARA No. 397, hlm. 25-6.

yang kuat. Dalam rumah tersebut terdapat ruang kaum laki-laki dan ruang kaum perempuan yang saling terpisah. Tungku perapian terdapat pada setiap ruang dalam rumah itu. Kaum wanita tidak diperkenankan memasuki ruang kaum pria. Mereka berpendapat bahwa kehadiran kaum wanita di ruang kaum pria akan menodai kebersihan ruang kaum pria tersebut. Hubungan suami isteri tidak berlangsung dalam rumah, melainkan di hutan. Hal ini disebabkan dalam sebuah rumah didiami oleh beberapa keluarga. Rumah yang dibangun biasanya hanya ditempati untuk beberapa tahun saja. Setelah itu rumah yang lama tersebut dirobohkan. Di daerah Muyu, penduduknya membangun rumah baru di dekat rumah yang lama. Sedangkan di daerah Mappi dan Digoel, sebagian besar penduduknya membangun rumah di lokasi yang baru, di tempat yang banyak ditumbuhi sagu. Syarat utama pemilihan lokasi pemukiman bagi orang Mappi dan Digoel adalah tersedianya tanaman sagu, karena sagu merupakan makanan pokok mereka. Oleh karena itu, pemukiman mereka pada umumnya terletak di sekitar aliran sungai, tempat ditemukannya pohon sagu. Masing-masing keluarga memiliki hak atas tanah yang diolahnya, termasuk lahan pohon sagu dan tanaman lainnya di sekitar rumahnya dan di dusun-dusun sagu yang dibukanya. Penduduk lokal membagi tempat pemukiman yang dibatasi oleh anak-anak sungai dari aliran utama sungai itu. Mereka membagi tanah dengan memperhatikan agar masing-masing keluarga menguasai tanah yang terletak di aliran hulu sungai.[32] Hal ini berarti pada saat itu orang Mappi dan Digoel masih hidup nomaden, sedangkan orang Muyu sudah hidup secara menetap.

5. Kehadiran Para Tawanan Politik di Boven Digoel

Tidak lama setelah pembangunan *Onderafdeeling Boven Digoel*, Kapten L. Th. Becking dengan pasukannya yang kebanyakan berasal dari Ambon dan tawanan pekerja dikirim ke Boven Digoel untuk membangun kamp yang akan dihuni rombongan interniran pertama, yang dijadwalkan tiba pada 27 Maret 1927. Kapten Becking bersama rombongannya tiba di Tanah Merah pada Januari 1927. Selama dua bulan mereka membangun barak, gudang,

32 NA, *Aanvuling van der Militaire Memorie van het Bewaking Detachment aan* Boven Digoel 31 Juli 1934, *Bundel Ministerie van Kolonie, Kantoor Bevolkingzaken Hollandia*, ARA No. 397, hlm. 26-30.

rumah sakit, stasiun radio, kantor pos, dan tempat mandi besar di aliran sungai bagi tentara dan tawanan. Rombongan pertama para interniran dan keluarganya tiba pada Maret 1927. Ada 50 orang interniran, termasuk seorang Cina dan 30 keluarga. Para interniran itu semuanya berpakaian rapi, dengan kostum tropis berwarna-warni, bersepatu dan kaus kaki bersih, topi, koper, dan sebuah payung yang dikepit di bawah lengan.[33]

Penduduk Boven Digoel terus bertambah dengan kehadiran para interniran rombongan berikutnya. Pengawas M.A. Monsju bersama dengan rombongan ketujuh interniran tiba di Tanah Merah pada 30 Oktober 1927. Kedatangan M.A. Monsju di Boven Digoel dimaksudkan untuk menggantikan Kapten Becking sebagai penguasa Digoel. Ketika M.A. Monsju tiba di Tanah Merah, penduduk Kamp Boven Digoel berjumlah sekitar 920 jiwa, yang terdiri dari 538 interniran dan 382 anggota keluarga. Pada Januari 1928, jumlah penduduk di Kamp Boven Digoel mencapai 1.139 jiwa, yang terdiri dari 666 interniran dan 473 anggota keluarga. Ketika kunjungan W.P. Hillen, anggota Dewan Hindia Belanda ke Boven Digoel pada April 1930, penghuni kamp berada di titik puncak, dengan 2.000 jiwa, termasuk 1.308 interniran.[34]

Para tawanan di Boven Digoel ditempatkan di dua lokasi yang berbeda yaitu di kamp interniran pertama, Tanah Merah dan kamp interniran kedua, Tanah Tinggi. Kamp konsentrasi Tanah Merah terdiri dari tiga wilayah yang berbeda yang dipisahkan oleh sungai-sungai kecil, yaitu:[35]

1. Wilayah administratif (*bestuursterrein*) sebagai tempat tinggal para pejabat sipil

   Dari dermaga terhampar sebuah jalan berkerikil besar menuju ke bukit. Di sepanjang lintasan sungai, di sisi kanan, terdapat bangunan memanjang bagi motorist, staf yang dipekerjakan untuk merawat perahu-perahu motor, dan beberapa rumah batu bagi para pegawai sipil rendahan dan staf polisi, semuanya dikelilingi taman-taman berukuran kecil yang terawat

33 I. F. M. Chalid Salim, *Lima Belas Tahun di Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea-Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 78-84.

34 Takashi Shiraisi, *Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 10.

35 Takashi Shiraisi, *Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 20-29.

rapi di sisi kiri. Lalu sebuah rumah penginapan baru, pasanggrahan bagi pelaut, bangunan yang pernah digunakan sebagai klab sipil (*burgersocieteit*), tempat pemutaran film-film bisu seperti Tarzan, Tom Mix, dan Dauglas Fairbank dengan proyektor sederhana. Di sebelah kiri rumah penginapan terdapat lapangan tenis bagi sipil dan tentara, lalu "Oranye Park" yang memanjang di sisi lintasan sungai, di taman itu berdiri rumah tinggal yang besar dan megah, menyerupai sebuah istana kecil, tempat tinggal kepala pemerintahan asisten residen tahun 1930-an. Di sebelahnya terdapat rumah yang lebih sederhana yang didiami oleh komandan militer garnisium berpangkat kapten. Di sebelah rumah penginapan terdapat sebuah jalan lebar berbatu, dan di sepanjang jalan itu terdapat stasiun pembangkit listrik, kantor pos, penjara sipil, dan gereja Katolik dengan pusat misinya. Di ujung jalan berbatu terdapat terdapat lapangan tembak dan tanah lapang yang menjadi batas kamp pembuangan, tempat di mana sebuah lapangan udara dibangun pada akhir 1930-an. Di persimpangan rumah penginapan dan stasiun tenaga listrik terdapat sebuah toko kelontong Cina milik Tan Toey. Di sebelah toko itu berderet-deret rumah kediaman para pejabat urusan pribumi, yang dibangun pertama kali pada 1927 untuk wedana (kepala distrik) dari Sunda, Suria Atmadja, dan asisten wedana dari Minangkabau, Bitek. Selain itu di sepanjang jalan itu juga terdapat kantor administrasi, gereja Protestan dan kediaman dokter yang berdekatan dengan rumah-rumah pejabat sipil dan perwira polisi. Ke arah pedalaman terhampar sebuah ladang rumput, yang pernah dikelola sebagai ladang buatan yang dimaksudkan untuk menanam padi atas perintah asisten wedana. Namun proyek penanaman padi itu gagal. Lahan itu digunakan para interniran untuk menanam sayur-sayuran dan tanaman lain, yang menjadikan Digoel berswasembada sayuran.

2. Wilayah militer

Kamp militer berada di lokasi strategis, di antara dua sungai kecil, satu sungai memisahkannya dari wilayah administratif dan satunya dari wilayah pemukiman para interniran. Di kamp militer terdapat barak-barak militer, kantor komandan garnisun, bangsal orang sakit, gudang amunisi, stasiun radio, kantin, penjara, dapur umum, asrama wanita,

dan lapangan kecil untuk olah raga. Fasilitas-fasilitas pertama kamp ini dibangun secara tergesa-gesa pada 1927. Bangunannya terbuat dari kayu dan alang-alang. Oleh karena itu, pada 1934 Gubernur Jenderal de Jonge memutuskan untuk merehab bangunan itu menjadi semi permanen. Pada awalnya kamp militer terdiri dari lima rumah, yang kemudian berkembang menjadi tujuh peleton infanteri. Setiap peleton infanteri terdiri 16 hingga 20 personel di bawah komando seorang tentara Eropa atau pribumi berpangkat sersan. Para militer itu bertugas untuk menjaga keamanan dan tatanan di Tanah Merah, melakukan penjagaan secara periodik di Tanah Tinggi, dan melakukan patroli ke seluruh wilayah Digoel.

3. Wilayah kamp konsentrasi sebagai tempat pemukiman para interniran. Melewati kamp militer dan menyeberangi sebuah jembatan di atas sungai kecil, jalan berbatu paling lebar menembus kamp interniran, yang dibagi menjadi dua bagian. Memasuki kamp itu, gedung pertama di sisi kiri adalah klinik kecil bagi interniran, Rumah Sakit Wilhelmina. Di sepanjang jalan utama itu terletak kampung A,B, dan berbatasan dengan hutan di utara, Kampung C, terletak di sisi kiri jalan dan membelakangi Sungai Digoel. Pada awalnya para interniran hidup terkotak-kotak menurut etnis. Di ujung utara kamp, di tepi sungai terdapat Kampung Ujung Sumatera, yang penghuninya mayoritas etnis Minangkabau. Etnis Aceh dan Lampung menetap terpisah. Orang-orang dari Jawa: etnis Madura, Jawa dan Sunda berkumpul di pemukiman sendiri. Orang Banten, sebagian besar mereka yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 di Banten, membentuk sebuah kelompok terpisah. Sebuah gedung kongres yang terletak di sisi kanan jalan utama, digunakan sebagai gedung teater untuk memutar film dan sebagai tempat berkumpul pada acara-acara festival. Di kampung B terdapat sekolah dan kantor utama administrasi kampung. Kampung ini memiliki satuan polisi sendiri yang bernama ROB (*Rust en Orde Bewaaders*) atau Penjaga Ketertiban dan Tatanan. Di kampung C terdapat sebuah mesjid dan lapangan tenis. Di sebelah Kampung Ujung Sumatera terdapat tanah makam. Di dekat jalan Tanah Makam terdapat Kampung D, E, F, dan G. Pada akhir 1930-an keempat kampung tersebut telah ditinggalkan penghuninya karena mereka mendapatkan pembebasan

bertahap, sehingga penduduk kampung tersebut menyusut dari angka tertinggi 2.100 jiwa pada 1929 menjadi kurang dari 1.000 jiwa pada pertengahan tahun 1930-an.

Kamp interniran Tanah Tinggi merupakan kamp interniran tingkat kedua, setelah kamp interniran Tanah Merah. Tanah Tinggi terletak 40 Km ke arah utara Tanah Merah. Tanah Tinggi alamnya lebih ganas dan lebih seram serta lebih menakutkan. Para interniran yang ditempatkan di Tanah Tinggi merupakan para pemimpin pergerakan yang sangat berbahaya menurut pandangan Pemerintah Kolonial Belanda.[36] Para interniran yang ditempatkan di Kamp Konsentrasi Tanah Tinggi adalah orang-orang yang masuk kategori *onverzoelijken*, yaitu mereka yang keras kepala, nekad, berkemauan baja, berprinsip, dan tak mau menyerah. Mereka menahan harapan untuk pulang dan bertahan dalam kehidupan yang buruk untuk tidak menyerah. Pemerintah hanya menyediakan jatah makanan rutin untuk mereka. Selain itu, mereka mengurus sendiri seluruh kebutuhannya. Di Tanah Tinggi terdapat 43 rumah yang terpisah satu sama lain. Rumah-rumah itu dibangun di tempat-tempat yang mereka pilih sendiri. Taman-taman rumah mereka tidak ada yang terawat. Mereka menolak untuk membangun jalan sendiri, sehingga tidak ada jalan setapak yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya. Satu-satunya jalan di Tanah Tinggi adalah sebuah jalan yang dibangun oleh pemerintah, sebuah jalan masuk kecil menuju Tanah Tinggi. Pada pertengahan 1930-an para interniran yang tinggal di Tanah Tinggi terbagi dalam tiga kelompok yaitu: pertama, kelompok yang memandang Aliarcham sebagai pemimpin mereka, seorang pemimpin teladan yang harus diikuti tentang seorang komunis yang seharusnya, jauh setelah kematiannya pada 1931; kedua, kelompok yang dipimpin oleh Sarjono, Ngadiman dan Winanta, yang membangun kader komunis mereka sendiri di dunia hutan rimba itu; ketiga, kelompok yang dipimpin tiga kader PKI yang kembali dari Moskow: Woworoentoe, Daniel Kamoe, dan Clementi Wentoek. Mereka sangat bangga dengan pelatihan yang didapatnya di Moskow dan bersikeras bahwa semua buku tentang komunis, selain yang diterbitkan di Rusia

36 A. Hasjmy, *Tanah-Merah: Digul Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34-35.

adalah palsu. Pada 1935 ketiga kelompok tersebut, bertemu, berdiskusi dan menyepakati "Konvensi Anti Pen-Digoel-an, yang intinya bersepakat untuk tidak menyerah. Namun, pada 1939 Sarjono mengakhiri sikap kerasnya, sehingga ia bersama kelompoknya meminta dipindahkan ke Tanah Merah. Tak lama kemudian, kelompok Moskow mengikuti jejak kelompok Sarjono. Dengan demikian, yang tinggal di Tanah Tinggi hanya mereka "pengikut sejati Aliarcham" yang berjumlah 25 orang. Mereka berhasil bertahan hingga penutupan kamp pada 1943, yang kemudian dievakuasi ke Australia.[37]

Para tawanan yang termasuk kategori pengikut dalam aksi melawan pemerintah ditampung di Tanah Merah. Penahanan di Tanah Merah dimaksudkan untuk memberikan hukuman jera yang menyelamatkan para tawanan dari kesalahan baru. Rumah para tawanan di Tanah Merah berjumlah 602 buah dengan jumlah penghuninya kira-kira 2000 jiwa. Rumah-rumah para tawanan itu terawat baik, semuanya tertutup dengan atap besi. Pekarangannya ditanami dengan rapi, jalan-jalan terawat dengan baik, yang dilengkapi dengan penerangan listrik di sepanjang jalan-jalan kampung. Fasilitas lainnya yang tersedia di Tanah Merah adalah dua sekolah, sebuah rumah sakit, sebuah jaringan telepon, dan sebuah gedung bioskop sederhana. Penghuni kamp interniran Tanah Merah menunjukkan sikap yang tenang dan sopan. Pada umumnya orang yang mengunjungi mereka akan berpendapat bahwa mereka tidak berada di tengah para perusuh dan musuh pemerintah yang berbahaya, sehingga tidak perlu mempersenjatai diri untuk mengunjungi kamp tersebut. Penghuni kamp itu hanya beberapa orang saja yang menunjukkan sikap penolakan terhadap orang Eropa. Meskipun para tawanan merupakan bagian dari kelompok yang sama, dihukum karena kenyataan yang sama, dan memiliki idealisme yang sama, gejala perpecahan dalam masyarakat kecil itu tidak dapat dihindarkan. Dalam masyarakat itu terdapat kelompok yang terbagi secara rasial. Ada kelompok yang melancarkan teror terhadap kelompok lain, ada yang bersifat lemah dan selalu terancam, dan ada juga yang tinggi hati. Kenyataannya hanya sedikit prinsip persamaan yang dianut. Orang-orang Sumatera (terutama orang Minangkabau) merupakan kelompok yang paling banyak menyendiri dan memandang rendah kelompok lain. Orang Jawa dan

37 Takashi Shiraisi, *Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 39.

orang Sunda saling berdampingan tetapi orang jawa lebih banyak penganut prinsip dibandingkan dengan orang-orang dari Priangan. Orang-orang Sunda cenderung mau bekerja sama dengan pemerintah. Sebaliknya orang-orang Banten lebih memegang prinsip dan menunjukkan sikap penolakan terhadap orang-orang Barat yang dianggapnya kafir. Kurangnya kesamaan pandangan di antara penghuni kamp itu menyebabkan organisasi yang dibentuk mereka tidak pernah berumur panjang. Sedangkan para tawanan yang ditahan di Tanah Tinggi adalah mereka yang mempunyai mentalitas keras kepala. Rumah para tawanan di Tanah Tinggi berjumlah 43 buah dengan jumlah penghuninya 115 orang, termasuk 70 orang tawanan dan 45 orang anggota keluarganya. Rumah para tawanan itu dibangun di lokasi yang dipilih oleh para tawanan dan terletak saling berjauhan di hutan rimba, dikelilingi oleh pekarangan yang kurang terawat. Para tawanan menolak membangun jalan, sehingga penghuni Tanah Tinggi tidak memungkinkan untuk saling mengunjungi di waktu petang. Penghuni Tanah Tinggi hanya berhubungan dengan pemerintah saat pembagian ransum kebutuhan hidupnya dua kali per minggu. Di luar pembagian ransum, kunjungan wakil pemerintah ke Tanah Tinggi tidak diperdulikan oleh para tawanan tersebut. Ketika P.W. Hillen mengunjungi Tanah Tinggi tak seorang pun dari penghuni kamp interniran Tanah Tinggi yang datang untuk menyampaikan keluhannya. Mereka tetap bekerja di rumah atau di kebun. Oleh karena itu, P.W. Hillen menyampaikan penilaiannya bahwa Penghuni Tanah Tinggi untuk sementara belum dapat dipertimbangkan untuk kembali kepada masyarakatnya. Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengelompokan atas para tawanan itu. Para tawanan di Tanah Merah dikelompokkan sebagai berikut:[38]

1. Pegawai,
2. Buruh upah harian,
3. Tahanan alami,
4. Penghuni Tanah Tinggi
5. Pencari Kerja Mandiri
6. Orang cacat.

38 ANRI, Laporan Anggota Dewan Hindia Belanda W.P. Hillen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tentang Kamp Internir di Boven Digoel, Weltevreden, 22 Juli 1930, *Bundel Algeemene Secretarie.*

Para pegawai adalah orang yang menerima gaji bulanan tetap, karena itu ia menjalankan tugas pokoknya, seperti agen polisi, pengelola motor, pegawai telepon, guru dan sebagainya. Buruh upah harian adalah orang yang bekerja bagi pemerintah dengan upah f. 1 per hari. Mereka pada umumnya bekerja di bidang pertanian. Pemerintah wajib menyediakan pekerjaan kepada mereka yang mau bekerja dengan upah harian. Namun, mereka tidak bisa bekerja upahan setiap harinya, karena mereka harus menyediakan waktu untuk merawat rumah dan pekarangannya. Oleh karena itu, pada umumnya mereka hanya mampu memperoleh upah sejumlah f. 20. Para tahanan alami adalah para tahanan di Boven Digoel yang menolak untuk bekerja. Pemerintah wajib memberikan ransum makanan senilai f. 12 setiap bulan. Ransum makanan biasanya dibagikan dua kali per minggu. Para pencari kerja mandiri adalah orang yang menjalankan suatu pekerjaan atau mengelola perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak menerima bantuan atau hanya menerima sedikit sekali bantuan dari pemerintah. Orang cacat adalah orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak lagi mampu untuk bekerja. Pemerintah memberi tunjangan kepada mereka sebesar f. 20 per bulan. Jumlah masing-masing berbagai kelompok itu selalu berubah-ubah. Pada awal Juni 1930 jumlah masing masing kelompok tersebut sebagai berikut:[39]

1. Pekerja berjumlah 110 orang
2. Pegawai upah harian berjumlah 380 orang
3. Tahanan alami berjumlah 225 orang
4. Penghuni Tanah Tinggi berjumlah 70 orang
5. Pencari kerja mandiri berjumlah 350 orang
6. Orang cacat berjumlah 40 orang.

Pengelompokan para tawanan itu sangat penting bagi pemerintah kolonial untuk menilai mentalitas para tawanan tersebut. Menurut penilaian W.P. Hillen seorang anggota Dewan Hindia Belanda yang telah melakukan interogasi kepada para tawanan itu bahwa pada umumnya para pegawai yang bersedia untuk bekerja setiap hari telah menyadari kesalahan sebelumnya dan

39 ANRI, Laporan Anggota Dewan Hindia Belanda P.W. Hillen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Kamp Internir di Boven Digoel, Weltevreden, 22 Juli 1930, *Bundel Algeemene Secretarie*.

telah berpandangan baik terhadap pemerintah. Demikian juga halnya dengan pekerja upah harian, pencari kerja mandiri, dan orang cacat telah menyadari kesalahan sebelumnya dan telah berpandangan baik kepada pemerintah. Berbeda halnya dengan para tahanan alami dan penghuni tanah tinggi sama sekali mentalitasnya tidak berubah. Kelompok yang telah keinginan dan berpandangan baik terhadap pemerintah bisa menambah peluang pencabutan penawanan mereka.[40]

Pada awalnya P.W. Hillen berpendapat bahwa semua tawanan politik di Boven Digoel adalah bagian dari PKI dan ormasnya. Namun, setelah Hillen melakukan interogasi terhadap para tawanan itu, ia berpendapat bahwa banyak para tawanan di Tanah Merah itu, yang tidak mengetahui dan tidak memperdulikan apa itu komunisme dan hanya memiliki pengetahuan yang kabur tentang keberadaan PKI, tujuan PKI, dan makna aksi perlawanan PKI pada 1927-1927, dan kurang memahami apa yang diinginkan oleh PKI. Berdasarkan hasil interogasinya terhadap para tawanan itu, P.W. Hillen menyimpulkan bahwa 412 orang dari 610 orang yang diinterogasi dapat diberikan kebebasannya kembali. Lebih lanjut P.W. Hillen menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat pemerintah wilayah asal para tawanan itu sangat sulit untuk mempertimbangkan orang-orang yang diusulkan untuk ditahan karena keterlibatannya dalam aksi perlawanan PKI tersebut.[41]

Kehadiran para tawanan politik itu telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah *Nieuw Guinea* Selatan. Para tawanan itu ditempatkan di dusun-dusun sagu orang-orang Bian. Opas De Keyzer ditunjuk untuk memimpin para tawanan itu. Kehadiran para tawanan ini menjadi ancaman untuk orang-orang Bian karena para tawanan itu dianggap telah menjarah dusun-dusun sagu orang-orang Bian dan menembaki hewan-hewan di hutan tempat perburuan orang-orang Bian.[42] Kehadiran para tawanan politik itu menyebabkan orang-orang Bian kehilangan sumber pencahariannya atau setidaknya mengurangi

40 ANRI, Laporan Anggota Dewan Hindia Belanda P.W. Hillen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Kamp Internir Boven Digoel, Weltevreden, 22 Juli 1930, *Bundel Algeemene Secretarie*.

41 ANRI, Laporan Anggota Dewan Hindia Belanda P.W. Hillen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Kamp Internir Boven Digoel, Weltevreden, 22 Juli 1930, *Bundel Algeemene Secretarie*.

42 J. van Baal, "De Bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 Jaaren", *Tijschrriff voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, LXXIX, 1939. 348.

sumber penghidupannya. Hal inilah yang memicu konflik antara orang-orang Bian dan tawanan politik itu.

6. Penempatan *Onderafdeeling Boven Digoel* di bawah *Afdeeling Tual* dan Penutupan Kamp Konsentrasi Digoel

Pada 1934 *Onderafdeeling Boven Digoel* dan *Onderafdeeling Nieuw Guinea Selatan* ditempatkan di bawah *Afdeeling Tual.* Wilayah *Afdeeling Tual* yang terlalu kecil menjadi alasan penyatuan kedua *onderafdeeling* itu ke wilayah *Afdeeling Tual.* Selain itu, kontak yang baik telah terjalin antara misi Ordo Hati Kudus yang berkarya di kedua *onderafdeeling* itu dengan Vikariat Apostolik yang tinggal di Tual. Demikian juga asisten residen Tual mempunyai hubungan yang baik dengan Vikariat Apostolik di Tual. Menurut Residen Maluku, B.J. Haga bahwa pembagian administratif wilayah pemerintahan tersebut adalah yang terbaik sehubungan dengan kontak yang lebih baik dengan misi.[43] Pemerintah menyadari peran para missionaris dalam membantu pemerintah untuk melayani penduduk *Nieuw Guinea* Selatan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjalin hubungan yang baik dengan para missionaris yang berkarya di daerah itu. Hal ini berarti bahwa pembagian wilayah pemerintahan di NNG juga didasarkan pada aspek budaya (mayoritas penduduknya beragama Katolik) dan hubungan baik antara pemerintah dan missionaris yang berkarya di wilayah itu.

Pada 1937 Gubernur Jenderal de Jonge digantikan oleh Tjarda van Starkenborg Statchouwer. Penggantian pejabat gubernur itu berdampak positif terhadap kehidupan kaum interniran di Boven Digoel karena Digoel yang hampir terlupakan kembali menjadi isu besar di Den Haag dan Buitenzorg. Hal itu disebabkan situasi internasional yang cepat berubah dengan berkuasanya Nazi di Jerman dan dimulainya invasi militer Jepang ke Cina. Pada 1937 menteri urusan koloni Welter mengirim nota kepada Petrus Blumberger untuk merancang surat kepada gubernur jenderal, untuk mendukung keputusannya membebaskan 20 interniran dari Boven Digoel sebagai langkah lebih lanjut menuju penutupan kamp konsentrasi kecuali bagi para *onverzoenlijken.* Welter mengusulkan agar kamp konsentrasi Boven Digoel diganti dengan

43 B. J. Haga, *Memorie van Overgave van Bestuur van den Afgredenden Resident der Molukken*, hlm. 41.

metode pembuangan yang lebih tradisional dalam waktu dekat, yaitu dengan cara membuang dan mengasingkan kaum interniran secara terpisah di banyak tempat sehingga mereka tidak bisa berharap membangun pengaruh politik karena perbedaan bahasa dengan penduduk lokal. Bahkan Welter mengusulkan Kamp Konsentrasi Boven Digoel harus dihapuskan dengan perkecualian bagi mereka yang masuk kategori keras kepala. Namun harapan Welter itu tidak dapat terealisasi seluruhnya. Pertemuan Dewan Hindia Belanda pada Desember 1938 memutuskan untuk mempertahankan Boven Digoel sebagai Kamp Konsentrasi. Akan tetapi, pada Juli 1938, 118 interniran dibebaskan, sehingga populasi interniran di Boven Digoel berkurang menjadi 345 jiwa, termasuk 42 interniran di Tanah Tinggi. Kehadiran tentara pendudukan Jepang di Papua telah mengubah kebijakan pemerintah kolonial tentang kamp konsentrasi di Boven Digoel. Boven Digoel ditutup pada 1943, karena pemerintah Hindia Belanda di pengasingan Australia khawatir dan takut tentang kemungkinan para interniran dibebaskan oleh Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda di pengasingan memutuskan untuk menghapuskan kamp konsentrasi Boven Digoel dan mengungsikan semua interniran ke Australia. Ch. O. van der Plas melakukan evakuasi terhadap semua interniran dan menutup kamp konsentrasi pada 1943.[44]

7. Kaum Digoelis dan Persemaian Nasionalisme Indonesia bagi Putra-putra Papua

Tidak dapat dipungkiri bahwa penugasan Marthen Indey sebagai wakil komandan polisi jaga ke Boven Digoel telah berpengaruh besar dalam perjuangan untuk membebaskan tanah Papua dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal tahun 1941, Belanda mengambil keputusan untuk menarik semua tentaranya dari Boven Digoel untuk persiapan menghadapi invasi Jepang dan mengalihkan penjagaan para tahanan politik kepada polisi lapangan (*veldpolitie*). Oleh karena itu, Pada Februari 1941 Marthen Indey ditugaskan sebagai wakil komandan polisi jaga ke Boven Digoel. Sebagai wakil komandan polisi jaga (*tweede posthuiscommandant*),

44 Takashi Shiraisi, *Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 39-40.

Marthen Indey mengepalai 31 orang polisi jaga untuk melakukan penjagaan di Kamp Tahanan Politik Boven Digoel. Sebagai wakil komandan polisi jaga, Marthen Indey, tentunya dia bebas ke luar masuk kamp tahanan untuk memeriksa keadaan dan perilaku para tahanan yang dicap "komunis". Dalam melakukan tugas dimaksud, dia sering duduk bercerita dengan para tahanan politik itu. Komunikasi yang intens antara Marthen Indey dengan para tahanan dimaksud mungkin lama kelamaan menyebabkan ia mulai tertarik dengan cara berpikir dan pengalaman para pejuang yang dibuang ke Boven Digoel itu.[45]

Pertemuan Marthen Indey dengan para tahanan politik di Digoel telah mengubah sikapnya terhadap pemerintah kolonial. Ia mulai tidak setuju dengan perlakuan keras dari pemerintah kolonial terhadap para tahanan politik itu. Perubahan sikapnya tidak terlepas dari pengaruh pertemanannya dengan beberapa orang dari tahanan politik itu. Beberapa orang tahanan politik di Digoel yang menarik simpati Marthen Indey saat itu adalah Sukoharjo, mantan Angkatan Laut dari Bandung, Sugoro Atmoprasodjo, mantan guru Taman Siswa di Yogyakarta, dan Hamid Siregar, seorang yang berasal dari Tapanuli bergelar Panggoncang Alam. Hamid Siregar terlibat dalam pergerakan kemerdekaan di Hollandia (sekarang Jayapura) dan pernah dipenjarakan bersama pejuang-pejuang Papua lainnya. Marthen Indey menunjukkan rasa simpatinya terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Keberanian bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya mengakibatkan para pejuang kemerdekaan Indonesia tersebut dipenjarakan oleh pemerintah kolonial. Perlakuan pemerintah kolonial yang demikian tidak dapat diterima oleh Marthen Indey. Marthen Indey mengadakan rapat gelap dengan 31 orang agen polisi bawahannya untuk menangkap orang-orang Belanda. Adapun orang-orang Belanda yang menjadi sasaran Marthen Indey adalah Inspektur Polisi yang merupakan atasannya, Kontrolir Wegner, dan seorang pastor berkebangsaan Belanda. Dalam pemikiran Marthen Indey, pasukan pendudukan Jepang yang telah merebut kota Fak-Fak pada 1 April 1942, terus bergerak ke selatan,

45 G. J. Aditjondro, "Marthen Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura", *Prisma*, No. 2 Tahun XVI, Februari 1987, hlm. 111.

sehingga dapat dimanfaatkan untuk menangkap orang-orang Belanda itu dan membebaskan para pejuang kemerdekaan Indonesia.[46]

Rencana Marthen Indey untuk menangkap orang-orang Belanda dan membebaskan para pejuang kemerdekaan Indonesia di Digoel tidak dapat direalisasikan. Sebab, rencana pemberontakannya dibocorkan oleh salah seorang polisi yang merupakan anak buahnya sendiri. Akhirnya, agar tidak menimbulkan kejutan terhadap para tahanan, pada suatu hari, ke-32 polisi Indonesia yang bertugas di Digoel ditugaskan membangun *bivak-bivak* baru dengan membuka hutan di daerah Pesnamman, lebih ke hulu Sungai Digoel. Daerah itu merupakan tempat Suku Jair dan Mandobo membunuh musuh-musuhnya yang tertangkap. Marthen Indey mengira penugasannya itu hanya sementara saja. Namun, ketika keluarganya (isteri dan anak angkatnya) juga diberangkatkan ke daerah itu, Marthen Indey menyadari bahwa ia bersama keluarganya telah dibuang secara halus. Setelah Marthen Indey bersama teman-teman polisinya menjalani hukuman selama 8 bulan di Pesnamman, mereka diizinkan kembali ke Tanah Merah.[47]

Pada 1943 Pemerintah kolonial Belanda menutup kamp konsentrasi di Digoel. Penutupan kamp konsentrasi itu bertalian dengan kehadiran tentara pendudukan Jepang di wilayah Papua bagian barat pada Perang Pasifik. Belanda khawatir tentang kemungkinan para tahanan politik di Digoel dibebaskan oleh tentara Jepang. Oleh sebab itu, Belanda memutuskan untuk menutup penjara tersebut dan mengungsikan semua tahanan ke Australia. Namun, setelah wilayah Papua dibebaskan oleh tentara Sekutu dari pendudukan tentara Jepang pada akhir Juli 1944, penjara itu digunakan kembali oleh Belanda untuk memenjarakan siapa saja yang dianggap menentang pemerintah kolonial Belanda.[48]

Setelah wilayah Papua dibebaskan tentara Sekutu, *Netherlands Indies Civil Administrations* (NICA) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda kembali ke Papua dengan membawa serta para pejuang eks Digoelis. Pada dasarnya para pejuang eks Digoelis itu, termasuk Sugoro dibawa kembali ke Papua hendak

46 G. J. Aditjondro, "Marthen Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura", *Prisma*, No. 2 Tahun XVI, Februari 1987, hlm. 111-112.

47 Handono Kusumo, *Marthen Indey Pahlawan Nasional Asal Papua* (Jayapura: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, 2011), hlm. 28-29.

48 *Ibid.*, hlm. 30.

diperalat Belanda dalam menegakkan kembali kekuasaannya di Papua. NICA menugaskan Sugoro sebagai Penasihat Direktur Pendidikan dan Agama dan memimpin Sekolah *Bestuur* (Pamong Praja) di Kota NICA (sekarang Kampung Harapan, Sentani). Di Sekolah Pamong Praja itulah Sugoro menjalankan tugas utamanya dan di luar jam kerjanya ia menanamkan kesadaran politik sebagai bangsa Indonesia dan patriotisme kepada peserta didiknya, sehingga Kota NICA menjadi tempat persemaian nasionalisme Indonesia bagi putra-putra Papua. Meskipun, ketika itu Marthen Indey bertugas sebagai kepala distrik di luar kota Hollandia (Arso, Yamasy, dan Waris), ia tetap melakukan kontak dengan sahabat-sahabatnya di Kota NICA, khususnya dengan Sugoro yang telah dikenalnya sejak penugasannya di Digoel. Corinus Krey yang bekerja di Kota NICA sebagai kepala poliklinik dan pengajar di sekolah mantri, juga ditugaskan mengajar ilmu kesehatan di sekolah Pamong Praja itu. Setiap malam, setelah pukul 24.00, Sugoro bersama Corinus Krey memantau siaran RRI Yogyakarta dan pemancar Komite Indonesia Merdeka di Australia. Komite orang-orang Indonesia di pengasingan itu juga menerbitkan surat kabar *Penyuluh*. Sugoro mengedarkan surat kabar *Penyuluh* itu secara diam-diam kepada peserta didik pamong praja, guru dan pendukung-pendukung kemerdekaan Indonesia di Kota NICA dan sekitarnya. Meskipun para pejuang eks Digoelis lainnya seperti Hamid Siregar, Aron Pandjaitan, dan Jusuf Nasution tidak mendapat tugas mengajar di sekolah *bestuur*, mereka terlibat dalam organisasi bawah tanah yang dipelopori Sugoro Atmoprasodjo bersama putera-putera Papua seperti: Marthen Indey, Silas Papare, Lukas Rumkorem, dan Corinus Krey.[49]

Pada akhir 1945, organisasi bawah tanah asuhan Sugoro menyusun suatu rencana pemberontakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di Irian Barat (sekarang Papua). Pemberontakan itu direncanakan dimulai pada 25 Desember 1945. Akan tetapi, rencana itu diketahui oleh Belanda dari orang-orang Indonesia yang pro-Belanda, sehingga Belanda melakukan penangkapan terhadap 250 orang, termasuk Sugoro pada tengah malam 15 Desember 1945. Meskipun Marthen Indey tidak ditangkap pada operasi tengah malam itu, bukan berarti Marthen Indey tidak berperan dalam rencana

49 G. J. Aditjondro, Marthen Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura", Prisma, No. 2 Tahun XVI, Februari 1987, hlm. 115.

pemberontakan itu. Pada saat operasi itu, Marthen Indey sedang berada di tempat tugasnya sebagai kepala distrik di Arso. Marthen Indey sebagai salah satu pelatih anggota Batalyon Papua yang dibentuk akhir tahun 1944, tentunya mempunyai pengaruh di kalangan anggota Batalyon tersebut. Hal ini memungkinkan dia untuk merekrut para anggota Batalyon Papua untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.[50]

Dalam rangka mewujudkan kemerdekaan di tanah Papua, putra-putra Papua membentuk organisasi kemerdekaan di berbagai daerah di Papua. Di Jayapura didirikan sebuah organisasi yang diberi nama Komite Indonesia Merdeka (KIM) pada Oktober 1946. Pada awal pembentukan KIM, organisasi itu diketuai oleh Dr. J.A. Gerungan, seorang dokter wanita yang mengepalai sebuah rumah sakit di Abepura. Corinus Krey dipilih sebagai Sekretaris I, yang dibantu oleh Sekretaris II Subroto, mantan kontrolir. Sedangkan Marthen Indey saat itu hanya sebagai anggota biasa, karena ia masih menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengurus inti KIM beralih kepada putra putra Papua, yang diketuai oleh Marthen Indey, wakil ketua Corinus Krey dan Petrus Wattebossy sebagai sekretaris. Para pengurus KIM mengikuti perkembangan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam konferensi penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Pada November 1946 pengurus KIM mengadakan rapat di Hollandia dan secara bersama-sama mendengarkan pembacaan hasil Konferensi Linggarjati, 12 November 1946. Dalam pertemuan itu, mereka berhasil menyepakati untuk mengubah nama Komite Indonesia Merdeka (KIM) menjadi Partai Indonesia Merdeka (PIM). Hasil dari konferensi Linggarjati sangat mengecewakan para aktivis KIM dan tokoh-tokoh Papua lainnya yang pro Indonesia. Oleh karena itu, Marthen Indey mengadakan pertemuan dengan 12 tokoh masyarakat Papua dari berbagai suku di Hollandia untuk membicarakan keberadaan Papua.[51]

Pada 11 Desember 1946 Residen van Eechoud mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Papua di Hollandia, di antaranya Corinus Krey dari Numfor, Milibella dari Sorong, Beratobui dari Yapen, Wetabosey

50 Handono Kusumo, *Marthen Indey Pahlawan Nasional Asal Papua* (Jayapura: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, 2011), hlm. 33-35.

51 *Ibid.*, hlm. 35-36.

dari Babo, Nicolaas Jouwe dan Lukas Jouwe dari Kayu Pulau, Mallo dari Skou, Barnabas Jufuway dari Depapre, Andreas Mano dari Tobati, dan Marthen Indey dari Doromena. Dalam pertemuan itu dibahas dua persoalan yaitu persoalan pertama tentang status masa depan Papua dan pemisahan Papua dari Indonesia. Persoalan kedua yang disampaikan Residen van Eechoud adalah kondisi tidak memungkinkan untuk mengirim seseorang sebagai wakil dari sekitar satu juta orang penduduk yang menghuni wilayah Papua saat itu.[52] Dari kedua persoalan yang disampaikan residen itu membuktikan bahwa Belanda berkeinginan untuk memisahkan Papua dari Indonesia.

Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang dibentuk oleh dokter Gerungan dan Pujosubroto di Hollandia pada 1945 yang beranggotakan Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolaas Jouwe menjadikan kedua persoalan itu sebagai bahan propagandanya kepada penduduk lokal Papua. Marthen Indey, Corinus Krey dan Nicolaas Jouwe memrotes usul residen mengenai tidak adanya wakil penduduk lokal Papua yang dikirim ke Denpasar. Adapun protes yang disampaikan kepada residen sebagai berikut:

1. *Nieuw Guinea* tidak akan keluar dari Federasi Indonesia, tetapi tetap menjadi bagian dari Indonesia Serikat, karena pada kenyataannya kekuasaan otonom diberikan kepada Indonesia Serikat meliputi semua wilayah dari Sabang sampai Hollandia dan Merauke, yang dulu disebut Hindia Belanda. Penduduk Karesidenan *Nieuw Guinea* sebagai bangsa demokratis, yang menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) setuju dengan rencana perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pertemuan ini tidak menerima ketiadaan wakil dari penduduk lokal Papua yang dikirim ke Denpasar, karena penduduk lokal Papua sebagai kesatuan rakyat demokratis memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dalam parlemen RIS.
3. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Papua tidak perlu menjadi koloni Belanda. Pemerintah tidak boleh mengabaikan hak penduduk lokal

52 J. W. M. Courtois, "Memorie van Overgave van den Afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948", J. Miedema dan W.A.L. Stokhof, *Irian Jaya Source Materials No. 2 Series A – No. 1: Memories van Overgave van de Afdeeling Noord Nieuw Guinea* (Leiden : DSALCUL/IRIS, 1991), hlm. 126-7.

untuk menyampaikan pendapat, berpikir dan berserikat.[53] Berdasarkan protes yang disampaikan anggota KIM tersebut diketahui bahwa mereka berkeinginan agar residen mengirim wakil penduduk lokal Papua untuk menghadiri konferensi di Denpasar.

Pada 18 Desember 1946 diadakan suatu konferensi di Denpasar yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino. Para peserta yang diundang dalam Konferensi Denpasar adalah wakil-wakil dari daerah Kalimantan dan Timur Besar. Namun wakil dari penduduk Papua tidak diundang untuk menghadiri konferensi tersebut. Ketidakhadiran wakil penduduk lokal Papua dalam konferensi Denpasar dimanfaatkan oleh KIM untuk menyampaikan propagandanya yang menyatakan kepada orang Papua untuk berjuang untuk kemerdekaan daerahnya, seperti Indonesia saudaranya yang berjuang untuk kemerdekaan. Pada awalnya propaganda KIM ini berhasil mempengaruhi pikiran Jouwe bersaudara (Nicolaas Jouwe dan Lukas Jouwe), Marthen Indey dan Corinus Krey. Mallo tetap netral. Namun Nicolaas dan Lukas Jouwe berubah pikiran dan menyetujui usul residen. Dengan demikian yang terus berjuang untuk menyampaikan propaganda KIM kepada penduduk lokal Papua adalah Marthen Indey dan Corinus Krey. Marthen Indey dan Corinus Krey berkali-kali mengundang para korano di *Onderafdeeling Hollandia* untuk menghadiri pertemuan KIM. Di satu pihak, mereka terus berusaha mengirimkan edaran kepada *korano* yang berisi tentang protes yang dilancarkan wakil penduduk lokal Papua kepada residen atas usul residen pada pertemuan 11 Desember 1946 di Hollandia. Mereka juga mengirim telegram yang berisi tentang protes penduduk lokal Papua karena residen Papua tidak mengirimkan wakil penduduk lokal Papua ke Denpasar dan residen mengusulkan agar Papua dipisahkan dari Indonesia dan menjadi koloni Kerajaan Belanda. Telegram itu ditujukan kepada Letnan Gubernur, Komisaris Pemerintah Umum Borneo dan Timur Raya, Menteri Penerangan Republik Indonesia, RVD Makassar, Dewan Maluku Selatan Ambon, Dewan Maluku Utara Ternate, para wakil Pupella, Nadjamoedin Daeng Malewa dan peserta konferensi lainnya di Denpasar, penduduk lokal di Biak dan di *onderafdeeling* lainnya di Papua. Di lain pihak, HBA Ormu Daniel Jouwe

53 J. W. M. Courtois, *Memorie van Overgave*, hlm. 127-8.

memrotes keras orang-orang yang menyusun edaran itu dan menyatakan bahwa penduduk lokal Papua belum siap untuk merdeka, namun sebaiknya tidak bertahan terus sebagai koloni Belanda. J.W.M. Courtois menyesalkan edaran dari Daniel Jouwe itu hanya ditujukan kepada pimpinannya langsung atau kepada residen lewat perantaraan atasannya, sementara pihak Marthen Indey mengirim telegram kepada dunia luar dengan mengatasnamakan seluruh penduduk Papua.[54] Penyesalan Courtois dapat dimaklumi karena keinginannya untuk menunjukkan kepada warga dunia bahwa edaran Marthen Indey dan Corinus Krey bukanlah pendapat penduduk lokal NNG.

Munculnya perbedaan pendapat terhadap usul residen merupakan bukti bahwa penduduk lokal Papua tidak seluruhnya pro Belanda atau pro Indonesia. Dalam kalangan penduduk lokal Papua terjadi pro-kontra tentang sikapnya apakah bergabung dengan RI atau berdiri sendiri sebagai suatu negara merdeka. Dalam kondisi seperti itu van Mook mengajukan rancangan pembentukan Negara Indonesia Timur yang didasarkan pada hasil Konferensi Malino. Usul van Mook itu membuktikan bahwa Belanda tidak menghendaki pembentukan Negara Indonesia Timur yang meliputi daerah Papua. Usul van Mook itu ditentang oleh para peserta konferensi. Para delegasi Indonesia Timur berpendapat bahwa Papua termasuk daerah "Timur Besar", karena sejak dahulu daerah itu telah menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore dan Ternate. Selain itu, penduduk pantai barat *Nieuw Guinea*, khususnya penduduk di Kepulauan Raja Ampat mempunyai kemiripan budaya dan ciri-ciri fisik dengan orang-orang di daerah Ternate dan Seram. Namun van Mook berdalih untuk tetap mempertahankan politiknya dengan mengatakan bahwa kedudukan Papua harus ditentukan sendiri oleh penduduknya.[55]

Sejak wilayah Papua dijadikan sebagai karesidenan tersendiri, kedudukan daerah itu dapat dipersoalkan oleh Belanda untuk lepas dari Karesidenan Maluku dan Papua menjadi satu kesatuan politik yang berdiri sendiri. Kondisi yang demikian sengaja diciptakan Belanda agar Belanda dapat mempertahankan kepentingannya atas wilayah Papua. Belanda berhasil mempertahankan kepentingannya atas wilayah Papua dalam Konferensi

54 J. W. M. Courtois, *Memorie van Overgave*, hlm. 128-131.

55 Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, *Penduduk Irian Barat* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1963), hlm. 81-82.

Malino, Pangkalpinang, dan Denpasar. Adapun kepentingan Belanda atas wilayah Papua adalah menjadikan daerah itu sebagai tempat penampungan keturunan Indo-Belanda yang tidak dapat kembali ke Holland dan tempat penampungan para pengusaha Belanda yang meninggalkan Indonesia serta untuk meneruskan tugas *zending* dan misi di pulau itu.[56]

Marthen Indey tidak pernah berhenti memperjuangkan wilayahnya menjadi bagian Republik Indonesia. Hal ini terbukti ketika ia bersama keluarganya bertolak ke Ambon untuk cuti pada 7 Januari 1947, ia memanfaatkan cutinya untuk mencari dukungan kepada kelompok-kelompok pro Indonesia di Maluku dan daerah Indonesia timur lainnya. Di Ambon Marthen Indey melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Maluku yang pro Indonesia. Pada 25 Februari 1947, ia bertemu dengan Presiden Negara Indonesia Timur (NIT) Tjokorde Gde Rake Sukawati yang berkunjung ke Ambon bersama dengan empat menterinya. Dalam pertemuan itu, Marthen Indey mendesak para pejabat NIT agar tetap mempertahankan Irian Barat dan menolak kemauan Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Marthen Indey melanjutkan aksi propagandanya ke Makassar sebagai ibukota NIT. Setelah kembali ke Ambon, Marthen Indey singgah di kampung isterinya, Kamarian, di Pulau Seram. Sementara itu, pada 7 Maret 1947 Belanda menjebloskan Corinus Krey ke dalam penjara di Jayapura karena Belanda mencium gerak-geriknya menyusun kekuatan kembali untuk suatu rencana pemberontakan. Tidak lama setelah penangkapan Corinus Krey, Residen van Eechoud mulai mencurigai gerak-gerik Marthen Indey, sehingga Marthen Indey juga ditangkap polisi Belanda di Kamarian pada 23 Maret 1947. Ia segera diterbangkan dari Ambon ke Biak dan Sentani untuk selanjutnya dijebloskan ke penjara. Setelah Marthen Indey dan Corinus Krey dipenjarakan, Belanda terus melakukan penangkapan besar-besaran di semua kampung di sekitar kota Jayapura, Danau Sentani, dan Teluk Tanah Merah. Pendukung Partai Indonesia Merdeka (PIM) sebagian besar ditahan di tempat penahanan polisi Base-G, Jayapura. Sementara Marthen Indey dan Corinus Krey beserta anggota-anggota inti PIM (Yohanes Fakdawer, Elly Uyo, Kaleb Hamadi, Andrias Irreuw, Laurens Mano, Petrus Wattebossy, Adrian Ondy,

56 Robert C. Bone, *The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem* (Ithaca: Cornell University, 1958), hlm. 22.

Hendrik Yoku, Hermanus Mebri, Barnabas Jufuway, dan Andreas Demena) ditahan di Ifar Gunung (Sentani). Polisi Belanda memerlukan waktu 7 bulan untuk memeriksa mereka. Pada 21 Oktober 1947 mereka dipindahkan ke penjara Abepura. Pengadilan Negeri Hollandia secara resmi memutuskan hukuman atas mereka pada 7 Maret 1947. Berdasarkan putusan pengadilan itu, Marthen Indey dan Elly Uyo dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, Corinus Krey selama 2 tahun 6 bulan, Johanes Fakdawer selama 2 tahun, selain mereka itu langsung dibebaskan karena vonis hukumannya sudah terpotong masa tahanan preventif.[57]

Setelah Marthen Indey menjalani masa hukumannya selama 3 tahun, pada 1 Mei 1950 ia keluar dari penjara. Namun, Belanda tetap mencurigai segala gerak-geriknya, sehingga Marthen Indey tidak lama menghirup udara kebebasan. Pada 16 Desember 1950, ia kembali ditahan di sel polisi selama 2 bulan sebagai tindakan pengamanan preventif. Awal tahun 1951 Marthen Indey bebas dari "tahanan preventif". Kemudian ia bersama isterinya memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang masih sepi, jauh dari pengawasan polisi Belanda. Mereka memilih untuk bermukim di Sabron-Dosay hingga akhir 1953. Pada 1954 mantan HPB Hollandia, de Haan menawarkan kepada Marthen Indey untuk memimpin proyek pembangunan jalan, jembatan dan gedung-gedung umum di Enarotali. Tawaran de Haan itu diterima oleh Marthen Indey, sehingga ia bersama keluarganya berangkat ke Enarotali dengan kapal melalui Sarmi dan Serui menuju Biak, dan dari sana terbang ke Enarotali. Setelah satu tahun ia mengerjakan proyek itu, pada 10 Oktober 1955 mereka terbang kembali ke Biak. Dari Biak mereka melanjutkan perjalanannya dengan kapal Hollandia melalui Serui. Selama perjalanan itu dia menghubungi kawan-kawan seperjuangannya Lukas Rumkoren di Biak dan Barnabas Aninam di Serui. Marthen Indey membagikan sandi kepada mantan para pengurus Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) di Serui agar dapat saling berhubungan dan bekerja sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Tanah Papua. Dengan cara tersebut, Marthen

57 G. J. Aditjondro, Marthen Indey, "Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura", *Prisma*, No. 2 Tahun XVI, Februari 1987, hlm. 118-119.

Indey tetap memelihara kontak dengan gerakan pro-Indonesia di bawah tanah hingga menjelang Trikora 1961.[58]

Pada masa Trikora, Marthen Indey berperan dalam membantu pendaratan anggota pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di Teluk Tanah Merah pada 15-16 Agustus 1962 dan penyelamatan sembilan orang dari 15 orang anggota pasukan RPKAD. Enam orang lainnya tertangkap oleh Belanda. Marthen Indey menyembunyikan anggota pasukan RPKAD itu ke rumahnya di Dosay dari pertengahan Agustus hingga September 1962. Selama Marthen Indey menyembunyikan anggota pasukan RPKAD itu, ia mengalami tekanan yang cukup berat. Pada 23 Agustus 1962, dua orang inspektur polisi Belanda dikawal oleh dua jip berisi agen-agen polisi datang mendatangi rumah Marthen Indey dan menyampaikan tujuannya untuk menangkap tentara Indonesia yang disembunyikan Marthen Indey. Namun, Marthen Indey yang sudah mendengar dari siaran radio bahwa Perjanjian New York sudah ditandatangani oleh wakil pemerintah Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962, dengan tegas menolak tuntutan perwira polisi Belanda itu. Marthen Indey mengatakan bahwa Belanda tidak berkuasa lagi di Tanah Papua, sebab pemerintahan sudah diambil-alih oleh PBB. Ketika Kepala Perwakilan Pemerintah RI, Soedjarwo Tjondronegoro, SH tiba di Jayapura, Marthen Indey melaporkan keberadaan regu itu. Beberapa hari kemudian beberapa anggota pasukan RPKAD itu diterbangkan pulang ke Jakarta, kecuali Tukiman tetap bersikeras bertahan di hutan Sabron-Dosay di bawah perlindungan Marthen Indey. Pada masa pemerintahan PBB di Irian Barat, tokoh-tokoh Papua yang pro-Indonesia, termasuk Marthen Indey mengkampanyekan agar pemerintahan PBB dipersingkat dan dipercepat penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Untuk menyampaikan aspirasi itu, pada Desember 1962 Marthen Indey bersama-sama rombongan E.Y. Bonay bertolak ke New York untuk memperjuangkannya di PBB. Perjuangan untuk mempersingkat masa pemerintahan PBB diperkuat lagi dengan dilaksanakannya demonstrasi oleh pemimpin rakyat Irian Barat di Jayapura pada 14 Januari 1963. Aksi tersebut ditandai dengan

58 Handono Kusumo, *Marthen Indey Pahlawan Nasional Asal Papua* (Jayapura: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, 2011), hlm. 38-40).

penandatanganan sebuah pernyataan yang diserahkan kepada pimpinan PBB di Jayapura Dr. Jalal Abdoh. Adapun isi pernyataan itu sebagai berikut:[59]

"Kami rakyat Irian Barat dengan ini menyatakan:

1. Menuntut pemendekan masa pemerintahan UNTEA.
2. Menggabungkan segera kepada Republik Indonesia secara mutlak tanpa syarat.
3. Setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Menghendaki adanya negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.
5. Menghendaki otonomi yang seluas-luasnya dalam Republik Indonesia bagi Wilayah Irian Barat".

Pada 1 Desember 1963 Marthen Indey dan sejumlah wakil-wakil Irian Barat ikut mencetuskan dan menandatangani Piagam Kota Baru (ketika itu Jayapura bernama Kota Baru). Pada prinsipnya para penandatangan Piagam Kota Baru tersebut mengakui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 juga merupakan hasil kemerdekaan bagi rakyat dan wilayah Irian Barat (Papua). Kebulatan ikrar, janji dan sumpah yang tertuang dalam Piagam Kota Baru itu menyatakan bahwa putra-putri Irian Barat ikut berpartisipasi dalam membangun Irian Barat dalam lingkungan NKRI; ikut bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban serta kesentosaan wilayah Irian Barat; mengakui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai sumpah rakyat Irian Barat; patuh dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945; menyambut dengan tangan dan hati terbuka saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari wilayah Indonesia lainnya yang ingin berdiam dan membangun Irian Barat; menganggap wilayah Indonesia lainnya sebagai wilayah dan tumpah darah rakyat daerah Irian Barat. Ikrar tersebut mencerminkan bahwa rakyat Papua ketika itu merasa telah menjadi bagian dari bangsa dan Negara Indonesia.[60]

59 Handono Kusumo, *Marthen Indey Pahlawan Nasional Asal Papua* (Jayapura: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, 2011), hlm. 45-47.

60 *Ibid.*, hlm. 48.

8. Penduduk dan Perekonomian

Kehadiran pemerintah kolonial, para misionaris di *Onderafdeeling Boven Digoel* menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial di wilayah itu. Perubahan struktur sosial itu terbukti dengan adanya pelapisan sosial baru yaitu Eropa/ Indo-Eropa, Cina, Asia lainnya (Indonesia) dan penduduk lokal. Sementara di kampung-kampung ditemukan kelompok-kelompok sosial baru yang didasarkan pada perannya di bidang keagamaan (guru misi, pastor, penginjil, suster, bruder) dan di bidang pemerintahan (kepala kampung). Berdasarkan sensus 1930, penduduk wilayah *Nieuw Guinea* Selatan berjumlah 19.116 orang. Persebaran penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Keadaan Penduduk Wilayah *Nieuw Guinea* Selatan pada 1930

No	*Onderafdeeling*	Pribumi	Eropa/Indo	Cina	Asia Lainnya	Jumlah
1	Boven Digoel	2.686	51	30	3	2.770
2	*Nieuw Guinea* Selatan	15.817	75	420	34	16.346
Jumlah		18.503	136	450	64	19.116

(Diolah kembali dari *Volkstelling*, 1936: 124)

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pribumi (penduduk lokal) menempati posisi mayoritas, urutan kedua orang Cina, berikutnya orang Eropa/Indo dan urutan terakhir adalah Asia lainnya (Indonesia). Penduduk lokal hampir seluruhnya tergantung pada hasil-hasil dari tanaman sagu dan kelapa. Sagu dan kelapa tumbuh dalam jumlah yang memadai di semua kampung-kampung yang berada di sekitar pantai. Penduduk pedalaman menanam pisang dan ubi sebagai makanan tambahannya. Penduduk lokal beternak babi, tetapi belum sampai pada usaha pembiakan. Hasil ternak babi itu biasanya digunakan untuk keperluan pesta adat. Para Eropa/Indo pada umumnya bekerja sebagai pejabat dan pemerintah kolonial, pedagang, dan

misionaris. Sementara orang Cina dan orang Asia lainnya pada umumnya bekerja sebagai pedagang dan pemburu burung.[61]

9. Dampak Kebijakan Pemerintah Kolonial

Penegakan pemerintah kolonial dan kehadiran para misionaris menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial di wilayah itu. Perubahan struktur sosial ditandai dengan adanya pelapisan sosial baru baik di kota maupun di kampung. Penegakan pemerintahan kolonial Belanda berdampak pada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dan bahasa pengantar baik di gereja maupun di sekolah-sekolah yang dikelola misi Katolik dan Pemerintah. Bahasa Melayu merupakan satu-satunya bahasa pergaulan untuk pemerintah dan *zending* dengan penduduk Papua.[62] Pada umumnya di sekolah-sekolah rakyat, sekolah desa dan sekolah peradaban tidak digunakan bahasa daerah. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan buku pelajaran dalam bahasa daerah dan banyaknya jumlah bahasa daerah di wilayah itu, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kondisi yang demikian menyebabkan Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan bahasa pergaulan di seluruh wilayah itu.[63] Selain itu, pada awalnya para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut pada umumnya berasal dari luar *Nieuw Guinea* (Ambon, Kei, Manado-Sanger).

Sebagian besar penduduk pribumi *Nieuw Guinea* Selatan umumnya, dan Boven Digoel khususnya menganut agama Katolik. Hal ini disebabkan kebijakan Asisten Residen Kroesen yang mempercayakan karya penginjilan di wilayah itu kepada para misionaris. Para misionaris memulai karyanya pada 14 Agustus 1905 yang ditandai dengan kehadiran Pastor H. Nollen, Pastor P. Braun, Bruder Roessel dan Bruder Oomen di Merauke.[64] Misi Katolik

61 ANRI, *Vervolg Memorie van den FD. Controleur van Zuid Nieuw Guinea L. Wreede over het Tijdvak 24 Maart 1933 tot 9 Maart 1934*, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 9-18)

62 ANRI, *Vervolg Memorie van Overgave van den Gediplomeerd Gezaghebber B.B. Gerrit de Lanaquete, Betrefende Onderafdeeling Jappen-Groep*, 7 September 1932, Reel No. 40, MvO Serie 1e, hlm. 11-2.

63 J. C. C. Haar, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea, 1940", J. Miedema dan W.A. L. Stokhof, *Irian Jaya Source materials No. 6 Series A – No. 3: Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea (Part II)* (Leiden: DSACCUL/IRIS, 1993), hlm. 140.

64 A. Vriens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Wilayah-Wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Indonesia Abad Ke-20 Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Irian Jaya*. Jakarta: Bagian Dokumentasi

membuka sekolah-sekolah rakyat di wilayah itu dan menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Para misionaris itu selain mengajarkan pelajaran agama dan etika juga pelajaran menulis, membaca dan berhitung. Pemberian pembelajaran bertujuan untuk mengarahkan para generasi muda untuk meninggalkan kebiasaan dan kepercayaan lama.[65] Para misionaris Katolik lebih memfokuskan kajiannya pada bahasa penduduk setempat yang dibutuhkan untuk menyampaikan ajaran Kristen dan peradaban kepada penduduk lokal.[66] Dengan demikian para misionaris bukan hanya menyebarkan ajaran agama tetapi juga mengubah cara hidup penduduk lokal *Nieuw Guinea* Selatan.

Ketika pemerintah membuka pos pemerintahannya di wilayah itu, pemerintah membenahi jalur-jalur perhubungan melalui sungai. Sungai-sungai yang ada merupakan prasarana transportasi dan komunikasi dengan daerah-daerah yang terletak di pedalaman.[67] Pembangunan sarana dan prasarana transportasi itu memudahkan aparat pemerintah mengawasi penduduk dan melakukan inspeksi secara rutin ke wilayah kekuasaanya itu. Pembangunan sarana dan prasana tersebut tentunya memudahkan penduduk lokal untuk melakukan perjalanan ke luar wilayahnya. Selain itu, pembangunan tersebut juga memudahkan kontak antara penduduk lokal dengan kaum interniran, sehingga lambat laun bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan di antara mereka. Dengan digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan telah memudahkan penduduk lokal dan kaum interniran dalam kegiatan jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

10. Penutup

Pembangunan *Onderafdeeling Boven Digoel* berkaitan dengan pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera Barat pada 1926/1927. Para pemberontak tersebut ditempatkan di Boven Digoel. Boven Digoel dipilih sebagai kamp konsentrasi (Pengasingan dan Pembuangan) karena menurut Gubernur

---

Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1974), hlm. 611-613.

65 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur Over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea L.M.P. Plate*, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 6-7.

66 J.van Baal, "De Bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 Jaaren", *Tijschrriff voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, LXXIX, 1939. 334.

67 ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur Over De Afdeeling Zuid Nieuw Guinea van L.M.P. Plate*, 15 Oktober 1915, Reel No. 38, MvO Serie 1e, hlm. 3.

Maluku yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mencari lokasi kamp, kondisi alam Boven Digoel sangat mendukung untuk dijadikan sebagai kamp konsentrasi. Di Boven Digoel saat itu terdapat hutan yang lebat, rawa-rawa, sarang nyamuk malaria, sungainya dihuni oleh banyak buaya ganas, dan penduduk lokalnya masih menjalankan sistem pengayauan dan kanibal. Oleh karena itu, menurut pandangan pemerintah kolonial Belanda, Boven Digoel sangat ideal untuk pembuangan dan pengasingan para pemberontak yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan kolonial karena Boven Digoel 100% terisolasi dari dunia luar. Selain itu, Gubernur Jenderal de Jonge berharap pembangunan kawasan Boven Digoel akan menghapus keinginan kaum interniran untuk memikirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan *Onderafdeeling Boven Digoel* dan penempatan kaum interniran di Boven Digoel berdampak pada terjadinya perubahan struktur sosial dalam masyarakat dan pembanguan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah itu. Selain itu, kehadiran kaum interniran di daerah itu menyebabkan perjumpaan penduduk lokal dengan penduduk dari luar Papua. Perjumpaan itu sedikit banyaknya pasti membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Adapun dampak positifnya adalah terjadinya persemaian nasionalisme Indonesia bagi putra-putra Papua dan digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan di antara mereka dan terbangunnya hubungan jual beli antara penghuni kamp konsentrasi dan penduduk lokal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran kaum interniran di daerah itu juga berdampak negatif yaitu terjadinya konflik antara kaum interniran dan penduduk lokal karena penduduk lokal menganggap kaum interniran memasuki wilayah sumber mata pencahariannya.

Pousthouder: pegawai rakyat Hindia timur yang memiliki kewenangan dari pemerintah kolonial di wilayah tanggung jawabnya.

Sekretaris Jenderal: pelaksana tugas-tugas pemerintahan dalam urusan surat-menyurat, laporan-laporan, usul-usul untuk wawancara, perintah-perintah, dan usul-usul resmi yang ditujukan kepada atau dari Gubernur Jenderal.

Syahbandar: pengawas administrasi dan perdagangan asing di pelabuhan

Referensi

Arsip

ANRI. *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie,* Tanggal 5 Februari 1898 Nomor 19.

ANRI. *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie,* Tanggal 18 Juni 1901 Nomor 25.

ANRI. *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie,* Tanggal 8 September 1901 Nomor 6.

ANRI. *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie,* Tanggal 22 Desember 1901 Nomor 16.

ANRI. *Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie,* Tanggal 11 Maret 1902 Nomor 48.

ANRI, *Memorie van Overgave van het Bestuur over de Afdeeling Zuid Nieuw Guinea, L.M.P. Plate,* 15 Oktober 1915. Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van de Gezaghebber D.H. Fikkert, Oktober 1928-Januari 1933, Zuid Nieuw Guinea.* Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van den Controleur L. Wrede van Zuid Nieuw Guinea,* 24 Maret 1933-9 Maret 1934, Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van den W. Scheffer van de Onderafdeeling Zuid Nieuw Guinea Afdeeling Zuid Nieuw Guinea Residentie Nieuw Guinea,* 10 Maret 1934-Juli 1935, Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave der Onderafdeeling Boven-Digoel door den fd. Gezaghebber Schellem*, 1 Juli 1934, Reel No. 38, MvO Serie 1 e.

ANRI, *Memorie van Overgave van het detachement te Tanah Merah Onderafdeeling Boven Digoel Controleur J.Wiarda*, 2 Mei 1935-25 Mei 1938. Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van den J. Van Baal Controleur van de Onderafdeeling Zuid Nieuw Guinea*, 25 Juli 1938, Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van de Onderafdeeling van Boven Digoel Controleur I B.B. C.H. Stefels*, periode 18 Februari 1953- Januari 1955. Reel No. 38, MvO Serie 1e.

ANRI, *Memorie van Overgave van Controleur I N.A. Nieland van der Onderafdeeling Boven-Digoel* 23 Februari 1952-5 Februari 1953, Reel No. 38, Mvo Serie 1 e.

ANRI, *Memorie van der Controleur I B.B. C.H. Stefels van Onderafdeeling Boven-Digoel* 18 Februari 1953- Januari 1955, Reel No. 38, MvO Serie 1 e.

NA, *Algemeen Rijksarchief Tweede Afdeeling Ministerie van Kolonien Kantoor Bevolkingszaken Hollandia Rapportenarchief NR: 397.*

Sumber Resmi Tercetak

Koloniaal Verslag, Tahun 1926.
Koloniaal Verslag, Tahun 1927.
Koloniaal Verslag, Tahun 1928.
Koloniaal Verslag, Tahun 1929.

J.W.M. Courtois, "Memorie van Overgave van den Afdeeling Noord Nieuw Guinea, Hollandia 1948", J. Miedema dan W.A.L. Stokhof. 1991. *Irian Jaya Source Materials No. 2 Series A – No. 1: Memories van Overgave van de Afdeeling Noord Nieuw Guinea,* Leiden: DSALCUL/IRIS.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 220 Tahun 1895.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 221 Tahun 1895.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 62 Tahun 1898.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 239 Tahun 1901
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 63 Tahun 1902
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 64 Tahun 1902
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 65 Tahun 1902
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 66 Tahun 1902
Staatsblad van Nederlandsch-Indie Nomor 529 Tahun 1926

Artikel

Baal, J.van, "De Bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 Jaaren", *Tijschrriff voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, LXXIX, 1939. 309-414.

Gelpke, Sollewijn J.H.F. "On The Origin of The Name Papua", *BKI*, Jilid 149, 1993. 318-332.

Mansoben, Johszua Robert,2001, "Arti Sebuah Nama: Papua, New Guinea, atau Irian Jaya", Makalah, Jayapura: Universitas Cenderawasih Jayapura.

Sinaga, Rosmaida dan Handono Kusumo, "Sejarah Pembentukan Pemerintahan Hindia Belanda di Papua", dalam *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2005, Jayapura: FKIP Universitas Cenderawasih Jayapura.

Prisma, No. 7, Jakarta: LP3ES, 1988.

Aditjondro G. J., "Marthen Indey, Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura", *Prisma*, No. 2 Tahun XVI, Februari 1987.

Buku

Bone, Robert C. *The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem.* Ithaca: Cornell University, 1958.

Boelaars, Jan. *Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.

Bone, Robert C. *The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem.* Ithaca: Cornell Universty, 1958.

Campo, J.N.F.M. *Kononklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaart en Saatsvorming in de Indonesische Archipel 1888-1914.* Hilversum: Uitgerij Verloren, 1992.

Erari, Karel Phil. *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis.* Jakarta: Sinar Harapan, 1999.

Graaff, S. De en D.G. Stibbe. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. tweede deel,* 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918.

Handono Kusumo. 2011. *Marthen Indey Pahlawan Nasional Asal Papua,* Jayapura: Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua.

Hasjmy, A., *Tanah Merah: Digul Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar. *Penduduk Irian Barat.* Jakarta: Penerbitan Universitas, 1963.

Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey. *Bakti Pamongpraja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia.* Jakarta: Kompas, 2008.

Mansoben, Johszua Roberrt. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya.* Jakarta: LIPI-RUL, 1995.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Salim, I.M.F. Chalid. *Lima Belas Tahun di Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea-Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia,* Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Schoorl, PIM. *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962.* Jakarta: Garba Budaya, 2001.

Shiraisi, Takashi, *Hantu Digul: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial,* Yogyakarta: LKiS, 2001.

Stibbe, D.G. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie derde deel.* 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919.

Tarmidzy Thamrin, *Boven Digoel: Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Surabaya: Ciscom, 2001.

Vriens, A. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Wilayah-Wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Indonesia Abad Ke-20 Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Irian Jaya.* Jakarta: Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1974.

BAB 7

BOVEN DIGOEL DAN PERGERAKAN POLITIK INDONESIA 1927-1943

*Langgeng Sulistyo Budi**

1. Pengantar

Awal abad ke-20 secara historis menjadi periode kebangkitan bagi Indonesia. Kegetiran hidup di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda telah menjadi pengalaman bersama sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu ciri terpenting periode ini adalah lahir dan berkembangnya ide emansipasi dan liberal dari status serba terbelakang.[1] Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap nasionalisme bangsa Indonesia, mulai tampak kebijakan pemerintah yang semakin represif.

Situasi pergerakan di Indonesia tampaknya memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20 benih-benih nasionalisme di Indonesia sudah muncul dan tampak lebih terorganisasi. Radikalisme perlahan tampak ke permukaan. Akibatnya, secara bertahap pemerintah mulai memikirkan strategi baru untuk meredam radikalisasi rakyat Indonesia. Salah satu strategi itu adalah: memisahkan para pimpinan pemberontak dari massa pendukungnya, dengan cara mengasingkannya.

---

*Penulis adalah staf Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)-Jakarta.

1 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jilid 2* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 121-122.

Pemerintahan Gubernur Jenderal van Limburg Stirum disebut oleh Sartono sebagai pemerintahan yang toleran terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda. Berkembangnya ide sosialis dan komunis merupakan perpaduan yang menarik dalam konteks pergerakan yang bersifat anti kolonialis.[2] Perkembangan yang demikian akhirnya memunculkan radikalisasi politik di Hindia Belanda.

Pemerintah mulai disibukkan dengan berbagai kritik dan penentangan terhadap kebijakan kolonialnya. Pada tahun 1926 dan awal tahun 1927, Hindia Belanda dikejutkan dengan pemberontakan kelompok komunis di daerah Banten dan daerah Sumatra Barat. Dampak dari peristiwa tersebut, pemerintah mulai keras dan tidak tanggung-tanggung menyiapkan tempat khusus untuk mengasingkan orang-orang yang dinilai radikal. Awalnya, tempat itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926-1927, namun pada periode berikutnya kamp Boven Digoel menjadi tempat pengasingan para tokoh nasionalis Hindia Belanda.

Kamp Boven Digoel memang dirancang untuk memisahkan para tokoh nasionalis dari massanya. Namun, fasilitas yang ada di lingkungan kamp tidak berbeda jauh dengan lingkungan normal, yang membedakannya adalah Boven Digoel terletak jauh dari pusat aktivitas politik di Hindia Belanda. Secara geografis tempatnya terpencil. Dengan keterpencilan itu, pemerintah berharap bisa "menjinakkan" para tokoh politik bumiputera, sehingga radikalisasi politik bisa diredam, walaupun kenyataannya sering berbeda. Pada kenyataannya saat itu masih banyak tokoh nasionalis yang dianggap keras kepala, sehingga harus diasingkan lebih jauh lagi, yaitu: ke Tanah Tinggi. Pemilihan Boven Digoel sebagai tempat pengasingan diduga berkaitan dengan strategi pertahanan Hindia Belanda, yaitu: berdekatan dengan tempat pengasingan untuk pemerintahannya di kala perang, dan tempat itu adalah Australia.[3] Mengingat periode awal abad ke-20 merupakan periode yang penuh pertikaian antar bangsa.

---

2 *Ibid.*

3 Tentang pemindahan pemerintahan Hindia Belanda dan tahanan politik yang ada di Boven Digoel ke Australia bisa dipelajari dalam Rupert Lockwood, *Armada Hitam*, terjemahan Koesalah Soebagijo Toer (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

Tulisan ini akan melihat bagaimana kehidupan para tahanan politik di Boven Digoel. Bagian awal akan membahas tentang Boven Digoel dalam konteks politik di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Diteruskan dengan bagaimana kamp dikelola dan apa saja yang bisa diperbuat oleh para penghuni kamp, sebab mereka sendiri tidak tahu sampai kapan mereka harus hidup dalam pengasingan, dan walaupun Boven Digoel dirancang sebagai lingkungan sosial biasa, dan masalah yang perlu dilihat adalah fasilitas apa saja yang bisa diperoleh para penghuninya. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya interaksi antara penghuni kamp dengan penduduk lokal. Secara sosial tentu ada dampaknya. Dampak itulah yang akan dicermati. Itulah beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan ini.

2. *Pergerakan Politik di Hindia Belanda Awal Abad ke-20*

Pada periode awal abad ke-20 mulai muncul keinginan untuk memajukan martabat rakyat ada dalam benak Mas Ngabehi Wahidin Soedirohoesodo. Dia dikenal sebagai dokter Jawa, yang pada tahun 1906 dan 1907 berkampanye di kalangan priyayi di Jawa untuk memajukan kecerdasan rakyat, dan walaupun kampanye itu belum menampakkan hasil yang maksimal, tetapi paling tidak sudah mampu membangkitkan kerja sama di antara priyayi di wilayah tersebut. Orang-orang yang bersimpati pada kegiatan Wahidn mulai berupaya membentuk dana belajar.

Pada tahun 1907, dalam sebuah perjalanan kampanye, Wahidin bertemu dengan salah satu murid STOVIA, Soetomo, di Batavia. Hasil pertemuan itu akhirnya membuahkan hasil, ketika pada tanggal 20 Mei 1908 di gedung STOVIA didirikan organisasi *Boedi Oetomo* (BO) dan Soetomo ditunjuk sebagai ketuanya.[4] Wahidin disebut oleh Ricklefs sebagai inspirator bagi pembentukan organisasi modern yang pertama berdiri untuk kalangan priyayi Jawa itu.[5]

Kemajuan Hindia Belanda menjadi tujuan organisasi BO, walaupun masih samar-samar. Wilayah kerja BO awalnya hanya Pulau Jawa dan Madura, baru

4 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 335.

5 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terjemahan Satrio Wahono, dkk (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 343.

kemudian akan dikembangkan ke seluruh Hindia Belanda. Dalam sebuah perdebatan, BO akhirnya memutuskan untuk membatasi jangkauannya di Jawa dan Madura saja, dan tidak melibatkan diri pada dunia politik. Titik berat kegiatannya adalah pendidikan dan kebudayaan. Sampai tahun 1909, BO memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota sekitar 10.000 orang.[6]

Ketika pemerintah mendirikan *Volksraad*, BO bisa menempatkan wakil-wakilnya, dan mereka masih sangat hati-hati melancarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada akhirnya BO berkesimpulan bahwa mereka membutuhkan dan harus mencari dukungan massa. Dalam perjalanan waktu BO mulai melihat proses radikalisasi politik di Hindia Belanda, dan Gubernur Jenderal Mr. D. Fock juga mulai merasakannya sampai akhirnya dia harus mengambil kebijakan yang lebih keras, termasuk kebijakan pengurangan anggaran pendidikan. BO mulai merasakan munculnya perpecahan antara kelompok moderat dan radikal.[7]

Pada tahun 1924, Soetomo mendirikan *Indonesische Studie Club* di Surabaya. Kelompok itu berupaya membangun kesadaran politik masyarakat pribumi dengan memberitahukan kepada mereka situasi yang sebenarnya di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 1930, Soetomo mendirikan *Partai Bangsa Indonesia*, dan di tahun 1935 partai itu digabungkan dengan BO dan bernama *Partai Indonesia Raja* (PARINDRA).[8]

Organisasi bercorak keagamaan berdiri di Solo pada dekade pertama abad ke-20 dengan nama *Sarekat Islam* (SI). Latar belakang ekonomis yang mendasari kelahiran SI adalah perlawanan terhadap pedagang Cina, di samping tentunya untuk membentuk sebuah front untuk melawan kekuatan kolonialisme. Anggota SI sampai ke lapisan terbawah masyarakat.[9]

Garis besar misi SI adalah (1) mengembangkan jiwa dagang; (2) memberi bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan; (3) memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputra; (4) menentang pendapat-pendapat yang salah tentang agama Islam. Pada

6 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.),*op.cit.*, hlm. 337.

7 *Ibid.*, hlm. 339.

8 Savitri Prastiti Scheret, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, terjemahan Jiman S. Rimbo (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 200-201.

9 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *op.cit.*, hlm. 344. Periksa juga Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*, terjemahan Hilmar Farid (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 55-57.

prakteknya, pemerintah Belanda melihat gerak SI mulai radikal, sehingga dibutuhkan sikap hati-hati dalam menghadapinya. Kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah tidak mengizinkan SI memiliki pengurus besar (nasional), namun lebih menjadi sebuah organisasi lokal.[10] Pada kongres nasional SI yang pertama dibicarakan kemungkinan penggabungan prinsip-prinsip Islam dan sosialisme. Sosialisme dipandang sebagai simbol modernitas untuk melawan kolonialisme. Modernitas itu akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan.[11]

SI mengalami perkembangan pesat. Oleh karena itu, SI dianggap sebagai organisasi massa pertama di Hindia Belanda, dan memiliki kesediaan untuk menerima pikiran-pikiran radikal. Selain itu anggotanya yang muda dan radikal bisa menggabungkan diri dengan ISDV tanpa harus meninggalkan SI.[12] Melalui Semaoen dan Darsono mereka mulai mengenal ajaran Marxisme. Kedua orang ini dikenal sebagai pelopor penggunaan teori perjuangan Marx dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Kondisi seperti itu menyebabkan munculnya konflik internal dalam tubuh SI.[13]

Pada tahun 1912 berdiri sebuah organisasi yang mendukung terbentuknya nasionalisme Indonesia. Organisasi itu adalah *Indische Partij* (IP). Pembentukan IP diawali dengan sebuah perjalanan propaganda yang dilakukan oleh Douwes Dekker ke beberapa kota di Pulau Jawa, yang dimulai pada tanggal 15 September sampai dengan 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan ini dia sempat bertemu dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Di Bandung, Douwes Dekker mendapat dukungan dari dua orang toko pergerakan lainnya, Soewardi Soerjaningrat dan Abdoel Moeis (yang waktu itu menjadi pimpinan SI cabang Bandung).[14]

IP berdiri di atas landasan nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. IP berpendapat bahwa Indonesia adalah *national home* untuk semua orang yang mengakui Hindia Belanda sebagai tanah airnya, tanpa memandang

10 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.). *loc.cit.*

11 Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 53.

12 *Ibid.*, hlm. 54.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.* Pelajari juga Savitri Prastiti Scherer, *op.cit.*, hlm. 88; Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 35.

suku atau ras.[15] Terhadap keberadaan IP, pemerintah Hindia Belanda sangat tegas, berbeda dengan sikap mereka terhadap BO dan SI. Keinginan mereka untuk mendapatkan status hukum ditolak oleh gubernur jenderal pada tanggal 4 Maret 1914, dan menjadikan IP sebagai partai terlarang.[16]

Kejadian menarik terjadi ketika pemerintah berkeinginan merayakan ulang-tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis di Bandung, dibentuk *Komite Boemipoetera*. Komite ini bermaksud mengirimkan petisi kepada Ratu Belanda, yang isinya meminta perbaikan politik di Hindia, seperti dibentuknya lembaga perwakilan dan jaminan kebebasan berpendapat. Salah satu pimpinan komite, Soewardi Soerjaningrat, menulis artikel dengan judul *Als ik een Nederlander was*, yang berisi sindiran terhadap ketidakadilan yang ada di tanah Hindia.[17]

Pemerintah Belanda melihat gerakan IP sudah mulai berbahaya. Akibatnya, pemerintah berkeputusan untuk mengasingkan Douwes Dekker, dr. Tjipto, dan Soewardi terhitung mulai Agustus 1913. Mereka bertiga memilih diasingkan ke Negeri Belanda. Douwes Dekker kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1918, namun kedatangannya tidak bisa membangkitkan kembali kebesaran IP.[18]

Perkembangan organisasi politik di Indonesia semakin radikal. Dalam catatan para penulis buku *Sejarah Nasional Indonesia*, *Perhimpoenan Indonesia* (PI) merupakan organisasi yang dianggap mulai radikal, khususnya dalam ide kebangsaan Indonesia. PI didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia di Negeri Belanda, seperti: Soetan Kesajangan dan R.M. Notosoeroto. Nama awalnya adalah *Indische Vereeniging*. Tujuan utamanya adalah memajukan berbagai kepentingan orang-orang yang berasal dari Indonesia. Seperti halnya organisasi-organisasi yang lain awalnya PI bersifat sosial.[19]

15 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed). *ibid.*, hlm. 352.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*, hlm. 353. Tulisan itu secara garis besar merupakan sindiran terhadap permintaan Pemerintah Kolonial Belanda agar orang-orang Indonesia menyumbangkan uang untuk membiayai peringatan kemerdekaan Belanda, sementara Indonesia sendiri masih dijajah Belanda. Soewardi menyebutkan bahwa sebenarnya hal itu merupakan penghinaan moral dan materi. Savitri Prastiti Scherer, *op.cit.*, hlm. 89; dan Darsiti Soeratman, *op.cit.*, hlm. 42-44.

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*, hlm. 354. Pelajari pula Harry A. Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950*, terjemahan Hazil Tanzil dan Koesalah Soebagyo Toer (Jakarta: KPG dan KITLV, 2008),

PI mengalami perkembangan pesat, dan sejalan dengan itu nama organisasinya berubah menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922. Pada tahun 1925 dipakai pula nama Indonesia, *Perhimpoenan Indonesia* (PI), sampai akhirnya hanya PI saja yang digunakan. Orientasi politik PI semakin terlihat setibanya dua mahasiswa baru dari Indonesia pada tahun 1921, yaitu: A. Soebardjo dan Hatta. Lama-kelamaan orientasi politik PI menjadi nasionalis-demokratis, non-kooperasi, dan meninggalkan sikap kerja sama dengan para kolonialis.[20]

Pemerintah Belanda semakin curiga dengan sepak-terjang PI. Pada tanggal 10 Juni 1927, pemerintah Belanda menangkap Hatta, Nazir Pamoentjak, Abdoelmadjid Djojodiningrat, dan Ali Sastroamidjojo. Pengadilan Den Haag pada tanggal 22 Maret 1928 menyatakan mereka tidak terbukti bersalah.[21]

Indonesia pada periode ini juga menjadi lahan persemaian Marxisme. Paham Marxisme masuk ke Hindia Belanda sebelum PD I, ketika seorang pemimpin buruh dari Negeri Belanda, Sneevliet, tiba di Hindia Belanda. Saat itu dia anggota *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP). Awalnya, dia bekerja sebagai staf redaksi surat kabar *Soerabajaasch Handelsblad*. Pada tahun 1913 dia pindah ke Semarang, dan menjadi sekretaris *Semarangsche Handelsvereniging*. Saat itu Semarang menjadi pusat *Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP).[22] VSTP dikenal sebagai organisasi atau serikat buruh tertua di Hindia Belanda, dan sudah menjadi organisasi dengan manajemen yang baik. Sneevliet mampu membawa VSTP menjadi semakin radikal.

Bersama 60 orang teman Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV) pada tanggal 9 Mei 1914. Pada tahun 1915 ISDV mendirikan majalah organisasi dengan nama *het Vrije Woord*. ISDV beranggapan untuk memperkuat posisi organisasi, maka dirasa perlu

hlm. 75-81.

20 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed). *op.cit*, hlm. 356.

21 *Ibid.*

22 Nama lengkapnya adalah Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Periksa dalam Ruth T. McVey, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, terjemahan Tim Komunitas Bambu (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 19-20.

bersekutu dengan organisasi yang lebih besar.[23] ISDV kemudian menjelma menjadi *Partai Komoenis Indonesia* (PKI).[24]

Pada tahun 1916 diputuskan untuk mulai masuk ke dalam SI. Anggota ISDV dijadikan anggota SI, dan demikian pula sebaliknya. Beberapa alasan mengapa SI bisa disusupi oleh ISDV: (1) *Central Sarekat Islam* (CSI) sebagai badan koordinasi pusat sangat lemah kekuasaannya. Setiap cabang SI bisa bertindak sendiri-sendiri; (2) Saat itu sangat memungkinkan seseorang masuk lebih dari satu partai.[25] Setelah kongres bulan Juni 1924, PKI semakin kuat.

Pada akhir tahun 1926 meletus pemberontakan komunis di Jawa dan Januari 1927 di Sumatera Barat. Dalam waktu beberapa minggu seluruh pemberontakan di Jawa bisa ditumpas oleh pemerintah.[26] Dua kasus pemberontakan tersebut ternyata bisa membuka mata pemerintah kolonial, bahwa situasi politik di Hindia Belanda sudah masuk tahapan yang serius untuk ditangani.

3. *Pemerintah Hindia Belanda Bereaksi Keras*

Dalam catatan Sartono, pada akhir dasawarsa ke dua abad ke-20 perkembangan politik memperlihatkan tanda-tanda pengetatan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, dan di sisi yang lain ada peningkatan tuntutan politik serta meluasnya mobilisasi politik di tengah masyarakat.[27] Perkembangan dari tahun ke tahun sejak 1918 sudah menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih radikal. Lebih lanjut, Sartono menyebutkan bahwa gejala itu disebabkan oleh: (1) Bidang politik di Eropa yang merupakan dampak PD I, khususnya di Belanda. Gerakan revolusioner kaum sosial-demokrat di Belanda di bawah pimpinan Troelstra, telah memberi inspirasi kepada perkembangan unsur-unsur progresif di Indonesia. Hal itu terlihat pada tuntutan ISDV untuk pemerintahan sendiri; (2) Bidang sosial-ekonomi, PD I telah menyebabkan terhambatnya atau bahkan macetnya distribusi hasil

23 *Ibid.*, hlm. 22-25.
24 *Ibid.*
25 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed), *op.cit.*, hlm. 357.
26 *Ibid.*, hlm. 365; pelajari pula John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1926-1927*, terjemahan Zamakhsyari Dhofier (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 35.
27 Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 144.

perkebunan, yang berakibat munculnya pengurangan produksi. Rakyatlah yang paling menderita, sebab mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan hilangnya pendapatan. Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan pungutan pajak.

Keadaan mulai membaik pada tahun 1920. Produk perkebunan mulai terserap ke pasaran. Pemerintah tetap membiarkan pengusaha memungut untung lebih besar lagi, sedangkan rakyat tetap ditekan dengan beban pajak dan hidup dalam kondisi sengsara; (3) Aktivitas politik melalui organisasi, kongres, media massa memperoleh rangsangan dengan melihat memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat; (4) Kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda bersifat reaksioner, sebab mereka tidak mau mengambil resiko yang tidak menguntungkan bagi para pemilik modal, sehingga wajar apabila muncul gejala reaksioner di satu pihak dan radikalisme di pihak yang lain; (5) Memburuknya kondisi hidup di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan di tengah rakyat, sehingga muncul kecenderungan kuat untuk mengikuti anjuran untuk melakukan aksi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial, seperti: melakukan berbagai aksi pemogokan kerja.[28] Tentu saja para pemimpin organisasi radikal seperti: ISDV, VSTP, dan PKI sangat aktif melakukan propaganda untuk melawan kapitalisme Belanda.[29]

Tentu saja gejala-gejala seperti tersebut di atas sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan Pemerintahan Kolonial Belanda. Akibatnya, Pemerintah Belanda tidak segan-segan melakukan tindakan keras. Sejak awal pemerintah sudah menaruh curiga terhadap kemunculan organisasi pergerakan. Lembaga-lembaga sosial itu merupakan perwujudan dari solidaritas dan tidak jarang mampu menghimpun pengaruh. Di satu pihak, pemerintah tidak bisa melarang niat untuk berkumpul, sedangkan di pihak lain perkembangan ke arah pembentukan kekuasaan tidak bisa dicegah. Reaksi keras pemerintah Belanda tampak ketika para pemimpin IP, Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, Tjipto Mangoenkoesoemo, diasingkan. Nasib yang sama juga dialami oleh para politisi kiri.[30]

---

28 Beberapa kasus pemogokan bisa dilihat dalam Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, terjemahan Zahara Deliar Noer (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 262-263.

29 Sartono, *op.cit.*,hlm. 146-147.

30 *Ibid.*, hlm. 148-149.

Pada awal abad ke-20 koloni Belanda sudah mulai terbatas. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah ketika muncul orang-orang yang "nakal" secara politis, Belanda tidak memiliki tempat untuk mengasingkan mereka di luar Hindia Belanda, sehingga lebih baik pemerintah mendirikan tempat pengasingan khusus di wilayah Hindia Belanda. Faktor lain yang dipertimbangkan oleh pemerintah Belanda adalah sudah dikenal luas bahwa tokoh komunis di Indonesia sering ke luar masuk penjara. Menurut J.J. Schricke (wakil pemerintah untuk urusan umum di *Volksraad*), hal itu tidak manusiawi. Lebih baik mereka ditempatkan di suatu tempat, dimana mereka bisa hidup nyaman dan tanpa diganggu mimpi menjadi masyarakat merdeka atau masyarakat komunis. Ide itu sudah ada sejak tahun 1925. Oleh karena pada tahun 1926 terjadi pemberontakan komunis, maka ada pembenaran untuk mewujudkan ide tersebut.[31]

Dasar hukum pemerintah kolonial mengasingkan para pemberontak 1926 ke Boven Digoel adalah hak istimewa gubenur jenderal. Hak istimewa itu dikenal dengan *exorbitante rechten*.[32] Isi aturan ini adalah:

Pasal 35

1. Kepada orang-orang, yang tidak dilahirkan di Hindia Belanda, yang dianggap berbahaya bagi ketertiban dan ketenangan umum, bisa dicabut hak tinggalnya disana oleh Gubernur Jenderal, dalam kesepakatan dengan Raad van Indie.
2. Keputusan yang dikeluarkan untuk itu ketika diberlakukan pada orang Belanda, dilengkapi dengan alasan.
3. Keputusan ini menentukan waktu yang tepat, ketika orang yang bersangkutan diijinkan untuk mengungkapkan dan menyelesaikan perkaranya
4. Gubernur jenderal dalam sebuah instruksi yang ditandatangani olehnya, bisa memerintahkan agar orang tersebut, sambil menunggu kesempatan bagi pengusiran, dijebloskan dalam kurungan.
5. Keputusan untuk menyingkirkan dan instruksi untuk mengurung disampaikan kepada orang yang bersangkutan melalui akta formal (legal)

31 Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 172-173.

32 S. Pompe, *The Indonesian Supreme Court: a Study of Institutional Collapse* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 2005), hlm. 23.

6. Gubenur Jenderal memberitahukan keputusan bagi pengusiran, bersama berkas-berkas lebih lanjut, segera kepada Menteri Kolonie.
7. Dari Keputusan bagi pengusiran, keterangan dibuat kepada volksraad dan, ketika menyangkut orang Belanda, diberitahukan kepada parlemen oleh raja.

Pasal 36

1. Kepada orang-orang, yang tidak dilahirkan di Hindia Belanda, oleh Gubernur Jenderal bisa dicabut hak tinggalnya demi kepentingan ketenangan dan ketertiban umum di bagian tertentu Hindia Belanda, dalam kesepakatan dengan Raad van Indie.
2. Ketika tindakan ini menyangkut seseorang yang tidak termasuk orang Hindia, keputusan ini bersama berkas-berkas lebih lanjut segera diberitahukan kepada menteri koloni.
3. Tentang tindakan yang dilakukan, keterangan dibuat kepada volksraad dan ketika menyangkut orang Belanda diberitahukan kepada parlemen oleh raja.

Pasal 37

1. Gubernur Jenderal dalam kesepakatan dengan Raad van Indie, bisa menunjuk hak tinggal pada suatu tempat tertentu di sana demi kepentingan ketenangan dan ketertiban umum kepada orang-orang yang dilahirkan di Hindia Belanda, atau mencabut hak tinggalnya di bagian tertentu Hindia Belanda.
2. Gubernur Jenderal bisa memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan dalam kurungan melalui sebuah instruksi yang ditandatangani olehnya, sambil menunggu saat untuk pengusiran.
3. Keputusan untuk mengusir dan perintah untuk mengurung disampaikan kepada orang yang bersangkutan melalui akte legal.
4. Ketika tindakan yang dimaksud dalam pasal ini menyangkut seseorang yang tidak termasuk orang Hindia, tindakan diambil sesuai satu ayat sebelum ayat terakhir dari pasal sebelumnya.
5. Ketentuan yang dimuat dalam ayat terakhir pasal sebelumnya juga diberlakukan.[33]

Siapa saja yang ditunjuk atau dianggap oleh gubernur jenderal sebagai orang yang membahayakan atau mengancam keamanan dan ketertiban (*rust en*

33 Pasal 35-37 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indie* (*Indische Staats-regeling 1925*). Peraturan ini dapat dibaca dalam *RA-1927*.

orde), akan dikirim atau ditunjuk kemana mereka harus tinggal, dalam kasus pemberontakan komunis 1926-1927 adalah Boven Digoel.

Tentang keberadaan kamp Boven Digoel, dalam penilaian Shiraishi, Gubernur Jenderal de Graeff masih menyimpan kepercayaan untuk mengembangkan kawasan *Nieuwe Guinea*. Kawasan itu dipercaya bisa menenteramkan dan memakmurkan orang-orang buangan. Usulan Boven Digoel menjadi tempat pengasingan berasal dari Gubernur Provinsi Maluku, yang saat itu diperintahkan untuk mencari tempat pengasingan di wilayahnya. Boven Digoel secara administratif saat itu berada di wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Boven Digoel dianggap ideal untuk mengasingkan tahanan politik pemerintah. Jarak dari muara Sungai Digoel sekitar 455 km ke arah pedalaman, dikelilingi hutan lebat, lengkap dengan rawa-rawa yang banyak nyamuk malarianya, dan sungainya masih menjadi tempat hidup buaya.[34]

Boven Digoel tidak dirancang sebagai sebuah kamp konsentrasi karena tidak ada penyiksaan atau pembunuhan terhadap tahanan di tempat itu. Pemerintah kolonial hanya membiarkan tahanan sampai mati, gila, atau menjadi hancur. Tidak ada pembatasan menyangkut keberadaan kamp itu. Pembangunan kamp itu diputuskan melalui sebuah pertemuan luar biasa *Raad van Nederlandsch-Indie* pada 18 November 1926, beberapa hari setelah meletus pemberontakan komunis di Jawa Barat (12 November 1926).[35] Harapan Gubernur Jenderal de Graeff dengan mengirimkan para pemberontak ke kamp Boven Digoel itu agar mereka tidak akan mengulang kelakuannya lagi. Rekomendasi yang sama juga diberikan oleh J. Roest, Wakil Gubernur Maluku, yang menyatakan bahwa Boven Digoel merupakan kawasan yang cocok untuk pengasingan massal.

Kamp Boven Digoel dibangun oleh sebuah kesatuan tentara yang dipimpin Kapten L. Th. Becking[36] Sebelumnya ia dikenal sukses memadamkan pemberontakan Komunis di Banten pada November 1926. Pasukannya tiba pada Januari 1927, dan selama dua bulan mereka membangun barak, gudang, rumah sakit, stasiun radio, kantor pos, dan tempat mandi massal di aliran

34 Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 174.

35 *Ibid.*, hlm. 3-4.

36 Pelajari dalam Ina Mirawati, *Inventaris Arsip Boven Digoel, 1927-1942 (1954)* (Jakarta: Arsip Nasional R.I., 1990). Shiraishi, *ibid.*, hlm. 7.

sungai. Pekerjaan besar itu dilaksanakan oleh anak buah Kapten Becking yang terdiri dari orang-orang Ambon dan tahanan kerja.[37]

Seperti disebut di atas, Tanah Merah dijadikan pusat pemerintahan, sekaligus tempat penampungan utama para tahanan politik, yang secara geografis terletak hampir di tengah-tengah Papua. Kamp penampungan ke dua berada lebih jauh lagi, sekitar 55 kilometer dari Tanah Merah. Dibutuhkan waktu 5 (lima) jam lagi dari Tanah Merah menuju Tanah Tinggi. Kamp Tanah Tinggi didirikan sekitar tahun 1928. Tempat ke tiga adalah Gudang Arang yang dikenal penuh nyamuk malaria, panas, lembab, gersang, dan jarang penduduknya. Namun, tidak ada kawat berduri yang mengelilingi kamp dan tidak ada pula menara pengawas. Hanya kompleks tempat tinggal tentara dan keluarganya yang dikelilingi kawat berduri. Para tahanan diberi kebebasan berkeliaran dalam radius 25 kilometer di dalam kamp.[38] Secara teknis sangat tidak mungkin para tahanan bisa melarikan diri, walaupun dalam catatan Chalid Salim antara tahun 1929-1943 paling tidak ada 50 orang tahanan yang mencoba melarikan diri, 40 orang di antaranya dari Tanah Tinggi dan sisanya dari Tanah Merah. Hanya sebagian kecil yang berhasil lolos dari ancaman alam.

Kamp tahanan di Boven Digoel dibagi menjadi tiga wilayah yang berbeda, yaitu: (1) wilayah administrasi (*bestuurterrein*), tempat tinggal para pejabat sipil, (2) wilayah militer, dan (3) kamp pembuangan. Fasilitas pendukung di wilayah Boven Digoel antara lain: bangunan untuk para motoris (orang-orang yang bertugas merawat kapal motor), perumahan pegawai, penginapan, pesanggrahan untuk para pelaut, *burgersocietiet* (yang menjadi tempat pemutaran film bisu), lapangan tenis, *oranje park*, stasiun pembangkit listrik, kantor pos, gereja Katholik,[39] lapangan tembak, beberapa toko Cina, gereja Protestan, bangunan untuk para pejabat pribumi, rumah dinas dokter, dan lain-lain. Sebenarnya, pada 1937 dibuka lapangan terbang dan bersamaan dengan itu beroperasi perusahaan penambangan emas, *Goudmijn*

37 Shiraishi, *ibid.*

38 *Ibid.*, hlm. 18.

39 Wilayah kamp Tanah Merah, khususnya, menjadi daerah pelayanan Pater C. Mauwese. Periksa dalam Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1800-1942- Sebuah Profil Sejarah: Jilid 2 – Pertumbuhan yang Spektakuler dari Sebuah Minoritas yang Percaya Diri, 1903-1942*, terjemahan Yosep Maria Florisan (Jakarta: Ledalero, 2006), hlm. 423-424.

Maatschappij Nieuw Guinea.[40] Perusahaan itu juga membangun berbagai fasilitas pendukung, seperti perumahan, kantor pos, dan ada juga bangunan stasiun radio[41]. Berdasarkan laporan kwartal pertama tahun 1930, bangunan di Tanah Merah berjumlah 584 bangunan, dan di Tanah Tinggi berjumlah 46 bangunan.[42] Menurut catatan Hatta, jarak kawasan *bestuurterrein* dengan kampung tempat pengasingan sekitar 1,5 km.[43]

Di tepi Sungai Digoel ada sebuah rumah sakit, wilayah militer, dan kantor *het Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (HPB/kepala daerah). Letak rumah sakit berada di dalam batas tempat penahanan, sedangkan fasilitas pemerintahan dan militer, termasuk lapangan terbang, berada di luar area penahanan.[44] Pemisahan fasilitas militer dan pemerintahan dengan fasilitas penahanan sudah tampak pada tahun 1928.[45]

Pihak yang paling berperan melacak dan memproses orang-orang yang berpotensi dibuang ke Boven Digoel adalah residen dan kepala polisi, khususnya PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) setempat. Hampir 100% usulan residen disahkan gubernur jenderal.[46] Ketika tempat dan sistem disiapkan, proses pengiriman calon penghuni kamp dimulai. Mereka yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 di kawasan Banten dan tahun 1927 di kawasan Sumatera Barat, diperiksa dan dipilah status hukumnya. Bagi mereka yang diputuskan untuk diasingkan, Boven Digoel sudah menunggu kedatangan mereka. Seperti telah direncanakan, penghuni awal kamp Boven Digoel adalah orang-orang yang terlibat pemberontakan komunis tahun 1926-1927.

40 Dalam proses pengerjaan dua bangunan milik perusahaan pertambangan tersebut, pernah ikut bekerja salah seorang aparat zeni (*genie*) yang bertugas di kamp Boven Digoel dan dia melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut berdasarkan surat ijin tanggal 12 Juli 1937 No. 37. Orang tersebut adalah E. Tomei (*opzichter der Genie*), lihat "*Rooi-Register behoorende v/d "Buiten-Rooikerer Molukken 1936" Tanah Merah: doorloppend nummer 37*" dalam *Arsip Boven Digoel No. 128* (ANRI-Jakarta).

41 Namun, usaha perusahaan itu gagal dan pada 1939 memutuskan untuk keluar dari kawasan Tanah Merah. Akhirnya Digoel hanya menjadi daerah pembuangan kembali Takashi Shirashi, *op.cit.*, hlm. 20-22.

42 "*Verslag betreffende de interneeringskampen aan den Boven Digoel over het tweede kwartaal 1930*", dalam *Binnenlandsch-Bestuur No. 1308* (ANRI-Jakarta).

43 Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hlm. 353.

44 Keterangan lengkap bisa dipelajari dalam "*Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Resident der Molukken van 5 October 1938 No. BB 100/1/1*", dalam *Arsip Boven Digoel No. 85* (ANRI-Jakarta).

45 Berdasarkan "*Afschrift uittreksel uit het register der Besluiten van den Gouverneur der Molukken 17den Maart 1928 No. BB-32/1/1*", tentang penentuan batas-batas *onderhoofdplaats* Tanah Merah der *onderafdeeling* Boven Digoel, dalam *Arsip Boven Digoel No. 84* (ANRI-Jakarta).

46 Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 175.

Dalam catatan Ruth McVey, keputusan untuk melakukan pemberontakan diambil pada pertemuan di Cirebon pada tanggal 6 November 1926. Pemberontakan akan dilaksanakan pada tengah malam tanggal 12 November 1926 di seluruh Jawa dan pesisir barat Sumatera. Malam hari antara tanggal 12-13 November 1926 terjadi pemberontakan tersebut. Menurut catatan Marieke, pemberontakan di Banten (Bantam) merupakan pemberontakan yang terorganisasi.[47]

Pada tanggal 13 November 1926, kepolisian melakukan 64 kali penangkapan, yang terdiri dari: 54 kali di Serang, 5 kali di Lebak, dan 5 kali di Pandeglang. Antara tanggal 13 November-8 Desember 1926 sudah 916 orang ditangkap, yang terdiri dari: 134 orang di Serang, 781 orang di Pandeglang, dan satu orang di Lebak. Jumlah tersebut tidak termasuk beberapa ratus orang yang diinterogasi oleh pemerintah setempat dan dan beberapa hari kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.[48] Jumlah yang ditahan di seluruh Indonesia karena terlibat pemberontakan tahun 1926 sekitar 13.000 orang,[49] dan 10% dari mereka berasal dari Banten atau 1.300 orang, sedangkan di seluruh Jawa Barat ditangkap 3.000 orang. Dari sekian banyak orang yang ditangkap di Banten, sekitar 700 orang dikenai hukuman penjara, dan 99 orang lainnya dikirim ke Boven Digoel. 11 orang di antara mereka adalah guru agama, dan 27 orang lainnya adalah haji. Dari total 1.000 orang yang dikirim pada gelombang pertama ke Boven Digoel dari seluruh Indonesia, 59 orang bergelar haji, dan 27`orang haji berasal dari Banten.[50]

Di tempat lain, pada tanggal 1 Januari 1927 kelompok komunis di Silungkang berkeputusan untuk melakukan tindakan nyata. Pada tanggal 4 Januari mereka mulai melakukan pemberontakan, sampai tanggal 12 Januari 1927.[51] Serangan pada awal tahun 1927 berhasil mengejutkan para penguasa Belanda di Sawah Lunto. Dalam catatan Mestika Zed, pusat gerakan komunis

47 Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda: dari Kepedulian dan Ketakutan*, terjemahan Tristam P. Moeliono, dkk (Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV-Jakarta, 2011), hlm. 329.

48 Michael C. Williams, *Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*, terjemahan Chandra Utama (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003), hlm. 113.

49 Angka yang sama juga disebutkan oleh Ruth T. McVey, *op.cit.*, hlm. 621. Ruth juga menyebut bahwa 5.000 orang akhirnya ditahan dalam rangka pencegahan, dan 4.500 di antaranya dipenjarakan setelah diadili. Akhirnya, 1.308 orang dan beberapa anggota keluarganya dikirim ke Boven Digoel.

50 Michael C. William, *loc.cit.*

51 Ruth T. McVey, *op.cit.*, hlm. 597.

ada di kawasan Silungkang. Pemerintah Belanda tidak pernah membayangkan bahwa gerakan perlawanan akan begitu cepat dan brutal, walaupun mereka sudah mendapat informasi akan adanya gerakan penentangan kepada pemerintah.[52]

Beberapa kesatuan militer dikirim untuk memadamkan pemberontakan. Pasukan pemerintah kerepotan untuk memadamkan pemberontakan di Silungkang. Kejadian seperti itu terjadi sampai akhir minggu pertama bulan Januari 1927. Sampai tanggal 12 Januari 1927 jumlah orang yang berhasil ditangkap pemerintah adalah 1300 orang. Mereka yang dianggap terlibat dalam pemberontakan itu rata-rata berusia 17-30 tahun. Jumlah itu meningkat pada bulan Februari, yaitu: 4.000 orang. Gerakan pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah berlangsung sampai tanggal 28 Februari 1927.[53]

Proses peradilan dilaksanakan oleh *Landraad* (pengadilan) Sawah Lunto. Saat itu di pengadilan Sawah Lunto hanya ada satu hakim dibantu oleh seorang panitera. Keduanya berasal dari Belanda. Jaksa berasal dari Indonesia. Tidak ada pembela untuk para terdakwa, walaupun ancaman hukumannya berat. Hukuman terberat adalah hukuman mati, yang dikenakan kepada beberapa orang, yaitu: Muhammad Zen, Pakih A'in (putusan untuk keduanya berubah menjadi hukuman seumur hidup), Kamaruddin gelar Manggulung, Muhammad Yusuf Sampono Kayo. Hukuman yang lain adalah hukuman penjara di Jawa, seperti ke: Glodok, Cipinang, Ambarawa, Malang, Sragen, Surabaya, Pamekasan, dan beberapa tempat lainnya. Hukuman yang lebih berat adalah dikirim ke Boven Digoel. Seluruh proses peradilan selesai pada bulan September 1928. Di pengadilan Sawah Lunto telah diproses sekitar 4.000 perkara. Dampak yang dihadapi orang-orang Sumatera Barat adalah ruang gerak kaum nasionalis semakin dipersempit. Tokoh-tokoh Silungkang yang dibuang ke Boven Digoel adalah Datuk Bagindo Ratu dan istrinya Salamah, Talaha Sutan di Langit, Saleh Mangkuto, Talaha Sutan Jambi, Jamal Basri, Upik Itam, dan beberapa lainnya.[54]

52 Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hlm. 139.

53 *Ibid.*, hlm. 141-142.

54 *Ibid.*, hlm. 143-145.

Pemerintah Belanda serius menangani gerakan radikal di Indonesia. Gerakan para tokoh nasionalis di mata mereka sudah menemukan bentuknya, dan sentimen anti-Belanda mulai meninggi. Dalam kondisi seperti itu wibawa pemerintah benar-benar dipertaruhkan. Kepentingan untuk memisahkan para tokoh pergerakan ke tempat yang sangat jauh dan terpencil, saat itu sudah dirasa tepat, walaupun efektivitasnya belum teruji. Apakah benar dengan mengasingkan mereka, benih-benih nasionalisme Indonesia akan pudar? Sebenarnya masih belum terjawab.

Tampak jelas bahwa pemerintah kolonial ingin terus mempertahankan posisi politiknya di Hindia Belanda. Setiap kali terjadi peristiwa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, maka akan dilakukan tindakan keras. Namun, demikian ada upaya untuk membedakan, khususnya dalam hal perlakuan, antara pelaku tindak kriminal dengan tahanan politik. Untuk kelompok yang dikategorikan sebagai tahanan politik, pemerintah akan berupaya memisahkan tokoh nasionalis yang dianggap radikal dari massanya, tanpa harus menyengsarakan secara fisik.

4. *Hidup di dalam kamp*

Rombongan pertama penghuni Digoel tiba pada Maret 1927. Pada waktu itu 50 orang tahanan tiba, termasuk seorang Cina, dan 30 orang anggota keluarga. Jumlah tahanan rombongan pertama dan keluarganya yang datang antara Oktober 1927 sampai April 1930 terus meningkat. Rata-rata mereka dikirim ke Boven Digoel setelah melalui interogasi dengan berbagai pertanyaan yang sama. Daftar pertanyaan itu sudah dikirimkan sejak 24 November 1926. Pengiriman tahanan terus berlanjut, dan sejak 1931 pengiriman berlangsung setiap Januari. Sebagian di antaranya yang dianggap keras kepala ditempatkan di kamp terjauh yaitu: Tanah Tinggi.

Di kamp Tanah Merah, tahanan dibagi menjadi empat kategori. Keempat kategori itu adalah:[55]

1. *De werkwilliger*, yaitu: mereka yang mau bekerja untuk kepentingan pemerintah dan karena itu menerima upah dari pemerintah.[56] Penerima upah terendah adalah:

55 Takashi Shiraisi, *op.cit.*, hlm. 31-32.

56 Dalam catatan Salim, dikenal dengan kelompok yang rela bekerja. Kelompok yang rela bekerja (termasuk dirinya) adalah kelompok mayoritas di kalangan tahanan. Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti: di kantor pemerintahan, di rumah sakit, dinas pemberantasan malaria, ada juga yang

pekerja sawah sebesar f. 10,50/bulan, dan yang tertinggi adalah juru tulis kantor dengan gaji f. 90/bulan. Alasan utama mereka mau bekerja untuk kepentingan pemerintah adalah: segera dibebaskan.[57]

2. *De eigenwerkzoekenden*,[58] yaitu: para pekerja mandiri. Masuk dalam kategori *eigenwerkzoekenden* antara lain: nelayan, petani, pemilik toko. Mereka hanya menerima jatah makan 15 kilogram beras/bulan sampai mereka benar-benar mandiri.
3. *De Struntrekkers*, adalah: mereka yang menerima bantuan atau tunjangan, yang terdiri dari mereka yang cacat, orang berpenyakit kronis, penderita gangguan jiwa atau mereka yang gila karena isolasi yang begitu lama;
4. *De naturalisten*,[59] yaitu: kelompok yang benar-benar tidak mau bekerja dan menolak pemberian apapun dari pemerintah, seperti makanan gratis dan barang. Bisa saja secara tiba-tiba tahanan yang masuk kategori ini dikirim ke pembuangan yang lebih jauh, yaitu: di Tanah Tinggi. Mereka umumnya dikategorikan sebagai orang-orang *onverzoenlijken* (keras kepala).[60]

---

menjadi buruh pergudangan, atau bekerja di lapangan. Pekerjaan lapangan adalah: pekerjaan di ladang atau proyek pemindahan tanah (yang dimulai jam 07.00 sampai 13.00. Bayaran tertinggi hanya 40 sen sehari atau sekitar f. 10,50 sebulan. Orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah menerima gaji antara f. 18,75 sampai f. 30 sebulan. Gaji tertinggi yang diterima tahanan adalah: f. 90 sebulan. I. F. M. Chalid Salim, I.F.M, *Limabelas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea, Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, terjemahan Hazil Tanzil dan J. Taufik Salim (Jakarta: Bintang Bulan, 1977) , hlm. 269-270.

57 *Ibid.*

58 Salim menyebutnya sebagai kelompok swa-karya, dimana peluang untuk dipulangkan sangat kecil. Tunjangan yang diberikan pemerintah bersifat sementara, sampai mereka bisa hidup mandiri. Para nelayan mendapatkan peralatan menangkap ikan dari pemerintah dan diizinkan menggunakan perahu dengan tanda pengenal. Jangkauan pelayaran yang diizinkan adalah 25 km. Disamping nelayan, adalah para petani sayuran, yang konon hidupnya lebih makmur di antara tahanan lainnya. Hasil buminya bernilai tinggi di daerah tersebut. Disamping nelayan dan petani, masih ada wiraswastawan lain dalam kelompok inil. Periksa Salim, *ibid.*, hlm. 274-276.

59 Atau dikenal dengan kelompok prinsipil, sebab mereka dikenal sebagai orang-orang yang berpegang pada prinsip, dan tidak mau bekerja pada pemerintah. Bantuan hanya kebutuhan pokok. Untuk pakaian mereka harus mengusahakan sendiri. Bagi tahanan yang masuk dalam kategori ini tidak ada pertimbangan untuk dipulangkan, bahkan ada yang dikirim ke Tanah Tinggi. Mereka hanya bekerja secara suka rela, seperti: mencari ikan, menanam sayur dan buah-buahan di kebun sendiri.

60 Menurut catatan Salim, para tahanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: (1) kelompok yang rela bekerja; (2) kelompok swa-karya; (3) kelompok penerima tunjangan; (4) kelompok *naturalis*. Periksa Salim, *ibid.*, hlm. 269. Molly Bondan menyebut bahwa para tahanan dibagi dalam beberapa kategori, menurut tingkat kemauan mereka bekerja dengan para penguasa kolonial. Bagi mereka yang mau bekerja, mereka bisa bekerja dengan upah 40 sen sehari, atau boleh bekerja dengan pekerjaan yang lebih mapan, seperti: menjadi petugas keamanan kampung (*Rust en Orde Bewaarder* (ROB)/Penjaga Keamanan dan Ketertiban). Bagi kelompok lain, khususnya yang disebut sebagai kaum *naturalis* (termasuk Bondan di dalamnya), yang tegas-tegas menolak bekerja kepada para penguasa kolonial hanya akan mendapat bantuan sekedarnya setiap bulannya. Periksa Molly Bondan, *Spanning a Revolution: Kisah Mohamad Bondan, Eks-Digoelis, dan Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 147.

Dengan demikian, secara garis besar kamp Boven Digoel dihuni oleh dua kelompok tahanan, yaitu: pertama, tahanan kamp Tanah Merah yang mayoritas berharap dibebaskan secepatnya. Kelompok kedua, tahanan di kamp Tanah Tinggi yang terdiri dari orang yang nekad, berprinsip, keras kepala, dan sebagainya. Pada tahun 1930, jumlah penghuni kamp Tanah Tinggi 115 orang, yang meliputi 70 orang tahanan dan 45 orang anggota keluarga. Jumlah rumah yang tersedia 43 buah. Di kamp Tanah Tinggi terdapat tiga kelompok besar tahanan, yaitu: kelompok Aliarcham, kelompok Sardjono, Ngadiman, Winanta, dan kelompok alumni Moskow pimpinan Woworoentoe, Daniel Kamoe, Clementi Wentoek. Selanjutnya mereka yang masih tetap tinggal di Tanah Tinggi hanyalah kelompok Aliarcham (23 orang), sedangkan yang lain sudah berkompromi.

Sampai 1927, sebelum digantikan oleh seorang kontrolir baru, yang bernama Monsju, Kapten Becking memiliki wewenang antara lain memeriksa para tahanan, memerintahkan apel pagi, mewajibkan para tahanan bekerja di bawah pengawasan setiap hari dengan upah f. 31,50/bulan. Namun, setelah kunjungan Gubernur Maluku banyak ketentuan yang diubah. Para tahanan boleh memilih bekerja dengan pemerintah atau tidak. Tunjangan kepada masing-masing tahanan diberikan sebesar f. 0,72/hari dalam bentuk pangan, dan bagi mereka yang mau bekerja untuk pemerintah diberi tambahan f. 0,30/hari dalam bentuk tunai. Aturan baru itu ditentang oleh para tahanan[61].

Pemerintah kolonial melihat kenyataan bahwa penghuni kamp Boven Digoel terus bertambah. Pertambahan itu juga bisa berarti jumlah tahanan yang semakin banyak, atau bisa karena ada anak-anak yang hadir melalui proses kelahiran, mengingat banyak tahanan yang dikirim ke Digoel datang bersama keluarganya. Sebagai gambaran, pada 1933 saja terjadi 17 kelahiran.[62] Kehadiran mereka tentu membutuhkan fasilitas lain, khususnya di bidang pendidikan. Pengajaran dirasa perlu, apalagi kebanyakan para tahanan (orang tua anak-anak itu) adalah: mereka yang sadar akan pentingnya pendidikan.

Sekolah formal yang ada di kawasan kamp adalah: *Standaardshool* dan *Malay English School*. Sejak bulan November 1928 di kampung A didirikan

61 *Ibid.*, hlm. 34.

62 Lihat "*Geboorte kinderen 1933*", dalam *Arsip Boven Digoel No. 268* (ANRI-Jakarta).

sekolah, jumlah muridnya 200 orang.[63] Sekolah itu mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak f. 2000,- per tahun. Tenaga pengajarnya adalah: 4 orang guru, mantan murid *kweekschool* namun belum lulus. Ada juga seorang guru perempuan. Sampai tahun 1930-an, para mantan murid *standaardschool* masih mengenang peran seorang guru yang berasal dari Sumatera Barat, Sutan Said Ali. Dia dikenal sebagai kepala sekolah yang profesional dan disiplin.[64] Nama Sutan Said Ali juga disebut dalam laporan pemerintah Belanda, yang berkaitan dengan alasan pembuangannya ke Boven Digoel.[65] Sehari-hari Said Ali dibantu oleh beberapa guru tidak tetap, antara lain: Moestadjab, Yahya Nasoetion,[66] dan Soejitno Hadiwirjo.[67] Pada tahun 1932, Said Ali dan istrinya mendapat gaji dari pemerintah sebesar f. 60.[68]

Masa belajar di *standaardschool* adalah: 7 (tujuh) tahun. Sekolah ini pada tahun 1930 berubah nama menjadi *Standaardschool met Nederlandsch*, dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Jam belajar dimulai pada jam 07.00 dan berakhir pada jam 13.00, dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan waktu istirahat dua kali.

Mata pelajaran yang diajarkan di tempat itu sama dengan sekolah setingkat *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), dan kemudian dikenal dengan nama *Standaardschool*.[69] Ada sebuah perpustakaan yang memiliki 700 buku. Pada

63 Margaret J. Kartomi menyebutkan bahwa sekolah setingkat HIS dibuka di Tanah Merah pada akhir tahun 1927. Seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut akan mendapat tambahan penghasilan f. 0,75 per hari. Pelajari Margaret J. Kartomi, *Gamelan Digoel, di Balik Sosok Seorang Pejuang: Hubungan antara Indonesia dengan Australia* (terjemahan Hersri Setiawan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 53.

64 Wawancara dengan Trikoyo (83 tahun) pada tanggal 3 November 2010, dan dengan Siti Chamsinah (84 tahun) tanggal 7 Desember 2010).

65 Catatan pemerintah Belanda tentang Soetan Said Ali termuat dalam "*Overzicht van de Politieke toestand ter Sumatera's Westkust aansluitende op het overzicht ddo. 5 April 1927*" dalam *Arsip Binnenlandsch-Bestuur No. 215* (ANRI-Jakarta).

66 Siti Chamsinah menyebut dua nama ini dalam wawancaranya. Yahya Nasution kemudian menjadi suami Siti Chamsinah. Keduanya menikah di Australia, dimana kelompok terakhir penghuni kamp ditempatkan setelah Jepang masuk, dan keduanya kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Wawancara dengan Siti Chamsinah pada tanggal 11 Desember 2010.

67 Nama ini disebut oleh Trikoyo sebagai wakil kepala sekolah di *standaardschool*, ketika dia bersekolah. Wawancara dengan Trikoyo tanggal 3 November 2009.

68 Tidak diketahui pasti gaji itu merupakan gaji per bulan atau tahunan, dalam laporan yang ditulis pada tanggal 1 Maret 1932 hanya menyebut jumlah tersebut. Periksa dalam *Arsip Boven Digoel No. 46* (ANRI-Jakarta).

69 *Standaardschool* menurut Jan Aritonang adalah: nama baru untuk sekolah kelas dua. Sekolah kelas dua merupakan peningkatan kualitas dari sekolah desa (*volksschool*) yang berdiri di banyak desa (Jawa), yang awalnya bertujuan sekedar memberantas buta huruf. Pelajarannya hanya pengetahuan dasar baca-tulis-hitung. Lama belajar selama tiga tahun. Periksa *Staatsblad* No. 241 dan 242 tahun 1906.

tahun tersebut sedang diusahakan bagaimana mengadakan pendidikan di Tanah Tinggi.[70] Dengan demikian, lembaga pendidikan yang ada di kawasan kamp adalah: lembaga pendidikan tingkat dasar. Di *standaardschool* pelajaran agama dan sejarah Indonesia tidak diberikan. Pelajaran sejarah yang diberikan adalah: sejarah dunia dan untuk sejarah Indonesia hanya berkisar pada beberapa kerajaan besar saja. Buku-buku dalam Bahasa Belanda.[71]

Bersekolah di *standaardschool* tidak dipungut biaya, dan sebenarnya siapapun (asal keluarga tahanan) bisa bersekolah di tempat tersebut. Selama sekolah tersebut beroperasi tidak ada satupun penduduk asli dan anak-anak pejabat birokrasi (*BB ambtenaar* atau *Bestuurtrerrein*) yang ikut bersekolah di situ. Keluarga *BB ambtenaar* bersekolah di sekolah yang ada di lingkungannya. Ijasah akan diberikan pada akhir tahun pelajaran klas 7. Ulangan umum akan diadakan setiap semester. Nilai dalam *rapport* ditulis dalam skala 0-10.[72]

Pelajaran ekstrakulikuler yang ada hanyalah kepanduan, dan diajarkan di luar jam pelajaran (pada hari Sabtu sore atau Minggu). Tidak ada seragam dalam kegiatan kepanduan. Latihan kepanduan diajar oleh Munandar, seorang tahanan yang berasal dari Semarang dan anggota dari *Ikatan Pandu-pandu Indonesia* (IPI). Materi yang diberikan adalah: tali-temali, mendaki gunung, menaksir tinggi pohon, dan sebagainya.[73]

Setelah tahun 1929, banyak anak-anak kaum *naturalis* yang ditarik ke luar dari sekolah pemerintah tersebut, dan dimasukkan ke sekolah yang mereka dirikan.[74] Sekolah itu dikenal dengan *Malay-English School* (MES). Dalam standar sekolah Eropa, MES sangat tidak memenuhi syarat, apalagi dari sisi sarana pengajaran. Sekolah ini tidak berjalan lama, sebab setelah terjadinya penggrebekan oleh polisi sekolah tersebut ditutup. Aktivitas belajar mengajar dipindahkan di rumah-rumah penghuni kamp.[75]

Pelajari dalam Jan S. Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak: Suatu Telaah Historis-Teologis Atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zending (khususnya RMG) di Bidang Pendidikan, 1861-1940*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 21-22.

70 Informasi tentang aktivitas persekolahan di masa-masa awal beroperasinya kamp Boven Digoel diperoleh dari *Pandji Poestaka No. 53* (2 Juli 1929, Tahoen VII), hlm. 837.

71 Wawancara dengan Trikoyo tanggal 7 Desember 2010.

72 Wawancara dengan Trikoyo tanggal 7 Desember 2010 dan Siti Chamsinah tanggal 7 Desember 2010.

73 Wawancara dengan Trikoyo tanggal 7 Desember 2010, dan wawancara dengan Asmun Sueb tanggal 1 November 2009.

74 Molly Bondan, *op.cit.*, hlm. 192.

75 Peristiwa bermula dari acara peringatan "Hari Buruh" pada tanggal 1 Mei. Hampir semua penghuni memperingatinya. Ketika salah seorang berpidato, tiba-tiba polisi datang tanpa alasan yang jelas dan

Bondan menyebut, setelah MES dibubarkan, maka pengajaran dijalankan atas prinsip "sistem tiga keluarga", yang artinya dalam praktek pengajaran sehari-hari hanya ada empat pihak yang hadir pada setiap pelajaran, yaitu: satu guru dan anak-anak dari tiga keluarga.[76] Para tahanan ada yang tidak ingin memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah, sebab sekolah pemerintah dianggap terlalu berorientasi pada kepentingan kolonial. Hatta menyebut tujuan sekolah pemerintah adalah: agar anak-anak di kemudian hari menjadi hamba Ratu Belanda dan pandai menyanyikan lagu kebangsaan Belanda.[77]

Aktivitas MES akhirnya diketahui oleh pemerintah. Akibatnya para guru harus mengajar dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, tidak jarang ada guru yang ditahan karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Bukan saja karena masalah materi pelajaran seorang guru bisa ditahan, tetapi apabila dia mengajar lebih dari tiga keluarga juga bisa ditahan.[78]

Pelajaran yang diberikan di kelas tiga keluarga umumnya adalah: pelajaran standar sekolah dasar. Pelajaran-pelajaran itu adalah: ilmu bumi dunia, fisik, biologi, matematika, Bahasa Melayu, dan Bahasa Inggris. Buku-buku dibawa dari Jawa, kecuali Bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris digunakan buku *Royal Science Readers I-VI* dan *Elementary Grammar*, yang semuanya dipesan dari Inggris.[79]

Dalam laporan pemerintah, sekolah-sekolah yang diadakan di rumah-rumah tahanan disebut juga sebagai *wilde school* atau sekolah liar. Pada awalnya "Ordonansi Sekolah Liar" dikenal dengan *Toezicht Ordonantie Particulier Onderwijs* (Ordonansi Pengawasan atas Pendidikan Swasta), yang dimuat dalam *Staatsblad* 1932 No. 494. Pendidikan Swasta dalam aturan tersebut diartikan dengan pendidikan yang tidak disubsidi oleh pemerintah (*het particulier ongesubsidieerde onderwijs*). [80] Sekolah-sekolah rumahan model

membubarkan acara tersebut. Polisi mengamankan mereka yang dianggap bertanggung-jawab pada acara tersebut. Kesaksian Siti Chamsinah dalam wawancara tanggal 7 Desember 2010.

76 Molly Bondan, *ibid.*, hlm. 190.

77 *Ibid.*

78 Kasus itu menimpa Suroso, yang diadukan oleh anggota ROB karena telah mengajar lebih dari tiga orang anak, Ketika dia mengajar bola basket kepada lebih dari tiga orang anak, maka pemerintah memenjarakannya selama satu hari, dalam *ibid*, hlm. 191.

79 *Ibid.*, hlm. 192.

80 Kenji Tsuchiya, *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Taman Siswa* (terjemahan H.B. Jassin), (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 262

"tiga keluarga" yang dikembangkan oleh para tahanan di Boven Digoel adalah: sekolah-sekolah yang sedikitpun tidak mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga layak kalau disebut dengan sekolah liar.

Di samping dua model sekolah formal yang telah disebutkan di atas, di tengah-tengah masyarakat kamp juga berkembang model pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah, yang pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Komponen yang dibutuhkan disesuaikan dengan keadaan anak atau peserta didik. Komponennya antara lain adalah: (a) guru atau tenaga pengajar atau pembimbing atau tutor; (b) fasilitas; (c) cara menyampaikan atau metode; (d) waktu yang dipergunakan. Pendekatan pendidikan jenis ini adalah: fungsional dan praktis.

Untuk mempelajari Bahasa Inggris, pada tanggal 4 Mei 1932 Maliki mengirim surat kepada *Wijkmeester van de interneeringskamp* dengan maksud memberitahukan tentang adanya kelompok belajar Bahasa Inggris. Dia menyatakan bahwa bentuk pembelajaran itu bukan bentuk sekolah, sebab tidak ada guru dan murid. Semuanya dianggap pelajar. Dalam proses pembelajaran itu tidak dipungut uang. Uang yang dikumpulkan bersifat sukarela, dan hanya untuk membeli minyak lampu.

Pada kursus Bahasa Belanda yang diadakan malam hari jumlah muridnya 19 orang tahanan, dan kursus Bahasa Inggris malam hari yang diajar oleh Abdul Qodir jumlah muridnya empat orang.[81] Kursus malam hari yang diadakan oleh Achmad Sumadi diikuti oleh seorang murid, yang diadakan Sardjono berjumlah dua orang murid. Di kamp Tanah Merah, Katamhadi, dan Soejitno terus berusaha meyakinkan aparat agar memberi ijin kepada mereka untuk mengadakan kursus Bahasa Belanda yang akan diajarkan oleh ketiga orang tesebut. Sampai laporan itu ditulis sudah ada 15 orang yang ingin mengikuti kursus tersebut.[82] Kursus sejenis juga dimintakan izin kepada pemerintah. Berdasarkan surat izin tertanggal 11 Maret 1932 ada enam orang tahanan yang ingin mendapatkan kursus Bahasa Belanda di rumah Marlan dan Hamzah.[83] Pada bulan yang sama ada beberapa orang yang mengadakan

81 *Arsip Boven Digoel No. 318* (ANRI-Jakarta).
82 *Arsip Boven Digoel No. 315* (ANRI-Jakarta).
83 *Arsip Boven Digoel No. 315* (ANRI-Jakarta).

rapat di rumah S. Kaesri untuk membicarakan rencana pembangunan sekolah di sekitar Kampung C.[84]

Ketika Hatta dan Syahrir tinggal dalam pengasingan di Digoel, mereka sering melakukan pengajaran untuk memperkukuh hubungan dengan masyarakat tahanan di sana. Hatta mengajar di rumahnya dalam mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan filsafat.[85] Pelajaran dilaksanakan pada malam hari. Syahrir mengajar Bahasa Inggris, sosiologi, sejarah, dan hukum, walaupun tidak seteratur Hatta[86]

Persekolahan yang dipraktekkan di Boven Digoel pada dasarnya sebagian besar dilaksanakan dengan model Barat. Bahasa pengantar, kurikulum, dan buku ajar yang dikembangkan oleh Belanda. Baik di sekolah pemerintah, maupun di sekolah-sekolah liar penggunaan bahasa dikatakan seimbang antara Bahasa Melayu (atau yang kemudian dikenal dengan Bahasa Indonesia) dengan bahasa asing (Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris). Penguasaan bahasa menjadi persyaratan penting, sebab buku ajarnya sebagian besar berbahasa asing. Murid-murid yang bersekolah di sekolah pemerintah maupun sekolah-sekolah liar dikenal sebagai orang-orang yang tidak saja melek huruf, tetapi juga melek bahasa asing, khususnya Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Bahasa Belanda akhirnya menjadi pintu gerbang menuju Barat, sebab mayoritas buku teks pelajaran ditulis dalam Bahasa Belanda.[87]

Pada periode akhir kamp Boven Digoel, para guru yang sebelumnya mengajar di sekolah-sekolah rumahan sudah mulai kesulitan mendapatkan bantuan. Kapal-kapal Belanda yang biasa membawa logistik atau bahan pangan, yang sebelumnya berlabuh di dermaga Tanah Merah sebulan sekali sudah tidak teratur berlayar ke kawasan Boven Digoel. Kebanyakan dari mereka, yang *naturalisten* ataupun yang menggantungkan pada bantuan pemerintah mencari penghidupan lain.

Kondisi yang demikian memaksa para orang tua memindahkan sekolah anak-anaknya ke sekolah lain. Sekolah yang masih terus berdiri adalah:

---

84 *Arsip Boven Digoel No. 78* (ANRI-Jakarta).

85 Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 139.

86 Rudolf Mrazek, *Syahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia* (terjemahan Mochtar Pabotinggi, Matheos Nalle, S. Maimoen), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 256.

87 Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat, Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950: Sejarah Politik Bahasa*, (terjemahan Jessy Augusdin), (Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995), hlm. 229.

sekolah milik pemerintah atau *standaardschool*. Sekolah ini terus ada dan terus beraktivitas sampai menjelang balatentara Jepang memasuki kawasan Boven Digoel. Kebutuhan hidup para tahanan dan seluruh staf administrasi Pemerintah Belanda di Boven Digoel sebelum diungsikan dipenuhi oleh Pasukan Sekutu.

Dalam kehidupan sehari-hari Bahasa Melayu dan Bahasa Jawa merupakan bahasa pergaulan yang paling banyak dipakai. Bahasa Jawa banyak terdengar, karena sebagian besar penghuni kamp adalah orang-orang Jawa. Pada kenyataannya Bahasa Melayu mampu menyatukan berbedaan bahasa daerah di antara para penghuni kamp.

Pemakaian Bahasa Melayu pada periode pergerakan merupakan simbol penyatuan tekad. Bahasa Melayu dikenal tidak terikat suku dan status, serta tidak memiliki masalah hierarkhi, dan walaupun tumbuh di daerah Sumatera, bahasa tersebut membantu penduduk maupun pemimpin berkomunikasi lintas suku. Elson menyebut bahwa Bahasa Melayu menjadi pertanda pertumbuhan keyakinan akan Indonesia.[88]

Bukan hanya mata pelajaran yang umum diajarkan di sekolah dasar ataupun pendidikan bahasa yang diupayakan di Boven Digoel. Sejak 25 Mei 1932, dimulai pengajaran di bidang jurnalistik di rumah Marsudi.[89] Pengajaran di bidang kebudayaan juga dicoba di tempat pengasingan itu. Pada 21 Mei 1932 diadakan acara tembang Sunda dan kecapi di rumah Tohir.[90] Menurut sumber yang sama juga dilaporkan mengenai pelaksanaan latihan memainkan musik gamelan yang diadakan setiap Minggu pada jam 20.00-24.00 di rumah Harjosentono di Kampung C. Latihan gamelan itu diikuti sembilan orang. Pada 15 Agustus 1932 diterima laporan bahwa Moh. Soe'ib meminta izin untuk mengadakan latihan pencak silat di rumah Datoe Saidi dan Zakaria, dan latihan akan diikuti 20 orang.[91]

Di bidang kesenian, di Tanah Merah, berdiri berbagai kelompok kesenian, seperti: kelompok opera "*Orient*", kelompok musik dan opera *Liberty*, dan himpunan sandiwara Sunda "Penglipur Hati". Ada dua perkumpulan

88 R.E. Elson, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (terjemahan Zia Anshor), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 98-99.
89 *Arsip Boven Digoel No. 264* (ANRI-Jakarta).
90 *Arsip Boven Digoel No. 321* (ANRI-Jakarta).
91 *Arsip Boven Digoel No. 10* (ANRI-Jakarta).

kesenian yang bisa hidup lama, yaitu: perkumpulan ketoprak dan wayang orang. Perkumpulan yang paling lama berdiri adalah: *Kunst en Sportvereniging Boven Digoel* (KSVD). Di tempat yang sama juga berkembang perkumpulan gamelan Jawa. Peralatan gamelan mereka dicukupi sendiri dengan menggunakan rantang, kaleng bekas, dan lembaran besi cangkul.[92] Tokoh pentingnya adalah: Pontjopangrawit. Sehari-hari Pontjopangrawit memiliki tugas berkesenian Jawa, dalam hal ini gamelan, di samping bercocok tanam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping memainkan gamelan, Pontjopangrawit dikenal sebagai pembuat gamelan menggunakan bahan seadanya, seperti: rantang bekas. Setiap hari Kamis sore diadakan latihan memainkan gamelan dan menari di rumahnya. Pemain gamelan kebanyakan adalah: orang-orang tua.[93]

Ada pengalaman menarik, satu minggu setelah rombongan Bondan tiba di Digoel, diadakan sebuah pertandingan sepak bola antara kesebelasan tahanan lama dengan kesebelasan tahanan baru. Bondan, Hatta, dan Syarir ambil bagian dalam pertandingan tersebut. Kesebelasan tahanan lama tidak hanya diperkuat oleh para tahanan, sering kali diperkuat juga oleh anak-anak tahanan.[94]

Pendidikan agama diberikan di lingkungan keluarga. Kurikulum sekolah formal pemerintah tidak mengalokasikan jam pelajaran agama di *standaardschool*.[95] Pengajaran diadakan di rumah bisa dimaklumi, karena sebagian besar tahanan memiliki latar belakang tokoh atau ahli agama Islam di daerahnya.

Nilai-nilai kebangsaan jelas tidak bisa diharapkan dari pelajaran di sekolah formal atau di *standaardschool*. Cerita tentang bagaimana mereka bisa sampai Boven Digoel dan dalam konteks apa mereka sampai ke Boven Digoel hanya muncul dalam pembicaraan di tengah keluarga. Semua orang yang berstatus sebagai tahanan, tentu memiliki alasan yang sama mengapa mereka sampai di tempat terpencil itu, yaitu: karena aktivitas orang tuanya dianggap membahayakan stabilitas politik pemerintah Belanda. Anak-anak segenerasi Trikoyo dan Chamsinah mendapatkan informasi status mereka dari

92 I.F.M. Chalid Salim, *op.cit.*, hlm. 296-297.
93 Wawancara dengan Trikoyo tanggal 7 Desember 2010.
94 Molly Bondan, *op.cit.*, hlm. 185.
95 Kesaksian Trikoyo tanggal 7 Desember 2010 dan Siti Chamsinah tanggal 7 Desember 2010.

keluarga dan lingkungan sesama tahanan.[96] Pewarisan nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk perlawanan tidak keluar dalam bentuk verbal "lawan". Namun demikian, tampak dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sekeluarga bisa sampai ke Boven Digoel karena sikap perlawanan tersebut. Demikian pula ketika orang tua mereka memilih untuk tetap menjadi *naturalis* juga menjadi simbol perlawanan tersebut.

Peran Bahasa Melayu dalam pergaulan di antara keluarga tahanan cukup penting. Komunikasi dan pembicaraan tentang nasib mereka di tanah seberang bisa berjalan lancar karena bahasa tersebut, dan Bahasa Jawa. Bahasa Belanda dan Inggris yang didapatkan oleh mereka yang bersekolah, hanya digunakan di bangku sekolah. Sehari-hari bahasa itu tidak digunakan dalam bahasa pergaulan. Ketika mereka bergaul dengan para pejabat pemerintahan, khususnya para pejabat pribumi, Bahasa Melayu-lah yang banyak digunakan, termasuk kemudian dengan penduduk asli. Penduduk asli secara perlahan mampu memahami Bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan para penghuni kamp, untuk menggantikan bahasa isyarat yang sebelumnya selalu mereka digunakan dalam bergaul dan bekerja.[97]

Kita harus memahami bahwa integrasi bukanlah sebuah barang jadi, namun sebuah proses historis. Interaksi adalah: proses awalnya, kemudian dari interaksi akan dibangun sebuah solidaritas. Menurut Sartono, bagian akhir dari proses ini adalah terbentuknya sebuah wadah atau organisasi yang berfungsi sebagai tumpuan identitas, sosial, kultural, dan akhirnya politik.[98]

Penggunaan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, ternyata tidak mampu menjadikan penghuni kamp menjadi "Belanda". Cita-cita perlawanan masih ada dalam diri para penghuni. Cita-cita pendidikan yang bersifat asimilasi, tampaknya gagal menjinakkan para penghuni kamp. Bahasa Belanda dipahami menjadi bahasa formal dalam pendidikan.

Pengalaman kehidupan di Boven Digoel telah memampukan mereka untuk beradaptasi dan berinteraksi di antara tahanan. Pengajaran dan persekolahan

96 Hal itu disampaikan kedua saksi sejarah tersebut dalam wawancara tanggal 7 Desember 2010.

97 Wawancara dengan Trikoyo dan Chamsinah tanggal 7 Desember 2010. Chamsinah bisa menyaksikan pengalaman berkomunikasi antara keluarganya dengan penduduk asli, sebab keluarganya memiliki satu orang pembantu penduduk asli Papua.

98 Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 125.

yang ada, dan khususnya yang diadakan oleh sesama tahanan, ternyata bisa melampaui perbedaan suku, ideologi, dan agama. Terjadilah interaksi di antara mereka. Seterusnya, solidaritas sebagai tahanan politik juga terbentuk. Mereka memiliki musuh bersama, yaitu: kolonialisme. Pada tingkat yang paling sederhana solidaritas itulah yang menyatukan ide mereka tentang ke-Indonesia-an. Persepsi dan ikatan itu rupanya tetap menjadi kekuatan yang menakutkan bagi pemerintah Belanda. Sampai-sampai ketika pemerintah Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang dan harus mengungsi ke Australia, di tahun 1943 sisa-sisa tahanan harus dibawa ke Australia, karena mereka takut bahwa para tahanan itu akan dimanfaatkan oleh bala tentara Jepang.

5. *Interaksi dengan penduduk lokal*

Ketika para tahanan datang dan mulai hidup di Tanah Merah dan Tanah Tinggi tentu menjadi perhatian penduduk setempat. Kedua belah pihak melihat dua kebiasaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam catatan Chalid Salim, di sekitar Tanah Merah paling tidak ada empat suku asli Papua, yaitu: Jahir, Mappi, Muyu, Mandobo, dan Kaoh.[99] Penduduk asli Papua juga sering disebut dengan orang Kaya-kaya. Sebutan Kaya-kaya awalnya diberikan kepada penduduk asli Papua yang ada di sekitar Merauke (Papua bagian selatan), yang sering mengerumuni kapal-kapal dagang Belanda yang berlabuh. Mereka sendiri menyebut dirinya Kaya-kaya, yang artinya: sahabat.[100] Jadi, dari awal mereka sangat ingin bersahabat dengan orang-orang dari luar wilayahnya.

Pergaulan itu dimulai ketika penduduk asli yang berkunjung kamp, khususnya kaum pria, dan beberapa waktu kemudian kaum perempuannya ikut berkunjung. Untuk mengunjungi kamp, penduduk asli sekitar Boven Digoel harus menempuh perjalanan sekitar 30-40 kilometer. Gubug mereka bangun di dekat kamp Tanah Merah. Pada tahap awal mereka hanya memperhatikan kehidupan di dalam kamp. Lama-kelamaan mereka mau

99 I. F. M. Chalid Salim, *op.cit.*, hlm. 239
100 *Ibid.*, hlm. 226

bekerja di beberapa keluarga tahanan.[101] Rata-rata mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau tukang kebun. Untuk pekerjaan itu mereka mendapatkan upah pakaian, tembakau, dan bahan pangan. Pada tahap tersebut, penduduk asli Papua belum paham dengan mata uang.[102]

Bagi penduduk asli untuk melakukan pekerjaan rumah di keluarga-keluarga yang ada di kamp memang butuh proses pembiasaan. Chalid mencatat bahwa ada perbedaan persepsi tentang beberapa hal dalam hidup berkeluarga. Penduduk asli sering menganggap pekerjaan di rumah-rumah tahanan sangat rumit dan heran dengan tata-cara makan yang harus menggunakan sendok dan garpu. Butuh waktu untuk meyakinkan mereka bahwa mandi itu perlu dan menjadi kebutuhan.[103] Namun, demikian pada akhirnya mereka bisa dididik untuk biasa hidup seperti itu. Sebenarnya mereka rajin. Tidak ada istilah pencurian selama mereka bekerja.[104]

Ternyata berbagai pekerjaan di dalam kamp menarik minat penduduk asli Papua, terutama yang berasal dari suku Muyu dan Kaoh. Kedua suku ini dikenal rajin. Mereka sering bekerja di dalam kamp dalam waktu lama. Ketika jumlah penduduk asli yang ingin bekerja di Tanah Merah bertambah banyak, maka dibangunlah bangsal khusus untuk mereka di sekitar kamp.

Dalam upaya saling mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sering kali terjadi pertukaran barang antara penghuni kamp dengan penduduk asli. Penduduk asli akan memberi: burung, anak babi, bulu cendrawasih, kulit biawak, dan sebagainya. Barang-barang itu akan ditukar dengan pakaian, beras, garam, dan gula merah. Penduduk asli sangat menghargai kapak dan parang besi.[105] Keberadaan gedung bioskop seringkali mengundang perhatian penduduk asli, dan memang seringkali mereka diundang untuk menyaksikan film. Film yang sangat mereka sukai adalah: *Tarzan*.[106]

Waktu terus berjalan, dan kehidupan di dalam kamp berangsur mulai normal. Para penghuni kamp dan penduduk asli bisa saling berinteraksi. Dengan cara yang paling sederhana, adaptasi di antara mereka bisa berjalan

101 Keluarga Chamsinah mempekerjakan seorang penduduk asli Papua. Wawancara dengan Siti Chamsinah tanggal 7 Desember 2010.
102 I. F. M. Salim, *op.cit.*, hlm. 227.
103 *Ibid.*, hlm. 232.
104 *Ibid.*, hlm. 232.
105 *Ibid.*, hlm. 228.
106 *Ibid.*, hlm. 154.

pula. Tanpa terasa ada hubungan saling menguntungkan atau saling membutuhkan. Para penghuni sudah mencitrakan penduduk asli sebagai orang yang berfisik kuat. Namun, ada beberapa orang di antara mereka yang menderita asma dan *bronkhitis*. Kembali lagi, butuh pembiasaan untuk membuat mereka sembuh dari pernyakit tersebut.

Sampai bulan September 1938 tercatat ada 99 orang penduduk asli yang bekerja di lingkungan kamp. Mereka dipimpin oleh dua orang mandor. Mandor pertama bernama Wanggem dan memimpin 29 orang penduduk asli Papua. Mandor ke dua bernama Djon dan memimpin 68 orang penduduk asli Papua. Mereka rata-rata bekerja selama 14-24 hari kerja, dengan upah total f.1,96 sampai f. 2,03.[107]

Penduduk asli Papua sering tinggal di keluarga tahanan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pekerjaan mereka adalah: mencuci, mengambil air, dan sebagainya. Upah yang mereka terima adalah: makanan, perkakas kerja, pakaian, dan tembakau.[108] Ketika Hatta tiba di Tanah Merah, orang Kaya-kaya-lah yang membantu mengangkat barang-barang. Menurut catatan Hatta, orang-orang itu akan bekerja di rumah tangga tahanan selama dua bulan, kemudian mereka kembali ke asalnya untuk beberapa waktu. Selama bekerja mereka menerima sehelai kemeja lengan pendek dan celana pendek, serta mendapat makan secukupnya. Kadang-kadang mereka juga menerima tembakau.[109] Hatta sendiri mempekerjakan seorang Kaya-kaya di rumahnya.[110]

Ketika penduduk asli mulai masuk dan berkenalan dengan kehidupan di dalam kamp, tidak terasa mereka mulai belajar dengan kebiasaan baru. Pada saat mereka memutuskan untuk tinggal dan bekerja di dalam kamp, mereka harus mulai membiasakan untuk hidup menetap dalam beberapa waktu. Jenis pekerjaannya juga baru. Suku Muyu, misalnya, mereka memiliki tradisi bertani *slash and burn*. Tradisi itu jelas tidak bisa dipraktekkan di dalam kamp. Pekerjaan rumah tangga, seperti: mencuci piring, menimba air, dan mandi secara rutin, juga menjadi pengalaman baru bagi mereka. Mereka juga harus

107 Periksa dalam "*Absentie Lijst der Papoea's Koelie over September 1938*" dalam *Arsip Boven Digoel No. 285* (ANRI-Jakarta).
108 Margaret J. Kartomi, *op.cit.*, hlm. 52.
109 Mohammad Hatta, *op.cit.*, hlm. 354.
110 Margaret J. Kartomi, *op.cit.*, hlm. 61.

membiasakan dengan kebiasaan makan orang-orang di dalam kamp, yang konon dianggapnya tidak praktis.

Tinggal dan bekerja di instalasi pemerintah maupun di masing-masing keluarga di dalam kamp juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi, khususnya kemampuan berbahasa Melayu. Bahasa isyarat berangsur-angsur ditinggalkan, dan digantikan dengan bahasa verbal dengan menggunakan Bahasa Melayu, walaupun tidak semua anggota kelompok bisa memahami Bahasa Melayu. Paling tidak masing-masing kelompok memiliki juru bahasa yang mengerti Bahasa Melayu.[111]

Seperti telah disebut di depan, selama tinggal di kamp, kebiasaan berpakaian suku-suku asli Papua juga berubah. Mereka mulai mengenal pakaian. Hal itu terbukti ketika terjadi barter, kemeja merupakan salah satu satu komoditi yang disukai. Membiasakan hidup dengan sehat juga mereka jalani di wilayah kamp. Beberapa orang penduduk asli yang bekerja di rumah sakit, tentu akan melihat bagaimana mereka mencegah dan mengobati suatu penyakit. Pada saat aparat pemerintah mengadakan patroli ke daerah-daerah sekitar kamp, biasanya akan diajak beberapa orang penduduk asli.

Tata cara kerja di dalam kamp juga menjadi pengalaman baru. Beberapa jenis pekerjaan membutuhkan kedisiplinan, khususnya disiplin waktu kerja. Ketaatan pada kesepakatan waktu kerja akan sangat terkait dengan upah yang akan mereka terima. Ketika mereka menerima upah dalam bentuk uang, sebenarnya mereka mulai mengenal uang sebagai alat bayar. Kehidupan di dalam kamp yang dinamis, biasanya akan berdampak pada orang-orang yang melihat dan terlibat dalam pekerjaan dengan penghuni kamp.

Hubungan antara penghuni kamp dengan penduduk asli, pada dasarnya merupakan hubungan yang saling menguntungkan, walaupun pada tahap awal masih ada anggapan bahwa mereka adalah: suku-suku liar. Tampaknya ada ikatan yang saling menguntungkan di antara keduanya. Para penghuni kamp membutuhkan tenaga mereka, dan penduduk asli membutuhkan banyak belajar tentang kehidupan di luar hutan.

Penduduk asli memang tidak bisa mengenyam pendidikan formal yang dikembangkan di dalam kamp. Namun, mereka bisa belajar dengan

111 Proses itu dikisahkan oleh Siti Chamsinah pada tanggal 7 Desember 2010. Saat Chamsinah beserta keluarga diasingkan di Boven Digoel, mereka memiliki seorang pembantu dari suku asli Papua.

membiasakan diri dengan kehidupan para penghuni kamp, seperti: ketika mereka bekerja di rumah sakit, rumah para tahanan, maupun di proyek-proyek pemerintah, termasuk belajar bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kamp.

Kamp Boven Digoel bertahan sampai tahun 1943. Saat itu sebenarnya wilayah Hindia Belanda sudah dikuasai oleh bala tentara Jepang. Ada ketakutan dari pihak pemerintah Hindia Belanda di pengasingan yang berada di Melbourne terhadap kemungkinan digunakannya para tahanan untuk kepentingan Jepang, sehingga diputuskan untuk mengungsikan para tahanan ke Australia. Pemindahan para tahanan dilakukan oleh Ch.O.van der Plas pada tahun 1943. Sejak ditutupnya kamp tersebut maka berakhir pula episode kehidupan para tahanan politik di Boven Digoel.[112]

6. *Penutup*

Pembukaan kamp Boven Digoel tidak bisa dipisahkan dari upaya pemerintah kolonial untuk meredam radikalisasi rakyat Indonesia. Para aktivis politik yang menjadi tahanan politik dicoba dijauhkan dari massa pendukungnya. Mereka sengaja ditempatkan di daerah yang sangat terpencil. Tidak ada batas-batas fisik dengan dunia luar. Batas-batas yang ada hanyalah kondisi alam yang masih sangat rawan. Kendati demikian, orang-orang yang terlibat pemberontakan komunis 1926 dan yang dituduh atau dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban, dalam batas tertentu tetap diizinkan menghirup kebebasan di sekitar Boven Digoel.

Kesan sebagai lingkungan kehidupan yang normal tampak dalam kehidupan keseharian di kamp Boven Digoel memberi. Untuk memperlancar pengeloalaan lingkungan kamp, secara bertahap tata administrasi pemerintahan dibentuk dan dilengkapi. Boven Digoel dibagi menjadi dua wilayah, yaitu: wilayah pemerintahan dan wilayah kamp pengasingan. Kawasan ini secara administratif menjadi bagian dari *onderafdeeling* sendiri dan berpusat di Tanah Merah. Pimpinan pemerintahan yang dipegang oleh pejabat pribumi tertinggi adalah setingkat wedana. Seluruh fasilitas sosial dan ekonomi dilengkapi oleh pemerintah, seperti: rumah sakit, sekolah, toko, dan sebagainya. Kebutuhan

112 Shiraishi, *op.cit.*, hlm. 43.

dasar hidup manusia dicukupi, dan di sisi lain, pemerintah kolonial sangat waspada dengan menempatkan mereka yang keras kepala di tempat yang lebih jauh dan lebih minim fasilitasnya.

Ada interaksi di antara penghuni dengan lingkungan sekitar. Ditemukan fakta bahwa kehidupan antara para penghuni dengan penduduk lokal yang ada di sekitar kamp berjalan seperti layaknya lingkungan masyarakat biasa. Secara bertahap mereka saling berhubungan. Awalnya, suku-suku yang tinggal di sekitar kamp mendekat dan membangun tempat-tempat tinggal sementara di dekat lingkungan kamp, sampai akhirnya ada orang-orang yang bekerja di lingkungan kamp, baik di keluarga-keluarga tahanan maupun bekerja di fasilitas milik pemerintah. Suku-suku asli itu mulai belajar tentang kebiasaan hidup dan bahasa yang berkembang di dalam kamp. Mereka mulai biasa dengan berpakaian, mandi, berdisiplin kerja, dan berbahasa Melayu.

Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan pemerintah adalah: berdirinya sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Sekolah yang disediakan oleh pemerintah adalah: *standaardschool* atau setingkat HIS (SD) dengan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Kurikulumnya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah sejenis di tempat lain di Hindia Belanda. Sekolah berjalan selama tujuh tahun atau sampai kelas tujuh. Murid-muridnya khusus untuk anak-anak dari keluarga tahanan.

Beberapa saat kemudian para tahanan kategori *naturalisten* mendirikan sekolah sendiri dengan nama *Malay English School* (MES), dengan lama belajar dan kurikulum yang hampir sama dengan *standaardschool* yang didirikan pemerintah. Bahasa pengantar di sekolah ini adalah: Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris. Namun, sekolah ini tidak berjalan lama. Setelah terjadi keributan, sekolah ini dibubarkan oleh pemerintah setempat. Persekolahan untuk keluarga *naturalisten* diadakan di rumah-rumah tahanan dengan sistem sekolah "tiga keluarga". Sekolah ini tidak memiliki ijasah. Orientasinya adalah: menjadikan murid-muridnya melek huruf, dan melek bahasa asing dan Bahasa Melayu. Para tahanan, khususnya dari kelompok *naturalisten* juga diberi ijin membuka kursus-kursus ketrampilan dan bahasa.

Identifikasi musuh dan perlawanan terhadap kolonialisme muncul dalam pendidikan di tengah keluarga, dan itupun tidak secara jelas diajarkan. Status orang tua murid sebagai tahanan politik sudah cukup menjadi pelajaran bagi

mereka, bahwa keberadaan mereka di Boven Digoel disebabkan oleh sikap orang tua mereka yang melawan kekuasaan kolonial. Dengan demikian, dampak terhadap perkembangan semangat kebangsaan memang tidak langsung, namun tampak nyata pada sikap anak-anak mereka yang pada umumnya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, atau pada masa-masa sesudahnya menjadi penggerak perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.

Di tengah segala keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar, kehadiran para tahanan yang memiliki bekal pengetahuan lebih dirasa mampu menutupi keterbatasan itu. Tenaga pengajar umumnya dari kalangan tahanan itu sendiri. Para tahanan yang memiliki tingkat intelektualitas relatif tinggi bisa menyumbangkan ilmunya kepada keluarga tahanan yang lain. Gejala yang menarik adalah: bahwa ilmu dan bahasa yang dikuasai oleh murid-murid sekolah yang ada di Digoel ternyata tidak bisa merubah pandangan mereka terhadap praktik kolonialisme Belanda.

Komunikasi di antara mereka menjadi lebih mudah, sebab mereka dipersatukan dengan bahasa, yaitu: bahasa Melayu. Dalam ikatan yang paling sederhana, mereka memiliki idealisme dan solidaritas sebagai orang-orang yang terjajah.

Pengembangan kapasitas pengetahuan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak menyentuh penduduk setempat, padahal lokasi kamp dan sekolahnya ada di wilayah itu, walaupun sudah bisa dipastikan, pemerintah mengetahui bahwa di sekitar kamp ada komunitas lokal. Namun demikian, di tengah berbagai pembatasan dan pengawasan pemerintah yang begitu ketat, penduduk asli Papua, mulai belajar sambil bekerja. Mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial di dalam kamp, termasuk tradisi kehidupan modern yang berlaku. Perubahan penampilan fisik yang paling tampak berubah. Mereka mengenal cara berpakaian, bagaimana cara makan dan cara memasak, bahkan mengenal tontonan film layar lebar. Pada tahap selanjutnya mereka mulai mengenal Bahasa Melayu, yang menggantikan bahasa isyarat. Dengan demikian, yang tampak adalah: proses pembiasaan dengan kehidupan masyarakat kamp ke arah kemajuan.

Sejarah kehidupan di kamp Boven Digoel berakhir hampir bersamaan dengan berakhirnya kekuasan Belanda di wilayah Indonesia. Pada tahun 1943

van der Plas memutuskan untuk membawa sisa-sisa tahanan di Boven Digoel ke luar Papua. Berangsur-angsur mereka dibawa ke Australia.

Referensi

A. *Arsip*

(Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)-Jakarta)

1. *Arsip Boven Digoel*

- 10
- 46
- 78
- 78
- 84
- 85
- 128
- 264
- 268
- 285
- 315
- 315
- 318
- 321

2. *Arsip Binnenlandsch-Bestuur*

- 1308
- 215

B. *Publikasi*

Aritonang, Jan S. *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak: Suatu Telaah Historis-Teologis Atas Perjumpaan Orang Batak dengan Zending (khususnya RMG) di Bidang Pendidikan, 1861-1940.* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988.

Bloembergen, Marieke. *Polisi Zaman Hindia Belanda: dari Kepedulian dan Ketakutan.* Terjemahan Tristam P. Moeliono, dkk. Jakarta: Penerbit Buku Kompas dan KITLV-Jakarta, 2011.

Chalid Salim, I.F.M *Limabelas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea, Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia.* Terjemahan Hazil Tanzil dan J. Taufik Salim. Jakarta: Bintang Bulan, 1977) , hlm. 269-270.

Deliar Noer. *Mohammad Hatta: Biografi Politik.* Jakarta: LP3ES, 1990.

Elson, R.E. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan.* Terjemahan Zia Anshor. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Groeneboer, Kees. *Jalan ke Barat, Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950: Sejarah Politik Bahasa.* Terjemahan Jessy Augusdin. Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995.

Ingleson, John. *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1926-1927.* Terjemahan Zamakhsyari Dhofier. Jakarta: LP3ES, 1988.

Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jilid 2.* Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

Kartomi, Margaret J. *Gamelan Digul, di balik Sosok Seorang Pejuang: Hubungan antara Indonesia dengan Australia.* Terjemahan Hersri Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

McVey, Ruth T. *Kemunculan Komunisme Indonesia.* Terjemahan Tim Komunitas Bambu, 2009.

Mestika Zed. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat.* Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004.

Mohammad Hatta. *Memoir.* Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.

Molly Bondan, *Spanning a Revolution: Kisah Mohamad Bondan, Eks-Digulis, dan Pergerakan Nasional Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Mrazek, Rudolf. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia.* Terjemahan Mochtar Pabotingi, Matheos Nalle, S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Niel, Robert van. *Munculnya Elit Modern Indonesia.* Terjemahan Zahara Deliar Noer. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Pandji Poestaka No. 53 (2 Juli 1929, Tahoen VII)

Poeze, Harry A. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950.* Terjemahan Hazil Tanzil dan Koesalah Soebagyo Toer. Jakarta: KPG dan KITLV, 2008.

Regeeringsalmanaak 1927

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.* Terjemahan Satrio Wahono, dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Rupert Lockwood, *Armada Hitam.* Terjemahan Koesalahan Soebagijo Toer. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

S. Pompe, S. *The Indonesian Supreme Court: a Study of Institutional Collapse.* Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 2005.

Scherer, Savitri Prastiti. *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX.* Terjemahan Jiman S. Rimbo. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926.* Terjemahan Hilmar Farid. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Soeratman, Darsiti. *Ki Hajar Dewantara.* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Steenbrink, Karet. *Orang-orang Katolik di Indonesia 1800-1942- Sebuah Profil Sejarah: Jilid 2 – Pertumbuhan yang Spektakuler dari Sebuah Minoritas yang Percaya Diri, 1903-1942.* Terjemahan Yosep Maria Florisan. Jakarta: Ledalero, 2006.

Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Tsuchiya, Kenji. *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Taman Siswa.* Terjemahan H.B. Jassin. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Williams, Michael C. *Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 1926 di Banten.* Terjemahan Chandra Utama. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003.

Informan

1. Bapak Trikoyo
2. Ibu Siti Chamsinah
3. Bapak Asmun

BAB 8

BOVEN DIGOEL DAN MIGRASI POLITIK KAUM NASIONALIS, 1920-1950

Riwanto Tirtosudarmo

Rupert Lockwood: "Tanah Merah on the Digul River, with its malaria, blackwater fever, nurtitional diseases, maltreatment by guards, exposure to monsoonal rain and heat, despair and appaling death rates, put a word into the Indonesian language: *Di-digulkan,* to be 'Digulled.'"[1]

1. *Pengantar*

Digoel atau lengkapnya Boven Digoel, sebagaimana dikemukakan oleh Rupert Lockwood (1982), penulis buku *Black Armada: Australia and the struggle for Indonesian independence 1942-1949*, mempunyai makna khusus dalam bahasa Indonesia. Lebih dari makna khusus itu, Boven Digoel juga menjadi bagian penting dari ingatan kolektif bangsa Indonesia. Dalam tulisan ini akan dikupas makna Boven Digoel sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa itu, di samping mengulas Boven Digoel sebagai tempat pengasingan dan penahanan (*detention camp*) bagi para aktivis politik yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda, setelah pemberontakan PKI pecah pada tahun 1926 di Sumatera Barat dan Banten.

Pengasingan dan penahanan para aktivis politik di Boven Digoel yang dimulai pada tahun 1927 dalam perkembangannya tidak saja diperuntukkan

1 Lockwood, 1984: 16.

untuk mereka yang terlibat pada pemberontakan PKI tetapi juga terhadap para nasionalis lain yang dinilai oleh Belanda berbahaya. Para aktivis politik ini merupakan kaum nasionalis generasi pertama dari bangsa Indonesia yang aktif berpolitik pada paruh pertama abad ke-20 di sebuah wilayah yang saat itu masih disebut sebagai Hindia Belanda. Kaum nasionalis yang dipenjarakan di Boven Digoel sampai dengan kedatangan Jepang di Indonesia (1942) secara akumulatif berjumlah sekitar 500an. Angka ini belum termasuk istri dan anak, dari beberapa tahanan politik itu. Sebagian besar dari kaum nasionalis tersebut diungsikan oleh tentara Belanda ke Australia karena khawatir mereka akan bekerjasama dengan tentara Jepang yang mulai menduduki wilayah Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan (1945) sebagian besar "*refugees and political exiles*" ini dipulangkan ke Indonesia.

Kisah perjalanan kaum nasionalis, dari sebelum sampai sesudah diasingkan ke Boven Digoel, akan merupakan bahan analisis dari sebuah pendekatan yang disebut sebagai "migrasi politik". Migrasi politik adalah sebuah pendekatan untuk menerangkan bahwa perpindahan penduduk yang bersifat spasial-geografis, tidak saja membawa implikasi terjadinya perubahan yang bersifat sosial-demografis namun yang lebih penting adalah terjadinya perubahan yang bersifat sosial-politik. Dalam pendekatan migrasi politik, konteks sosial-politik, sebelum maupun sesudah terjadinya perpindahan yang bersifat spasial-geografis, merupakan dimensi yang sangat penting. Kisah kaum nasionalis yang dibuang ke Boven Digoel dan kemudian Australia ini, dalam perspektif Benedict Anderson (1998) adalah sebuah bentuk dari apa yang dideskripsikannya sebagai "*a long distance nationalism*". Sebuah nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan cita-cita sebagai sebuah bangsa sekalipun mereka berada di luar negerinya sendiri

Pemahaman tentang konteks sosial-politik ini merupakan kunci utama untuk mengerti fenomena migrasi politik yang menjadi fokus analisis. Oleh karena itu, dalam tulisan ini digambarkan berbagai seting dan konteks, di Jawa, di Boven Digoel maupun di Australia, sebelum kemudian para Digoelis ini kembali ke tanah air setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Dengan menganalisis migrasi politik yang dialami oleh para nasionalis generasi pertama yang diasingkan ke Boven Digoel ini, selain diharapkan ada pemahaman tentang "Kota Digoel" sebagai "Kota Kebangsaan" juga bisa dipahami adanya

sebuah episode penting dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia.

Bahan-bahan yang dipakai untuk menyusun tulisan ini terutama merupakan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan tentang para pejuang kemerdekaan yang dibuang ke Boven Digoel. Kunjungan singkat ke Jayapura, Merauke dan Boven dilakukan pada awal Juni 2012, yang memungkinkan penulis mewawancarai beberapa narasumber di Papua dan melihat langsung bekas tahanan kaum nasionalis itu di Tanah Merah, Boven Digoel. Pada saat ini Boven Digoel merupakan sebuah nama Kabupaten dengan ibukota Tanah Merah, yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Merauke. Pemekaran Kabupaten Merauke itu terjadi pada tahun 2002 menjadi tiga kabupaten: Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Untuk mencapai Tanah Merah, saat ini bisa melalui darat dari kota Merauke, jalur sungai Digoel juga dari Merauke dan udara dari Jayapura atau Merauke.[2]

Tulisan ini terbagi menjadi empat bagian, yang pembagiannya didasarkan pada pembabakan dari sudut waktu (kurun, periode, *time*) dan ruang (pulau, negara, *space*). Bagian pertama akan menguraikan terutama tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Hindia Belanda, khususnya Jawa dan Sumatra; menjelang pemberontakan PKI tahun 1926. Bagian kedua akan memusatkan tentang kisah-kisah mereka yang diasingkan ke Boven Digoel, Papua. Bagian ketiga adalah tentang berbagai pengalaman dari para "Digoelis" yang dipindahkan ke Australia, dan bagaimana aktivitas politik mereka di benua Kangguru ini. Bagian keempat akan mengulas tentang nasib kaum nasionalis pertama ini setelah dipulangkan ke tanah air, setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945.

2. *Hindia Belanda dalam Zaman Bergerak (1900-1926)*

Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun (1825-1830) mempunyai implikasi yang besar terhadap kekuasaan Belanda di tanah jajahannya yang bernama Hindia Belanda. Perang yang cukup lama itu

2 Secara kebetulan Harian *Kompas* membuat 6 buah reportase tentang "Jejak Nasionalisme Boven Digoel", dari tanggal 24 sampai dengan 30 Mei 2012. Laporan Harian *Kompas* ini merupakan informasi yang cukup penting tentang Boven Digoel, terutama perkembangan setelah mengalami pemekaran sebagai kabupaten baru.

disamping banyak memakan korban jiwa rupanya telah menguras secara serius kemampuan keuangan Belanda. Untuk memulihkan kondisi keuangannya, Belanda memulai kebijakan sistim tanam paksa (1830-1870) yang berdampak luas pada kemiskinan penduduk pribumi, khususnya di Jawa. Sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tahun 1900 melaporkan keadaan penduduk di Jawa semakin hari semakin memburuk. Dampak lain dari Perang Jawa adalah mulai dipergunakannya jajaran elite priyayi sebagai kepanjangan tangan Belanda dalam mengelola tanah jajahannya. Tentang hal ini, Hans van Miert[3] menulis sebagai berikut:

> "Dalam stelsel pemerintahan dualistik di Hindia yang berkembang penuh setelah Perang Jawa berakhir (1830) di masa system tanam paksa itu, para *priyayi* memegang peranan yang menentukan. Orang Belanda ingin agar negeri itu sebanyak mungkin diperintah melalui elit pemerintahan yang sudah ada itu. Jadi di samping pejabat kolonial Belanda, berfungsi juga seorang amtenar *priyayi* Jawa. Jawa dibagi menjadi beberapa karesidenan (yang dipimpin oleh seorang amtenar Belanda, yaitu residen). Karesidenan dibagi lagi menjadi kabupaten-kabupaten (di tahun 1900 jumlahnya 72 buah) yang diperintah oleh seorang regent (*bupati*), yang didampingi atau dipimpin oleh seorang asisten residen Belanda. Di bawah *bupati* ada *patih* (pembantunya), dan *wedana* (kepala distrik) yang di tahun 1900 jumlahnya 434 orang. Tahun 1900 para *bupati* yang tadinya adalah pembangkang VOC, kini menjadi kepanjangan tangan kekuasaan Belanda."

Sejak saat ini elite pribumi yang di Jawa diperankan oleh para priyayi mulai menampilkan diri sebagai representasi terdidik dari bangsanya. Kebutuhan Belanda akan tenaga yang terlatih sebagai alat untuk mengelola secara produktif tanah jajahannya mendorong Belanda mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai politik etis. Kebijakan politik etis menekankan tiga bidang yang dianggap penting bagi eksploitasi tanah jajahan secara lebih produktif, yaitu bidang pendidikan (*educatie*), pengairan (*irigatie*), dan pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa (*emigratie*). Melalui kebijakan pendidikan – yang saat itu bersifat selektif dan diperuntukkan hanya bagi para priyayi, mulailah penduduk pribumi diperkenalkan dengan berbagai bentuk modernitas, antara lain tradisi baca-tulis dan bagaimana cara berorganisasi

3 van Miert, 2003: 2-3.

secara modern. Munculnya kesadaran baru sebagai dampak dari pendidikan ini mulai terlihat antara lain dengan berdirinya organisasi para priyayi. Pada tahun 1908 Boedi Oetomo didirikan oleh para pelajar STOVIA (sekolah kedokteran pribumi), antara lain Raden Soetomo, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan saudaranya Goenawan Mangoenkoesoemo.

Boedi Oetomo adalah organisasi pribumi yang pertama menerapkan model Barat. Model Barat yaitu organisasi yang pengurusnya secara periodik diganti, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi ini memiliki program-program kegiatan, mengadakan rapat-rapat dan kongres-kongres, dan anggotanya memiliki hak suara. Setelah Boedi Oetomo lahir, menyusul didirikan organisasi-organisasi lain, seperti *Indische Partij* – IP (didirikan tahun 1912) sebuah organisasi multi-etnik Indo-Eropa dan pribumi radikal yang salah satu tujuannya adalah kemerdekaan bagi Hindia-Belanda. IP merupakan partai politik yang pertama, dan pendirinya adalah tiga serangkai: EFE Douwes Dekker (cucu kemenakan Multatuli), Soewardi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangoenkoesoemo – yang juga merupakan pendiri Boedi Oetomo. Pada tahun 1913 ketiga tokoh awal perjuangan kemerdekaan ini diasingkan oleh Belanda ke negeri Belanda karena dianggap sebagai orang-orang yang sangat berbahaya bagi pemerintah Hindia-belanda. Bersamaan dengan berdirinya IP, tahun 1912, didirikan Sarekat Islam (SI) oleh para pedagang batik di Solo yang merasa perlu mengorganisir diri dalam menghadapi para pedagang Cina dan Belanda. Pada tahun 1914 didirikan *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV) sebuah organisasi yang berhaluan komunisme oleh orang Belanda dan Jawa. Pada tahun 1920 ISDV berganti nama menjadi PKI (Perserikatan Komunis Indonesia). Para pelajar pribumi yang bersekolah di Belanda pada tahun 1908 mendirikan *Indische Vereniging* yang pada tahun 1922 berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* atau Perhimpunan Indonesia (PI).

Organisasi pribumi secara umum bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah organisasi-organisasi yang menginginkan perubahan secara bertahap, dan kelompok kedua yang menganggap bahwa perubahan perlu dilakukan secara radikal. Radikalisasi organisasi-organisasi pribumi antara lain terjadi karena didorong oeh semakin memburuknya keadaan penduduk pribumi akibat tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh

berbagai kebijakan pemerintah Belanda. Tentang memburuknya keadaan ini, Soe Hok Gie[4] melukiskannya sebagai berikut:

> "Pada tahun 1916 hingga 1920, proses perluasan produksi tebu terus berlangsung walaupun tuntutan untuk menguranginya makin santer. Apabila produksi tebu (gula) pada tahun 1900 berjumlah 744.257 ton, pada tahun 1915 menjadi 1.319.087 ton, 1.629.827 ton pada tahun 1916 dan 1.822.188 ton pada tahun 1917. Ini berarti berlanjutnya pengurangan areal persawahan dan produksi padi. Peningkatan itu diperhebat oleh kurangnya pengangkutan antara Indonesia dan negeri-negeri penghasil beras lainnya di Asia Tenggara sebagai akibat Perang Dunia I."

Perubahan yang cukup drastis mulai terjadi pada tahun 1920 ketika jumlah barang-barang yang diekspor mengalami penurunan. Akibatnya tidak sedikit perusahaan-perusahaan mengalami kerugian, bahkan ada yang menjadi bangkrut. Sebagai reaksi dari adanya penurunan di bidang ekonomi ini, pemerintah mulai melakukan apa yang disebut sebagai "politik penghematan", tentang hal ini, Sagimun dkk[5] menulis sebagai berikut:

> "Politik penghematan mulai dilaksanakan oleh pemerintah yang menimbulkan kegelisahan sosial. Hubungan antara pemerintah dengan para pemimpin pergerakan nasional menjadi tegang. Sementara itu Gubernur Jendral Van Limburg Stirum pada tahun 1921 diganti oleh Gubernur Jendral Fock, yang mulai melaksanakan politik reaksioner sesuai dengan keinginan pemerintah Belanda pada waktu itu. Fock memerintah secara otokratis dengan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang, tambahan Fock mendapat tugas untuk menghemat dan menambah penghasilan pemerintah. Tindakan pertama Fock adalah menaikkan pajak. Selama pemerintah Fock tekanan pajak pada penduduk pulau Jawa dan Madura naik 40 persen. Sementara itu politik penghematan dilaksanakan dengan ketat sehingga mengakibatkan pengangguran. Kehidupan rakyat makin mundur dan kesehatan tidak diperhatikan."

Kondisi masyarakat pribumi yang semakin memburuk sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Belanda inilah yang mendorong para pemimpin organisasi-organisasi kaum pribumi ini untuk melakukan berbagai upaya

4 Gie, 2005: 12-13
5 Sagimun dkk, 1977: 38-39.

sebagai tanggapan terhadap kondisi yang memburuk tersebut. Respons yang muncul terutama berupa aksi-aksi pemogokan buruh yang dimulai pada tahun 1922.

Melalui pendidikan dan organisasi, generasi pertama kaum nasionalis Indonesia ini tumbuh. Modernitas yang melanda elite pribumi ditandai dengan suburnya aliran-aliran filsafat maupun ideologi politik yang dibawa kaum etis Belanda dan melalui berbagai bentuk penerbitan. Saat inilah elit pribumi mengenal dan memilih berbagai ideologi seperti Marxisme, Sosialisme, Liberalisme; maupun yang bercorak non-barat seperti Islamisme. Persilangan maupun percampuran antara berbagai bentuk ideologi politik itu bukanlah sesuatu yang aneh, dan sesungguhnya menjadi dasar dari lahirnya nasionalisme Indonesia.

Dalam konteks tumbuh suburnya berbagai ideologi ini, dalam sebuah esai untuk mengenang Soekarno, Taufik Abdullah[6] mengungkapkan pentingnya dua tulisan dari Soekarno, yaitu "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme", serta "Indonesia Menggugat". Taufik kemudian menempatkan kedua teks yang dianggapnya sebagai karya yang telah menjadi "klasik", dan menganggap periode itu sebagai "sebuah dekade ideologi:"

> "Tahun 1920-an dan 1930-an barangkali bisa disebut sebagai *a decade of ideology* dalam sejarah kebangsaan kita. Ketika itulah berbagai ideologi bermunculan dan di saat itu pula semuanya terlibat dalam perdebatan. Sekian puluh tahun setelah teks ini ditulis, dua ilmuwan asing menempatkan berbagai ideologi di tanah air kita dalam beberapa kategori, tapi Bung Karno tidaklah salah kalau ia mengatakan bahwa pada dasarnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme merupakan tiga kategori ideologi yang dominan. Dalam kategori nasionalisme, ia pun tak merasa perlu membedakan "kaum Budi Utomo", yang dikatakannya sebagai mencita-citakan "Jawa-Besar", dengan "kaum revolusioner-nasionalis", yang ingin "mencari Hindia-Besar atau Indonesia-Merdeka". Lebih dari factor apapun, dalam teks ini kelihatan sekali betapa konflik golongan "Marxis" dan "Islamis" dari partai Sarekat Islam, partai yang pernah dimasukinya, sangat membekas pada Sukarno. Dikeluarkannya Sarekat Islam (SI) "Merah", yang dipelopori oleh SI cabang Semarang dari SI, tidak saja telah menyebabkan terjadinya kristalisasi ideologi "Islamisme" dan "komunisme", tapi juga telah mengajarkan kepadanya kerugian dari sebuah perpecahan dalam pergerakan kebangsaan."

6 Abdullah, 2010: 93.

3. *Boven Digoel, Tanah Merah, Papua (1927-1942)*

Pengasingan para nasionalis generasi pertama ke Boven Digoel dimulai pada tahun 1927 sebagai reaksi dan kebijakan pemerintah Belanda terhadap pemberontakan PKI tahun 1926 di Sumatera Barat, dan kemudian di Banten. Boven Digoel, oleh Belanda, tidak dimaksudkan sebagai tempat penghukuman (*penal colony*) atau kamp konsentrasi, namun lebih merupakan "*administrative measure*" yang merupakan tindakan yang sudah sering dilakukan oleh Belanda, berdasarkan kekuasaan khusus yang ada ditangan Gubernur Jendral yang disebut sebagai *exorbitant rechten.*

Menurut Shiraishi (1996) sebelum adanya kebijakan pengasingan ke Boven Digoel, beberapa tokoh politik sudah mengalami dampak dari kekuasaan khusus dari Gubernur Jendral ini, antara lain: Samin Soerontiko, pemimpin Orang Samin, diasingkan di Sumatera Barat tahun 1907; Tjipto Mangoenkoesoemo, pada tahun 1920 diasingkan ke daerah yang tidak memakai bahasa Jawa, dan pada tahun 1927 dibuang ke Banda Neira; Henk Sneevliet, A. Baars, Semaoen, Tan Malaka, Darsono, Haji Misbach dan Aliarcham, diasingkan ke luar negeri atau ke Indonesia Timur. Haji Misbach dan keluarganya diasingkan di Manokwari hingga wafatnya.[7] Boven Digoel memang kemudian merupakan tempat pengasingan yang menampung paling banyak para aktivis politik, sejak 1927 sampai 1942.

Belanda juga selalu memberitakan, antara lain melalui koran-koran berbahasa Melayu, tentang apa saja yang berkaitan dengan Digoel, tentu dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi para aktivis politik saat itu, sehingga seorang Sukarno-pun, menurut Shiraishi, harus meminta maaf dan berjanji untuk tidak berpolitik lagi, karena takut di-Digoel-kan. Tentang hal ini Shiraishi[8] menulis:

> "Indonesians understood better what it meant to be exiled in Digoel. There was no shortage of information in the Indies about Digoel. Virtually every new internment to Digoel and every new release from it were reported in Malay language newspapers, often accompanied with internees' letters to their relatives and friends and their interviews. The government let Indonesians know about

7 Tentang Haji Misbach, lihat tulisan Herman Hidayat dalam buku ini.
8 Shiraishi, 1996.

> Digoel, no doubt, to scare them. Soekarno, always imaginative, was so terrified in a Sukamiskin prison cell in1933 at the thought of living in Digoel, away from his mother and perhaps without his wife, that he asked for the government pardon in exchange of his quitting political activities and if necessary his cooperation with the government."

Setelah selesai dibangun pada awal 1927, para tahanan politik (*internee*) didatangkan secara bertahap. Rombongan pertama datang pada bulan Maret 1927, terdiri dari 15 orang aktivis, termasuk seorang Cina, beserta sekitar 30 anggota keluarganya. Warga Digoel sejak itu bertambah secara cepat. Pada saat rombongan ketujuh tiba, pada 30 Oktober 1927, warga Digoel berjumlah 930 jiwa, yang terdiri dari 538 aktivis dan 382 anggota keluarganya. Warga Digoel mencapai jumlah 1139 jiwa, yang terdiri dari 666 aktivis dan 473 anggota keluarga, pada bulan Februari 1928. Pada April 1930 jumlah penghuni Digoel mencapai puncaknya, sekitar 2000 jiwa, dan aktivisnya berjumlah 1308[9].

Menurut Langgeng[10], seorang peneliti yang bekerja di Arsip nasional, dan banyak mempelajari arsip seputar tentang Boven Digoel:

> "Secara garis besar kamp Boven Digoel dihuni oleh dua kelompok tahanan, yaitu: pertama, tahanan kamp Tanah Merah yang mayoritas berharap dibebaskan secepatnya. Kelompok ke dua, tahanan di kamp Tanah Tinggi yang terdiri dari orang yang nekad, berprinsip, keras kepala dan sebagainya. Pada tahun 1930, jumlah penghuni kamp Tanah Tinggi 115 orang, yang meliputi 70 orang tahanan dan 45 orang anggota keluarga. Jumlah rumah yang tersedia 43 buah. Di kamp Tanah Tinggi terdapat tiga kelompok besar tahanan, yaitu: kelompok Aliarcham, kelompok Sardjono, Ngadiman, Winanta, dan kelompok alumni Moskow pimpinan Woworoentoe, Daniel Kamoe, Clementi Wentoek. Selanjutnya mereka yang masih tetap tinggal di Tanah Tinggi hanyalah kelompok Aliarcham (23 orang), sedangkan yang lain sudah berkompromi."

Tentang nilai-nilai kebangsaan dari para Digoelis, Langgeng[11], menggambarkannya sebagai berikut:

---

9 Ibid.
10 Langgeng. 2012.
11 Ibid.

"Nilai-nilai kebangsaan jelas tidak bisa diharapkan dari pelajaran di sekolah formal atau di *standaardschool*. Cerita tentang bagaimana mereka bisa sampai Boven Digoel dan dalam konteks apa mereka sampai ke Boven Digoel hanya muncul dalam pembicaraan di tengah keluarga. Semua orang yang berstatus sebagai tahanan, tentu memiliki alasan yang sama mengapa mereka sampai di tempat terpencil itu, yaitu: karena aktivitas orang tuanya dianggap membahayakan stabilitas politik pemerintah Belanda. Anak-anak segenerasi Trikoyo dan Chamsinah mendapatkan informasi status mereka dari keluarga dan lingkungan sesama tahanan.[12] Pewarisan nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk perlawanan tidak keluar dalam bentuk verbal "lawan". Namun demikian, tampak dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sekeluarga bisa sampai ke Boven Digoel karena sikap perlawanan tersebut. Demikian pula ketika orang tua mereka memilih untuk tetap menjadi *naturalis* juga menjadi simbol perlawanan tersebut."

Sementara itu, tentang ide "ke-Indonesia-an", Langgeng[13] mengemukakannya sebagai berikut:

"Pengalaman kehidupan di Boven Digoel telah memampukan mereka untuk beradaptasi dan berinteraksi di antara tahanan. Pengajaran dan persekolahan yang ada, dan khususnya yang diadakan oleh sesama tahanan, ternyata bisa melampaui perbedaan suku, ideologi, dan agama. Terjadilah interaksi di antara mereka. Seterusnya, solidaritas sebagai tahanan politik juga terbentuk. Mereka memiliki musuh bersama, yaitu: kolonialisme. Pada tingkat yang paling sederhana solidaritas itulah yang menyatukan ide mereka tentang ke-Indonesia-an. Persepsi dan ikatan itu rupanya tetap menjadi kekuatan yang menakutkan bagi pemerintah Belanda. Sampai-sampai ketika pemerintah Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang dan harus mengungsi ke Australia, di tahun 1943 sisa-sisa tahanan harus dibawa ke Australia, karena mereka takut bahwa para tahanan itu akan dimanfaatkan oleh bala tentara Jepang."

4. *Di Benua Kangguru, Australia (1943-1945)*

Menjelang kedatangan tentara Jepang, pemerintah Belanda memutuskan untuk membawa para tahanan di Boven Digoel ke Australia yang merupakan negara yang menjadi anggota sekutu Amerika Serikat. Keputusan Belanda

12 Hal itu disampaikan kedua saksi sejarah tersebut dalam wawancara tanggal 7 Desember 2010.
13 Langgeng, Op.cit.

ini antara lain didasari oleh kekhawatiran para tahanan politik ini akan terpengaruh dan mendukung tentara pendudukan Jepang.

Dalam pengantar bukunya yang berjudul *Black Armada: Australia and the struggle for Indonesian independence 1942-1949*, Rupert Lockwood[14] mengatakan:

> "On this unscheduled Australian battlefield, Indonesian mutineers and Australian boycotters, drawing occasional aid and comfort from the Chiefley-Evatt Government, paralysed vital initial military operations to restore Dutch rule in the Indies, helped significantly in the diplomatic isolation of Dutch recolonizers and speeded the Indonesian Republic's victory".

Pada bulan Maret 1942 Belanda mengarahkan sebagian besar kapal-kapalnya, melalui bombardier dan torpedo Jepang, ke pelabuhan Brisbane, Sydney dan Fremantle (Perth), dan para pejabat administrasinya diterbangkan dari Cilacap di pantai selatan Jawa Tengah, ke Broome, di pantai barat Australia. Belanda kemudian membangun pemerintahan sementara di pembuangan (*Netherlands East Indies Government in Exile* di Wacol, sebuah tempat di pinggiran kota Brisbane).

Orang-orang Indonesia yang dibawa Belanda, menurut Hardjono and Warner, 1995[15], pada awalnya bisa dikelompokkan menjadi lima kategori.

> "Some were civilian government employees, some were uniformed members of the NEI, a few were nannies and other servants of the Dutch and high-born Indonesians, and some werepeople who had no intention of fleeing but were 'scooped up' by the Dutch and brought along with them, presumably as laborers".

Kelompok keenam, menurut Hardjono and Warner, menyusul ke Australia sekitar setahun kemudian, pada bulan Juni 1943, ketika 502 orang Indonesia, pria, wanita dan anak-anak; yang berasal dari tempat tahanan politik Belanda di Tanah Merah di Papua (*Dutch New Guinea*) dipindahkan karena khawatir kalau mereka akan jatuh ketangan tentara Jepang. Kelompok keenam ini sering disebut sebagai Digoelis (*'Digoelists"*).

14 Lockwood,1982: 1.
15 Dikutip dari Bennet, 2003: 22.

Adalah sebuah kenyataan yang menarik bahwa orang Indonesia bisa diperbolehkan untuk memasuki wilayah Negara Australia yang saat itu masih memberlakukan apa yang dikenal sebagai "*White Australia Policy*". Berdasarkan "*Immigration Restriction Act*", orang-orang yang dianggap "*non-whites*" dilarang memasuki wilayah territorial Australia. Pemerintahan Australia yang saat itu berada di tangan Partai Buruh melakukan pengecualian terhadap orang-orang yang disebut sebagai "*coloured*" karena keadaan darurat perang. Dalam daftar orang-orang yang dievakuasi oleh Belanda ke Australia yang dibuat oleh bagian imigrasi Australia tidak disebutkan adanya "Orang Indonesia", tapi ada yang disebut sebagai "Javanese". Orang-orang Indonesia yang dibawa ke Australia oleh Belanda terentang dari "*senior government officials*" sampai dengan "babu anak" (*nannies*) dan para pembantu rumah tangga Belanda yang membawa serta keluarganya ke Australia. Oleh Belanda para pria Indonesia diberi pekerjaan, termasuk mereka yang "diciduk" (*scooped up*) yaitu para tahanan politik yang berasal dari Boven Digoel. Baik Belanda maupun Australia mengalami kekurangan tenaga kerja selama masa perang sehingga bagi Orang Indonesia tidak sulit mendapatkan pekerjaan, mulai dari pejabat senior di *NEI Government Information Service* (NIGIS) sampai ke pekerjaan-pekerjaan sebagai tukang cuci atau "*waiters*" di mes-mes atau "*clubs*" yang banyak dibuat oleh Belanda di kota-kota di pantai timur Australia.

Sebelum perang, Belanda di Indonesia telah banyak mempekerjakan orang Indonesia sebagai pelaut (*seaman*) atau pejabat kecil (*petty officers*) di kapal-kapal dagang mereka. Kapal-kapal dagang Belanda ini secara berkala mengunjungi di kota-kota pelabuhan Australia sehingga bagi orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal-kapal itu sudah terbiasa dengan kota-kota pelabuhan yang ada di Australia. Pekerjaan di kapal, selain di perusahaan perkereta-apian, merupakan pilihan yang terbaik, karena gaji yang relatif tinggi menurut sistim administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Bennet[16], para pekerja Indonesia ini boleh dikatakan cukup berpendidikan dan rata-rata memiliki pengetahuan dan kesadaran politik, antara lain karena pengalamannya yang cukup banyak mengenal negeri-negeri di luar Indonesia. Dengan bantuan orang-orang Australia yang bersimpati pada

16 Bennet, 2003: 23.

Indonesia, para pelaut dan pejabat-kecil yang berasal dari Indonesia ini membentuk apa yang disebut sebagai "Indonesia Club" di mana mereka berkumpul dan menyalurkan sentimen-sentimen nasionalistik mereka. Yang menarik, menurut pengamatan Bennet[17] meskipun selalu ada elemen-elemen radikal dari orang-orang Indonesia yang menjadi pelaut dan pejabat kecil, namun mereka bukan merupakan orang-orang yang berideologi komunis. Orang-orang Indonesia di Australia yang berideologi komunis, menurut Bennet[18] adalah mereka yang berasal dari Boven Digoel, yang dikenal sebagai Digoelis. Bertemunya berbagai kelompok orang Indonesia di Australia ini menjadi semakin nasionalistis menjelang kalahnya Jepang dari tentara sekutu, sebagaimana digambarkan oleh Bennet[19] :

> "The pro-nationalist, anti-Dutch sentiment among the Indonesian petty officers in the Dutch merchant marine proved to be influential when, at the war's end, an opportunity arose to aid an independent Indonesian Republic by defying the Dutch authorities. In combination with the Digulists – avowed nationalists who had been imprisoned for their political views and actions – they formed a political force."

Menurut Lockwood[20], dalam evakuasi besar-besaran inilah Belanda membawa serta ribuan orang Indonesia – yang saat itu bekerja pada Belanda (*servicemen, clerks, medical orderlies and merchant seaman*). Selain orang-orang Indonesia yang bekerja pada Belanda, Belanda juga mengevakuasi para tahanan politik dari Boven Digoel, Papua Barat. Para tahanan politik dari Boven Digoel inilah yang menurut Lockwood[21] berperan aktif dalam menggalang protes terhadap pemerintah Belanda dalam pengasingan. Akibat dari protes ini para tahanan politik Boven Digoel ini sempat dipenjarakan di beberapa penjara, antara lain di Cowra dan Liverpool. Mereka kemudian dibebaskan setelah ada protes dari simpatisan mereka di Australia yang mendirikan "*a system of republican power*" jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan pada bulan Agustus 1945.

17 Ibid., hlm. 28.
18 Ibid.
19 Ibid., hlm. 30.
20 Lockwood,1982: 3.
21 Ibid., hlm. 3.

"Independence organizations, sponsored in Sydney, Melbourne, Brisbane and Mackay by Tanah Merah ex-internees, supplanted Dutch authority. The Indonesian Independence Committee in Sydney issued a 1945 ruling that anyone who did not support boycott of the Dutch would no longer be regarded as an Indonesian subject. The warning was hardly necessary. Nearly all Indonesians in Australia, with the exception of the Ambonese janissaries, were disaffected."

Pembangkangan orang-orang Indonesia yang sebelumnya bekerja untuk Belanda digambarkan oleh Lockwood[22] sebagai berikut:

"Indonesian troops mutinied, refusing orders from Dutch officers to prepare to fight the Indonesian Republic. Indonesian seamen walked off ships, refusing to carry troops, munitions, archives, currency and other paraphernalia of colonial rule. Indian, Chinese anda Malayan seamen joined the Indonesian's boycott. Waterside workers, first at Brisbane then to at other ports round the coast, refused to load Dutch cargoes, tug-crews would not provide tow-ropes, shipyard unions denied repairs to Dutch ships, Royal Netherlands Indies Air Force aircraft and navy craft were sometimes kept out of the Java battle zones by bans. The boycott extended to Dutch transport, stores and depots ashore. Some 31 Australian trade unions and four unions of Asian seamen temporarily organized in Sydney imposed boycotts on any Dutch activity likely to aid the war on the Indonesian Republic."

5. *Kembali ke Tanah Air (1946-1950)*

Ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Sukarno (didampingi Hatta) pada tanggal 17 Agustus 1945, para pengungsi politik dari Indonesia umumnya tidak mengetahui. Berita kemerdekaan itu hanya diketahui oleh beberapa pejabat yang memegang kekuasaan dan beberapa orang Indonesia yang berhubungan dengan teman-teman di Broome (Australia Barat).[23] Karena berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat dirahasiakan oleh Belanda, maka para pengungsi politik itu baru mengetahui menjelang akhir bulan Agustus. Sebuah pamflet yang memberitakan proklamasi kemerdekaan itu diterbitkan oleh IPEA (*Indonesia Political Exile Association*)

22 Ibid., hlm. 4.

23 Lihat Sagimun dkk, "Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan seri Perjuangan Ex-Digul", terbitan Direktorat Jendral Bantuan Sosial, Departemen Sosial, Jakarta 1977, hlm. 111.

dan ditandatangani oleh Ahmad Soemadi, ketua SIBAR (Sarikat Indonesia Baru) Cabang Mackay.

Sebagai respons terhadap proklamasi kemerdekaan, para aktivis politik Indonesia di pengasingan di Australia, mendirikan organisasi baru (menggantikan SIBAR) Komite Indonesia Merdeka (KIM) di Melbourne. Selain KIM didirikan pula AIA (*Australia Indonesia Association*) yang mengikutsertakan orang-orang Australia yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui negosiasi yang dilakukan oleh pimpinan KIM disetujui bahwa proses repatriasi orang-orang Indonesia akan dilakukan dengan bantuan Australia dan bukan Belanda. Pada pertengahan Oktober 1945 kapal "*Esperance Bay*" yang berbendera Inggris membawa rombongan pertama pengungsi Indonesia yang berjumlah 1.400 jiwa. Rombongan pertama ini berasal dari Melbourne, Brisbane, dan Sydney. Sesampai di pelabuhan Tanjung Priok, tentara sekutu dimana Belanda ada didalamnya, menahan 20 orang aktivis, antara lain Sudihiyat, Mohamad Senan, Suparmin, Ilyas Jacob, Jalaloeddin Thaib, dan Lumanoue. Keduapuluh orang ini diangkut oleh Belanda ke pulau Semau di Timor. Dari Timor mereka dipindahkan ke tempat penahanan militer sekutu di Labuan – Brunei, sebelum dipulangkan ke Jawa melalui pelabuhan Cirebon pada bulan Agustus 1946.[24]

Para pimpinan aktivis politik yang masih ada di Australia, melalui organisasi mereka KIM dan AIA, berdasarkan pengalaman repatriasi pertama; meminta kepada Menteri Urusan Imigrasi Australia untuk menjaga keselamatan rombongan repatriasi selanjutnya. Rombongan repatriasi kedua menggunakan Kapal Transpor Militer Australia "*Manoora*" yang diberangkatkan dari pelabuhan Sydney. Rombongan kedua ini juga berjumlah 1.400 dan berasal dari orang-orang Indonesia yang bermukim di Melbourne, Brisbane, Sydney dan Mackay. Berlayar melalui pelabuhan Dili di Timor Timur, "*Manoora*" tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Februari 1946 dan disambut oleh Menteri Sosial saat itu Maria Ulfah.[25]

24 Ibid., hlm. 118-119.
25 Ibid., hlm. 123.

6. *Penutup*

Dalam sebuah tulisan panjang yang sangat menarik untuk mengenang sahabatnya Teuku Ibrahim Alfian, Taufik Abdullah menutup dengan sebuah renungan tentang posisi Aceh dalam sejarah Republik Indonesia, sebagai berikut:

> "Bagi saya yang pernah juga membaca-baca sekadarnya tentang sejarah Aceh, reaksinya yang keras terhadap GAM dan bahkan skeptismenya terhadap usul referendum, bukanlah semata-mata dibentuk oleh kenyataan bahwa ia adalah perantau yang telah merasa nyaman di tempat tinggalnya yang baru. Mengapa ia harus menjadikan dirinya kembali seorang yang singgah di negeri orang? Bukan, tetapi sikap ini adalah pula hasil pendalaman studinya tentang sejarah propinsi dari kampung halamannya dan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan itu. Bagaimanakah Aceh bisa dipahami kalau daerah ini secara konseptual, apalagi riel, dipisahkan dari daerah-daerah Indonesia lainnya? Bahkan sejarah Indonesia pun tidak akan bisa dipahami tanpa kehadiran Aceh. Meskipun merupakan kumpulan tulisan, tetapi bukunya *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* (1999) bisa juga dilihat sebagai kesaksian historis akan keterikatan Aceh dengan nafas sejarah Indonesia secara keseluruhan[26]."

Persoalan Aceh dan GAM, meskipun dalam banyak hal berbeda, bisa disejajarkan dengan persoalan Papua dan OPM, yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jika saat ini persoalan Aceh dan GAM telah berhasil diselesaikan, setelah melalui proses berliku yang panjang, persoalan Papua dan OPM masih dalam proses penyelesaian dan belum terlihat kapan akan selesai. Ketegangan dan konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan berbagai elemen masyarakat di Papua, masih memerlukan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya dengan damai. Salah satu persoalan yang menjadi ganjalan dalam proses penyelesaian ini terkait dengan persepsi yang berbeda terhadap sejarah hubungan antara Papua dan Republik Indonesia. Berbagai elemen masyarakat di Papua, terutama OPM, menganggap bahwa Papua secara historis tidak merupakan bagian dari Republik Indonesia. Keabsahan proses integrasi melalui Pepera 1963 sangat dipertanyakan karena adanya dugaan

26 Abdullah, 2002.

"intimidasi" oleh pihak militer yang berdampak pada manipulasi suara oleh pemerintah Republik Indonesia.

Bukanlah tidak mungkin "intimidasi" pada saat pemungutan suara itu memang telah terjadi[27] dan hal ini memang memerlukan klarifikasi yang bisa memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa, namun tampaknya adalah sesuatu yang sulit diingkari bahwa sejarah perjalanan Papua sejak masa kolonial tidak mungkin dilepaskan dari jejak sejarah Republik Indonesia. Boven Digoel dan gerakan nasionalisme Indonesia tidak mungkin dipisahkan. Gerakan Nasionalisme Indonesia tidak mungkin ada tanpa kehadiran Boven Digoel, tidak saja sebagai sebuah bagian dari geografi Indonesia, namun juga sebagai bagian dari "ingatan kolektif" bangsa Indonesia. Seperti halnya Aceh, eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin bisa dipahami tanpa Papua, dimana Boven Digoel dan seluruh kisah migrasi politik generasi pertama kaum nasionalis itu ada di dalamnya.

Pembuangan kaum nasionalis generasi pertama ke Boven Digoel dan pengasingan mereka ke Australia sebelum kemudian kembali ke tanah air, merupakan sebuah fenomena migrasi politik. Migrasi ini tidak mungkin bisa dijelaskan melalui pendekatan geografi-spasial yang sering dipakai dalam menjelaskan perpindahan penduduk, karena memerlukan sebuah pendekatan yang baru. Pendekatan baru ini, disebut sebagai pendekatan migrasi politik, memberikan perhatian utama pada dua hal, pertama konteks sosial-politik yang melatarbelakangi terjadinya sebuah perpindahan penduduk, dan kedua pada adanya transformasi atau perubahan kesadaran politik dari mereka yang mengalami perpindahan.

Dari menelaah fenomena migrasi politik para nasionalis generasi pertama ini dapat disimpulkan bahwa menguatnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa tidak saja diperoleh dari pengalaman politik yang berlangsung di sebuah tempat tertentu (*sedentair*) namun juga diperoleh dari perubahan atau transformasi kesadaran politik yang dialami akibat perpindahan lokasi dan seting politik. Kota-kota di Jawa, atau Sumatera, Boven Digoel di Papua, Sidney, dan Melbourne di Australia; adalah ruang-ruang politik yang disinggahi oleh para nasionalis Indonesia, dan menjadi tempat persemaian bagi menguatnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.

27 Drooglever, 2005; Lapian, 2006.

Sebagai sebuah tempat, lokasi, ruang, Boven Digoel memiliki arti yang signifikan dalam sejarah perkembangan kebangsaan di Indonesia. Signifikansi Boven Digoel, paling tidak dapat dilihat dari dua dimensi: spasial-keruangan dan mental-kultural. Dari dimensi spasial-keruangan, posisi Boven Digoel yang terletak di ujung timur negara Republik Indonesia dan keberadaannya sebagai bagian dari teritori pemerintah Hindia Belanda; memberikan legitimasi historis bahwa Papua adalah bagian dari Republik Indonesia. Legitimasi historis ini menjadi penting tatkala desakan untuk memisahkan diri dari sebagian warga Papua muncul ke permukaan. Legitimasi historis bahwa Papua adalah bagian dari Republik Indonesia tidak dimaksudkan untuk menafikan adanya ketidakadilan struktural yang masih berlangsung di Papua, namun persoalan-persoalan Papua harus ditempatkan dalam konteks ketidakadilan struktural yang masih dihadapi oleh mayoritas warga negara Republik Indonesia. Dimensi kedua yang bersifat mental-kultural dari Boven Digoel sangat berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai "politik ingatan". Boven Digoel diam-diam telah menjadi, tidak sekedar sebagai tempat, lokasi, atau ruang; namun sebuah "domain", "tonggak penting", atau sebuah "ikon politik" dalam kesadaran sejarah bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia memerlukan kedua dimensi dari Boven Digoel itu jika ingin tegak sebagai sebuah negara-bangsa kini dan di masa depan.

Sebuah *Postscript*

Sekitar awal bulan Juni 2012, penulis bersama Soewarsono mendarat di bandara Boven Digoel, di Tanah Merah, setelah terpaksa harus bermalam di Merauke karena penerbangan langsung hari itu dibatalkan dikarenakan cuaca buruk. Boven Digoel yang saat ini menjadi nama kabupaten, secara geografis terletak antara kota Merauke di sebelah selatan dan kota Jayapura di utara. Sementara di bagian timur berbatasan dengan wilayah PNG. Pada tahun 2002 Boven Digoel dimekarkan menjadi kabupaten, bersamaan dengan dibentuknya kabupaten Mappi dan Asmat, ketiganya semula merupakan kecamatan dalam kabupaten Merauke. Rupanya Boven Digoel mengalami nasib serupa dengan tempat-tempat lain di Papua yang mengalami pemekaran

meskipun dari banyak indikator sesungguhnya belum layak untuk menjadi kabupaten.

Karena letaknya berada di dataran tinggi, hanya pesawat kecil yang dapat melewati celah-celah pegunungan Oksibil yang sering berkabut. Jika berkabut, jarak pandang pilot pesawat menjadi sangat terbatas, dan penerbangan menjadi penuh resiko, karena dapat menabrak bebatuan di pegunungan Oksibil. Penerbangan ke Tanah Merah, ibukota Boven Digoel, dari Jayapura hanya membutuhkan waktu 1 ½ jam, sementara dari Merauke sekitar 1 jam. Selain melalui jalur udara, Boven Digoel juga dapat dicapai dengan kapal motor melalui sungai Sungai Digoel yang bermuara di Merauke; atau melalui jalan darat yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 11 jam jika tidak musim hujan.

Bandara Boven Digoel terletak di daerah pinggiran kota, berseberangan dengan kompleks bekas tahanan politik Belanda. Sebagai penanda kompleks bekas tahanan politik itu, pada tahun 2007 dibuat patung Mohammad Hatta, salah seorang pemimpin politik sebelum kemerdekaan yang sempat dibuang ke Digoel bersama Syahrir, sebelum kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Komplek bekas tahanan politik inilah yang menjadi tujuan kami datang ke Boven Digoel untuk melihat dengan mata-kepala sendiri bekas-bekas yang masih ada dari sebuah penggalan sejarah kebangsaan Indonesia yang menurut pendapat penulis sangat penting karena di tempat inilah generasi pertama para nasionalis Indonesia dikucilkan dari publiknya. Generasi pertama nasionalis Indonesia tahun 20 dan 30-an dikucilkan di Boven Digoel, sebagian membawa anak istrinya, memang dengan tujuan memenggal hubungan mereka dengan "rakyat" yang umumnya tidak mengenal politik. Belanda beranggapan bahwa pengucilan itu perlu karena di mata Belanda para aktivis politik ini dianggap dapat mengacaukan ketenteraman masyarakat[28]. Di sinilah menjadi menarik argumentasi resmi dari Belanda bahwa para aktivis ini bukan mengancam posisi politik Belanda namun mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Pemindahan mereka ke sebuah tempat yang terkucil oleh Belanda juga bukan semata-mata untuk menahan mereka, tetapi untuk memberikan kesempatan bagi mereka mengembangkan kehidupan di tanah yang baru. Oleh karena itulah tahanan Boven Digoel didesain oleh Belanda menjadi

28 Shiraishi, 1996.

sebuah masyarakat baru, lengkap dengan fasilitas publiknya seperti kompleks perumahan yang diatur menurut petak-petak, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Secara fisik, kompleks tahanan politik Boven Digoel bisa dibedakan antara kamp tahanan – keadaannya saat ini masih relatif baik, dan pemukiman yang berada di luar kamp. Hatta misalnya tinggal di bagian pemukiman di sebuah rumah di petak 6 di luar kamp.[29]

Menurut Adranus Moromon, sarjana sejarah lulusan Universitas Cendrawasih Jayapura yang menulis tesis S-1 tentang Boven Digoel dan saat ini bekerja di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Pemda Boven Digoel, Hatta selalu diundang ke *Societeit* oleh pejabat-pejabat Belanda di akhir pekan. Pada saat penulis mengunjungi Boven Digoel, bekas rumah Hatta hanya tinggal lantai saja, dan rangka tempat tidur besinya juga sudah rata dengan lantai, serta ditumbuhi semak dan rumput liar. Selain menempatkan para tahanan politik dan keluarganya di kamp dan pemukiman di Tanah Merah, Belanda juga membangun kamp di Tanah Tinggi kira-kira 4 jam naik kapal motor dari Tanah Merah melalui Sungai Digoel. Penjara Tanah Tinggi ini dibangun untuk mengisolasi para aktivis politik yang dianggap berbahaya oleh Belanda.

Harian *Kompas*, dalam seri laporan "Jejak Nasionalisme" menulis tentang "Jejak Nasionalisme di Boven Digoel" dalam enam laporan secara berturut-turut mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei 2012. Laporan jurnalistik *Kompas* ini selain memberitakan tentang keadaan bekas tahanan politik pemerintah kolonial Belanda ini juga menggambarkan keadaan Boven Digoel dan masyarakatnya dewasa ini. Menurut laporan *Kompas* dan sebagaimana dilihat sendiri oleh penulis, sebagian kompleks tahanan politik itu saat ini dipakai oleh polisi sebagai kantor dan sebagai tempat tinggal. *Kompas* (Jumat 25 Mei) menulis: "Runyamnya, hampir semua bangunan cagar budaya yang berada di dekat Penjara Boven Digoel berubah fungsi jadi hunian polisi... Di Boven Digoel saat ini, jangankan tempat bersejarah itu, bahkan gedung-gedung dan fasilitas lainnya juga kurang terawat".

29 Dalam konteks ini menarik membandingkan kompleks tahanan politik Boven Digoel dan kamp konsentrasi Nazi Jerman, dan kamp konsentrasi Orde Baru di pulau Buru. Selain daripada itu, juga sangat menarik untuk diketahui bahwa "penDigoelan" dilakukan setelah para Digoelis itu diproses secara hukum oleh pemerintah Hindia Belanda (Shiraishi, 1996). Lagi-lagi menarik untuk membandingkannya dengan "pemburuan" yang dilakukan oleh pemerintah Suharto-Orde Baru, tanpa proses peradilan.

Referensi

Abdullah, Taufik. 2010. "Sebuah Klasik dan Sebuah Tragedi", dalam *Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia.* Seri Buku TEMPO: Bapak bangsa. Jakarta: KPG.

Abdullah, Taufik. 2002. "Wijilan, Ibrahim, dan Kenangan" dalam *Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta: Persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian,* hlm. xv-xiii. Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Sinergi Press.

Anderson, Benedict. 1998. "Long-Distance Nationalism", bab 3 dalam *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World.* London and New York: Verso.

Bennet Jr, Frank C. 2003. *The return of the exiles: Australia's repatriation of the Indonesians, 1945-47.* Clayton: Monash Asia Institute.

Budi, Langgeng Sulistyo. 2012. "Tanah Merah, Boven Digoel, dan Pergerakan Politik Indonesia, 1927-1943". Bab 7 dalam buku ini.

Sagimun dkk. 1977. "Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan, Seri Perjuangan, Ex Digul". Jakarta: Departemen Sosial.

Drooglever, Pieter. 2009. *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua.* Oxford: One World.

Gie, Soe Hok. 2005. *Di bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920.* Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.

Lapian, Adrian B. 2006. Resensi Buku "An Act of Free Choice" Papua versi Sejarawan Belanda. *Kompas,* 23 Agustus 2006.

Lockwood, Rupert. 1982. *Black Armada: Australia and the struggle for Indonesian independence 1942-1949.* Sydney, NSW: Hale and Iremonger.

Shiraishi, Takashi. 1996. "The phantom world of Digoel". *Indonesia,* Vol. 61, hlm. 93–118.

Van Miert, Hans. 2003. *Dengan Semangat Berkorban: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930.* Jakarta: Kerjasama KITLV, Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu.

BAB 9

EPILOG: *Papua and problem of structural injustice*[1]

Riwanto Tirtosudarmo

The problem confronted by Papua, the easternmost province of Indonesia, is structural, rather than developmental as perceived by the current government.

The creation of the Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B) was also based on an assumption that Papua suffered from developmental neglect and that its development should be accelerated to solve the problem.

Such a technocratic view was proved to be wrong as shown by the collapse of the S[u]harto regime that was built on the "developmentalist" ideology.

Political relations between the center and the periphery are an old problem in this country. Following the end of S[u]harto regime in 1998, the format of center-periphery relations was renewed with bigger autonomy given to regional governments. But the horror of disintegration, particularly among the military elites, was the reason for a halfhearted decentralization policy, as autonomy is given to the regency/municipality rather the provincial level of government.

1 Tulisan ini pernah diterbitkan di *The Jakarta Post*, Jakarta | Opinion | Tue, June 19 2012, 9:25 AM, http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/19/papua-and-problem-structural-injustice.html. Kata Soeharto dalam tulisan diganti menjadi S[u]harto, sesuai dengan penulisan lainnya di dalam buku ini.

Apart from this problematic decentralization, the post-S[u]harto era was also marked by the Timor Leste partition in 1999, and a peace agreement in the rebellious province of Aceh in 2005. After Timor Leste and Aceh, Papua is now seen as the main problem of center-periphery relations in the republic. Armed rebels grouped under the Free Papua Organization (OPM) radically call for a separation from Indonesia.

Some argue that a healthy dialogue is urgently needed between Papuans and the central government in order to address the intractable tension and conflict in the province. Dialogue is important but I would argue that it will not be sufficient. Apart from the immediate problem of representation, a dialogue assumes the presence of two opposite but equal parties. Such an assumption is unlikely to be accepted by the Indonesian government.

As the basic issues in Papua are structural rather developmental, I would argue that a new perspective should be proposed to resolve the problem in Papua. From a structural perspective, the problem of Papua is not unique. By seeing Papua's problems as Indonesia's problems we look at the solution to Papua as a solution for the whole of Indonesia without any exception.

A structural perspective views the problem of the society as a result of structural injustices emanating from continuing economic and political inequalities between the center and periphery. The central government's policies toward Papua have officially changed in the guise of special autonomy, yet the structural injustices persist.

These injustices are a problem facing not only Papuans but the majority of Indonesian citizens. Structural injustices are rooted in the wrong assumption in the Constitution that the state will unquestionably take care of the life of its citizens, but in reality we continue witnessing the state's failure to protect its citizens from violence and the abuse of power.

What is currently happening in Papua is only a reflection of the state's failure to resolve the continuing problem of structural injustices in this country.

The difference between Papua and other places in Indonesia, including in the capital city of Jakarta, is just a matter of the degree of violence. In Papua the level of violence is higher than that in other places as the latest string of fatal shootings strongly indicated. The basic right of the Indonesian citizens to security protection from the state is simply violated. The climate of fear and the insecurities felt by ordinary citizens in Papua are growing unchecked.

From what I have witnessed, today, both sociologically and demographically, Papuans can no longer be divided into particular ethnic or racial groups. The movement of people, in and out-migration in Papua, has occurred for centuries. The latest population census (2010) clearly indicated the high level of in-migration into Papua.

Papua is in fact a pluralistic society, in which any attempt to distinguish between indigenous and migrants is becoming more futile. Every day, the number of people who move in and out of Papua is increasing as the number of daily flights and weekly ships obviously indicate. While certain Papuan elites and their organizations understandably try to reassert their claims about a pure Papuan identity, such a move runs counter to the reality.

Cities and urban areas in Papua have become the most pluralistic places, in which people from different social and economic backgrounds mingle and interact. In such urban settings, social tensions and conflicts normally occur, as people are competing for economic and political resources.

It is the constitutional duty of the state to protect its citizens from discrimination. Economic and political fairness should be the order of the day, where the state has to act as an impartial referee when tensions and conflicts arise between different groups and people in society. Yet as we are witnessing these days in Papua, the Constitution, which mandates the state to protect all its citizens, is simply being violated.

Indeks

A

Abdoh, Dr. Jalal, 149
Abdullah, Taufik, 203, 212
Abepura, 21, 142, 147
Aceh, 2,22, 63, 101, 131, 212, 213, 220
Ahmad, Abdul Hakim, 59, 60, 62, 63, 66, 70, 71
AIA (*Australia Indonesia Association*), 211
A'in, Pakih, 174
Ajoi, Fred, 108
Alfian, Teuku Ibrahim, 212
Aliarcham, 132, 133, 177, 204, 205
Al-Qur'an, 53, 56, 83, 86, 87, 95
Ambarawa, 174
Ambon, 6, 61, 62, 65, 123, 128, 144, 146, 151, 171
Amerika Serikat, 7, 15, 46, 71, 206
Ampenan, 6
Anari, Benyamin, 108
Anderson, Bennedict, 100
Aninam, Barnabas, 147
Arfak, pegunungan, 34, 108
Arfak, suku, 60, 67, 74, 97, 99, 107, 108
Ariks, Johan, 19, 20, 108
Aronggear, Terianus, 108
Arso, 142
Asia Tenggara, 202
Asmat, 199, 214
Atmadja, Suria, 130
Atmoprasodjo, Sugoro, 139, 140, 141
Australia, 8, 38, 46, 133, 138, 140, 141, 160, 186, 190, 193, 198, 199, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213
Auyu, suku, 127
Awom, Mr. Permenas Ferry, 107
Ayamaru, 70

B

Baal, J. van, 10
Baars, A., 204
Babo, 143
Bachtiar, Harsja W., 5, 6
Bakri, H., 48
Bali, 16,
Banda, 4, 6, 38, 204, 215
Banda Neira, 4, 38, 204, 215
Bandung, 45, 50, 56, 139, 163, 164
Banten, 4, 125, 126, 131, 134, 160, 170, 172, 173, 197, 204
Banyumas, 125
Basri, Jamal, 174
Batak, 62, 65
Batavia, 1, 4, 6, 8, 123, 126, 161
Batjan, 6
Becking, LTh. Kapten, 2, 128, 129, 170, 171, 177
Beratobui, 142
Berkhout, L., 120, 122
Bereuch, Daud, 22
Bestuurterrein, 171, 172

BFO, 8
Bhinneka Tunggal Ika, 60, 62, 64
Biak Numfor, 105
Bintang Kejora, 11, 112
Bintoro, R. Brigadir Jenderal, 16
Biriosi, pantai, 109
Bitek, 130
bivak-bivak, 140
BKAG (Badan Kerjasama Antar Gereja), 60, 61, 62
Blitar, 35
Blumberger, Petrus, 137
Boedi Oetomo, 41, 161, 201
Bonay, E.Y., 148
Bondan, 180, 184
Braun, P., Pastor, 151
Brisbane, 207, 210, 211
Bronkhitis, 188
Broome, 207, 210
budi binatang, 54, 59
budi kemanusiaan, 54, 59, 69, 75, 87
budi syaitan, 54, 59
Bugis, 48, 67, 108
Buitenzorg, 37, 137
Bukit Tinggi, 39, 125
Buleleng, 6
Bundel Algeemene Secretarie, 134, 135, 136
Burgersocieteit, 130
Buton, 48, 57, 67, 108

C
Chamsinah, 178, 179, 180, 184, 185, 187, 189, 196, 206
Cilacap, 207
Cina, 44, 75, 84, 96, 129, 150, 151, 162, 175, 201, 205
Cipinang, 174
Cirebon, 173, 211
Cnopius, Dr. N., 120
colonial nationalism, 5
Controleer Afdeling Noord New Guinea (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara), 35, 106
Courtois, J.W.M., 143, 144, 145, 155
Cowra, 209
CSI (*Central Sarekat Islam*), 45, 166
Czechoslavia, 11, 17

D
Daendels, Herman, 3
Darsono, 45, 53, 163, 204
Darmodiprono, 43
Dasoeki, Ahmad, 37
Dawood, 38
De eigenwerkzoekenden, 176
de Graeff, 124, 125, 170
De Keyzer, opas, 136
Dekker, EFE Douwes, 163, 164, 167
Demena, Andreas, 147
Den Haag, 137, 165
Denpasar, 143, 144, 146
Depapre, 143
De Steuntrekkers, 176
De werkwilliger, 175
De Zeven Provincien, 35
Digoel, sungai, 6, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 140, 170, 172, 199, 216
di Langit, Talaha Sutan, 174
Dili, 211
Dinah, kampung, 127
DI/TII, 22
Djaya, Mulyadi, 66, 67, 73, 74
Djojodiningrat, Abdoelmadjid, 165
Djokosoedjono, 38
Djopari, Franz Joseph, 108
Dobo, 6
Doromena, 143

Doreri, suku, 60, 67, 108
DPRD, 62, 63, 66, 70, 71, 74, 75, 111

E
Effendi, Anwar, 102, 103, 104, 105
eksploitasi, 15, 41, 42, 46, 50, 55, 58, 76, 88, 126, 200
Elementary Grammar, 180
Enarotali, 147
Engineer, Asghar Ali, 55
Eropa, 51, 90, 96, 131, 133, 150, 166
Ertsberg, 15
Esperance Bay, 211
Ewanim, 105
exorbitant rechten, 204

F
Fakdawer, Yohanes , 146, 147
Fak-Fak, 12, 59, 61, 83, 84, 96, 105, 139
Feith, Herbert, 2, 8
Fock, Gubernur Jenderal Mr. D., 162, 202
Freeport-McMoRan Copper & Gold, 15
Fremantle, 207
Furnivall, 3

G
Galela, 6
GAM, 212
Gatote, kampung, 127
Geisslerr, Johann G., 56, 57, 61, 63, 66, 73, 84, 106
Gerakan 30 September 1965 (G30S), 9
Gerungan, Dr. J.A., 142, 143
Gezaghebber, 118, 123
glidig, 48
Glodok, 174
Gorlinski, Virginia, 32

H
Habibie, B.J., 23, 24, 32
Hadji, 6
Hajar, Ibnu, 22
Haji Merah, 95
Hamadi, Kaleb, 146
Hardjosumarto, 48
Haroenrasjid, 37
Hatam, suku, 108
Hatta, Mohammad, 39, 215
het Vrije Woord, 165
Hillen, W.P., 129, 134, 135, 136
HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), 178, 191
Hollandia, 11, 14, 15, 31, 139, 141, 142, 143, 144, 147
Horst, Dr. D. W., 34, 106
HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 71
HTI (Hutan Tanaman Industri), 71
Hutabarat, Binsar A, S.Th., M.C.S, 106

I
Ifar Gunung, 147
IJB (*Indlandsche Journalisten Bond*), 44, 82
IPI (Ikatan Pandu-pandu Indonesia), 179
imagined community, 100
Immigration Restriction Act, 208
Indey, Marthen, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Indiers Journalist Bond, 95
Indonesia Club, 209
Indonesia Menggugat, 203
Indonesische Studie Club, 162
Indonesische Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia (PI), 162
Inggris, 3, 8, 71, 117, 180, 181, 182,

185, 191, 211
IP (*Indische Partij*), 163, 201
IPEA (*Indonesia Political Exile Association*), 210
Irian Barat, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 33, 141, 146, 148, 149
Irian Jaya, 15, 23, 25, 32, 33, 63, 64, 81, 92, 105, 106
Irreuw, Andrias, 146
ISDV (*Indische Sociaal-Democratische Vereniging*), 45, 95, 163, 165, 166, 167, 201
Iskan, Dahlan, 39
Iskandardinata, Oto, 7
Islam Bergerak, 47, 82, 95
Islamic Center, 60, 62, 65, 66, 68, 74
Islamisme, 49, 52, 54, 85, 203
Itam, Upik

J
Jacob, Ilyas, 37, 211
Jahir (Jair), suku, 186
Jambi, 22
Jambi, Talaha Sutan, 174
Jambuani, Mr. John, 107
Jatinegara, 125
Jawa Barat, 124, 125, 170, 173
Jawa Tengah, 16, 17, 207
Jawa Timur, 16
Jayapura, 7, 15, 17, 21, 25, 31, 139, 142, 146, 148, 149, 199, 214, 215, 216
Jepang, 7, 8, 18, 21, 35, 41, 45, 46, 71, 137, 138, 139, 140, 178, 183, 186, 190, 198, 206, 207, 209,
Jerman, 34, 56, 57, 61, 63, 71, 72, 106, 137, 216
Joesoef, Daja bin, 37
Joesoef, M., 45
Jouwe, Lukas, 143, 144
Jouwe, Nicolaas, 143, 144
Jufuway, Barnabas, 143, 147

K
Kaimana, 70, 105
Kaisiepo, Franz, 20, 21
Kalimantan, 8, 22, 144
Kalimantan Selatan, 22
Kamarian, 146
Kamoe, Daniel, 132, 177, 205
Kamp interniran, 116, 129, 131, 132, 133, 134
Kampung Harapan, 141
Kandor, 37
Kaoh, 186, 187
kapitalisme, 5, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 85, 86, 87, 91, 167
Karangduren, 48
Karl Marx, 42, 50, 51, 53
Kartodikromo, Mas Marco, 82
Karubuy, Albert, 108
Katamhadi, 181
Karon, suku, 108
Kartosuwiryo, 22
Kauman, 42, 43, 48, 82
Kawab, Samuel Damianus, 108
Kawarga, Sungai, 6
Kaya-kaya, 186, 188
Kayo, Muhammad Yusuf Sampono, 174
Kayu Pulau, 143
keadilan, 44, 47, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 75, 76, 82, 89, 163
Kecu, 76, 83, 89, 137, 138, 148, 180
Kedu, 125
Kei, 62, 65, 151
Kekaisaran Jepang, 7, 18
Kesajangan, Soetan, 164
KIM (Komite Indonesia Merdeka), 38,

141, 142, 143, 211
Kisar, pulau, 6
KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), 57
Klaseman, 48
KNIL, 18
Komite Boemipoetera, 164
Komite Nasional Papua, 11
komunisme, 49, 50, 52, 53, 54, 85, 86, 87, 90, 92, 136, 201, 203
Konferensi Malino, 21, 144, 145
KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), 1, 7, 9, 11, 21, 25
KOSTRAD (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), 15
Kota Injil, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 75, 91, 106
Krey, Corinus, 20, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
KSVD (*Kunst en Sportvereniging Boven Digoel*), 184
Kweekschool, 178

L
Labuan-Brunei, 211
Lampung, 131
Latif, Bermawi, 38
Lawean, 76
Lebak, 173
Leksola, 6
Lemon, 108
Liberty, opera, 183
Lisabon, 18
Liverpool, 209
Lockwood, Rupert, 197, 207, 209, 210
Loebis, Abdul Hamid, 38
Loetfi, Moechtar, 37
Lumanoue, 211

M
MacArthur, Douglas, 8
Mackay, 210, 211
Maidotga, Cornelis, 99
Makassar, 6, 8, 20, 48, 67, 89, 108, 144, 146
Makasser, 6
Malaka, Tan, 6, 45, 46, 47, 53, 204
Malang, 174
Malik, Adam, 16
Maliki, 181
Mallo, 143, 144
Maluku Utara, 9, 57, 61, 73, 144
Manado-Sanger, 151
Mandatjan, Baren, 108
Mandobo, kecamatan dan nama suku, 2, 127, 140, 186
Mandung, kampung, 127
Manggulung, Kamaruddin gelar, 174
Mangkuto, Saleh, 174
Mangoenkoesoemo, Goenawan, 163, 164, 201, 204
Mangoenkoesoesoemo, Tjipto, 201
Mano, Andreas, 143
Mano, Laurens, 146
Manoora, 211
Mansinam, Pulau, 34, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 72, 73, 74, 106, 107, 108, 110
Mappi, 122, 127, 128, 186, 199, 214
Marani, Mr., 108
Mardjono, 37
Marind-Anim, suku, 117
Marsudi, 183
Marxisme, 42, 45, 52, 76, 92, 95, 163, 165, 203
McVey, Ruth, 173
Mebri, Hermanus, 147
Medan Moeslimin, 42, 44, 49, 54, 82, 83,

85, 87, 89, 90
Mekkah, 43, 53, 64
Melbourne, 190, 210, 211, 213
Merangin, Kabupaten, 102
Merauke, 3, 36, 38, 39, 117, 118, 119, 122, 143, 149, 151, 186, 199, 214, 215
MES (*Malay-English School*), 179
Meyeh (Meyakh), suku, 108
Milibella, 142
Minangkabau, 130, 131, 133
Misbach, Haji, 4, 5, 6, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 69, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 104, 112, 204
Moerad, 38
Monsju, M.A., 129, 177
Moromon, Adranus, 38, 216
Moscow (Moskow), 132, 133, 177, 205
Mountbatten, Lord Louis, 8
Muhammadiyah, 42, 57, 58, 59, 66, 73, 74, 87
MUI, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 66
Muis, Abdoel, 45
Multatuli, 201
Munandar, 179
Murtopo, Ali, 16, 17, 24
Musa, Abdul Hakim, 59, 60, 61, 62, 66
Muyu, suku, 187, 188
Muzakar, Kahar, 22

N

Nabi Muhammad, 47, 88
Nagai, Ryutaro, Profesor, 46
Namlea, 6
nasionalisme, 25, 38, 44, 52, 56, 103, 104, 105, 111, 112, 138, 141, 153, 159, 163, 175, 198, 203, 213, 216
Nasoetion, Jahja, 38, 178
Nasoetion, Moehidin, 38
Naturalisten, 176, 182, 19
Nederlandsch Nieuw Guinea, 1, 2, 3, 10, 13, 15
New York, 13, 15, 18, 25, 33, 1481,
Ngadiman, 132, 177, 205
Nglungge, 48
NICA (*Netherlands-Indies Civil Administration*)
Nieuw Guinea, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 21, 33, 84, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 127, 136, 137, 143, 145, 150,151, 152
NIT (Negara Indonesia Timur), 145, 146
Nollen, H., Pastor, 151
R.M. Notosoeroto, 42, 164
NU (Nahdatul Ulama), 42, 58
Numfor (Nunfor), 105, 142

O

Oksibil, Pegunungan, 215
Onderafdeeling, 115, 116, 123, 124, 126, 128, 137, 144, 150, 152, 153, 190
Ondy, Adrian, 146
Ongko Loro, 43
Onverzoenlijken, 37, 176
Oomen, Bruder , 151
Oosterzee, L. A. Van, 34, 35, 106
OPM, 21, 22, 24, 25, 32, 102, 103, 104, 105, 107, 212, 220
Oranye Park, 130
Orde Baru, 15, 18, 22, 33, 90
Orde Lama, 15, 18, 21, 22
Orient, opera, 183
Ottow, Carl W., 34, 56, 57, 61, 63, 66, 73, 84, 106, 107

OTSUS (Otonomi Khusus) Papua, 67, 70, 110

P
Padang, 125
Paku Buwono X, 47
Pamekasan, 174
Pamoentjak, 165
Pancasila, 60, 75, 149
Pandeglang, 173
Panggoncang Alam, 139
Papare, Silas, 108, 141
Papua Barat, 1, 11, 12, 13, 21, 22, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 81, 84, 99, 105, 110, 111, 116,209
Parinussa, Pdt Shirley, 61
PARINDRA (Partai Indonesia Raja), 162
Parsons, Talcott, 100
Pasar Sanggeng, 110
Pasir Putih, 35, 96, 97
Patoni, 6
PBB, 13, 148, 149
PD (Perang Dunia) I, 165, 166
Pearl Harbour, 7
Pekalongan, 42, 48, 56, 76, 125
Pembebasan Irian Barat, 12, 14, 15
Pembuangan, 2, 3, 4, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 115, 116, 130, 138, 52, 153, 171, 176, 178, 207, 213
Pengasingan, 2, 5, 6, 42, 43, 48, 49, 85, 112, 115, 116, 125, 138, 141, 152, 153, 160, 161, 168, 170, 172, 182, 183, 190, 197, 204, 209, 211, 213
Penindasan, 25, 41, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 76, 88, 90, 104
Penindi (Fanindi), 34, 35, 43, 48, 57, 83, 96, 97
Penyuluh, 141
PEPERA, 13, 16, 18, 23, 25, 33, 212
Perang Pasifik, 7, 140
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995, 35, 106
Peraturan Pemerintah No. 24/2007, 105
Perjanjian New York, 13, 148
Permi (Perhimpoenan Moeslimin Indonesia), 37
Perth, 207
Pesnamman, 140
PETA (Pembela Tanah Air), 18, 35
Piagam Kota Baru, 149
PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*), 172
PIDRIS (Partai Irian dalam Republik Indonesia Serikat), 38
PIM (Partai Indonesia Merdeka) 38, 144, 148
PKI (Perserikatan Komunis Indonesia), 203
PKII (Partai Kemerdekaan Indonesia Irian), 38, 108, 147
Plateel, P.J., 10,11
Plas, van der, 138, 190,193
Plebiscite, 16, 32,
pluralisme, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 75, 76
PNG, 214
POGI (Persatuan Organisasi Gerakan Irian), 38
Pontjopangrawit, 184
Portugal, 18
Prancis, 71
Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), 72, 73
Priangan, 125, 126, 134
PRRI/Permesta, 22
PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), 37
PSWW (Perkumpulan Sosial Serui Waropen), 38

PUIM (Persatuan Ummat Islam Manokwari), 74
Pujosubroto, 143
Pulau Seram, 146

Q
Qodir, Abdul, 181

R
Raad van Nederlandsch-Indie (Dewan Hindia Belanda), 124, 170
Raffles, Stamford, 3
Rais, Amien, 41, 44
Raja Ampat, kepulauan, 105, 145
Raperdasus, 91
Ratu, Datuk Bagindo, 174
Reeser, L.E.H., 11
Rekso Roemekso, 76
Renan, Ernest, 52
Riau, 22
RIS (Republik Indonesia Serikat), 38, 143,146
RMS (Republik Maluku Selatan), 22
ROB (*Rust en Orde Bewaaders*), 131
Roessel, Bruder, 151
Roest, J., 170
Royal Science Readers I-VI, 180
Rumah Sakit Wilhelmina, 131
Rumbekwan, 108, 109, 110
Rumbruren, 108, 109, 110
Rumfabe, 109, 110
Rumkorem, Lucas, 20, 21
Rumkorem, Brigjen Seth J., 21
Rust en orde, 3, 131, 176

S
Sabang, 3, 38, 143, 149
Sabron-Dosay, 147, 148
Sagimun, 202
Saidi, Datoe, 183
Salamah, 183
Salim, Agus, 19, 45
Salim, I.F.M. Chalid, 4, 6, 11, 14, 19, 116, 124, 129, 176, 184, 186
Sanomo, 6
Sardjono, 177, 181, 205
Sarekat Rakyat, 85,
Sarosan, 37
Sarmi, 147
Sartono, 160, 166, 185
Sastroamidjojo, Ali, 165
Satimin, 67, 68, 69, 74
SATV (*Sidiq* (benar), *Amanah* (terpercaya), *Tablig* (menyampaikan), dan *Fatonah* (cerdas), 44
Sawah Lunto, 173, 174
Schrieke, J.J., 168
SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*), 165
SDI (Sarekat Dagang Islam), 41, 76
Semaoen, 6, 45, 53, 163, 204
Semarangsche Handelsvereniging, 165
Semau, pulau, 211
Senan, Mohamad, 211
Sentani, 141, 146, 147
Serang, 173
Serui, 38, 63, 65, 67,108, 147
Shirashi, Takashi, 6, 172
SIBAR (Sarikat Indonesia Baru), 211
Silungkang, 125, 173, 174
SI (Sarekat Islam), 37, 41, 43, 76, 162, 166, 201, 203
SI merah, 42, 44, 45, 48, 50, 76, 95
SI putih, 44, 45, 76
Siregar, Amir Hamzah, 38
Siregar, Hamid, 139, 141
Sjahrir, Sutan, 2, 3, 4, 5, 37, 38
SKBI (Sarekat Kaum Boeroeh Indonesia),

37
Skou, 143
Sneevliet, Henk, 45, 95, 165, 204
Soasiu, 9
Societeit, 216
Soedirohoesodo, Mas Ngabehi Wahidin, 161
Soe Hok Gie, 95, 202
Soe'ib, Moh., 183
Soejitno, 1178, 181
Soekarno, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 203, 205
Soekarnopura, 14, 15
Soekarnoputri, Megawati, 32
Soemadi, Ahmad, 38, 211
Soenarjo, 37
Soerabajaasch Handelsblad, 165
Soerjaningrat, Soewardi, 163, 164, 167, 201
Soerontiko, Samin, 204
Soetomo, Raden, 161, 162, 201
Sokanggo, kabupaten, 39
Sorong, 6, 12, 57, 67, 75, 105, 142
sosialisme, 44, 163, 203
Sough, suku, 108
Sragen, 174
Standaardschool, 178, 179, 183, 184, 191, 206
Stirum, Gubernur Jendral Van Limburg, 202
Stoddard, Lothrop, 46, 47
STOVIA, 161, 201
Suanggi, 109
Subroto, 142
Sudihiyat, 211
Sugoro, 139, 140, 141
Suharto, 12, 15, 17, 18,19, 22, 23, 216
Sukabumi, 50, 56
Sukawati, Tjokorde Gde Rake, 146
Sulawesi Selatan, 22, 57, 62
Sulawesi Utara, 22
Sumatera Barat, 125, 126, 152, 166, 172, 174, 178, 197, 204
Sumpah Pemuda, 41, 149
Sunda, 130, 131, 134, 183
Suparmin, 211
Supriyadi, 35
Surabaya, 6, 43, 45, 56, 97, 162, 174
Surakarta (Solo), 41, 42, 43, 44, 47, 48, 76, 82, 96, 125
SWAP (*South West Pacific Area*), 8
Swiss-Bell Hotel, 110
Syah, Zainal Abidin, 9
Syariat Islam, 63
Sydney, 207, 210, 211

T

Taman Siswa, 139, 180
Tamin, Djamaloeddin, 37
Tanah Tinggi, 5, 37, 39, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 160, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 186, 205, 216
Tandirerung, PB, 85
Tangerang, 125
Tanjung Priok, 211
Tapanuli, 139
Tarumaselly, Julianus, 20
Tarzan, 130, 187
tauhid pembebasan, 55, 59, 75, 76
TCC (Tentara Cendrawasih Cadangan), 38
Tegalgondo, 48
Teluk Bintuni, 105, 108
Teluk Doreri, 106, 108
Teluk Mananswari, 108, 109
Teluk Wondama, 105
Tentara Sekutu, 140, 209, 211

Ternate, 6, 33, 34, 90, 106, 117, 144, 145
Thaib, Jalaloeddin, 37, 211
The Gate of Civilization, 72
The Republic of United States of Indonesia, 9
The Round Table Conference at The Hague, 8, 9, 19
Tidore, 9, 33, 57, 61, 66, 73, 83, 145
Timor Leste, 220
Tjokroaminoto, Oemar Said, 41, 43, 44, 45, 81, 91
Tjondronegoro, Soedjarwo, SH, 148
Tobati, 143
Tobelo, 6
Toey, Tan, 130
Toezicht Ordonantie Particulier Onderwijs (Ordonansi Pengawasan atas Pendidikan Swasta), 180
Toraja, 62, 65
Traktat London, 33
TRIKORA (Tri Komando Rakyat), 11, 12, 18, 148
Trikoyo, 178, 179, 184, 185, 206
Troelstra, 166
Tual, 6, 137
Tugeri, suku, 117

U

Ulfah, Maria, 211
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 9
Undang-Undang No. 5/Prps/64, 35
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, 39
Uni Indonesia-Belanda, 8, 9
Universitas Cendrawasih, 38, 216
Universitas Negeri Yogyakarta, 102
UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*), 13, 18, 33, 149
Untung, Letnan Kolonel, 12, 14
UP4B, 70, 219
USSR, 11, 17
Uyo, Elly, 146, 147

V

van Aterze, Asisten Residen, 90
van Eechoud, J.P.K., 8, 9, 20, 21, 142, 143, 146
van Miert, Hans, 200
van Mook, H.J., 8, 20, 145
VOC, 3, 200
Volksraad, 162, 168, 169
VSTP (*Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel*), 165

W

Waardenburg, S.L.J., 10
Wacol, 207
Wahid, Abdurrahman, 32
Wambrau, Jimmy, 108
Wamesa, suku 108
Wanggai, Thomas, 21
Wanggem, 188
Waris, 141
Wattebossy, Petrus, 142, 146
Weda, 6
Weddik, H.M. Lublink, 122
Wentoek, Clementi, 132, 177, 205
Wetabosey, 142
Wetori, 109
White Australia Policy, 208
Wibowo, Sarwo Edhie, 16
Widjojoatmodjo, R. Abdoelkadir, kolonel, 8
Wijkmeester van de interneeringskamp, 181
Winanta, 132, 177, 205
Wongsosoediro, 48

Woworoentoe, 132, 177, 205

Y
Yamasy, 141
Yani, A., 12, 14
Yanu, Haji Ismail, 58, 63, 64, 65
Yapen, 67, 142
Yapen Waropen, 108
YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam), 74
Yarini, 109, 110
Yogyakarta, 8, 11, 139, 141
Yoku, Hendrik, 147
Yowiri, 109

Z
Zakaria, 183
Zed, Mestika, 173
Zen, Muhammad , 174
Zwalau, kapal laut, 121

Tentang Penulis

Soewarsono

Drs. Soewarsono, MA, peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). S-1 Sejarah FSUI 1988 dan MA Institut Etnologi Universitas Münster 2004. Minat mempelajari masalah-masalah kebangsaan dan Ke-Indonesiaan". Salah satu publikasi yang terbaru adalah: "Beberapa Acuan Untuk Membaca 'Ikatan Budaya' dan 'Nasionalisme Indonesia' Melalui Perspektif Regional atau Kedaerahan", dalam Thung Ju Lan dan M. 'Azzam Manan (penyunting), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm. 90-106.

Herman Hidayat

Ahli Peneliti Utama (APU) ditetapkan tahun 2007 di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI). Karirnya dimulai sebagai staf peneliti tahun 1984 di LRKN-LIPI. Sejak akhir tahun 1990an ia bergabung dalam kelompok studi Hutan, Masyarakat Adat, dan Taman Nasional. Menamatkan studi doktoral dan memperoleh Ph.D dalam bidang *Forest Policy* di Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Department of Forest Science, The University of Tokyo, tahun 2005. Sarjana lengkap diperoleh di Fakultas Ushuluddin-IAIN Jakarta tahun 1982. Mengajar di Universitas Nasional, Fakultas Sosial dan Politik (FISIP), Jakarta dari tahun 1985-1997. *Postdoctoral Fellow* diperoleh pada tahun (2009-2010) dari JSPS,

di Kyoto University, Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), dengan topik risetnya: "In Search of Sustainable Plantation Forestry, Pulp and Paper in ASEAN: Political Ecology Analyses on Stakeholders." Ia aktif melakukan penelitian di dalam negeri dan luar negeri. Dia menjadi *Visiting Fellow* di IDE-JETRO (Agustus 2006-February 2007), Fondation Maison des Sciences de l"homme (FMSH - Paris) (Oktober-Desember 2011), Kagoshima University Research Center for the Pacific Islands (KURCPI) (November 2012 - Maret 2013). Tulisannya mengenai politik kehutanan, hutan kemasyarakatan, konflik tanah adat, masyarakat, lingkungan, taman nasional, dan biografi politik diterbitkan di berbagai jurnal nasional dan regional seperti, Masyarakat Indonesia (LIPI), Masyarakat dan Budaya (PMB-LIPI), Kajian Wilayah (PSDR-LIPI), Jurnal Biologi Indonesia (LBN-LIPI), Manabu (UI), *Borneo Review* (Sabah-Malaysia), *Journal of Forest Management* (Kasetsart University, Bangkok), *The Journal of Forest Science* (South Korea), *Journal of Tropic* (Japan), *Journal of Asian-Pacific Studies* (Fukuoka, Japan), *Journal of South Pacific Studies* (Kagoshima University), *Journal of Southeast Asian Studies* (CSEAS, Kyoto). Papernya telah terbit dalam kompilasi buku berjudul: "Krisis Masa Kini dan Orde Baru", Penerbit Obor (2003) dan "Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan, Sarawak dan Sabah, Penerbit Sinar Harapan (2005). Dua bukunya telah diterbitkan oleh OBOR dengan judul: "Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (2008) dan "Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional dalam Era OTDA" (2011). Kontak e-mail: hermanhidayat246@gmail.com.

Ana Windarsih

Bekerja di PMB-LIPI sejak 1999 sebagai staf administrasi dan baru mulai menjalani fungsional peneliti tahun 2011. Pendidikan S-1 jurusan Ilmu Administrasi Negara diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1997. Lulus S-2 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia tahun 2009. Sejak tahun 2011 bergabung dalam kegiatan penelitian Tim Pantura di bawah koordinator Dr. Riwanto Tirtosudarmo, MA, APU dan di bawah koordinator Drs. Soewarsono, MA untuk penelitian kerjasama LIPI dengan Kemenristek. Karya tulis yang sudah diterbitkan: "Menelusuri Kembali Orang

Betawi di Jabotabek" (bersama Syarfina Mahya Nadila), dalam Soewarsono, dkk., 2012, *Kota-Kota Pantura Bagian Barat dalam 'Pemekaran': Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: LIPI, hlm. 171-201.

Thung Ju Lan

Thung Ju Lan adalah peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Tahun 1998 ia memperoleh gelar Ph.D dari La Trobe University, Melbourne- Australia dengan tesis berjudul "Identities in Flux: Young Chinese in Jakarta". Beberapa artikelnya yang sudah dipublikasikan adalah: "Nasionalisme Indonesia dan Revitalisasi Simbol-simbol Ke-Melayu-an di Riau: *'faayna tadzhabun?*", in Soewarsono, Thung Ju Lan, Riwanto Tirtosudarmo, Tine Suartina, Imelda, Nasionalisme dalam Konteks Otonomi Daerah: Rekonstruksi Pluralisme dan Etnisitas, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2010, hlm. 39-67; "Studi Tentang 'Elit Indonesia': Problematika & Pendekatan", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Edisi Khusus 2010, hal. 101-115;"Teori dan Praktek Dalam Studi Konflik di Indonesia", dalam Antropologi Indonesia, No. 1, Januari-April 2010, hlm. 28-40; "Heterogeneity, politics of ethnicity, and multiculturalism: What is a viable framework for Indonesia?", in Wacana, Vol.13 no.2 (October 2011):209-292; "Membaca Kembali Konsep Bhinneka Tunggal Ika untuk Manajemen Keberagaman Indonesia", dalam Widjajanti M. Santoso & Ana Windarsih (editors), *Refleksi 80 Tahun Melly G. Tan Perspektif Perempuan & Pembangunan,* Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2012, hlm. 1-20.

Rosmaida Sinaga

Lektor Kepala Ilmu Sejarah di Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Cenderawasih (UNCEN), Jayapura. Lahir di Sipinggan (Simalungun), 8 Januari 1967. Pendidikan S-1 di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP

Medan pada 1990, S-2 di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada 2001, S-3 di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada 2010, dengan disertasi "Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea 1898-1962.

Langgeng Sulistyo Budi

Langgeng Sulistyo Budi, lahir di Magelang, 8 Agustus 1967. Lulusan Jurusan Sejarah, Fak. Sastra UNS-Solo (S-1, 1992), sejak 1994 bekerja sebagai Arsiparis di Arsip Nasional –Jakarta. Melanjutkan S-2 Ilmu Sejarah, UNDIP-Semarang pada tahun 2011. Publikasi yang sudah diterbitkan adalah: "*Coenraad Laurens Coolen: Pekabar Injil di Ngoro"* dalam *Kairos,* edisi Juli 1996.; *"Kristen "Londo" dan Kristen "Jawa": Dinamika Sejarah Pekabaran Injil di Jawa Timur"* dalam *Kairos,* edisi Januari 1997; *"Permasalahan Sosial Perkotaan Pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta 1947-1948"*, dalam *Lembaran Sejarah* volume I, No. 2-1997/1998 (Jurusan Sejarah, Fak. Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta); *"Pioneers of the Fatherland"*, dalam Remco Raben (eds.), *Representing the Japanese Occupation of Indonesia: Personal Testimonies and Public Images in Indonesia, Japan, and the Netherlands.* Amsterdam: Netherlands Institute for War Documentation, 1999; *"Simpati di Tengah Revolusi"*, dalam *Angkasa* No. 3/Desember 1999; *"Pendidikan Bagi Tawanan di Boven Digul 1926-1942"*, dalam *Jurnal Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi.* Vol. 6-No. I Agustus 2004 (Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2004); *"Mewarisi Konsep Kota dari Solo Tempo Doeloe"* dalam *Solo Pos* 14 Juli 2003 (ditulis bersama Soedarmono); *"Solo dalam Lintasan Sejarah "*, dalam *Solo Pos* tanggal 18-19 Februari 2004 (ditulis bersama Harto Yuwono dan Soedarmono); dan "*Perkembangan Fasilitas Sosial Perkotaan Awal Abad ke-20: Rumah Sakit dan Sekolah di Yogyakarta*", dalam Sri Margana dan M. Nursam (eds.), *Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010).

Riwanto Tirtosudarmo

Dr. Riwanto Tirtosudarmo, peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, memperoleh gelar doktor dalam bidang demografi sosial dari Research School of Social Sciences, Australian National University tahun 1990. Melakukan penelitian dan menulis mengenai mobilitas penduduk (migrasi), demografi politik, kewarganegaraan (*citizenship*) dan ke-Indonesia-an, dan akhir-akhir ini tertarik dengan isu STS (*Science, Technology and Society*). Beberapa karya tulisnya: *Dari Riau sampai Timor Timur: Demografi - Politik Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Sosial-Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan - Malaysia Timur*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004; *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: Yayasan Obor dan LIPI Press, 2007; *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial*, Jakarta: LIPI Press, 2010; "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya: Beberapa Catatan dari Perspektif Demografis", dalam Thung Ju Lan dan M. 'Azzam Manan (penyunting), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm. 17-38.